



STATISTIK PENDIDIKAN



2014



BADAN PUSAT STATISTIK



STATISTIK PENDIDIKAN



2014



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDIDIKAN 2014

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

ISSN	:	
Nomor Publikasi	:	
Katalog BPS	:	
Ukuran Buku	:	21 Cm x 29 cm
Jumlah Halaman	:	xxii + 270 halaman
Naskah	:	Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
Penanggung Jawab Umum	:	Teguh Pramono, MA
Penanggung Jawab Teknis	:	Ir. Meity Trisnowati, M.Si
Editor	:	Amiek Chamami, S.ST, M.Stat Dwi Susilo, S.ST, M.Si Nur Budi Handayani, S.ST, M.Si
Penulis Naskah	:	Rida Agustina, S ST Rini Sulistyowati, S.ST Tjong Lanny, SE Eko Budiatmodjo, S.ST
Pengolah Data	:	Sapta Hastho Ponco, S.ST, M. Stat.
Gambar Kulit	:	Sub Dir. Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
Diterbitkan oleh	:	Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia
Dicetak oleh	:	

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 1984, Badan Pusat Statistik telah menerbitkan Publikasi Statistik Pendidikan setiap tiga tahun. Publikasi ini sebelumnya diterbitkan setelah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) dilaksanakan, namun mulai tahun 2014 akan diterbitkan setiap tahun dengan menggunakan data hasil Susenas KOR.

Statistik Pendidikan 2014 memuat Informasi mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama kegiatan pendidikan berdasarkan hasil Susenas KOR tahun 2014 dan data registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Ajaran 2012/2013.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna data terutama sebagai masukan untuk pemerintah pusat/daerah dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan/program-program pembangunan bidang pendidikan. Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan publikasi ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan. Kritik dan saran membangun untuk perbaikan publikasi serupa di masa datang sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin
NIP. 195608051979031001

Ringkasan Eksekutif

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah bertugas untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mutu pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri.

Keseriusan pemerintah dalam pemerataan ketersediaan fasilitas ditunjukkan melalui jumlah sekolah negeri (165.018 sekolah) yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah swasta (41.561 sekolah). Jumlah SD dan SMP yang dikelola pemerintah (133.874 sekolah SD dan 22.325 sekolah SMP) lebih banyak dibandingkan dengan satuan pendidikan lain (5.978 sekolah SMA dan 2.841 sekolah SMK). Partisipasi pihak swasta dalam pembangunan pendidikan nasional juga patut diberikan apresiasi. Mereka turut membantu menyediakan fasilitas pendidikan dengan mengimbangi jumlah sekolah pemerintah (14.398 sekolah SD, 13.202 sekolah SMP, 6.129 sekolah SMA dan 7.832 sekolah SMK).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun ajaran 2012/2013, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik (*under-qualified*) terutama pada jenjang pendidikan dasar. Dari setiap 100 orang guru SD/MI, rata-rata sebanyak 33 guru yang belum berpendidikan setingkat S1. Pada jenjang SMP/MTs, dari 100 orang guru rata-rata 15 guru yang belum berpendidikan setingkat S1. Adapun pada jenjang SMA/MA dan SMK jauh lebih baik, dimana dari 100 orang guru SMA/MA rata-rata 6 guru yang belum berpendidikan setingkat S1, dan dari 100 orang guru SMK rata-rata 11 guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik yang belum berpendidikan setingkat S1.

Rasio murid-guru pada tahun ajaran 2012/2013 telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Rasio murid-guru pada jenjang SD/MI sebesar 1:16, jenjang SMP/MTs sebesar 1:16, dan jenjang SMA/MA sebesar 1:19. Kondisi ini memberikan harapan bahwa jika kondisi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi guru juga telah terpenuhi, maka proses pendidikan dan pengajaran dari seorang guru akan memberikan hasil yang maksimal.

Partisipasi anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah untuk kelompok umur 0-6 tahun adalah sebesar 17,24 persen. Sedangkan untuk kelompok umur 3-6 tahun adalah sebesar 29,02 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sepertiga dari jumlah keseluruhan anak usia 3-6 tahun sedang mengenyam pendidikan pra sekolah. Berdasarkan tipe daerah, partisipasi anak usia 3-6 tahun yang mengikuti pendidikan pra sekolah di perkotaan adalah sebesar 32,95 persen dan di perdesaan sebesar 25,24 persen.

Penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah tercatat sebesar 7,53 persen, penduduk yang masih bersekolah sebesar 26,34 persen, dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 66,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan.

Pola hubungan antara status ekonomi dan APS menunjukkan bahwa semakin tinggi status ekonomi, semakin besar APS. Hal ini semakin kuat membuktikan bahwa partisipasi sekolah dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Untuk kelompok umur 7-12 (Kuintil I 98,09 persen, Kuintil II 98,81 persen, Kuintil III 99,09 persen, Kuintil IV 99,44 persen, dan Kuintil V 99,54 persen) dan 13-15 tahun (Kuintil I 90,01 persen, Kuintil II 93,45 persen, Kuintil III 95,48 persen, Kuintil IV 96,89 persen, dan Kuintil V 98,17 persen), APS pada setiap strata ekonomi tidak jauh berbeda. Program pemerintah yang membebaskan biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP berhasil meningkatkan APS kelompok umur yang bersesuaian dengan kedua jenjang tersebut.

APK untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah sebesar 108,87 persen, APK SMP/ sederajat adalah sebesar 88,63 persen, APK SM/ sederajat sebesar 74,26 persen. APK laki-laki dan perempuan relatif tidak berbeda untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat, SM/ sederajat, dan PT kecuali pada jenjang SMP/ sederajat (laki-laki sebesar 87,26 persen berbanding perempuan sebesar 90,08 persen).

APM untuk jenjang pendidikan menengah (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat) sudah memenuhi target APM yang tercantum dalam Renstra Kemdikbud 2014. Target APM terpenuhi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. APM SD/ sederajat yang ditargetkan mencapai angka 96 persen pada tahun 2014, tercatat sebesar 96,45 persen. Sedangkan APM SMP/ sederajat sebesar 77,53 persen telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,8 persen.

Rasio APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, yaitu sebesar 99,68 persen. Meskipun demikian, rasio APM tersebut hampir mendekati 100 persen. Sementara itu, rasio APM pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi

(SMP/ sederajat hingga PT) melebihi angka 100 persen (104,49 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SD/ sederajat, kesetaraan gender sudah terwujud.

Dalam bidang pendidikan, pemanfaatan internet mulai digunakan sebagai media pembelajaran untuk dapat menunjang sistem kurikulum sekolah. Kegiatan mengakses internet yang dilakukan oleh siswa berumur 5-24 tahun relatif tinggi mencapai 26,95 persen dengan proporsi di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah perdesaan, yaitu masing-masing tercatat sebesar 38,71 persen dan 14,91 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin secara umum diketahui siswa perempuan (27,83 persen) berumur 5-24 tahun lebih banyak mengakses internet dibanding siswa laki-laki (26,10 persen).

Kegiatan bekerja merupakan salah satu penghambat proses pendidikan siswa. Keberadaan siswa yang bekerja merupakan sebuah realita sosial yang umum ditemui pada berbagai negara di dunia termasuk Indonesia saat ini. Keterlibatan siswa berumur 10-24 tahun yang melakukan kegiatan bekerja selama seminggu terakhir mencapai 8,53 persen dengan rincian daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 7,64 persen dan 9,47 persen. Sementara itu, jenis kelamin tampaknya juga mempengaruhi pola partisipasi siswa dalam kegiatan ekonomi selama seminggu terakhir. Proporsi siswa laki-laki berumur 10-24 tahun yang bekerja (9,98 persen) lebih tinggi daripada siswa perempuan (7,01 persen).

Selain bekerja, kegiatan mengurus rumah tangga juga diasumsikan dapat mengurangi jam belajar siswa dirumah. Mengurus rumah tangga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dalam mengurus atau membantu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan sebagainya. Persentase siswa berumur 10-24 tahun yang mengurus rumah tangga di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibanding siswa yang tinggal di perkotaan (16,42 persen berbanding 36,82 persen), keadaan yang sama juga ditemui baik untuk siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Siswa laki-laki yang mengurus rumah tangga di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing tercatat sebesar 16,98 persen dan 34,99 persen sedangkan pada siswa perempuan, untuk daerah perkotaan dan perdesaan tercatat sebesar 15,82 persen dan 38,79 persen.

Sebagian besar mereka yang tidak bersekolah selama 1 minggu berturut-turut dikarenakan sakit (54,00 persen). Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mendorong anak tidak masuk sekolah, baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini ditunjukkan

dengan masih adanya penduduk yang tidak masuk sekolah karena bekerja (2,62 persen) dan tidak punya biaya (0,61 persen). Persentase penduduk yang tidak masuk sekolah karena bekerja lebih tinggi di daerah perdesaan (2,92 persen). Akan tetapi, persentase penduduk yang tidak masuk sekolah karena tidak punya biaya (0,72 persen), lebih tinggi di daerah perkotaan.

Keberlanjutan pendidikan akan menunjang peningkatan sumber daya manusia. Alasan utama penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, tidak melanjutkan sekolah mayoritas adalah karena tidak ada biaya (27,75 persen). Selain karena alasan tidak ada biaya, mereka yang tidak melanjutkan sekolah karena belum cukup umur dan bekerja/mencari nafkah juga tinggi, masing-masing tercatat sebesar 22,27 persen dan 17,48 persen.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Penduduk usia 15 tahun ke atas masih banyak yang bersekolah hanya sampai jenjang pendidikan SD/ sederajat. Bahkan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan SMP/ sederajat hanya sebesar 20,82 persen, lebih rendah dari angka pada jenjang pendidikan SD/ sederajat (27,41 persen). Hal sebaliknya terjadi untuk jenjang pendidikan menengah. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan SM/ sederajat tercatat sebesar 25,18 persen. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang Perguruan Tinggi sebesar 7,46 persen.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan pendidikan nasional. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dicantumkan target nasional rata-rata lama sekolah yaitu sekurang-kurangnya 8,25 tahun pada tahun 2014. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 8,23 tahun. Angka tersebut hampir menyamai target yang ditetapkan dalam Renstra 2014.

Persentase penduduk 15-24 tahun yang melek huruf sebesar 99,68 persen, sedangkan untuk yang berumur 15-59 tahun sebesar 97,17 persen. Dilihat dari status ekonomi, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk umur 15-59 tahun sudah melebihi 90 persen. Namun demikian, AMH penduduk yang memiliki status ekonomi terendah (Kuintil I sebesar 94,36 persen) tidak mencapai target Renstra Kemdikbud.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Tabel Lampiran	xix
Daftar Tabel Estimasi Kesalahan <i>Sampling</i>	xxi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sistematika Penyajian	4
Bab II Metodologi	7
2.1 Sumber Data	9
2.1.1 Ruang Lingkup	9
2.1.2 Kerangka Sampel	9
2.1.3 Pemilihan Sampel	10
2.1.4 Keterwakilan Sampel	10
2.1.5 Metode Pengumpulan Data	12
2.1.6 Keterbatasan Data	12
2.2 Konsep dan Definisi	12
2.3 Metode Analisis	19
Bab III Fasilitas Pendidikan dan Peserta Didik	21
3.1 Fasilitas Pendidikan	23
3.2 Peserta Didik	30
Bab IV Partisipasi Pendidikan	35
4.1 Pendidikan Anak Usia Dini	39
4.2 Partisipasi Sekolah	45
4.2.1 Angka Partisipasi Sekolah	47
4.2.2 Angka Partisipasi Kasar	52

	Halaman
4.2.3 Angka Partisipasi Murni	56
4.2.4 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)	61
Bab V Kegiatan di Luar Jam Sekolah	65
5.1 Akses Terhadap Internet	67
5.2 Bekerja	72
5.3 Mengurus Rumah Tangga	80
Bab VI Capaian Proses Pendidikan	85
6.1 Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah	87
6.2 Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Tidak Bersekolah	91
6.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	94
6.4 Rata-rata Lama Sekolah	97
6.5 Angka Melek Huruf	100
Daftar Pustaka	103
Lampiran Tabel	107
Estimasi Kesalahan <i>Sampling</i>	207

Daftar Gambar

Gambar	Judul	Halaman
3.1	Komposisi Guru menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun Ajaran 2012/2013	29
3.2	Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2010/2011–2012/2013	32
4.1	Partisipasi Anak Umur 0-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014	40
4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-15 Tahun Menurut Provinsi, 2014	51
4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 16-18 Tahun Menurut Provinsi, 2014	52
4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Menurut Provinsi 2014	55
4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Menurut Provinsi, 2014	56
4.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Menurut Provinsi, 2014	60
4.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket Menurut Provinsi, 2014	60
5.1	Persentase Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis kelamin dan Tipe Daerah, 2014	68
5.2	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis kelamin dan Tipe Daerah, 2014	72
5.3	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, 2014	79
5.4	Persentase Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	81
6.1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014	98
6.2	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 18 Tahun ke Atas Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014	100
6.3	Persentase Penduduk Umur 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014	102
6.4	Persentase Penduduk Umur 15-59 Tahun yang Melek Huruf Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014	103

Gambar	Judul	Halaman
6.5	Rasio Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah, 2014	104
6.6	Rasio Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014	104

<http://www.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel	Judul	Halaman
1	Keputusan mengenai Keakuratan Suatu Estimasi	11
3.1	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2012/2013	24
3.2	Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Menurut Jenis dan Status Lembaga, Tahun Ajaran 2012/2013	25
3.3	Persentase Ruang Kelas Milik Menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2012/2013	25
3.4	Jumlah Laboratorium Menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2012/2013	26
3.5	Jumlah Perpustakaan Menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2012/2013	26
3.6	Persentase Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tempat Mengajar, Status Sekolah dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Tahun Ajaran 2012/2013	28
3.7	Jumlah dan Rasio Kelas-Guru Menurut Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013	29
3.8	Persentase Murid Menurut Jenjang Satuan Pendidikan, Status Sekolah, dan Jenis Kelamin, Tahun Ajaran 2012/2013	30
3.9	Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013	31
4.1	Partisipasi Anak Umur 0-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	40
4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2014	41
4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014	42
4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kelompok Umur, 2014	43
4.5	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2014	43
4.6	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014	44
4.7	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kelompok Umur, 2014	44

Tabel	Judul	Halaman
4.8	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah, 2014	46
4.9	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2014	46
4.10	Persentase Penduduk Umur 5 – 24 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014	47
4.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2014	48
4.12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014	49
4.13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kelompok Umur, 2014	50
4.14	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, 2014	53
4.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014	54
4.16	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Jenjang Pendidikan, 2014	54
4.17	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, 2014	57
4.18	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014	58
4.19	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Jenjang Pendidikan, 2014	59
4.20	Rasio APM menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan 2014	61
4.21	Rasio APM menurut Status Ekonomi dan Jenjang Pendidikan 2014	62
5.1	Persentase Siswa Berumur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014	69
5.2	Persentase Siswa Berumur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Media/Lokasi Mengakses Internet dan Tipe Daerah, 2014	70
5.3	Persentase Siswa Berumur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Media/Lokasi Mengakses Internet dan Jenis Kelamin, 2014	70
5.4	Persentase Siswa Berumur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir melalui <i>Handphone</i> Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2014	71

Tabel	Judul	Halaman
5.5	Persentase Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Golongan Pengeluaran dan Tipe Daerah, 2014	72
5.6	Proporsi Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Daerah, 2014	74
5.7	Proporsi Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2014	74
5.8	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2014	75
5.9	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2014	76
5.10	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2014	76
5.11	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2014	77
5.12	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenjang Pendidikan, 2014	78
5.13	Proporsi Siswa Berumur 10-24 tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Golongan Pengeluaran dan Jenjang Pendidikan, 2014	80
5.14	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, 2014	82
5.15	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014	82
5.16	Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014	83
6.1	Persentase Penduduk Bersekolah Umur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-Turut dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 201	88
6.2	Persentase Penduduk Bersekolah Umur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Alasan Utamanya dan Tipe Daerah, 2014	88
6.3	Persentase Penduduk Bersekolah Umur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-Turut dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Alasan Utamanya dan Jenis Kelamin, 2014	90

Tabel	Judul	Halaman
6.4	Persentase Penduduk Bersekolah Umur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-Turut dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Alasan Utamanya dan Status Ekonomi, 2014	90
6.5	Persentase Penduduk Umur 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	91
6.6	Persentase Penduduk Umur 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utamanya dan Tipe Daerah, 2014	92
6.7	Persentase Penduduk Umur 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utamanya dan Jenis Kelamin, 2014	93
6.8	Persentase Penduduk Umur 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utamanya dan Status Ekonomi, 2014	94
6.9	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2014	95
6.10	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2014	96
6.11	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Ekonomi, 2014	96
6.12	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	97
6.13	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 18 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah, 2014	99
6.14	Persentase Penduduk Umur 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	101
6.15	Persentase Penduduk Umur 15-59 Tahun yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah, 2014	102

Daftar Tabel Lampiran

Tabel	Judul	Halaman
3.1.1–3.1.3	Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013	131–133
3.2	Jumlah Ruang Kelas Menurut Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013	134–136
3.3.1–3.3.3	Jumlah Laboratorium Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013	137–139
3.4.1–3.4.3	Jumlah Perpustakaan Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013	140–142
3.5.1–3.5.3	Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013	143–145
3.6.1–3.6.3	Jumlah Murid Menurut Jenis Kelamin, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013	146–148
4.1.1–4.1.3	Persentase Penduduk Berumur 0–6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	129–131
4.2.1–4.2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014	132–134
4.3.1–4.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	135–137
4.4.1–4.4.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	138–140
4.5.1–4.5.3	Persentase Penduduk Berumur 5-24 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014	141–143
4.6.1–4.6.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	144–146
4.7.1–4.7.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	147–149
4.8.1–4.8.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	150–152
4.9.1–4.9.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	153–155

Tabel	Judul	Halaman
4.10.1–4.10.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	156–158
4.11.1–4.11.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	159–161
4.12.1–4.12.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	162–164
4.13.1–4.13.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	165–167
4.14.1–4.14.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	168–170
4.15.1–4.15.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	170–172
4.16.1–4.16.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	173–175
4.17.1–4.17.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	176–178
5.1.1–5.1.3	Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	179–181
5.2.1–5.2.3	Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014	182–184
5.3.1–5.3.3	Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	185–187
5.4.1–5.4.3	Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014	188–190
5.5.1–5.5.3	Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	191–193
5.6.1–5.6.3	Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014	191–193
6.1.1–6.1.3	Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut atau Lebih Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	194–196
6.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2014	197–199

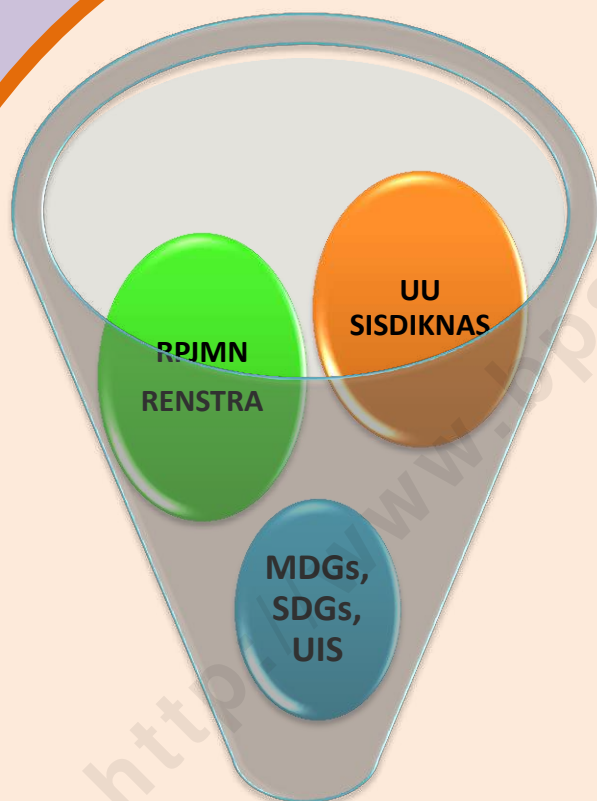
Tabel	Judul	Halaman
6.3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	200–202
6.4	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	203–205
6.5	Rasio Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	206–208
6.6.1–6.6.3	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-24 Tahun Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	209–211
6.7.1–6.7.3	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-59 Tahun Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	212–214

Daftar Estimasi Kesalahan Sampling

Tabel	Judul	Halaman
7.1.1-7.1.3	<i>Sampling error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	217
7.2.1-7.2.3	<i>Sampling error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	218
7.3.1-7.3.3	<i>Sampling error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	219
7.4.1-7.4.3	<i>Sampling error</i> <i>Sampling error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	220
7.5.1-7.5.3	<i>Sampling error</i> Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	221
7.6.1-7.6.3	<i>Sampling error</i> Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	222
7.7.1-7.7.3	<i>Sampling error</i> Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Tamat SD Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	223
7.8.1-7.8.3	<i>Sampling error</i> Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Tamat SD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	224
7.9.1-7.9.3	<i>Sampling error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	225
7.10.1-7.10.3	<i>Sampling error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	226
7.11.1-7.11.3	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	227
7.12.1-7.12.3	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	228
7.13.1-7.13.3	<i>Sampling Error</i> Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	229
7.14.1-7.14.3	<i>Sampling Error</i> Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	230
7.15.1-7.15.3	<i>Sampling Error</i> Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	231

Tabel	Judul	Halaman
7.16.1-7.16.3	<i>Sampling Error</i> Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	232
7.17.1-7.17.3	<i>Sampling Error</i> Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	233
7.18.1-7.18.3	<i>Sampling Error</i> Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014	234
7.19.1-7.19.3	<i>Sampling Error</i> Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	235
7.20.1-7.20.3	<i>Sampling Error</i> Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014	236

Bab I PENDAHULUAN



**STATISTIK
PENDIDIKAN 2014**



1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat 1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 12 secara khusus menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional disusun berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan oleh pemerintah pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender. Pembangunan pendidikan pada tahun 2010-2014 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014. Renstra tersebut telah menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Terdapat beberapa pergeseran yang diterapkan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2010-2014 (Kemdikbud, 2013), yaitu:

- a. perubahan wajib belajar menjadi hak belajar;
- b. kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan;
- c. pendidikan komprehensif melalui penyelarasan pendidikan dan kebudayaan;

- d. perubahan fungsi sekolah negeri menjadi sekolah publik;
- e. perubahan dasar perencanaan pendidikan yang berdasarkan suplai menjadi berdasarkan kebutuhan;
- f. pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan;
- g. pergeseran fungsi kebudayaan dari tontonan menjadi tuntunan;
- h. pengelolaan kebudayaan secara integratif multisektor.

Informasi maupun gambaran mengenai situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia dinilai sangat penting. Salah satu kepentingannya yaitu sebagai bahan evaluasi pembangunan khususnya dengan bergantinya pemerintahan masa periode 2010-2014. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung sistem pendidikan nasional serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional bagi pemerintahan selanjutnya.

1.2 Tujuan

Tujuan utama penyajian publikasi Statistik Pendidikan adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun tingkat regional. Kondisi dan perkembangan pendidikan dalam publikasi ini akan dilihat dari lima aspek yaitu; fasilitas pendidikan dan peserta didik, partisipasi pendidikan, kegiatan di luar jam sekolah, serta capaian proses pendidikan.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi dunia pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan target yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1.3 Sistematika penyajian

Pembahasan utama publikasi ini dirinci ke dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penyajian.
- Bab II menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang mencakup sumber data (penjelasan

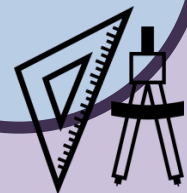
mengenai ruang lingkup, kerangka sampel, pemilihan sampel, keterwakilan sampel, metode pengumpulan data, dan keterbatasan data), konsep dan definisi, serta metode analisis.

- Bab III menyajikan pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup informasi umum tentang fasilitas pendidikan dan peserta didik.
- Bab IV tentang partisipasi pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini dan partisipasi sekolah.
- Bab V memberikan penjelasan tentang kegiatan di luar jam sekolah, mencakup akses terhadap internet, bekerja, dan mengurus rumah tangga.
- Bab VI membahas tentang hasil proses pendidikan yang antara lain dicerminkan oleh siswa 5-24 tahun yang bersekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, serta alasan penduduk 5-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi.

Data-data pendidikan yang ditampilkan pada tingkat regional dapat dilihat pada tabel-tabel lampiran. Sementara penghitungan tingkat kesalahan pengambilan sampel (*sampling*) dari hasil estimasi beberapa indikator pendidikan ditampilkan pada bagian akhir publikasi ini untuk melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan dari teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam survei (Susenas). Penjelasan keterwakilan sampel disajikan dalam metodologi.

Bab II METODOLOGI

**METODE
ANALISIS**



**KONSEP
DEFINISI**

**SUSENAS
2014**



2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Tahun 2014. Informasi yang dikumpulkan pada Susenas KOR 2014 mencakup keterangan umum mengenai anggota rumah tangga (anggota rta), domisili dan keberadaan orang tua kandung, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, perlindungan sosial, serta teknologi komunikasi dan informasi. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai pendidikan seperti partisipasi pendidikan, kegiatan di luar jam sekolah, dan capaian proses pendidikan.

Susenas merupakan kegiatan survei untuk mengumpulkan informasi/data di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, Keluarga Berencana, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Susenas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Konsumsi dan Pengeluaran, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pada tahun 2011 terjadi perubahan, pengumpulan data konsumsi dan pengeluaran dilakukan secara triwulan berbarengan dengan Kor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data yang dihasilkan dan sejalan dengan peningkatan frekuensi permintaan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga untuk PDB/PDRB triwulanan dan penghitungan indikator kemiskinan.

2.1.1 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas 2014 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan 497 Kab/Kota di Indonesia, di mana setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 75 ribu rumah tangga. Data hasil pencacahan setiap triwulan dapat disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan dari kumulatif pelaksanaan pencacahan selama empat triwulan maka datanya dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

2.1.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.

- Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010 yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1).
- Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.
- Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa pada blok sensus terpilih yang telah dimutakhirkan menjelang pelaksanaan survei. Rumah tangga tidak termasuk rumah tangga khusus seperti panti asuhan, barak polisi/militer, penjara.

2.1.3 Pemilihan Sampel

Metode *sampling* yang digunakan adalah penarikan sampel tiga tahap berstrata (*Stratified Three Stage Sampling*) dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap pertama, memilih sampel wilcah secara *PPS (Probability Proportional to Size)* dengan *size* banyaknya rumah tangga SP2010. Kemudian wilcah terpilih tersebut dialokasikan secara acak ke dalam 4 (empat) triwulan.
- Tahap kedua, memilih 30.000 BS dari keseluruhan sampel wilcah yang dialokasikan di masing-masing triwulan sebanyak 7.500 BS.
- Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih Susenas yang sudah dilakukan pemutakhiran listing rumah tangga hasil Sensus Penduduk tahun 2010, dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis. Pemilihan sampel rumah tangga dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan program komputer yang telah disiapkan BPS RI.

2.1.4 Keterwakilan Sampel

Keterwakilan sampel dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu banyaknya sampel, kesalahan pengambilan sampel (*sampling error*), dan kesalahan bukan karena pengambilan sampel (*non sampling error*). Keterwakilan sampel ini mempengaruhi estimasi hasil pendataan.

(1) Banyaknya sampel

Semakin banyak atau semakin besar jumlah sampel dalam suatu survei, maka estimasi yang dihasilkan akan semakin mendekati karakteristik populasinya.

(2) Kesalahan *sampling* (*Sampling Error*)

Sampling error merupakan kesalahan yang muncul akibat dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Estimasi yang dihasilkan dalam survei tidak terlepas dari *sampling variability*. Secara statistik, besarnya *sampling error* dapat ditunjukkan oleh besarnya angka galat baku (*standard error/SE*). Untuk mengukur sejauh mana sampel yang digunakan sudah cukup menggambarkan keadaan parameter populasi digunakan *Relative Standard Error (RSE)*, yaitu hasil bagi SE dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

Dalam publikasi ini penghitungan RSE menggunakan metode Taylor Linearization untuk mengestimasi nilai total maupun rata-ratanya. Namun tidak semua variabel hasil pendataan dihitung SE dan RSE, hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung.

Menurut Aryago Mulia dkk (2008), kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan *sampling* dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Untuk estimasi dengan jumlah kasus yang kecil, kesalahan relatif akan menjadi sangat besar. Secara umum, RSE menurun jika ukuran estimasi tersebut meningkat. Estimasi yang sangat kecil akan menghasilkan RSE yang tinggi sehingga nilainya menjadi tidak akurat.

Tabel 1
Keputusan mengenai Keakuratan Suatu Estimasi

Kondisi	Perlakuan
$RSE \leq 25\%$	Akurat (bisa digunakan)
$25\% < RSE \leq 50\%$	Perlu hati-hati jika digunakan
$RSE > 50\%$	Dianggap tidak akurat (harus digabungkan dengan estimasi lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$).

(3) Kesalahan *non sampling* (*Non-Sampling Error*)

Non sampling error merupakan kesalahan yang muncul pada saat pelaksanaan survei dan atau saat pengolahan data. Contoh dalam pelaksanaan survei: i) penggunaan konsep dan definisi yang salah oleh petugas akibat kesalahan

penyampaian dari instruktur ke petugas pencacah maupun pengawas ii) tidak ditemukannya rumah tangga sampel iii) kesalahan pengertian antara responden dan petugas pencacah pada saat wawancara. Sedangkan kesalahan pada saat pengolahan: i) kesalahan pada saat perekaman data (*entry data*) ii) kesalahan *editing dan coding*.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendataan yang bertujuan untuk memperkecil jenis kesalahan ini, namun kesalahan *non sampling* tidak dapat dihilangkan sama sekali serta sulit untuk dievaluasi secara statistik.

2.1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Susenas 2014 yang ditujukan kepada individu harus ditanyakan langsung kepada responden bersangkutan. Keterangan dalam rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.

2.1.6 Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS RI, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya tidak dicakup.

2.2 Konsep dan Definisi

- a. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

b. **Blok sensus** ialah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.

c. **Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga Khusus**

Rumah Tangga Biasa ialah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus ialah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

d. **Kepala Rumah Tangga (KRT) dan Anggota Rumah Tangga (ART)**

Kepala Rumah Tangga (KRT) ialah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) ialah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yakni orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

e. **Rasio murid-guru** adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

Rasio kelas-guru adalah perbandingan antara jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tersebut.

Rasio murid-kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

- f. **Pendidikan formal** ialah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/SDLB/MI/ sederajat, SMP/SMPLB/MTs/ sederajat, SM/SMLB/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan nonformal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan informal ialah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

- g. **Pendidikan kesetaraan** ialah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
- h. **Pendidikan anak usia dini (PAUD)** ialah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- i. **Tamat sekolah** adalah jika responden telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- j. **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tidak punya ijazah SD adalah kepala ruta/anggota ruta yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah,

Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara SD) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga kepala ruta/anggota ruta yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

SD/SDLB adalah Sekolah Dasar atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong).

Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SD.

SMP/SMPLB adalah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat (MULO, HBS 3 tahun, dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama).

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SMP.

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), atau yang sederajat (Sekolah Menengah Luar Biasa, HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA).

Madrasah Aliyah (MA) adalah sekolah umum berciri khas Islam yang sederajat dengan SMA.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Penata Rontgen.

Program Diploma 1/2 adalah program D1/D2 pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma 1/2 pada pendidikan formal.

Program Diploma 1 hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

Program Diploma 3/sarjana muda adalah program D3 atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/ perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda.

Program Diploma 4/sarjana adalah program pendidikan diploma 4 atau strata 1 pada suatu perguruan tinggi.

S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), strata 2 atau 3 pada suatu perguruan

Paket A/B/C merupakan pendidikan kesetaraan dengan tujuan memperluas akses pendidikan dasar sembilan tahun melalui program Paket A dan Paket B serta pendidikan menengah melalui program Paket C.

Menurut UU No.20 tahun 2003 pasal 26 ayat, pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yg mencakup Paket A Setara SD/MI, Paket B Setara SMP/MTs, dan Paket C Setara SMA/MA.

- k. **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud), Kementerian Agama (kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

I. **Partisipasi Pendidikan**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) ialah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) ialah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) ialah Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

- m. **APK PAUD** adalah Jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi anak usia 3-5 tahun.
- n. **APM PAUD** adalah Jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) berusia 3-5 tahun, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi anak usia 3-5 tahun.
- o. **Rasio APM (SD/SMP/SMA)** adalah perbandingan APM murid/mahasiswa perempuan terhadap APM murid/mahasiswa laki-laki pada tiap jenjang dan jalur pendidikan, dinyatakan dalam persentase.
- p. **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya.
- q. **Rata-rata Lama Sekolah (MYS)** adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.

Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

- r. **Alasan tidak/belum pernah/tidak bersekolah lagi:**

Tidak ada biaya, apabila responden atau keluarganya tidak mampu menyediakan biaya pendidikan.

Bekerja/mencari nafkah, bekerja dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan.

Menikah/mengurus rumah tangga, apabila responden merasa sangat sibuk mengurus rumah tangga atau tidak pantas bersekolah setelah menikah/berkeluarga.

Merasa pendidikan cukup, apabila responden menganggap bekal pendidikan yang dikuasai sudah cukup, dan tidak perlu lagi bersekolah ke kelas/tingkat/jenjang yang lebih tinggi.

Belum cukup umur, apabila responden yang bersangkutan umurnya belum mencukupi untuk bersekolah.

Malu karena ekonomi, apabila responden merasa malu karena keadaan ekonomi keluarga.

Sekolah jauh, apabila responden menganggap jarak sekolah dengan tempat tinggal terlalu jauh, sehingga sukar untuk dicapai.

Cacat, apabila responden menganggap dengan kecacatan yang dideritanya menjadi halangan bagi responden untuk bersekolah.

Menunggu pengumuman, apabila responden sudah mendaftar sekolah namun belum ada pengumuman di terima atau tidak.

Tidak diterima, adalah suatu keadaan dimana responden tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di sekolah yang ia daftar, misalnya tidak lulus dalam ujian masuk.

Lainnya, adalah alasan selain yang telah disebut di atas. Contoh: sakit atau pikiran tidak mampu, termasuk dikeluarkan dari sekolah.

- s. **Internet** (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.

Yang dimaksud dengan **mengakses internet** apabila seseorang meluangkan waktu untuk mengakses internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet seperti: mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, e-mail/*chatting*, dll.

- t. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.
- u. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan mengurus rumah/membantu mengurus rumah tanpa mendapat upah/gaji. Ibu rumah tangga atau anak-anaknya yang melakukan kegiatan kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci dan sebagainya

digolongkan sebagai mengurus ruta. Bagi pembantu ruta yang mengerjakan hal yang sama tetapi mendapat upah/gaji, tidak digolongkan sebagai mengurus ruta, melainkan digolongkan sebagai bekerja.

2.3 Metode Analisis

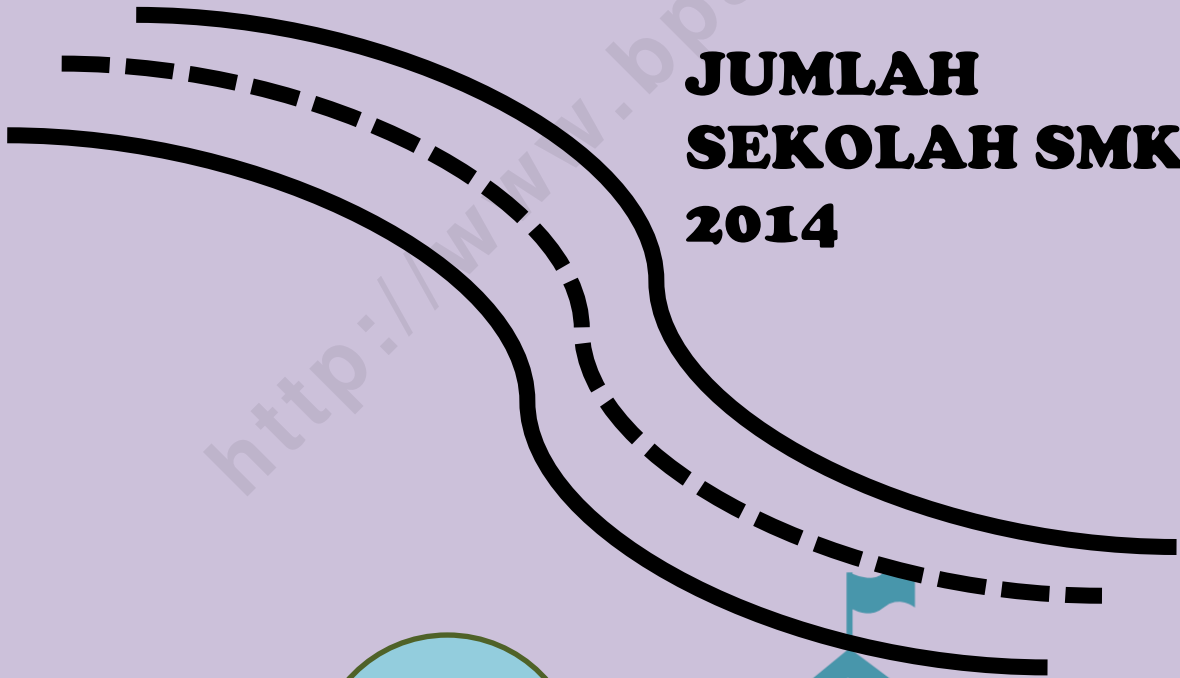
Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan menyajikan ulasan sederhana berdasarkan tabel dan grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Ulasan sederhana meliputi pola dan gambaran suatu indikator yang dibedakan menurut tipe wilayah (perkotaan dan perdesaan), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), status ekonomi rumah tangga (kuintil pengeluaran), dan perbandingan antar provinsi. Selain itu juga diulas pola dan gambaran suatu indikator berdasarkan periode waktu tertentu dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai perkembangan pendidikan selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran untuk melihat data pada tingkat provinsi.

Bab III FASILITAS PENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK



SMK
Negeri
2.841
sekolah

JUMLAH SEKOLAH SMK 2014



SMK
Swasta
7.832
sekolah



Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sesuai bunyi Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung. Ditinjau dari fungsi atau peranannya, sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga macam yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran (Sulistiyowati & Rohayati, 2006). Sementara prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar, seperti bangunan dan *furniture* sekolah.

Mutu pendidikan nasional tidak dapat terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan yang layak, memadai, dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri serta peserta didik (murid) yang berkualitas. Gambaran tentang kondisi fasilitas pendidikan di Indonesia akan dibahas pada bab ini, dimulai dari sebaran jumlah sekolah dan guru, serta kemudahan penduduk dalam mengakses pendidikan baik dari aspek sarana ke sekolah maupun prasarana kemudahan biaya pendidikan.

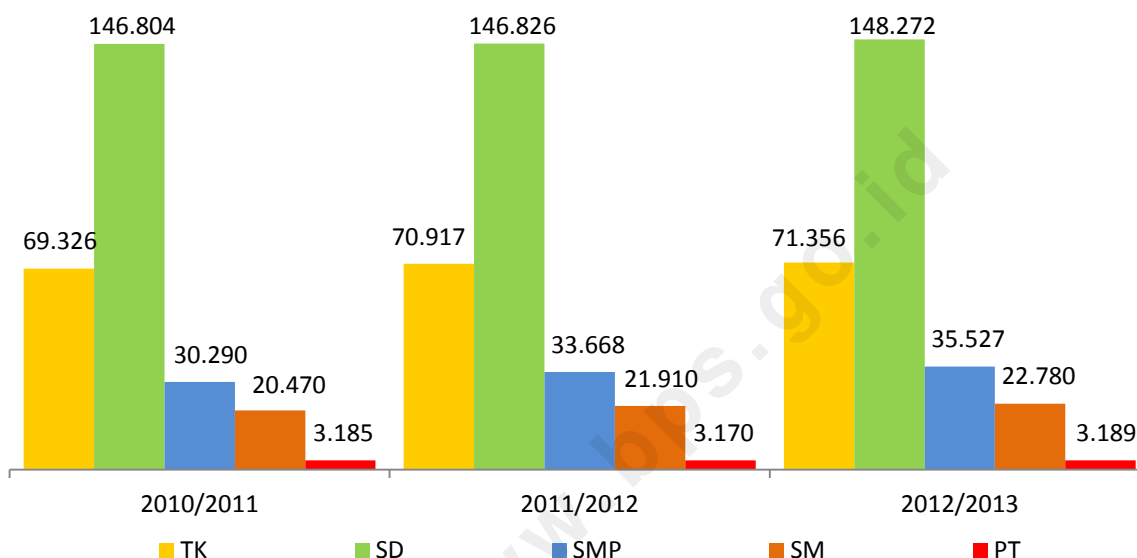
3.1 Fasilitas Pendidikan

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pembangunan pendidikan nasional dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025. RPPNJP 2005-2025 terbagi ke dalam 4 tema pembangunan dengan periode masing-masing tema adalah 5 tahun. Tema pembangunan pendidikan nasional pada periode 2010-2014 difokuskan pada penguatan layanan pendidikan.

Pemerintah telah berupaya menambah dan mengembangkan fasilitas sekolah, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan yang bermutu. Gedung sekolah yang tidak layak pakai diperbaiki sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik secara interaktif. Jumlah sekolah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara proporsional di seluruh Indonesia. Pada Tahun Ajaran 2012/2013, jumlah sekolah yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jenjang TK sebanyak 71.356 sekolah, SD sebanyak 148.272 sekolah, SMP sebanyak 35.527

sekolah, SM sebanyak 22.780 sekolah, dan PT sebanyak 3.189 sekolah. Gambar 3.1 memperlihatkan perkembangan jumlah sekolah TK, SD, SMP dan SM yang terus meningkat selama periode tahun ajaran 2010/2011 hingga 2012/2013. Sementara jumlah perguruan tinggi sempat mengalami penurunan sebanyak 15 unit pada Tahun Ajaran 2011/2012, dan naik kembali pada Tahun Ajaran 2012/2013 sebanyak 19 unit.

Gambar 3.1
Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2010/2011–2012/2013



Sumber :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2010/2011 – 2012/2013

Sebaran jumlah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antar provinsi dan jenjang pendidikan disajikan pada Lampiran Tabel 3.1.3. Persebaran jumlah sekolah sampai dengan Tahun Ajaran 2012/2013 baik antar provinsi maupun jenjang pendidikan sangat bervariasi, namun terlihat masih mengumpul di Pulau Jawa baik pada jenjang SD, SMP, SM maupun PT. Jumlah sekolah untuk jenjang SD tertinggi di Provinsi Jawa Timur (26.725 sekolah), Jawa Barat (23.710 sekolah), dan Jawa Tengah (23.237 sekolah). Pola yang sama terjadi pada jenjang SMP, sedangkan pada jenjang SM jumlah sekolah tertinggi di Provinsi Jawa Barat (3.218 sekolah), Jawa Timur (2.810 sekolah) dan Jawa Tengah (2.151 sekolah). Perbedaan pola terjadi di jenjang PT, jumlah sekolah tertinggi di Provinsi Jawa Barat (506 PT), Jawa Timur (475 PT) dan DKI Jakarta (367 sekolah).

Untuk mencapai layanan pendidikan nasional yang kuat, pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan, seperti sekolah, ruang kelas, atau fasilitas pendidikan lainnya. Tabel 3.1 menunjukkan jumlah sekolah

negeri maupun swasta menurut jenjang satuan pendidikan. Keseriusan pemerintah dalam pemerataan ketersediaan fasilitas ditunjukkan melalui jumlah sekolah negeri yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah swasta.

Tabel 3.1
Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Sekolah,
Tahun Ajaran 2012/2013

Jenjang Satuan Pendidikan	Status Sekolah				Jumlah
	Negeri		Swasta		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	133.874	90,29	14.398	9,71	148.272
SMP	22.325	62,84	13.202	37,16	35.527
SMA	5.978	49,38	6.129	50,62	12.107
SMK	2.841	26,62	7.832	73,38	10.673

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Program pemerintah yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun juga didukung dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar berupa bangunan sekolah jenjang satuan pendidikan SD dan SMP. Jumlah SD dan SMP yang dikelola pemerintah lebih banyak dibandingkan dengan satuan pendidikan lain. Partisipasi pihak swasta dalam pembangunan pendidikan nasional juga patut diberikan apresiasi. Mereka turut membantu menyediakan fasilitas pendidikan dengan mengimbangi jumlah sekolah pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang menunjukkan pola hubungan terbalik antara persentase sekolah negeri dan swasta. Ketika bangunan sekolah milik pemerintah jumlahnya relatif sedikit, bangunan sekolah swasta pada jenjang satuan pendidikan yang sama lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah. Begitu pula sebaliknya. Pada satuan pendidikan SD, bangunan yang dikelola swasta jauh lebih sedikit dari yang jumlah sekolah negeri. Di sisi lain, jumlah bangunan SMA dan SMK milik swasta relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bangunan SMA dan SMK negeri.

Berbeda dengan satuan pendidikan dasar, jumlah lembaga pendidikan tinggi milik swasta lebih banyak dibandingkan dengan negeri. Hal ini terjadi pada semua jenis lembaga pendidikan tinggi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2. Ketersediaan lembaga pendidikan tinggi negeri memang relatif sedikit. Pada setiap provinsi cenderung hanya terdapat satu atau dua universitas negeri.

Tabel 3.2
Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Menurut Jenis dan Status Lembaga,
Tahun Ajaran 2012/2013

Lembaga Pendidikan	Status Lembaga				Jumlah
	Negeri		Swasta		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Universitas	52	10,92	424	89,08	476
Institut	7	12,07	51	87,93	58
Sekolah Tinggi	1	0,07	1.383	99,93	1.384
Akademi	0	0,00	1.099	100,00	1.099
Politeknik	36	20,93	136	79,07	172

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Pembangunan fasilitas pendidikan didukung dengan peningkatan sarana penunjang di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung secara kondusif. Sarana pendidikan yang biasanya disediakan oleh sekolah antara lain ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan.

Tabel 3.3
Persentase Ruang Kelas Milik Menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Kondisi,
Tahun Ajaran 2012/2013

Jenjang Satuan Pendidikan	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	76,21	11,52	12,27	100,00
SMP	74,48	22,66	2,86	100,00
SMA/MA	87,94	9,65	2,41	100,00

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.3 menunjukkan persentase ruang kelas menurut jenjang satuan pendidikan dan kondisinya. Secara umum, persentase ruang kelas dengan kondisi baik bekisar 70-80 persen pada semua jenjang satuan pendidikan. Sementara untuk ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/sedang, rata-rata 14 persen ruang kelas pada setiap jenjang. Persentase ruang kelas dengan kondisi rusak berat relatif kecil pada jenjang SMP dan SM (masing-masing sekitar 2 persen). Akan tetapi, ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada jenjang SD mencapai 12 persen. Bahkan, angka tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/sedang.

Tabel 3.4
Jumlah Laboratorium Menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Sekolah,
Tahun Ajaran 2012/2013

Jenjang Satuan Pendidikan	Status Sekolah				Jumlah
	Negeri		Swasta		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SMP	19.209	71,61	7.616	28,39	26.825
SMA	14.635	54,02	12.458	45,98	27.093
SMK	3.949	45,39	4.751	54,61	8.700

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.4 memperlihatkan jumlah laboratorium menurut jenjang satuan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Laboratorium yang tersedia di jenjang satuan pendidikan SMP negeri lebih banyak dibandingkan dengan yang terdapat di SMP swasta. Sementara itu, pada jenjang satuan pendidikan SMA dan SMK jumlah laboratorium tidak jauh berbeda, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan laboratorium di sekolah negeri lebih banyak dibandingkan dengan sekolah swasta. Dengan demikian, pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan ketersediaan laboratorium di sekolah swasta.

Tabel 3.5
Jumlah Perpustakaan Menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Status Sekolah,
Tahun Ajaran 2012/2013

Jenjang Satuan Pendidikan	Status Sekolah				Jumlah
	Negeri		Swasta		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SMP	14.711	65,62	7.702	34,38	22.419
SMA	5.163	48,64	5.452	51,36	10.615
SMK	1.521	26,51	4.217	73,49	5.738

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.5 memperlihatkan ketersediaan perpustakaan di sekolah negeri dan swasta. Sama halnya dengan laboratorium yang tersedia di SMP negeri, perpustakaan

yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan yang terdapat di SMP swasta. Sebaliknya, pada jenjang satuan pendidikan SMK jumlah perpustakaan di sekolah swasta lebih banyak dibandingkan dengan perpustakaan di SMK negeri. Ketimpangan ketersediaan perpustakaan di SMK negeri dan swasta lebih tinggi dibandingkan pada jenjang lainnya. Dengan demikian, pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan ketersediaan perpustakaan di sekolah negeri pada jenjang satuan pendidikan SMK.

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Melalui arahan dan bimbingan guru yang profesional, murid atau peserta didik bisa berkembang menjadi sosok yang cerdas dan terpelajar. Peserta didik diharapkan menjadi generasi yang handal dan berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat, agar kelak dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.

Guru merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan proses pendidikan, sehingga kualifikasi dan kompetensi guru perlu selalu dievaluasi. Pasal 8 UU tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dievaluasi melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, sementara kompetensi guru diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut PerMendiknas RI No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu:

- Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- Guru pada SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat, dan SMK/MAK/sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Tabel 3.6
Persentase Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tempat Mengajar, Status Sekolah dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Tahun Ajaran 2012/2013

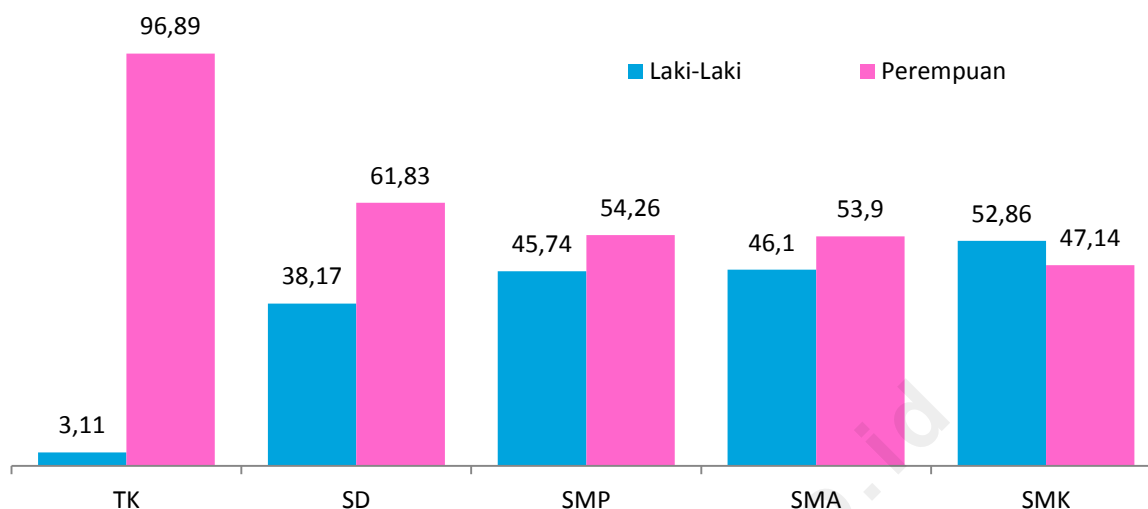
Jenjang Pendidikan Tempat Mengajar	Status Sekolah				Jumlah
	Negeri		Swasta		
	Kurang dari S1	S1 atau Lebih	Kurang dari S1	S1 atau Lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	30,05	60,68	3,35	5,92	100,00
SMP	11,16	63,88	3,61	21,36	100,00
SMA	3,24	65,63	3,12	28,02	100,00
SMK	3,61	45,19	7,01	44,19	100,00

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Berdasarkan data Kemdikbud pada Tahun Ajaran 2012/2013, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik (*under-qualified*) terutama pada jenjang pendidikan dasar. Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa dari setiap 100 orang guru SD, rata-rata sebanyak 33 guru yang belum berpendidikan setingkat Diploma IV atau S1 (PG SD/PG MI). Pada jenjang SMP, dari 100 orang guru rata-rata 15 guru yang belum berpendidikan setingkat Diploma IV atau S1. Dari 15 guru tersebut, 11 orang mengajar di SMP negeri dan 4 orang mengajar di SMP swasta. Adapun pada jenjang SMA dan SMK jauh lebih baik. Dari 100 orang guru SMA, terdapat rata-rata 6 guru yang belum berpendidikan setingkat Diploma IV atau S1. Sementara dari 100 orang guru SMK, rata-rata 11 guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik yang belum berpendidikan setingkat Diploma IV atau S1.

Gambar 3.2 memperlihatkan komposisi guru pada setiap jenjang pendidikan menurut jenis kelamin. Guru atau tenaga pendidik TK didominasi oleh perempuan dengan perbedaan yang sangat terlihat. Pada jenjang pendidikan TK atau prasekolah, persentase guru laki-laki (3,11 persen) jauh di bawah guru perempuan (96,89 persen). Begitu pula pada jenjang pendidikan dasar. Persentase guru perempuan SD (61,83 persen) dan guru perempuan SMP (54,26 persen) lebih tinggi daripada guru laki-laki. Pada jenjang pendidikan menengah, persentase guru laki-laki di SMA (46,10 persen) juga lebih rendah daripada perempuan. Sementara itu, persentase guru laki-laki SMK (52,86 persen) sedikit lebih tinggi daripada guru perempuan.

Gambar 3.2
Komposisi Guru Menurut Jenjang Satuan Pendidikan dan Jenis Kelamin,
Tahun Ajaran 2012/2013



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Mutu pendidikan dapat dilihat dari beban guru yang diukur melalui indikator rasio kelas-guru. Rasio kelas-guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah guru terhadap jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Standar ideal rasio kelas-guru adalah 1:1 untuk SD, 1:0,42 untuk SMP, dan 1:0,42 untuk SM. Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat kekurangan atau kelebihan jumlah guru yang mengajar di kelas pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 3.7
Jumlah dan Rasio Kelas-Guru Menurut Jenjang Satuan Pendidikan,
Tahun Ajaran 2012/2013

Jenjang Satuan Pendidikan	Jumlah		Rasio Kelas – Guru
	Guru	Kelas	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	1.682.263	1.032.818	0,61
SMP	587.610	318.440	0,54
SM	452.041	265.404	0,59

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Indikator rasio kelas-guru pada Tabel 3.7 menunjukkan bahwa beban tugas mengajar guru SD relatif masih di bawah standar ideal. Besaran rasio kelas-guru di SD sebesar 1:0,61 masih di bawah standar ideal sebesar 1:1. Adapun pada jenjang SMP

dan SM telah melebihi kondisi ideal. Nilai rasio kelas-guru di SMP sebesar 1:0,54 dan di SM sebesar 1:0,59.

Persebaran guru antar provinsi disajikan pada Lampiran Tabel 3.1.1. Sebaran guru antar provinsi pada masing-masing jenjang pendidikan masih sangat timpang. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah guru yang terpusat di Pulau Jawa. Untuk jenjang SD, jumlah guru tertinggi berturut-turut di Provinsi Jawa Barat (282.069 orang), Jawa Timur (278.245 orang), dan Jawa Tengah (218.297 orang). Untuk jenjang SMP, jumlah guru tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat (157.686 orang), Jawa Timur (152.079 orang), dan Jawa Tengah (101.792 orang).

3.2 Peserta Didik

Pasal 1 ayat 4 UU RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sebagai individu yang mengalami perkembangan dan perubahan, seorang peserta didik harus mendapatkan bimbingan dan arahan untuk membentuk sikap moral dan kepribadian. Pengembangan potensi dasar seorang peserta didik dapat dilakukan melalui pendidikan baik secara fisik maupun psikis dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dimana peserta didik tersebut berada.

Tabel 3.8
Persentase Murid Menurut Jenjang Satuan Pendidikan, Status Sekolah, dan Jenis Kelamin, Tahun Ajaran 2012/2013

Jenjang Satuan Pendidikan	Status Sekolah					
	Negeri			Swasta		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	51,43	48,57	100,00	52,13	47,87	100,00
SMP	49,98	50,02	100,00	53,02	46,98	100,00
SM	51,81	48,19	100,00	59,90	40,10	100,00

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.8 menunjukkan persentase murid menurut status sekolah dan jenis kelamin pada setiap jenjang satuan pendidikan. Komposisi murid laki-laki dan perempuan relatif tidak jauh berbeda di sekolah negeri. Sebaliknya, pada sekolah

swasta selisih persentase murid laki-laki dan perempuan lebih besar dibandingkan dengan sekolah negeri. Hal ini terjadi pada semua jenjang pendidikan.

Selain rasio kelas-guru, beban guru dapat pula diukur melalui indikator rasio murid-guru. Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah guru terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid-guru mencerminkan rata-rata jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru. Standar ideal rasio murid-guru adalah 1:40 untuk SD, 1:21 untuk SMP, dan 1:21 untuk SM.

Tabel 3.9 memperlihatkan bahwa rasio murid-guru telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, sehingga perhatian dan konsentrasi guru dalam memberikan materi pelajaran dapat tersampaikan secara baik. Data Kemdikbud menunjukkan bahwa rasio murid-guru pada jenjang SD sebesar 1:16, jenjang SMP sebesar 1:16, dan jenjang SM sebesar 1:19. Kondisi ini memberikan harapan bahwa jika kondisi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi guru juga telah terpenuhi, maka proses pendidikan dan pengajaran dari seorang guru akan memberikan hasil yang maksimal.

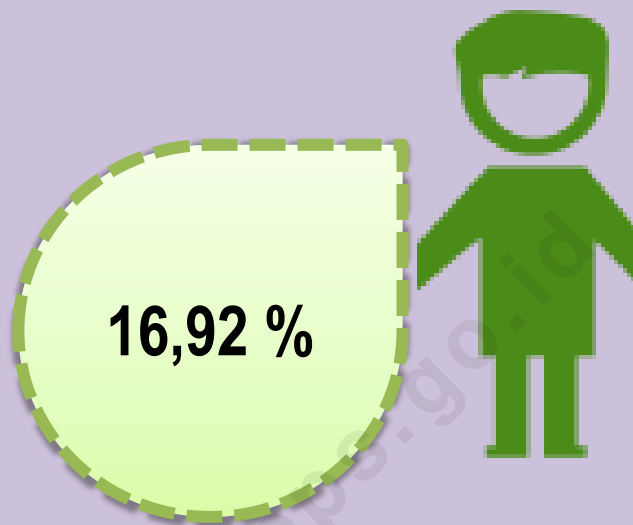
Tabel 3.9
Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Jenjang Satuan Pendidikan	Jumlah			Rasio	
	Guru	Murid	Kelas	Murid – Guru	Murid – Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	1.682.263	26.769.680	1.032.818	16	26
SMP	587.610	9.653.093	318.440	16	30
SM	452.041	8.462.379	265.404	19	32

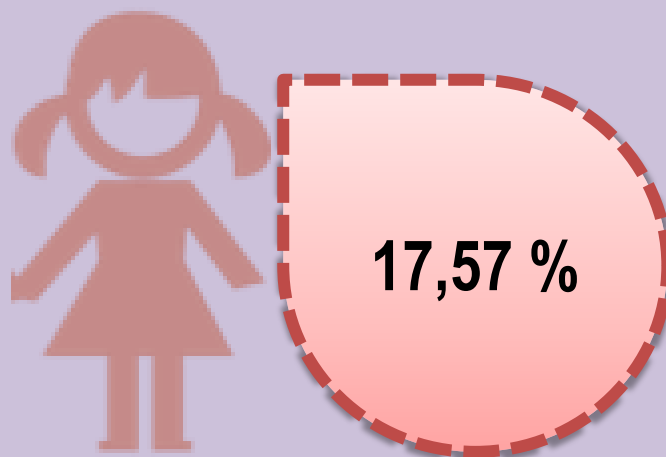
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan juga dapat dilihat dari besaran rasio murid-kelas. Rasio murid-kelas mencerminkan idealnya jumlah murid dalam satu kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Standar ideal rasio murid-kelas adalah 1:28 untuk SD, 1:32 untuk SMP, dan 1:32 untuk SM. Data Kemdikbud pada Tabel 3.9 memperlihatkan bahwa pada tahun ajaran 2012/2013, rasio kelas-murid sedikit di atas standar ideal pada tiap-tiap jenjang pendidikan. Setiap kelas pada jenjang pendidikan dasar rata-rata diisi oleh 26 orang murid SD dan 30 orang murid SMP. Sementara pada jenjang pendidikan menengah, rata-rata setiap kelas diisi oleh 32 orang murid.

Bab IV PARTISIPASI PENDIDIKAN



**Partisipasi Anak Umur 0-6
Tahun yang Mengikuti PAUD,
2014**



Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan hasil pembangunan serta sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global.

Program pendidikan untuk semua diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka, demokratis serta berkesetaraan gender. Dengan demikian, pendidikan dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Indonesia merupakan salah satu dari 164 negara yang menandatangani konvensi *Education for All* (EFA) di Dakar Senegal pada tahun 2000. Konvensi tersebut memuat kesepakatan berupa 6 tujuan pendidikan yang harus dicapai pada tahun 2015. Berikut adalah progres pencapaian tujuan EFA berdasarkan *EFA Global Monitoring Report* tahun 2015:

Tujuan 1. Pendidikan anak usia dini

Memperluas dan mengembangkan pendidikan anak usia dini secara menyeluruh, khususnya untuk anak yang kurang beruntung.

Pada tahun 2012, 184 juta anak di dunia sudah mengikuti pendidikan usia dini. Angka ini mengalami peningkatan sebesar dua per tiga jika dibandingkan dengan tahun 1999.

Tujuan 2. Pendidikan dasar yang universal

Memastikan bahwa semua anak, terutama anak perempuan, anak yang dalam situasi sulit, dan anak yang termasuk dalam kelompok minoritas, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar dengan baik tanpa pungutan biaya.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan dasar sebesar 84 persen pada tahun 1999. Angka tersebut diperkirakan akan mencapai 93 persen pada tahun 2015. Di pihak lain, satu dari enam anak di negara berpendapatan rendah dan menengah, tidak menamatkan pendidikan dasar pada tahun 2015.

Tujuan 3. Kecakapan/bakat pemuda dan orang dewasa

Menjamin akses pembelajaran dan pendidikan kecakapan hidup yang merata untuk semua orang.

Sebagian besar dari 94 negara dengan pendapatan rendah dan menengah telah mengatur pendidikan menengah yang gratis sejak tahun 1999. Beberapa provinsi di Indonesia telah mencanangkan sekolah gratis sampai jenjang pendidikan menengah. Provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Tujuan 4. Tingkat melek huruf orang dewasa

Meningkatkan angka melek huruf orang dewasa khususnya perempuan, sebesar 50 persen, dan pemerataan akses pendidikan dasar dan berkelanjutan.

Penurunan tingkat buta huruf relatif kecil, diperkirakan menjadi 14 persen pada tahun 2015 dari sebelumnya 18 persen pada tahun 2000. Artinya, tujuan konvensi EFA di Dakar tidak tercapai.

Tujuan 5. Kesetaraan gender

Mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, dengan berfokus pada akses penuh dan merata serta pendidikan dasar yang berkualitas baik untuk anak perempuan.

Kesetaraan gender di jenjang pendidikan dasar diharapkan telah tercapai pada tahun 2015, sedangkan progres yang lebih lambat terjadi pada jenjang pendidikan menengah. Sementara itu, anak perempuan cenderung tidak pernah sekolah (48 persen dibandingkan dengan 37 persen). Sebaliknya, anak laki-laki cenderung meninggalkan bangku sekolah (26 persen dibandingkan dengan 20 persen). Anak perempuan yang bersekolah cenderung mencapai kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki.

Tujuan 6. Kualitas pendidikan

Mengembangkan dan menjamin seluruh aspek mutu pendidikan sehingga dihasilkan *outcome* pendidikan yang dapat diukur dan diakui, terutama dalam hal baca tulis, angka, dan kemampuan dasar lain.

Rasio murid-guru menurun di jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang pendidikan menengah, rasio murid-guru di bawah 30:1.

Rencana strategis pembangunan pendidikan nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2010 telah mempertegas berbagai target pencapaian program pendidikan pada tahun 2014, diantaranya sebagai berikut:

- Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD sebesar 72,9 persen
- APK jenjang pendidikan SD/SDLB/Paket A sebesar 119,1 persen

- APK jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B sebesar 110 persen
- APK jenjang pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C sebesar 85 persen
- APK jenjang pendidikan PT dan PTA sebesar 30,00 persen
- APM jenjang pendidikan SD/SDLB/Paket A sebesar 96 persen
- APM jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B sebesar 76,8 persen

Indikator partisipasi sekolah selain digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah, juga dapat melihat apakah sasaran yang ditetapkan pemerintah tercapai. Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2014 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

4.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara perkembangan yang dialami anak pada usia dini dengan keberhasilan mereka dalam kehidupan selanjutnya. Misalnya, anak-anak yang hidup dalam lingkungan (baik di rumah maupun di KB atau TK) yang kaya interaksi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar akan terbiasa mendengarkan dan mengucapkan kata-kata dengan benar sehingga ketika mereka masuk sekolah, mereka sudah mempunyai modal untuk membaca (Kemdikbud, 2015).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai umur 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014). Berbagai studi menunjukkan manfaat dan pengembalian investasi dari kesiapan bersekolah, terkait dengan penurunan biaya pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan manusia, dan manfaat bagi masyarakat. Program-program pendidikan dan perkembangan anak usia dini yang efektif dapat menurunkan biaya pendidikan melalui peningkatan efisiensi internal pendidikan dasar: sedikit anak mengulang kelas (Unicef, 2012).

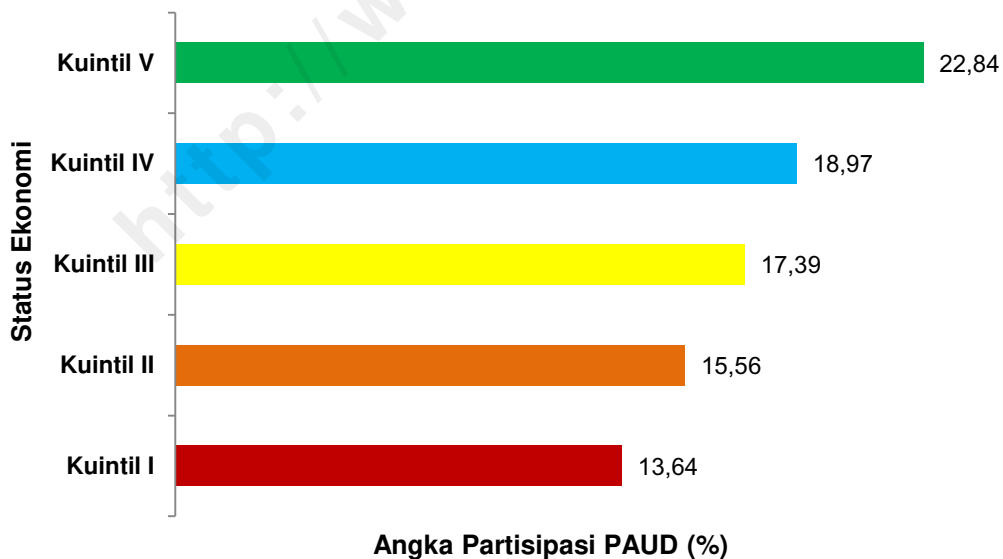
Tabel 4.1
Partisipasi Anak Umur 0-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	19,07	20,00	19,52
Perdesaan	14,84	15,23	15,03
Perkotaan + Perdesaan	16,92	17,57	17,24

Sumber: Susenas Kor, 2014

Tabel 4.1 memperlihatkan partisipasi anak umur 0-6 tahun yang mengikuti PAUD. Secara umum, partisipasi anak mengikuti PAUD masih relatif rendah, yaitu sebesar 17,24 persen. Apabila dilihat dari tipe daerah, persentase anak yang mengikuti PAUD lebih besar di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Sementara itu, partisipasi anak perempuan mengikuti PAUD lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 4.1
Partisipasi Anak Umur 0-6 Tahun yang Mengikuti PAUD Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014



Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber : Susenas Kor, 2014

Dilihat dari status ekonomi rumah tangga, partisipasi anak umur 0-6 tahun mengikuti PAUD meningkat seiring kenaikan status rumah tangga (Gambar 4.1). Persentase anak umur 0-6 tahun yang mengikuti PAUD pada rumah tangga dengan status ekonomi terendah (Kuintil 1) sebesar 13,54 persen. Sementara itu, persentase anak mengikuti PAUD pada rumah tangga dengan status ekonomi tertinggi (Kuintil V) sebesar 22,84 persen.

Indikator lain terkait PAUD yang disajikan dalam publikasi ini terdiri atas Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK PAUD ialah proporsi jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah, baik TK/BA/RA maupun pendidikan usia dini lainnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang bersesuaian. Sementara APM PAUD ialah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut. Kelompok umur yang digunakan adalah kelompok umur 3-5 tahun dan 3-6 tahun. Kelompok umur 3-5 tahun sesuai dengan yang ditetapkan UNESCO dalam penghitungan indikator pendidikan usia dini. Sementara kelompok umur 3-6 tahun sesuai dengan Renstra Kemdikbud.

Tabel 4.2 memperlihatkan APK PAUD untuk kelompok umur 3-5 tahun dan 3-6 tahun. APK untuk kelompok umur 3-5 tahun adalah sebesar 38,78 persen. Sementara itu, dilihat dari kelompok umur 3-6 tahun, partisipasi anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah sebesar 29,02 persen.

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Menurut
Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2014

Tipe Daerah	Kelompok Umur	
	3 - 5	3 - 6
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	43,94	32,95
Perdesaan	33,80	25,24
Perkotaan + Perdesaan	38,78	29,02

Sumber: Susenas Kor, 2014

Dilihat menurut tipe daerah, APK PAUD daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Akses dan kualitas pelayanan PAUD yang tidak merata serta pandangan orangtua yang menganggap tingginya biaya mengikuti PAUD menentukan perbedaan angka partisipasi anak yang mengikuti PAUD di daerah

perkotaan dan perdesaan. Mayoritas orangtua, khususnya yang tinggal di perdesaan, menganggap biaya mengikuti PAUD lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD untuk kelompok umur 3-6 tahun tidak memenuhi target Kemdikbud, baik di perkotaan maupun perdesaan. Target APK PAUD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemdikbud adalah sebesar 72,9 persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anak mengikuti PAUD masih tergolong rendah.

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Menurut
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	
	3 - 5	3 - 6
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	37,89	28,31
Perempuan	39,72	29,76
Laki-laki + Perempuan	38,78	29,02

Sumber: Susenas Kor, 2014

Tabel 4.3 memperlihatkan APK PAUD menurut jenis kelamin. Disparitas gender secara umum lebih rendah daripada disparitas berdasarkan tipe daerah. Pada semua kelompok umur, APK PAUD perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Sementara itu, Tabel 4.4 menunjukkan pola hubungan antara APK PAUD dan status ekonomi rumah tangganya. Semakin tinggi status ekonomi, semakin tinggi APK. Hal ini terjadi pada semua kelompok umur. Ketimpangan antara Kuintil I dan Kuintil V lebih besar daripada ketimpangan berdasarkan tipe daerah maupun gender. Faktor ekonomi cenderung lebih berperan dalam menentukan partisipasi seseorang mengikuti PAUD.

Penghitungan APK tidak mempertimbangkan kesesuaian umur penduduk yang mengikuti PAUD. Dengan demikian, APK pada kelompok umur 3-5 tahun dan 3-6 tahun bergantung pada banyaknya penduduk masing-masing kelompok umur tersebut. Kelompok umur 3-6 tahun yang cakupannya lebih besar selalu memiliki APK lebih kecil, baik dilihat dari tipe daerah, jenis kelamin, maupun status ekonomi.

Tabel 4.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kelompok Umur, 2014

Status Ekonomi	Kelompok Umur	
	3 - 5	3 - 6
(1)	(2)	(3)
Kuintil I	31,34	23,52
Kuintil II	35,72	26,33
Kuintil III	38,22	28,91
Kuintil IV	42,32	31,41
Kuintil V	50,43	38,16

Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas Kor, 2014

Angka Partisipasi Murni (APM) mempertimbangkan kesesuaian umur penduduk yang mengikuti pendidikan usia dini. Oleh karena itu, APM akan lebih kecil daripada APK. APM pada masing-masing kelompok umur menggambarkan partisipasi anak dalam rentang umur tersebut yang mengikuti PAUD.

Tabel 4.5
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2014

Tipe Daerah	Kelompok Umur	
	3 - 5	3 - 6
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	32,25	32,39
Perdesaan	25,13	24,83
Perkotaan + Perdesaan	28,62	28,54

Sumber: Susenas Kor, 2014

Tabel 4.5 memperlihatkan APM PAUD masing-masing kelompok umur menurut tipe daerah. APM PAUD daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini terjadi pada setiap kelompok umur. Tingginya mobilitas ibu rumah tangga di daerah perkotaan cenderung untuk mendorong mereka menitipkan anak mereka ke tempat yang juga menyediakan pendidikan untuk anak usia dini. Dengan demikian, anak mereka akan tetap berada dalam pengawasan.

Sementara itu, APM kelompok umur 3-5 tahun dan 3-6 tahun tampak tidak berbeda jauh. Hal ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Tabel 4.2, selisih APK dan APM kelompok umur 3-5 tahun relatif besar, yaitu sekitar 10 persen. Artinya, sekitar 10 persen anak yang mengikuti PAUD berumur kurang dari 3 tahun atau lebih dari 5 tahun. Sebaliknya, selisih APM dan APK kelompok umur 3-6 tahun relatif kecil.

Tabel 4.6
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Menurut
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014

Tipe Daerah	Kelompok Umur	
	3 - 5	3 - 6
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	27,43	27,92
Perempuan	29,89	29,19
Laki-laki + Perempuan	28,62	28,54

Sumber: Susenas Kor, 2014

Tabel 4.6 memperlihatkan APM PAUD menurut jenis kelamin. APM perempuan tidak jauh berbeda dengan APM laki-laki, baik pada kelompok umur 3-5 tahun maupun 3-6 tahun. Hal ini memperlihatkan adanya kesetaraan gender pada semua kelompok umur.

Tabel 4.7
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Menurut Status
Ekonomi Rumah Tangga dan Kelompok Umur, 2014

Status Ekonomi	Kelompok Umur	
	3 - 5	3 - 6
(1)	(2)	(3)
Kuintil I	22,27	23,12
Kuintil II	25,64	25,93
Kuintil III	28,42	28,39
Kuintil IV	31,36	31,06
Kuintil V	39,04	37,34

Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas Kor, 2014

Sama seperti APK, Tabel 4.7 menunjukkan pola hubungan yang searah antara APM PAUD dan status ekonomi rumah tangganya. Semakin tinggi status ekonomi, semakin tinggi APM. Hal ini terjadi pada semua kelompok umur. Ketimpangan antara status ekonomi terendah (Kuintil I) dan status ekonomi tertinggi (Kuintil V) lebih besar daripada ketimpangan berdasarkan tipe daerah maupun gender. Hal ini semakin menguatkan bahwa partisipasi seseorang mengikuti PAUD cenderung ditentukan oleh faktor ekonomi.

4.2 Partisipasi Sekolah

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk peningkatan SDM tersebut. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Untuk mengetahui keaktifan penduduk dalam pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah ialah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kementerian Agama (Kemendikbud), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Tabel 4.8 menunjukkan penduduk umur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 7,53 persen, penduduk yang masih bersekolah sebesar 26,34 persen, dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 66,13 persen. Dilihat menurut tipe daerah, partisipasi sekolah penduduk umur 5 tahun ke atas yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk umur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah yang relatif lebih kecil, sedangkan persentase penduduk yang

masih bersekolah relatif lebih besar. Akses pendidikan yang terjangkau untuk masyarakat di perkotaan menjadi penyebab utama kesenjangan ini.

Tabel 4.8
Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah, 2014

Tipe Daerah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	5,72	26,66	67,62
Perdesaan	9,36	26,02	64,63
Perkotaan+Perdesaan	7,53	26,34	66,13

Sumber: Susenas Kor, 2014

Sementara itu, Tabel 4.9 memperlihatkan partisipasi sekolah menurut jenis kelamin. Kesenjangan akses pendidikan terhadap jenis kelamin ditunjukkan melalui persentase penduduk perempuan umur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah yang lebih besar dari laki-laki, yaitu sebesar 9,25 persen. Sebaliknya, persentase penduduk laki-laki umur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah lebih besar dibandingkan dengan persentase perempuan.

Tabel 4.9
Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2014

Jenis Kelamin	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	5,83	26,81	67,36
Perempuan	9,25	25,86	64,89
Laki-laki+Perempuan	7,53	26,34	66,13

Sumber: Susenas Kor, 2014

Faktor demografis yang berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan adalah umur. Semakin tinggi kelompok umur sekolah, semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa penduduk kelompok umur 5-6 tahun yang masih bersekolah adalah sebesar 26,24 persen, kelompok umur 7-12 tahun adalah sebesar 98,92 persen, kelompok umur 13 - 15 tahun sebesar 94,44

persen, kelompok umur 16 - 18 tahun sebesar 70,31 persen, dan pada kelompok umur 19-24 tahun sebesar 22,82 persen. Persentase terbesar adalah pada kelompok umur 7-12 dan 13-15 tahun. Kelompok umur tersebut adalah kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama. Sementara itu, persentase penduduk umur 5-6 tahun yang masih bersekolah lebih besar dibandingkan penduduk umur 19-24 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa partisipasi sekolah anak usia dini lebih tinggi dibandingkan remaja dewasa.

Tabel 4.10
Persentase Penduduk Umur 5 – 24 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
5 – 6	73,76	26,24	0,00
7 – 12	0,87	98,92	0,21
13 – 15	0,67	94,44	4,89
16 – 18	0,77	70,31	28,93
19 – 24	0,93	22,82	76,24

Sumber: Susenas Kor, 2014

Di sisi lain, masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada rentang umur 7-24 tahun. Meskipun angkanya relatif kecil, pada kelompok umur 7-12 tahun masih terdapat penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi. Angka tersebut meningkat seiring pertambahan umur. Angka terbesar yaitu pada kelompok umur 16-18 dan 19-24 tahun. Kelompok umur tersebut adalah kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penduduk umur 5-24 tahun cenderung putus sekolah pada jenjang SMA/ sederajat dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

4.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) ialah persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk umur tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di

sektor pendidikan, seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung oleh setiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk umur sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Tabel 4.11 memperlihatkan APS penduduk umur 7-24 tahun. APS terbesar yaitu pada kelompok umur 7-12 tahun yang merupakan kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun tercatat sebesar 98,92 persen. Angka yang hampir mencapai 100 persen tersebut menunjukkan bahwa hampir semua anak umur 7-12 tahun sudah bersekolah. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah sasaran strategis pemerintah yang mengharapkan APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,9 persen. Sama halnya dengan kelompok umur 13-15 tahun. Target yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 96 persen, sedangkan APS kelompok umur 13-15 tahun berdasarkan Tabel 4.11 adalah sebesar 94,4 persen. Sementara itu, APS untuk kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat relatif kecil mengingat hanya sekitar 70 persen anak umur 16-18 tahun melanjutkan ke sekolah menengah.

Tabel 4.11
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur, 2014

Tipe Daerah	Kelompok Umur			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	99,42	96,48	74,90	28,01
Perdesaan	98,47	92,62	65,43	16,38
Perkotaan + Perdesaan	98,92	94,44	70,31	22,82

Sumber: Susenas Kor, 2014

Dilihat menurut tipe daerah, APS untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Selisih APS perkotaan dan perdesaan meningkat seiring bertambahnya umur. Perbedaan terbesar yaitu pada kelompok umur 19-24 tahun yang merupakan umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tingkat Perguruan Tinggi (PT). Ketersediaan perguruan tinggi yang masih sedikit serta biaya yang relatif tinggi kerap kali menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat

perguruan tinggi. Selain itu, faktor ekonomi juga mendorong seseorang yang berumur 19-24 tahun untuk berhenti sekolah dan lebih memilih bekerja.

Tabel 4.12
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	98,82	93,66	69,91	22,98
Perempuan	99,02	95,27	70,73	22,66
Laki-laki + Perempuan	98,92	94,44	70,31	22,82

Sumber: Susenas Kor, 2014

Dilihat dari jenis kelamin, ketimpangan yang terjadi secara umum lebih rendah daripada ketimpangan berdasarkan tipe daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.12. Pada kelompok umur 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun, APS perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APS laki-laki. Sementara untuk kelompok umur 19-24 tahun, APS laki-laki dan perempuan relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender untuk semua jenjang pendidikan sudah terwujud.

Partisipasi sekolah seseorang sedikit banyak ditentukan oleh status ekonomi rumah tangganya. Rumah tangga dengan status ekonomi tinggi cenderung menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan status ekonomi yang lebih rendah. Tingginya biaya pendidikan mendorong seseorang untuk meninggalkan bangku sekolah. Selain itu, biaya hidup (*cost of living*) yang tinggi juga menuntut seseorang lebih memilih kesempatan untuk bekerja.

Tabel 4.13 memperlihatkan pola hubungan antara status ekonomi dan APS. Semakin tinggi status ekonomi, semakin besar APS. Hal ini semakin kuat membuktikan bahwa partisipasi sekolah dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ketimpangan antar strata ekonomi semakin melebar pada kelompok umur 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun. Untuk kelompok umur 7-12 dan 13-15 tahun, APS pada setiap strata ekonomi tidak jauh berbeda. Program pemerintah yang membebaskan biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP berhasil meningkatkan APS kelompok umur yang bersesuaian dengan kedua jenjang tersebut.

Tabel 4.13
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Status Ekonomi Rumah
Tangga dan Kelompok Umur, 2014

Status Ekonomi	Kelompok Umur			
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuintil I	98,09	90,01	57,16	12,87
Kuintil II	98,81	93,45	65,88	15,25
Kuintil III	99,09	95,48	71,69	17,34
Kuintil IV	99,44	96,89	75,65	23,29
Kuintil V	99,54	98,17	81,18	39,53

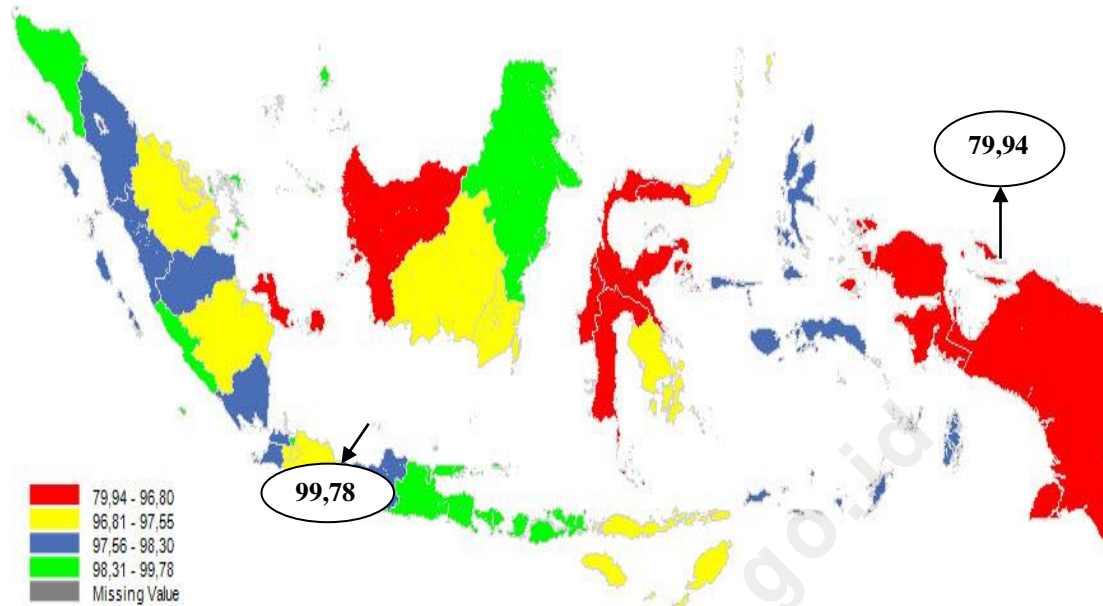
Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas Kor, 2014

Sementara itu, untuk kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan PT, APS pada setiap status ekonomi tampak berbeda. Bahkan hampir sebagian penduduk umur 16-18 tahun pada status ekonomi terendah tidak bersekolah. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok umur 19-24 tahun. Penduduk umur 19-24 tahun pada status ekonomi terendah yang masih/ sedang mengenyam pendidikan tercatat hanya sebesar 12,87 persen. Penduduk umur 16-24 tahun yang merupakan umur produktif, cenderung terdorong untuk meninggalkan bangku sekolah karena bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, faktor ekonomi tidak selalu menentukan partisipasi sekolah seseorang. Dapat dilihat pada status ekonomi tinggi, APS kelompok umur 16-18 tahun belum mencapai 90 persen, tepatnya sebesar 81,18 persen. Sementara itu, APS untuk kelompok umur 19-24 tahun tercatat sebesar 39,53 persen.

Gambar 4.2 memperlihatkan penyebaran angka partisipasi sekolah penduduk umur sekolah dasar (7-15 tahun) di seluruh provinsi di Indonesia. Area yang diberi warna merah dan kuning merupakan provinsi dengan APS yang lebih rendah dari angka nasional. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki APS lebih dari 95 persen. APS tertinggi terdapat di Provinsi Yogyakarta dengan angka sebesar 99,78 persen. Sebaliknya, partisipasi penduduk umur sekolah dasar di Papua terendah se-Indonesia, yaitu sebesar 79,94 persen. Selain jauh dari angka nasional, ketimpangan APS antara Papua dan provinsi lainnya juga cukup tinggi.

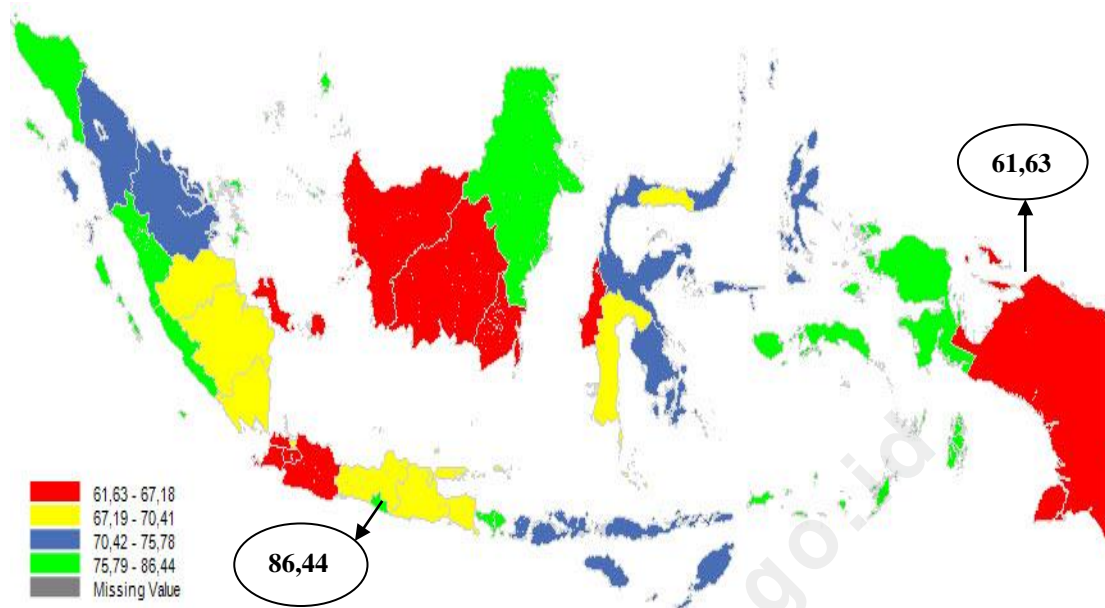
Gambar 4.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-15 Tahun Menurut Provinsi
2014



Sumber: Susenas Kor, 2014

Berbeda dengan APS kelompok umur sekolah dasar, sebagian besar provinsi yang nilai APS-nya di bawah angka nasional terletak di kawasan barat Indonesia. Provinsi tersebut antara lain Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Bahkan, Jawa Barat menempati urutan kedua provinsi dengan APS terendah (65,48 persen). Sebaliknya, APS provinsi yang termasuk Kawasan Timur Indonesia, seperti Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, melebihi APS nasional. Sementara itu, posisi pertama APS terendah masih ditempati oleh Papua. Meskipun demikian, selisih APS kelompok umur 16-18 tahun dengan angka nasional lebih kecil dibandingkan selisih pada kelompok umur 7-15 tahun. Di pihak lain, provinsi Yogyakarta menempati urutan pertama APS tertinggi, baik untuk kelompok umur sekolah dasar maupun sekolah menengah. Hal ini semakin menguatkan citra provinsi Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar.

Gambar 4.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 16-18 Tahun Menurut Provinsi 2014



Sumber: Susenas Kor, 2014

4.2.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) ialah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk umur sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Misalnya, APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas umur sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya siswa yang umurnya belum mencapai umur sekolah dengan jenjang pendidikan yang bersesuaian, siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 4.14 memperlihatkan APK jenjang pendidikan SD sampai PT. APK untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah sebesar 108,78 persen, APK SMP/MTs sebesar 88,43 persen, APK SMA/MA sebesar 73,95 persen, dan APK untuk jenjang pendidikan PT sebesar 25,76 persen. APK pada jenjang pendidikan SD/MI melebihi angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa umur anak yang masih mengenyam pendidikan

dasar berada di luar range 7-12 tahun. Orang tua terkadang mendaftarkan anak yang belum mencapai umur 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu. Selain itu, anak yang mengikuti pendidikan usia dini pada saat umurnya baru 5 tahun, biasanya hanya selama satu tahun. Orang tua cenderung memilih untuk mendaftarkan anaknya lanjut ke sekolah dasar dibandingkan berlama-lama mengenyam pendidikan dini untuk anaknya.

Tabel 4.14
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, 2014

Tipe Daerah	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	107,80	91,15	79,20	32,73
Perdesaan	109,84	86,38	69,02	17,12
Perkotaan + Perdesaan	108,87	88,63	74,26	25,76

Sumber: Susenas Kor, 2014

Tabel 4.14 juga menunjukkan bahwa APK untuk semua jenjang pendidikan masih jauh dari target yang tercantum dalam Renstra Kemdikbud 2014. APK SD/MI/Paket A tercatat sebesar 108,87 persen, sedangkan target yang diharapkan adalah sebesar 119,1 persen pada tahun 2014. APK SMP/MTs/Paket B yang ditargetkan mencapai angka 110 persen pada tahun 2014, tercatat hanya sebesar 88,63 persen. APK SMA/MA/Paket C sebesar 74,26 persen, sedangkan target yang diharapkan 85 persen. Sementara itu, APK jenjang PT juga masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Kemdikbud 2014, yaitu 30,00 persen untuk penduduk umur 19-23 tahun. Berdasarkan hasil Susenas 2014, APK PT tercatat sebesar 25,76 persen untuk penduduk umur 19-24 tahun.

Dilihat menurut tipe daerah, APK untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Selisih APK perkotaan dan perdesaan meningkat seiring kenaikan jenjang berikutnya. Perbedaan terbesar yaitu pada jenjang pendidikan tingkat Perguruan Tinggi (PT). APK penduduk perkotaan hampir dua kali lipat APK perdesaan. Hal ini semakin menguatkan bahwa pembangunan sarana pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi masih belum merata. Ketersediaan perguruan tinggi masih terpusat di daerah perkotaan.

Tabel 4.15
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	109,37	87,26	74,03	25,24
Perempuan	108,35	90,08	74,50	26,30
Laki-laki + Perempuan	108,87	88,63	74,26	25,76

Sumber: Susenas Kor, 2014

Sementara itu, dilihat dari jenis kelamin, APK laki-laki dan perempuan relative tidak berbeda jauh (Tabel 4.15). Disparitas gender secara umum lebih rendah daripada disparitas berdasarkan tipe daerah. Selisih APK terbesar terdapat pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B.

Tabel 4.16 memperlihatkan pola hubungan searah antara status ekonomi dan APK. Semakin tinggi status ekonomi, semakin besar APK. Namun demikian, pola hubungan tersebut tidak tampak pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. APK SD/MI/Paket A tidak berbeda jauh antar tingkatan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya program pemerintah yang membebaskan biaya pendidikan sekolah dasar, kesenjangan ekonomi pada tingkat pendidikan dasar dapat ditekan.

Tabel 4.16
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Jenjang Pendidikan, 2014

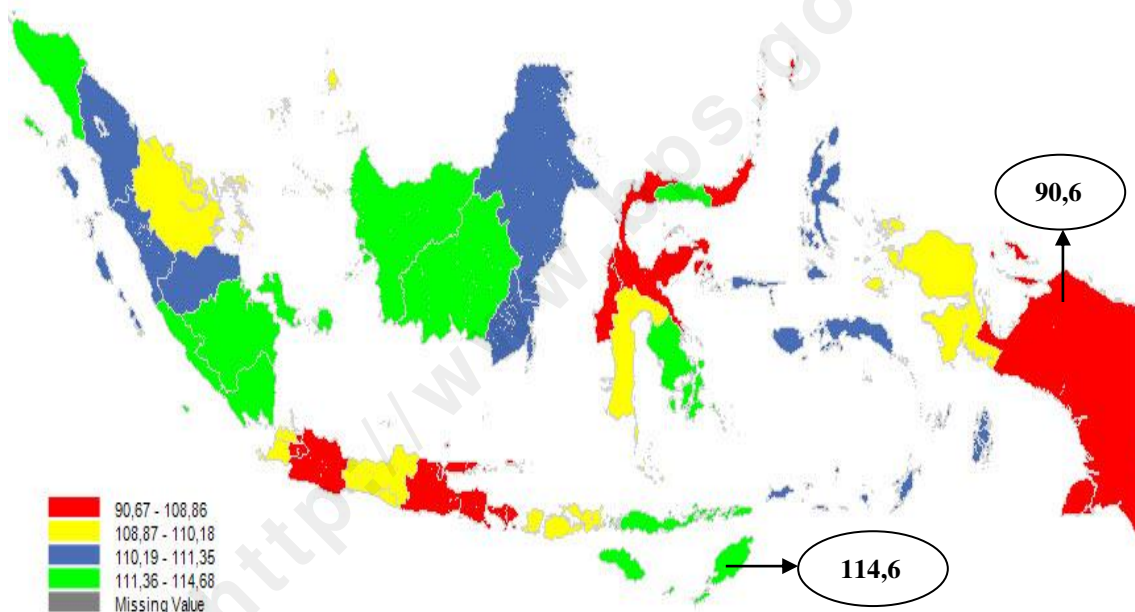
Status Ekonomi	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuintil I	109,97	82,30	58,81	11,72
Kuintil II	109,46	88,04	68,71	14,92
Kuintil III	108,23	91,44	77,35	17,73
Kuintil IV	109,01	91,08	82,42	26,25
Kuintil V	107,01	92,29	83,77	49,85

Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas Kor, 2014

Gambar 4.4 memperlihatkan APK SD/MI/Paket A menurut provinsi di Indonesia. Area yang diberi warna merah merupakan provinsi dengan APK di bawah angka nasional. Hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah mencapai APK SD/MI/Paket A melebihi angka 100 persen. Hal ini menunjukkan pembangunan pendidikan jenjang SD/ sederajat sudah cukup merata. Bahkan sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki APK jenjang SD/MI/Paket A yang lebih besar dari angka nasional. Selain itu, APK di atas 100 persen juga menunjukkan banyaknya anak-anak yang bersekolah di SD/MI/Paket A yang umurnya belum mencapai 7 tahun atau umurnya sudah lebih dari 12 tahun. Hal tersebut terjadi di semua provinsi di Indonesia, kecuali Papua.

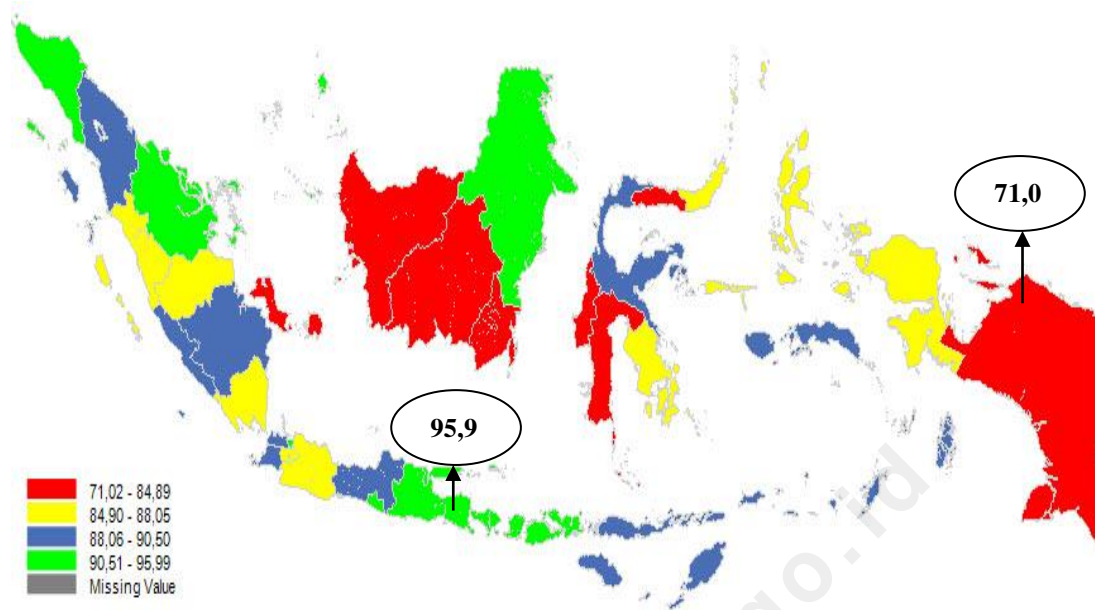
Gambar 4.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Menurut Provinsi 2014



Sumber: Susenas Kor, 2014

Pemerataan pendidikan jenjang SD/ sederajat di hampir seluruh wilayah Indonesia ternyata belum cukup berhasil di provinsi Papua. APK jenjang SD/MI/Paket A bahkan belum mencapai angka 100 persen (90,67 persen). Provinsi paling timur tersebut selalu menempati posisi terendah baik untuk APK maupun angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah menjadikan pembangunan pendidikan di wilayah Papua sebagai prioritas demi tercapainya program wajib belajar sembilan tahun untuk seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 4.5
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Menurut Provinsi, 2014



Sumber: Susenas Kor, 2014

Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun dapat terlihat dari APK jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pada jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B. Program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar mulai ditetapkan pemerintah sejak tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.

Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia ditunjukkan dengan adanya wacana peningkatan wajib belajar yang sebelumnya sembilan tahun menjadi 12 tahun. Rintisan wajib belajar 12 tahun akan dimulai tahun 2016 mendatang (tempo.co.id). Akan tetapi, kesiapan masyarakat terhadap program tersebut tampaknya masih jauh. Hal itu ditunjukkan melalui Gambar 4.5. APK SMP/Mts/Paket B dari seluruh provinsi di Indonesia tidak ada yang mencapai angka 100 persen. APK tertinggi baru mencapai 95,99 persen yang ditempati oleh Provinsi Bali. Sementara itu, posisi paling buncit masih diduduki oleh provinsi Papua dengan APK sebesar 71,02 persen.

4.2.3 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) ialah proporsi penduduk kelompok umur sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur sekolah tersebut.

APM menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat tertentu yang sesuai dengan umurnya. APM juga dapat melihat penduduk umur sekolah yang bersekolah tepat waktu. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar umur sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 4.17 memperlihatkan APM jenjang pendidikan SD sampai PT. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Akan tetapi, APM jenjang pendidikan menengah (SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B) sudah memenuhi target yang tercantum dalam Renstra Kemdikbud 2014. Target APM terpenuhi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. APM SD/MI/Paket A yang ditargetkan mencapai angka 96 persen pada tahun 2014, tercatat sebesar 96,45 persen. APM SMP/MTs/Paket B sebesar 77,53 persen telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,8 persen. Ketercapaian target tersebut terkait tujuan strategis pembangunan pendidikan, yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang diimplementasikan pada program wajib belajar sembilan tahun.

Tabel 4.17
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, 2014

Tipe Daerah	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	96,73	80,71	63,91	25,63
Perdesaan	96,20	74,68	54,50	13,42
Perkotaan + Perdesaan	96,45	77,53	59,35	20,18

Sumber: Susenas Kor, 2014

Dilihat menurut tipe daerah, APM untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Selisih APM perkotaan dan perdesaan meningkat seiring kenaikan ke jenjang berikutnya. Perbedaan terbesar yaitu pada jenjang pendidikan tingkat Perguruan Tinggi (PT). APM penduduk perkotaan hampir dua kali lipat APM perdesaan. Hal ini sejalan dengan APK PT daerah perkotaan yang juga hampir mencapai dua kali lipat perdesaan (Tabel 4.14).

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, APM akan selalu lebih kecil dari APK. Hal ini terjadi pada semua jenjang pendidikan. Apabila dibandingkan dengan Tabel 4.14, selisih APK dan APM pada tingkat pendidikan SD/ sederajat berkisar 12 persen. Artinya, penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI atau yang sedang mengambil Paket A, sekitar 12 persen dari mereka berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Sekitar 11 persen penduduk yang umurnya di luar kelompok umur SMP/ sederajat (13-15 tahun) sedang mengenyam pendidikan di bangku SMP/MTs/ Paket B atau sedang mengambil program Paket B. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah atas, hampir 15 persen penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut berumur kurang dari 16 tahun atau lebih dari 18 tahun. Angka yang relatif kecil justru pada jenjang PT. Sekitar 5 persen penduduk yang bersekolah di perguruan tinggi berumur di luar kelompok umur yang bersesuaian (19-24 tahun). Ketidaksesuaian umur tersebut dapat disebabkan karena keterlambatan masuk sekolah atau dibolehkannya mengulang kelas.

Tabel 4.18
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	96,60	75,87	58,78	19,78
Perempuan	96,29	79,28	59,95	20,60
Laki-laki + Perempuan	96,45	77,53	59,35	20,18

Sumber: Susenas Kor, 2014

Sementara itu, disparitas gender secara umum lebih rendah daripada disparitas berdasarkan tipe daerah (Tabel 4.18). Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ Paket B, SMA/MA/ Paket C, dan PT, APM perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Akan tetapi, untuk jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A, APM laki-laki dan perempuan relatif tidak berbeda jauh.

Dilihat dari status ekonomi rumah tangga, pola hubungan yang terbentuk antara status ekonomi dan APM sama seperti pada APS dan APK (Tabel 4.19). Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, semakin besar APM. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk dengan status ekonomi tinggi cenderung lebih berpeluang untuk bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya.

Tabel 4.19
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Jenjang Pendidikan, 2014

Status Ekonomi	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuintil I	96,28	71,13	45,26	9,79
Kuintil II	96,72	76,85	55,29	12,22
Kuintil III	96,48	79,69	62,32	14,44
Kuintil IV	96,77	80,41	66,28	20,53
Kuintil V	95,89	81,74	67,29	37,80

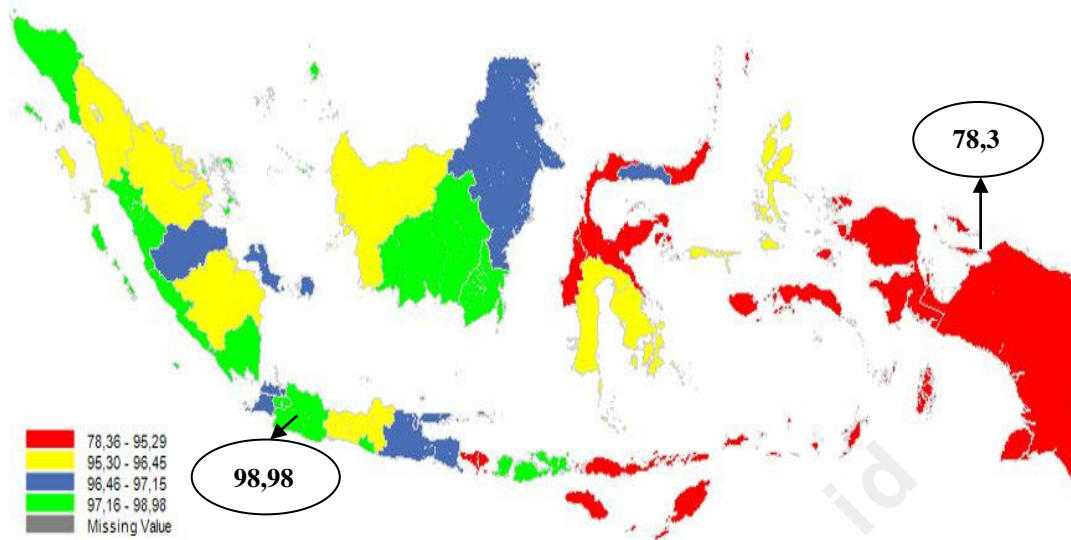
Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas Kor, 2014

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/ sederajat relatif sama antar kuintil. Artinya, keputusan seseorang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya tidak dapat ditentukan melalui status ekonominya. Sementara itu, ketimpangan berdasarkan status ekonomi semakin meningkat seiring kenaikan jenjang pendidikan. Ketimpangan terbesar pada jenjang pendidikan PT yang menunjukkan bahwa penduduk umur 19-24 tahun dengan status ekonomi tinggi (Kuintil IV dan V) lebih berpeluang untuk bersekolah di perguruan tinggi dibandingkan dengan status ekonomi menengah ke bawah.

Gambar 4.6 memperlihatkan penyebaran APM SD/MI/Paket A di Indonesia. Sebagian provinsi masih memiliki APM SD/MI/Paket A yang lebih rendah dari angka nasional. Hal ini ditunjukkan dari area yang berwarna merah dan kuning. Namun demikian, sebagian besar provinsi di Indonesia sudah mencapai target Renstra Kemdikbud 2014. APM SD/MI provinsi-provinsi di Indonesia telah melebihi angka 90 persen, kecuali Papua. Hal ini semakin menguatkan pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan pendidikan di Papua. Sementara itu, Yogyakarta menempati urutan pertama provinsi dengan APM SD/ sederajat tertinggi di Indonesia. Sebelumnya juga telah dipaparkan bahwa Yogyakarta merupakan provinsi dengan APS tertinggi baik untuk kelompok umur 7-15 tahun maupun 16-18 tahun.

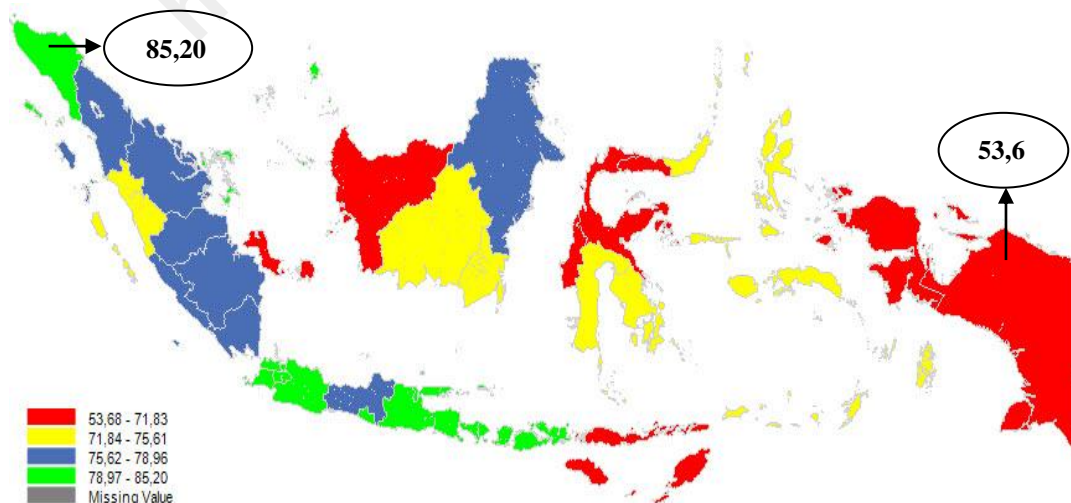
Gambar 4.6
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Menurut Provinsi, 2014



Sumber: Susenas Kor, 2014

Gambar 4.7 memperlihatkan APM SMP/MTs/Paket B provinsi di Indonesia. Sebagian besar provinsi masih memiliki APM di bawah angka nasional. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya area yang berwarna merah dan kuning pada gambar. Sementara itu, area yang berwarna biru, baik biru muda maupun biru gelap, merata menyelimuti Pulau Jawa dan hampir seluruh Sumatera. Area yang berwarna biru tersebut merupakan wilayah dengan APM yang relatif tinggi. Dengan kata lain, partisipasi penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera untuk bersekolah tepat waktu atau bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya, relatif tinggi.

Gambar 4.7
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Menurut Provinsi, 2014



Sumber: Susenas Kor, 2014

Sementara itu, sebagian besar provinsi di Indonesia belum mencapai target yang ditetapkan Kemdikbud, yaitu 76,8 persen. Papua masih menduduki posisi terbawah dengan APM sebesar 53,68 persen. Posisi teratas ditempati oleh Provinsi Aceh dengan 85,20 persen. Provinsi Aceh memiliki pola APS, APK, dan APM yang bagus. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 hingga Gambar 4.7. Wilayah Aceh selalu berwarna biru tua di semua gambar.

4.2.4 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)

Salah satu tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) adalah terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam aspek pendidikan, kesetaraan gender mendukung adanya pemenuhan hak memperoleh pendidikan dasar, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat disparitas gender dalam aspek pendidikan adalah rasio Angka Partisipasi Murni (Rasio APM). Rasio APM merupakan persentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. Nilai rasio APM yang lebih dari 100 persen menunjukkan APM perempuan yang lebih besar dari APM laki-laki. Artinya, kesetaraan gender sudah terwujud.

Tabel 4.20
Rasio APM menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan 2014

Tipe Daerah	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	99,42	103,38	100,39	102,91
Perdesaan	99,92	105,50	103,38	106,93
Perkotaan + Perdesaan	99,68	104,49	101,98	104,13

Sumber: Susenas Kor, 2014

Sebagai bentuk upaya mewujudkan pembangunan pendidikan yang berkesetaraan gender, pemerintah menetapkan target rasio APM untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat masing-masing sebesar 98 persen pada tahun 2014. Target rasio APM yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan menengah adalah sebesar 95 persen, sedangkan untuk jenjang PT sebesar 104 persen. Tabel 4.20 memperlihatkan rasio APM pada masing-masing jenjang pendidikan. Rasio APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket, yaitu sebesar 99,68 persen. Sementara itu, rasio APM jenjang SMP/ sederajat sebesar 104,49 persen, untuk

jenjang SMA/ sederajat 101,98 persen, dan untuk jenjang PT sebesar 104,13 persen. Dengan demikian, target pemerintah terkait kesenjangan gender telah tercapai pada semua jenjang pendidikan.

Rasio APM SD/MI/Paket A yang belum mencapai angka 100 persen terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Artinya, penduduk laki-laki yang bersekolah tepat waktu di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A lebih besar di bandingkan penduduk perempuan. Akan tetapi, penduduk laki-laki, khususnya yang tinggal di perdesaan, cenderung meninggalkan bangku sekolah ketika menginjak usia yang cukup untuk bekerja. Hal ini dapat dilihat melalui besaran rasio APM pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SD/MI/Paket A. Rasio APM untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT sudah melebihi 100 persen. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SD/ sederajat, perempuan lebih cenderung bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 4.21
Rasio APM menurut Status Ekonomi dan Jenjang Pendidikan 2014

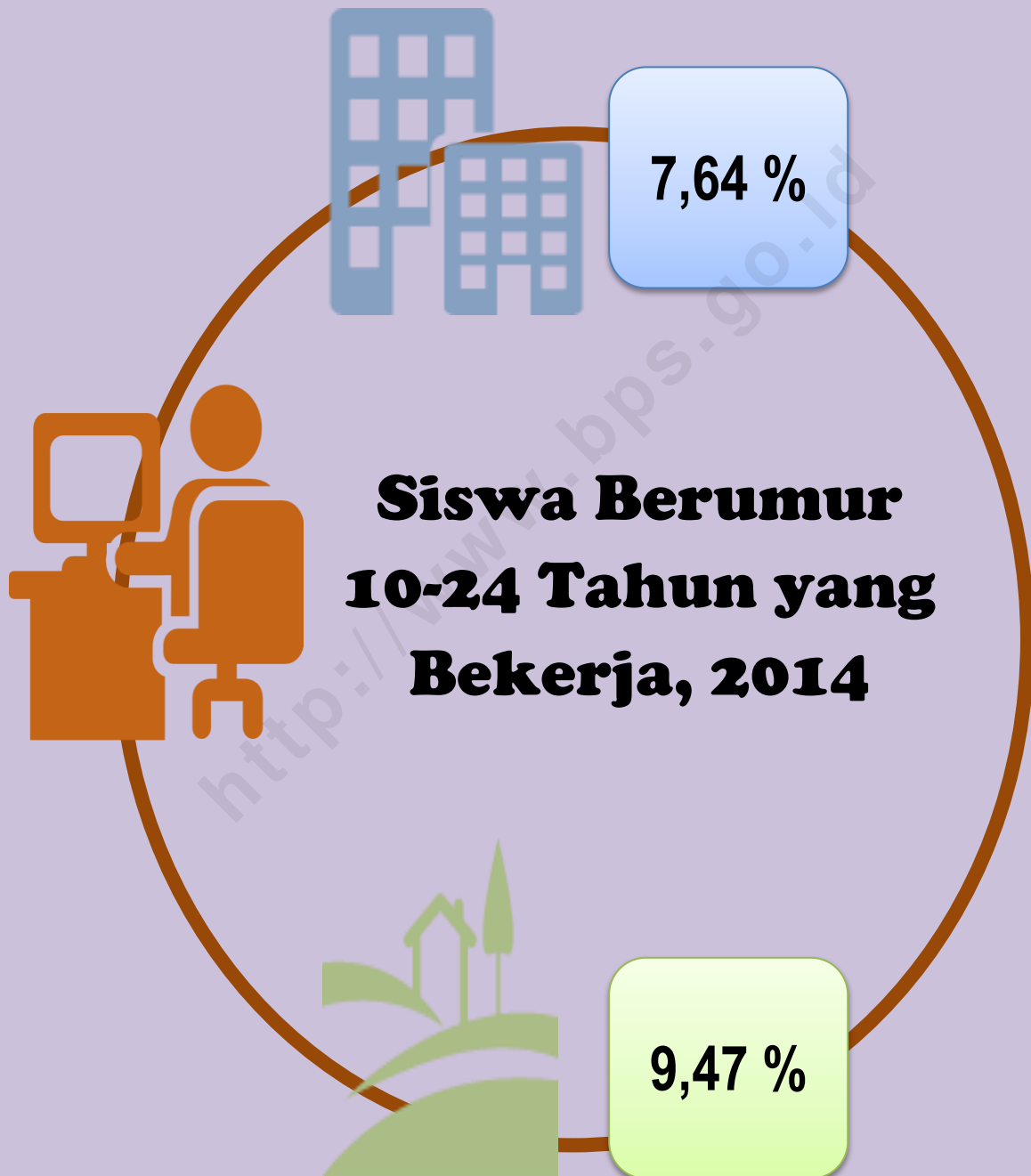
Status Ekonomi	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/MA/ Paket C	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuintil I	100,17	108,58	106,54	100,56
Kuintil II	100,12	104,73	104,86	110,75
Kuintil III	99,34	104,63	105,87	117,50
Kuintil IV	99,57	104,82	101,51	113,14
Kuintil V	98,86	98,79	92,45	97,11

Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas Kor, 2014

Dilihat dari status ekonomi rumah tangga, rasio APM untuk semua jenjang pendidikan pada status ekonomi tertinggi (Kuintil V) tidak mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki dari rumah tangga dengan status ekonomi tertinggi lebih berpeluang untuk bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya dibandingkan dengan perempuan. Di sisi lain, rasio APM pada status ekonomi rendah (Kuintil I dan Kuintil II) sudah melebihi angka 100 persen untuk semua jenjang pendidikan. Penduduk perempuan dari rumah tangga dengan status ekonomi rendah cenderung bersekolah di jenjang pendidikan yang bersesuaian dengan umurnya.

Bab V KEGIATAN DI LUAR JAM SEKOLAH



Faktor determinasi dari kualitas pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya yakni berupa kegiatan pemanfaatan waktu luang di luar jam sekolah yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan pemanfaatan waktu luang di luar jam sekolah tentu dapat memberikan dampak yang positif jika diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung proses belajar dan memberikan nilai tambah bagi pengembangan pendidikan karena pada hakikatnya kegiatan pemanfaatan waktu luang di luar jam sekolah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari di bangku sekolah (Nurgiantoro, 2005). Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua kegiatan waktu luang di luar jam sekolah mendukung proses capaian prestasi belajar siswa di sekolah.

Hasil Susenas 2014 berikut memperlihatkan hasil penghitungan dari berbagai bentuk kegiatan pemanfaatan waktu luang di luar jam sekolah yang dilakukan oleh siswa seperti mengakses internet, bekerja dan mengurus rumah tangga.

5.1. Akses Terhadap Internet

Selama hampir 2 dekade, keberadaan internet telah banyak berperan dalam sendi kehidupan manusia dan kecanggihan teknologi komputer yang berkembang saat ini semakin mendukung peran tersebut sehingga teknologi komputer dan internet dimanfaatkan pada berbagai bidang kehidupan.

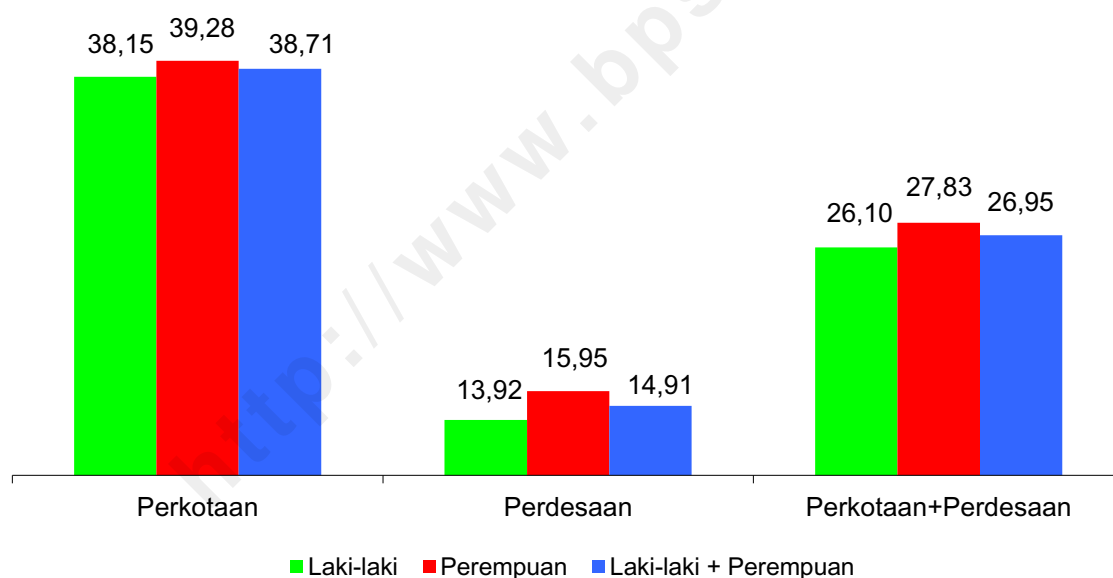
Dalam bidang pendidikan, pemanfaatan internet sudah lama digunakan oleh negara-negara maju di dunia dan maraknya pemanfaatan internet tersebut turut berimbas pula pada dunia pendidikan di Indonesia yang juga mulai menerapkan pemanfaatan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran pada sistem kurikulumnya. Segala keunggulan teknologi melalui penerapan internet diharapkan bisa memacu dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Menurut Maryono dan Istiana (2007), pemanfaatan teknologi khususnya komputer dan internet pada bidang pendidikan memiliki banyak manfaat. Para siswa dapat memperoleh bahan-bahan pembelajaran melalui *e-library* atau *e-book* untuk memperoleh koleksi perpustakaan berupa buku, modul, jurnal atau surat kabar. Kehadiran internet juga memungkinkan dilakukannya pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) sehingga para siswa tidak lagi terikat pada ruang dan waktu di ruang kelas. Materi bisa diperoleh melalui komputer di rumah yang tersambung dengan internet atau melalui warnet-warnet yang memberikan layanan akses internet. Bahkan harapan

kedepannya, para siswa dapat melakukan komunikasi dengan guru melalui fasilitas *e-mail* atau bertatap muka melalui fasilitas *teleconference*.

Terlepas dari berbagai bentuk penerapan pemanfaatan internet pada kurikulum pendidikan di sekolah, teknologi internet disadari telah populer dan menjadi primadona di kalangan siswa. Berdasarkan data Susenas tahun 2014, kegiatan mengakses internet yang dilakukan oleh siswa berumur 5-24 tahun relatif tinggi. Secara keseluruhan dari Gambar 5.1 di bawah ini, tampak besarnya persentase siswa berumur 5-24 tahun yang mengakses internet tercatat mencapai 26,95 persen dengan persentase di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah perdesaan, yaitu masing-masing tercatat sebesar 38,71 persen dan 14,91 persen. Tingginya persentase pada daerah perkotaan dinilai wajar karena ketersediaan akses fasilitas internet di daerah perkotaan cenderung lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan.

Gambar 5.1
Persentase Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Jenis kelamin dan Tipe Daerah, 2014



Sumber: Susenas 2014

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, secara umum diketahui bahwa siswa perempuan berumur 5-24 tahun (27,83 persen) lebih banyak mengakses internet dibanding siswa laki-laki (26,10 persen). Kemudian jika dirinci menurut tipe daerah, persentase siswa laki-laki dan perempuan yang mengakses internet di daerah perkotaan tercatat sebesar 38,15 persen dan 39,28 persen. Sementara pada daerah perdesaan tercatat sebesar 13,92 persen dan 15,95 persen.

Seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang sedang diikuti oleh siswa, kebutuhan untuk mengakses internet juga semakin meningkat. Dari Tabel 5.1, siswa berumur 5-24 tahun yang duduk pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi tercatat mengakses internet sebesar 63,84 persen kemudian diikuti oleh siswa yang duduk di jenjang SM/ sederajat sebesar 62,84 persen. Sementara jika dilihat berdasarkan tipe daerah tampak terjadi kondisi yang berbeda. Persentase siswa umur 5-24 tahun yang mengakses internet pada jenjang SM/ sederajat lebih tinggi dibanding jenjang perguruan tinggi. Untuk daerah perdesaan, persentase siswa yang mengakses internet pada jenjang perguruan tinggi dan SM/ sederajat berturut-turut tercatat sebesar 38,59 persen dan 48,55 persen sedangkan pada daerah perkotaan tercatat sebesar 74,38 persen dan 74,53 persen.

Tabel 5.1
Persentase Siswa Berumur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)				
Laki-laki	13,03	52,63	72,73	73,59
Perempuan	11,32	55,27	76,39	75,15
L+P	12,20	53,94	74,53	74,38
Perdesaan (D)				
Laki-laki	1,64	21,41	46,12	37,15
Perempuan	1,92	24,90	51,14	39,95
L+P	1,77	23,13	48,55	38,59
K + D				
Laki-laki	6,96	36,48	60,65	62,91
Perempuan	6,35	39,72	65,14	64,73
L+P	6,66	38,08	62,84	63,84

Sumber: Susenas 2014

Distribusi siswa berumur 5-24 tahun yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir menurut media/lokasi dan tipe daerah disajikan pada Tabel 5.2. Secara umum ditunjukkan bahwa siswa yang mengakses internet lebih banyak dilakukan melalui *handphone* dibanding melalui media/lokasi lainnya. Persentase siswa yang mengakses internet melalui *handphone* tercatat sebesar 61,68 persen. Sementara jika

dibedakan menurut tipe daerah tampak persentase siswa yang mengakses internet melalui *handphone* di perdesaan sedikit tinggi dibanding daerah perkotaan. Persentase siswa yang mengakses internet melalui *handphone* di daerah perdesaan sebesar 62,53 persen sedangkan pada daerah perkotaan sebesar 61,36 persen.

Tabel 5.2
Persentase Siswa Berumur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Media/Lokasi Mengakses Internet dan Tipe Daerah, 2014

Media/Lokasi Mengakses Internet	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah sendiri	20,65	7,08	16,94
Warnet	45,93	48,85	46,73
Kantor	1,30	0,86	1,18
Sekolah	26,79	28,61	27,29
<i>Handphone</i>	61,36	62,53	61,68
Lainnya	18,24	7,64	15,35

Sumber: Susenas 2014

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin tampak siswa perempuan lebih banyak mengakses internet melalui *handphone* dibanding siswa laki-laki. Persentase siswa perempuan yang mengakses internet melalui *handphone* tercatat sebesar 63,94 persen sedangkan siswa laki-laki hanya tercatat sebesar 59,36 persen.

Tabel 5.3
Persentase Siswa Berumur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Media/Lokasi Mengakses Internet dan Jenis Kelamin, 2014

Media/Lokasi Mengakses Internet	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah sendiri	17,20	16,68	16,94
Warnet	49,54	43,98	46,73
Kantor	0,97	1,37	1,18
Sekolah	26,69	27,88	27,29
<i>Handphone</i>	59,36	63,94	61,68
Lainnya	15,24	15,45	15,35

Sumber: Susenas 2014

Kegiatan mengakses internet melalui *handphone* kini telah menyentuh seluruh siswa pada berbagai jenjang pendidikan. Tabel 5.4 di atas menunjukkan siswa yang mengakses internet melalui *handphone* tidak lagi hanya dinikmati oleh siswa pada jenjang pendidikan tinggi, siswa yang sedang duduk di jenjang pendidikan dasar pun telah menikmati hal yang serupa. Kegiatan mengakses internet yang dilakukan oleh siswa pada jenjang SD/ sederajat secara umum tercatat lebih dari 40 persen (42,00 persen) dengan komposisi siswa perempuan jauh mendominasi siswa laki-laki (46,76 persen berbanding 37,91 persen).

Tabel 5.4
Persentase Siswa Berumur 5-24 tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir melalui *Handphone* Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2014

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat	37,91	46,76	42,00
SMP/Sederajat	49,91	56,43	53,27
SM/Sederajat	65,11	66,60	65,87
Perguruan Tinggi	78,04	79,83	78,97
Jumlah	59,36	63,94	61,68

Sumber: Susenas 2014

Informasi mengenai persentase siswa berumur 5-24 tahun yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir menurut golongan pengeluaran dan tipe daerah disajikan pada Tabel 5.5. Dari tabel tampak persentase tertinggi siswa yang mengakses internet berasal dari kelompok rumah tangga terkaya (kuintil V) yang mencapai 54,78 persen dengan rincian daerah perkotaan dan perdesaan sebesar 65,37 persen dan 28,87 persen, sementara untuk golongan pengeluaran lainnya hanya di bawah 50 persen. Kondisi ini menunjukkan teknologi internet di Indonesia masih belum begitu luas dinikmati dan diakses oleh seluruh golongan ekonomi rumah tangga siswa.

Tabel 5.5
Persentase Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Golongan Pengeluaran dan Tipe Daerah, 2014

Golongan Pengeluaran	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuintil I	17,91	5,89	9,75
Kuintil II	27,12	9,63	16,44
Kuintil III	37,16	13,69	23,23
Kuintil IV	48,05	18,72	33,27
Kuintil V	65,37	28,87	54,78

Catatan: Susenas hanya mengumpulkan informasi pengeluaran rumah tangga, oleh karena itu konteks pendapatan rumah tangga didekati oleh pengeluaran rumah tangga dengan asumsi pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

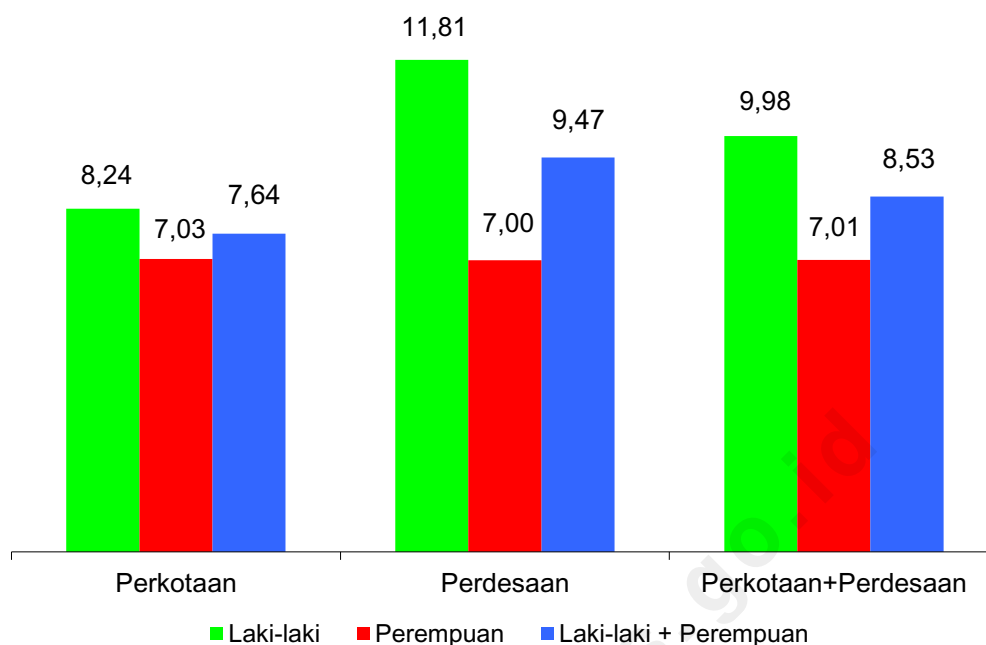
Sumber: Susenas 2014

5.2. Bekerja

Fenomena ironis yang muncul pada dunia pendidikan adalah adanya siswa yang bersekolah tetapi ikut berpartisipasi pada kegiatan ekonomi. Kondisi demikian tentu menghambat proses pencapaian prestasi belajar siswa. Lens. dkk., (2005) mengungkapkan proses pembelajaran dan pencapaiannya akan terganggu ketika siswa memadukan dua aktivitas yaitu bekerja dan sekolah. Keadaan ini khususnya terjadi pada siswa yang berasal dari rumah tangga yang berstatus sosial ekonomi rendah dan menghadapi kesulitan ekonomi (Slavin, 2009). Dalam keluarga tersebut siswa terpaksa harus bekerja atau membantu orang tua dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Keberadaan siswa yang bekerja merupakan sebuah realita sosial yang umum ditemui pada berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data Susenas tahun 2014, keterlibatan siswa berumur 10-24 tahun yang melakukan kegiatan bekerja selama seminggu terakhir dinilai cukup besar. Secara umum, persentase siswa berumur 10-24 tahun yang bekerja tercatat mencapai 8,53 persen. Angka ini mengindikasikan dari setiap 100 siswa yang berumur 10-24 tahun, sekitar 9 orang diantaranya aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Gambar 5.2
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis kelamin dan Tipe Daerah, 2014



Sumber: Susenas 2014

Fenomena lainnya dari Gambar 5.2 adalah relatif tingginya persentase siswa berumur 10-24 tahun yang bekerja di daerah perdesaan dibanding daerah perkotaan. Persentase pada daerah perdesaan tercatat sebesar 9,47 persen sedangkan pada daerah perkotaan tercatat sebesar 7,64 persen.

Sementara itu, jenis kelamin tampaknya mempengaruhi pola partisipasi siswa dalam kegiatan ekonomi. Persentase siswa laki-laki berumur 10-24 tahun yang bekerja (9,98 persen) lebih tinggi daripada siswa perempuan (7,01 persen). Kondisi serupa ditemukan di daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk daerah perkotaan, persentase siswa laki-laki dan perempuan yang bekerja tercatat sebesar 8,24 persen dan 7,03 persen sedangkan daerah perdesaan sebesar 11,81 persen dan 7,00 persen. Kesenjangan yang terjadi antara siswa laki-laki dan perempuan pada daerah perdesaan salah satunya lebih disebabkan pada karakter jenis pekerjaan yang tersedia. Jenis pekerjaan di perdesaan umumnya penuh risiko sehingga menarik minat bagi siswa perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan itu.

Apabila siswa yang berumur 10-24 tahun dibedakan menurut jenjang pendidikan (lihat Tabel 5.6) diketahui seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang sedang diduduki, semakin tinggi pula partisipasi mereka untuk terlibat dalam

kegiatan ekonomi. Siswa yang sedang duduk di jenjang pendidikan tinggi terlihat jauh mendominasi dibanding jenjang pendidikan lainnya (jenjang pendidikan SM/ sederajat sebesar 11,25 persen dan jenjang perguruan tinggi tercatat sebesar 32,53 persen). Pola yang sama berlaku juga baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada daerah perkotaan, persentase siswa di SM/ sederajat dan perguruan tinggi yang aktif bekerja tercatat sebesar 8,42 persen dan 27,53 persen sedangkan pada daerah perdesaan persentase yang diperoleh jauh lebih tinggi yaitu tercatat sebesar 14,71 persen dan 44,52 persen.

Tabel 5.6
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Daerah, 2014

Jenjang Pendidikan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat	0,81	2,25	1,59
SMP/Sederajat	2,59	6,92	4,82
SM/Sederajat	8,42	14,71	11,25
Perguruan Tinggi	27,53	44,52	32,53
Jumlah	7,64	9,47	8,53

Sumber: Susenas 2014

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan jenis kelamin tampak siswa laki-laki yang sedang duduk di jenjang pendidikan perguruan tinggi (38,71 persen) jauh lebih banyak yang bekerja dibanding siswa perempuan (26,60 persen).

Tabel 5.7
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2014

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat	1,66	1,52	1,59
SMP/Sederajat	5,79	3,83	4,82
SM/Sederajat	13,84	8,55	11,25
Perguruan Tinggi	38,71	26,60	32,53
Jumlah	9,98	7,01	8,53

Sumber: Susenas 2014

Cakupan lapangan pekerjaan pada Susenas 2014 terdiri atas sektor pertanian, yang meliputi pertanian tanaman pangan dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik dan gas; sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, hotel dan rumah makan; sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi; sektor keuangan dan asuransi; sektor jasa-jasa; dan sektor lainnya.

Sektor-sektor tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 sektor besar, yaitu sektor pertanian (*Agriculture*) meliputi lapangan usaha pertanian; sektor industri manufaktur (*Manufacture*) meliputi sektor-sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, serta sektor konstruksi dan bangunan, dan sektor pelayanan dan jasa (*Service*) mencakup sektor perdagangan, hotel dan rumah makan; transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi; keuangan dan asuransi; serta sektor jasa-jasa dan sektor lainnya.

Tabel 5.8 berikut ini menyajikan persentase siswa berumur 10-24 tahun yang bekerja menurut lapangan usaha dan tipe daerah. Secara umum lapangan usaha sektor jasa banyak menyerap siswa umur 10-24 tahun yaitu sebesar 49,21 persen. Kemudian sektor lapangan usaha berikutnya yang cukup banyak menyerap siswa adalah sektor pertanian, tercatat sebesar 32,28 persen.

Tabel 5.8
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2014

Lapangan Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian (A)	7,75	53,48	32,28
Manufaktur (M)	22,34	15,19	18,51
Jasa (S)	69,91	31,33	49,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014

Siswa berumur 10-24 tahun yang bekerja pada daerah perdesaan mayoritas terserap pada lapangan usaha sektor pertanian yaitu sebesar 53,48 persen. Sementara pada daerah perkotaan, mayoritas terserap pada lapangan usaha sektor jasa (69,91 persen).

Tabel 5.9
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2014

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian (A)	39,18	22,07	32,28
Manufaktur (M)	19,51	17,02	18,51
Jasa (S)	41,31	60,91	49,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tiap sektor lapangan usaha sebagian besar persentase siswa laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibanding siswa perempuan kecuali pada sektor jasa. Pada sektor jasa, persentase siswa laki-laki yang bekerja (41,31 persen) lebih rendah dibanding siswa perempuan (60,91 persen).

Tabel 5.10
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, 2014

Status Pekerjaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	6,66	5,59	6,09
Berusaha dibantu Buruh	1,61	1,75	1,69
Buruh/Karyawan/Pegawai	59,35	24,27	40,53
Pekerja Bebas	6,95	10,66	8,94
Pekerja Tidak Dibayar	25,44	57,73	42,76
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014

Status pekerjaan menunjukkan jenis kedudukan seseorang dalam bidang pekerjaan. Distribusi siswa berumur 10-24 tahun yang bekerja menurut status pekerjaan dan tipe daerah disajikan pada Tabel 5.10. Dari keseluruhan jumlah siswa yang bekerja, pada umumnya seminggu terakhir bekerja sebagai pekerja tidak dibayar dan buruh/karyawan/pegawai yaitu masing-masing tercatat sebesar 42,76 persen dan 40,53 persen. Apabila dilihat menurut tipe daerah tampak terjadi perbedaan pola status

pekerjaan. Di daerah perkotaan, siswa yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai lebih besar dibanding mereka yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar (59,35 persen berbanding 25,44 persen). Sementara di daerah perdesaan berlaku sebaliknya, status pekerjaan sebagai pekerja tidak dibayar lebih besar dibanding mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (57,73 persen berbanding 24,27 persen). Tingginya status pekerjaan sebagai pekerja tidak dibayar di daerah perdesaan menggambarkan siswa lebih banyak berperan sebagai pekerja keluarga, seperti membantu keluarga di sawah/kebun atau pada usaha keluarga lainnya.

Tabel 5.11
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2014

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	6,61	5,31	6,09
Berusaha dibantu Buruh	1,97	1,27	1,69
Buruh/Karyawan/Pegawai	37,62	44,83	40,53
Pekerja Bebas	11,47	5,19	8,94
Pekerja Tidak Dibayar	42,33	43,41	42,76
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014

Temuan menarik lainnya adalah adanya perbedaan yang cukup mencolok antara siswa laki-laki dan perempuan dalam hal pemilihan status pekerjaan. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.11, persentase siswa laki-laki lebih banyak bekerja sebagai pekerja tidak dibayar, yaitu tercatat sebesar 42,33 persen kemudian diikuti oleh mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 37,62 persen sedangkan siswa perempuan lebih dominan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (44,83 persen) dibanding sebagai pekerja tidak dibayar (43,41 persen). Kondisi ini menunjukkan siswa perempuan lebih cenderung memilih jenis pekerjaan yang bersifat menambah penghasilan keluarga dibanding sebagai pekerja tidak dibayar yang lebih bersifat sebagai pekerja keluarga.

Apabila status pekerjaan ditinjau berdasarkan jenjang pendidikan, hampir sebagian besar status pekerjaan didominasi oleh siswa yang sedang duduk pada jenjang perguruan tinggi kecuali untuk pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar. Status pekerja bebas didominasi oleh siswa yang berada pada jenjang pendidikan

SM/ sederajat (11,18 persen). Sementara pada status pekerja tidak dibayar didominasi oleh siswa pada jenjang SD/ sederajat (87,84 persen). Kondisi ini menunjukkan siswa dengan jenjang pendidikan rendah lebih banyak terserap pada bidang pekerjaan yang bersifat nonformal.

Tabel 5.12
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenjang Pendidikan, 2014

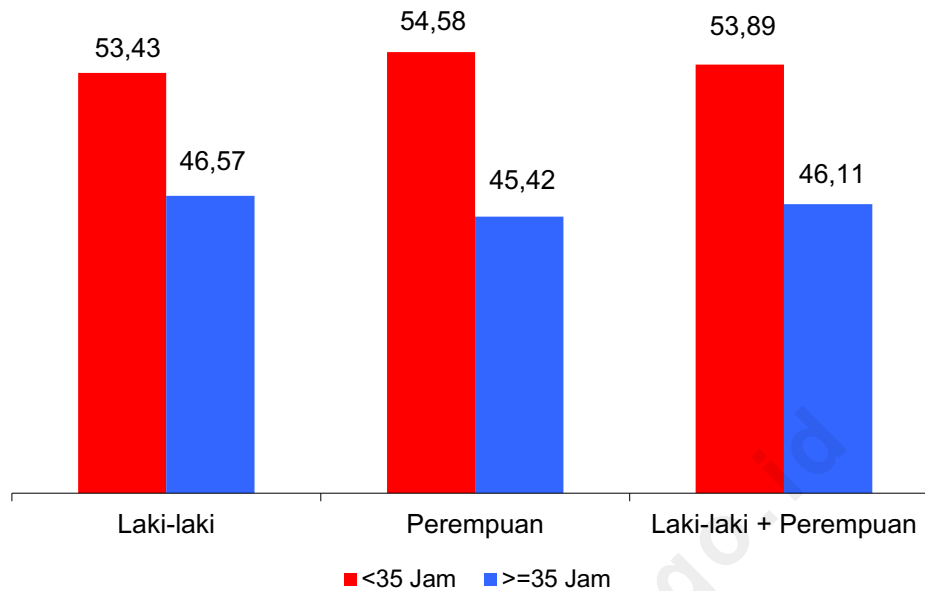
Status Pekerjaan	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	3,03	2,96	4,83	8,35	6,09
Berusaha dibantu Buruh	0,46	0,60	1,07	2,59	1,69
Buruh/Karyawan/Pegawai	3,67	10,42	30,99	61,79	40,53
Pekerja Bebas	5,00	6,00	11,18	9,19	8,94
Pekerja Tidak Dibayar	87,84	80,02	51,93	18,08	42,76
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2014

Salah satu cara untuk mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja adalah jumlah jam kerja yang dihabiskan dalam pekerjaan. Gambar 5.3 di bawah ini menyajikan distribusi siswa berumur 10-24 tahun yang bekerja menurut jumlah jam kerja dan jenis kelamin. Secara keseluruhan tampak persentase siswa yang bekerja secara normal yakni lebih dari 35 jam dalam seminggu, mencapai 46,11 persen sedangkan mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu tercatat sebesar 53,89 persen.

Tingkat produktivitas siswa perempuan yang bekerja masih lebih rendah daripada siswa laki-laki. Kondisi ini dapat dilihat dari persentase siswa perempuan yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu mencapai sebesar 54,58 persen. Persentase tersebut relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan siswa laki-laki yang hanya tercatat mencapai 53,43 persen. Sebaliknya, persentase siswa perempuan yang bekerja secara normal cenderung lebih kecil dibanding siswa laki-laki (45,42 persen berbanding 46,57 persen). Fenomena ini dapat terjadi karena siswa perempuan lebih banyak bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat paruh waktu (*part time*) atau berstatus sebagai pekerja keluarga.

Gambar 5.3
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: Susenas 2014

Problematika siswa berumur 10-24 tahun yang bekerja tidak terlepas dari tuntutan ekonomi rumah tangga. Mereka yang berasal dari status ekonomi rendah, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, harus bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan atau minimal memperbaiki nasibnya. Dalam banyak kasus, meskipun mereka telah bekerja dengan jumlah jam kerja yang relatif panjang, pendapatan yang diperolehpun masih tetap relatif rendah. Untuk tetap dapat bertahan hidup, mereka berusaha mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk mencari nafkah atau membantu keluarga bekerja mencari penghasilan tambahan meski sedang bersekolah.

Apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan dari siswa berumur 10-24 tahun yang bekerja, tampak mayoritas berasal dari status ekonomi rendah. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.13, secara keseluruhan persentase tertinggi terdapat pada siswa berkerja yang berasal dari kelompok rumah tangga termiskin (kuintil I). Pola yang serupa terjadi di daerah perdesaan, yang berturut-turut tercatat sebesar 2,63 persen untuk jenjang SD/ sederajat, 8,09 persen untuk jenjang SMP/ sederajat, 18,60 persen untuk jenjang SM/ sederajat dan 50,48 persen untuk jenjang perguruan tinggi. Sementara untuk daerah perkotaan, pada jenjang pendidikan dasar mayoritas terdapat pada mereka yang berasal dari kelompok miskin kedua (kuintil II) yaitu sebesar 1,16 persen untuk jenjang SD/ sederajat dan 3,11 persen untuk jenjang SMP/ sederajat sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi mayoritas berasal dari kelompok termiskin

(kuintil I), yaitu sebesar 11,70 persen untuk jenjang SM/ sederajat dan 4,18 persen untuk jenjang perguruan tinggi.

Tabel 5.13
Persentase Siswa Berumur 10-24 tahun yang Bekerja Menurut Tipe Daerah, Golongan Pengeluaran dan Jenjang Pendidikan, 2014

Tipe Daerah/ Golongan Pengeluaran	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)				
Kuintil I	0,82	2,90	11,70	45,18
Kuintil II	1,16	3,11	9,21	37,84
Kuintil III	0,49	2,60	7,77	34,95
Kuintil IV	0,75	2,00	7,50	28,03
Kuintil V	0,71	2,08	6,48	19,29
Perdesaan (D)				
Kuintil I	2,63	8,09	18,60	50,48
Kuintil II	2,16	6,72	15,34	47,31
Kuintil III	2,03	6,44	14,60	45,67
Kuintil IV	2,23	6,77	14,12	48,48
Kuintil V	2,10	6,57	12,48	37,02
K + D				
Kuintil I	2,00	6,03	15,64	48,27
Kuintil II	1,68	5,16	12,76	44,65
Kuintil III	1,63	4,69	11,66	40,77
Kuintil IV	1,24	4,57	9,83	36,01
Kuintil V	1,09	3,24	7,91	22,64

Catatan: Susenas hanya mengumpulkan informasi pengeluaran rumah tangga, oleh karena itu konteks pendapatan rumah tangga didekati oleh pengeluaran rumah tangga dengan asumsi pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

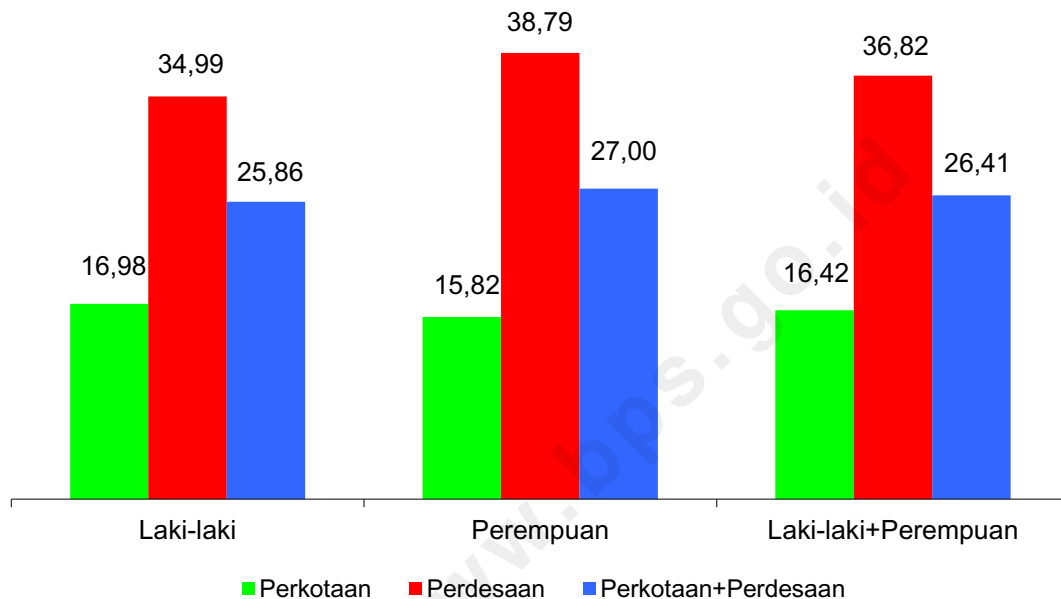
Sumber: Susenas 2014

5.3 Mengurus Rumah Tangga

Mengurus rumah tangga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dalam mengurus atau membantu mengurus rumah tangganya seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan sebagainya. Hasil Susenas 2014 secara keseluruhan menunjukkan persentase siswa berumur 10-24 tahun yang mengurus rumah tangga di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibanding siswa

yang tinggal di perkotaan (16,42 persen berbanding 36,82 persen), keadaan yang sama juga ditemui baik untuk siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Siswa laki-laki yang mengurus rumah tangga di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing tercatat sebesar 16,98 persen dan 34,99 persen sedangkan pada siswa perempuan, tercatat sebesar 15,82 persen dan 38,79 persen.

Gambar 5.4
Persentase Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014



Sumber: Susenas 2014

Selanjutnya jika diperhatikan menurut jenjang pendidikan tampak adanya suatu kecenderungan dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan yang diduduki oleh siswa, partisipasi siswa dalam mengurus rumah tangga juga semakin meningkat. Secara keseluruhan, baik daerah perkotaan maupun perdesaan, persentase dari partisipasi siswa yang mengurus rumah tangga pada jenjang pendidikan SD/ sederajat tercatat sebesar 16,40 persen, kemudian naik hingga 44,71 persen pada jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Pola yang sama berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, partisipasi siswa pada jenjang SD/ sederajat dalam mengurus rumah tangga tercatat dengan persentase sebesar 14,53 persen, kemudian pada jenjang SMP/ sederajat sebesar 23,99 persen, pada jenjang SM/ sederajat sebesar 30,85 persen dan pada jenjang perguruan tinggi sebesar 43,41 persen. Demikian pula untuk siswa di daerah perdesaan, persentase partisipasi siswa pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dalam mengurus rumah tangga tercatat sebesar 17,97 persen, kemudian

siswa pada jenjang SMP/ sederajat sebesar 28,52 persen, siswa pada jenjang SM/ sederajat sebesar 35,00 persen dan siswa pada jenjang perguruan tinggi sebesar 47,83 persen. Satu hal yang menarik disini adalah adanya suatu pola yang menunjukkan partisipasi siswa untuk mengurus rumah tangga di daerah perdesaan lebih besar dibanding siswa di daerah perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama.

Tabel 5.14
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan, 2014

Tipe Daerah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	14,53	23,99	30,85	43,41	25,86
Perdesaan	17,97	28,52	35,00	47,83	27,00
Perkotaan + Perdesaan	16,40	26,33	32,72	44,71	26,41

Sumber: Susenas 2014

Kemudian jika dibedakan menurut jenis kelamin tampak pada setiap jenjang pendidikan yang diduduki, persentase siswa perempuan yang mengurus rumah tangga dua kali lipat lebih tinggi dibanding siswa laki-laki. Berdasarkan Tabel 5.15 tampak pada jenjang pendidikan SD/ sederajat hingga SM/ sederajat, persentase siswa laki-laki dan perempuan yang mengurus rumah tangga berturut-turut tercatat sebesar 10,77 persen dan 22,51 persen; 16,80 persen dan 36,06 persen, dan 19,89 persen dan 46,11 persen. Sementara pada jenjang pendidikan perguruan tinggi, lebih dari separuh (62,06 persen) siswa perempuan melakukan kegiatan mengurus rumah tangga sedangkan siswa laki-laki hanya tercatat sebesar 26,62 persen.

Tabel 5.15
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014

Jenis Kelamin	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	10,77	16,80	19,89	26,62	16,42
Perempuan	22,51	36,06	46,11	62,06	36,82
Laki-laki+Perempuan	16,40	26,33	32,72	44,71	26,41

Sumber: Susenas 2014

Tabel 5.16 menyajikan persentase siswa berumur 10-24 tahun yang mengurus rumah tangga menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Apabila diperhatikan menurut kelompok umur, secara keseluruhan persentase tertinggi partisipasi siswa dalam mengurus rumah tangga terdapat pada kelompok umur 19-24 tahun yaitu sebesar 43,53 persen sedangkan persentase terendah terdapat pada kelompok umur 10-12 tahun yang tercatat sebesar 16,55 persen. Hal ini tentu dinilai wajar mengingat pada usia yang lebih tua, siswa telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk mengurus atau membantu mengurus rumah tangga. Di lain pihak, mereka yang berada pada jenjang pendidikan dasar merupakan siswa dengan kelompok usia sekolah muda dan umumnya kegiatan mereka sebagian besar masih diisi dengan kegiatan bermain bersama teman sebaya.

Tabel 5.16
Persentase Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
10-12	10,70	22,66	16,55
13-15	16,99	36,26	26,45
16-18	19,47	46,31	32,63
19-24	25,88	61,97	43,53

Sumber: Susenas 2014

Pola yang sama terlihat pada siswa laki-laki dan perempuan. Partisipasi siswa laki-laki dalam mengurus rumah tangga pada kelompok umur 10-12 tahun tercatat sebesar 10,70 persen dan terus mengalami peningkatan hingga lebih dua kali lipat pada kelompok umur 19-24 tahun (25,88 persen). Sementara pada siswa perempuan, partisipasi dalam mengurus rumah tangga pada kelompok umur 10-12 tahun tercatat sebesar 22,66 persen dan hampir menyentuh tiga kali lipat pada kelompok umur 19-24 tahun (61,97 persen).

Tabel 5.16 juga menunjukkan bahwa pada setiap kelompok umur, partisipasi siswa perempuan untuk mengurus rumah tangga cenderung lebih tinggi dibanding siswa laki-laki. Selain itu terlihat pula kesenjangan partisipasi mengurus rumah tangga yang semakin tinggi antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan seiring dengan meningkatnya umur. Pada kelompok umur 10-12 tahun kesenjangan partisipasi mengurus rumah tangga antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan hampir

mencapai 15 persen sedangkan pada kelompok umur 19-24 tahun kesenjangan jauh meningkat menjadi lebih dari 35 persen.

<http://www.bps.go.id>

Bab VI CAPAIAN

Penduduk Umur 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2014



BEKERJA
17,48 %

**TIDAK ADA
BIAYA**
27,75 %

**MENIKAH/
MEGURUS
RUTA** 10,40%

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.48 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Hal tersebut juga dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, telah disusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025. RPPNJP telah dijabarkan ke dalam 4 (empat) tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan pendidikan menghadapi berbagai tantangan, diantaranya tingginya disparitas antar wilayah, masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum memperoleh akses pendidikan, masih adanya provinsi yang angka literasinya di bawah target nasional, pemerataan distribusi guru, dan lain-lain. Meskipun masih ada berbagai kendala dan tantangan, diharapkan kondisi pendidikan akan terus mengalami kemajuan. Hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

6.1 Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah

Selain angka partisipasi sekolah, indikator lain yang menggambarkan partisipasi penduduk 5 (lima) tahun ke atas terhadap pendidikan adalah ketidakhadiran bersekolah. Indikator ini merupakan indikator negatif. Artinya, semakin sering seseorang tidak hadir/masuk sekolah, semakin rendah partisipasinya terhadap pendidikan. Dengan tidak hadir/masuk sekolah, siswa tidak akan mendapatkan pengajaran secara penuh, sehingga akan menurunkan kualitas pendidikan. Jangka waktu tidak masuk sekolah yang diukur oleh Susenas adalah tidak masuk sekolah selama satu minggu berturut-turut selama tiga bulan terakhir.

Tabel 6.1
Persentase Penduduk Bersekolah Umur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-Turut dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	4,08	3,79	3,94
Perdesaan	4,32	4,11	4,22
Perkotaan + Perdesaan	4,20	3,95	4,08

Sumber: Susenas KOR, 2014

Tabel 6.1 memperlihatkan persentase penduduk 5-24 tahun yang masih bersekolah namun dalam tiga bulan terakhir tidak masuk sekolah selama satu minggu berturut-turut. Secara umum, persentase mereka yang tidak masuk sekolah selama seminggu berturut-turut relatif kecil, yaitu sebesar 4,08 persen. Dilihat dari tipe daerah, persentase di perdesaan (4,22 persen) lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (3,94 persen). Sementara itu, dilihat dari jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki (4,20 persen) lebih besar dibandingkan dengan perempuan (3,95 persen).

Tabel 6.2
Persentase Penduduk Bersekolah Umur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Alasan Utamanya dan Tipe Daerah, 2014

Alasan tidak masuk sekolah	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sakit	54,51	53,51	54,00
Bekerja/membantu ortu mencari uang	2,27	2,96	2,62
Tidak punya biaya	0,72	0,51	0,61
Sekolah tutup/rusak	1,10	1,46	1,28
Tidak mau sekolah	2,50	3,39	2,96
Mengurus ruta	0,22	0,28	0,25
Lainnya	38,67	37,89	38,27

Sumber: Susenas KOR, 2014

Banyak alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk tidak masuk sekolah selama satu minggu berturut-turut. Beberapa alasan tersebut diantaranya adalah karena sakit, bekerja/membantu orang tua mencari uang, tidak punya biaya, sekolah tutup/rusak, tidak mau sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Alasan karena bekerja dan biaya biasanya berkaitan erat dengan kemiskinan (kesulitan ekonomi). Alasan sekolah tutup/rusak berkaitan dengan rendahnya perhatian pemerintah terhadap sarana pendidikan. Sementara itu, alasan tidak mau sekolah dan mengurus rumah tangga berkaitan dengan kurangnya peran orang tua dalam memotivasi anaknya atau mungkin hal ini sudah menjadi budaya di dalam masyarakat.

Tabel 6.2 memperlihatkan alasan penduduk bersekolah umur 5-24 tahun yang tidak masuk sekolah dengan membandingkan pola di perkotaan dengan perdesaan. Sebagian besar penduduk tidak masuk sekolah dengan alasan sakit (54,00 persen). Persentase penduduk dengan alasan sakit di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan di perdesaan. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mendorong penduduk tidak masuk sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya penduduk yang tidak masuk sekolah dengan alasan bekerja atau pun tidak punya biaya. Persentase penduduk yang tidak masuk sekolah dengan alasan bekerja lebih besar di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Sementara itu, persentase penduduk yang tidak masuk sekolah dengan alasan tidak punya biaya, lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Penutupan atau pun kerusakan sekolah juga menjadi alasan tidak masuk sekolah. Persentase penduduk yang tidak masuk sekolah karena sekolahnya tutup/rusak lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Sementara itu, alasan tidak masuk sekolah karena tidak mau sekolah masih cukup besar, khususnya untuk di perdesaan.

Tabel 6.3 memperlihatkan alasan tidak masuk sekolah dengan membandingkan pola untuk laki-laki dan perempuan. Sebagian besar mereka yang tidak masuk sekolah selama satu minggu berturut-turut adalah dikarenakan sakit, baik laki-laki (52,43 persen) maupun perempuan (55,74 persen). Persentase penduduk yang tidak masuk sekolah karena bekerja lebih besar untuk jenis kelamin laki-laki (3,27 persen) dibandingkan dengan perempuan (1,89 persen). Hal yang sama juga terjadi pada alasan tidak punya biaya, tidak mau sekolah, dan lainnya. Sementara itu, persentase penduduk yang tidak masuk sekolah selama satu minggu berturut-turut dengan alasan mengurus rumah tangga relatif lebih besar pada perempuan (0,29 persen) dibandingkan laki-laki (0,22 persen). Demikian pula untuk alasan tidak masuk sekolah karena sekolah tutup/rusak, persentase pada perempuan relatif lebih besar.

Tabel 6.3
Persentase Penduduk Bersekolah Umur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah
Selama 1 Minggu Berturut-Turut dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Alasan
Utamanya dan Jenis Kelamin, 2014

Alasan tidak masuk sekolah	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sakit	52,43	55,74	54,00
Bekerja/membantu ortu mencari uang	3,27	1,89	2,62
Tidak punya biaya	0,68	0,54	0,61
Sekolah tutup/rusak	1,20	1,37	1,28
Tidak mau sekolah	3,83	1,99	2,96
Mengurus ruta	0,22	0,29	0,25
Lainnya	38,36	38,18	38,27

Sumber: Susenas KOR, 2014

Tabel 6.4 memperlihatkan pola alasan tidak masuk sekolah berdasarkan status ekonomi rumah tangga. Persentase penduduk yang beralasan sakit menjadi lebih kecil seiring dengan kenaikan status ekonomi. Hal ini sejalan dengan kecenderungan semakin tingginya taraf hidup sehat pada rumah tangga yang berstatus ekonomi tinggi. Persentase penduduk yang tidak masuk sekolah dengan alasan bekerja/membantu orang tua mencari uang juga terkait dengan status ekonomi rumah tangga. Penduduk dengan status ekonomi pada kuintil I (pertama) menempati persentase terbesar, yaitu 3,77 persen.

Tabel 6.4
Persentase Penduduk Bersekolah Umur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah
Selama 1 Minggu Berturut-Turut dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Alasan
Utamanya dan Status Ekonomi, 2014

Alasan tidak masuk sekolah	Status Ekonomi				
	Kuintil I	Kuintil II	Kuintil III	Kuintil IV	Kuintil V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sakit	57,23	61,17	57,11	51,34	44,94
Bekerja/membantu ortu mencari uang	3,77	1,86	2,38	2,13	2,90
Tidak punya biaya	0,78	1,04	0,73	0,16	0,39
Sekolah tutup/rusak	2,02	1,68	1,10	0,95	0,74
Tidak mau sekolah	4,74	3,95	3,27	1,92	1,23
Mengurus ruta	0,36	0,12	0,10	0,22	0,41
Lainnya	31,08	30,17	35,31	43,28	49,39

Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas KOR, 2014

6.2 Penduduk 5 Tahun Keatas yang Tidak Bersekolah

Penduduk tidak bersekolah terbagi menjadi yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak bersekolah lagi. Pada analisis selanjutnya penduduk pada umur sekolah yang akan dilihat, yaitu umur 5-24 tahun. Banyaknya penduduk yang tidak bersekolah pada umur sekolah menggambarkan belum baiknya kondisi pendidikan.

Tabel 6.5
Persentase Penduduk Umur 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	33,30	32,89	33,10
Perdesaan	34,35	34,02	34,19
Perkotaan + Perdesaan	33,83	33,45	33,64

Sumber: Susenas KOR, 2014

Persentase penduduk umur 5-24 tahun yang tidak bersekolah adalah 33,64 persen (Tabel 6.5). Jika dibandingkan berdasarkan tipe daerah akan terlihat bahwa persentase penduduk yang tidak bersekolah di perkotaan lebih kecil dibandingkan di perdesaan, baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Hal ini menandakan masih terdapat ketimpangan partisipasi bersekolah untuk penduduk perdesaan dan perkotaan. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang tidak bersekolah lebih kecil dibandingkan perempuan. Walaupun perbedaannya tidak signifikan, kondisi ini masih menandakan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak yang bersekolah dibandingkan perempuan.

Tabel 6.6 membandingkan pola alasan utama penduduk tidak bersekolah berdasarkan tipe daerah. Persentase penduduk dengan alasan tidak ada biaya merupakan yang terbesar, baik untuk perkotaan (25,14 persen) maupun perdesaan (30,30 persen). Persentase penduduk dengan alasan tidak ada biaya di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Akan tetapi, untuk persentase penduduk dengan alasan bekerja/mencari nafkah di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun sama-sama bersumber dari masalah ekonomi, tetapi terdapat perbedaan alasan, yang mungkin terjadi karena terkait permasalahan lain, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan di perkotaan yang lebih banyak dibandingkan di perdesaan.

Tabel 6.6
Persentase Penduduk Umur 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utamanya dan Tipe Daerah, 2014

Alasan utama	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak ada biaya	25,14	30,30	27,75
Bekerja/mencari nafkah	23,11	11,99	17,48
Menikah/mengurus RT	8,50	12,25	10,40
Merasa pendidikan cukup	8,41	6,78	7,59
Belum cukup umur	22,54	22,01	22,27
Malu karena ekonomi	0,48	0,50	0,49
Sekolah jauh	0,22	1,97	1,10
Cacat	0,82	1,21	1,02
Menunggu pengumuman	0,53	0,34	0,43
Tidak diterima	0,15	0,12	0,13
Lainnya	10,11	12,54	11,34

Sumber: Susenas KOR, 2014

Sementara itu, persentase penduduk yang tidak bersekolah dengan alasan belum cukup umur masih cukup tinggi, baik di perkotaan maupun perdesaan. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama nomor 04/VI/PB/2011 dan nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah telah menyebutkan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI paling rendah berusia 6 tahun atau kurang dari 6 tahun jika ada rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Hal ini membuka peluang bagi penduduk yang masih berumur 5-6 tahun untuk memilih belum cukup umur sebagai alasan tidak bersekolah.

Tabel 6.7 membandingkan pola alasan utama penduduk tidak bersekolah berdasarkan jenis kelamin. Persentase penduduk tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya menjadi yang terbesar, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, untuk alasan bekerja/mencari nafkah persentase penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terkait dengan tanggung jawab dalam keluarga yang secara umum lebih banyak dipegang oleh laki-laki.

Persentase penduduk perempuan yang tidak bersekolah lebih besar dibandingkan laki-laki untuk alasan menikah/mengurus rumah tangga. Hal ini

dipengaruhi oleh banyaknya perempuan yang telah kawin pada usia sekolah. Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 adalah 22,3 tahun. Angka ini masih berada di dalam usia sekolah (5-24 tahun). Sementara itu, untuk laki-laki memiliki rata-rata umur kawin pertama yang lebih tinggi, yaitu 25,7 tahun. (<http://sp2010.bps.go.id/>).

Tabel 6.7
Persentase Penduduk Umur 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utamanya dan Jenis Kelamin, 2014

Alasan utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak ada biaya	28,24	27,24	27,75
Bekerja/mencari nafkah	22,63	12,01	17,48
Menikah/mengurus RT	1,79	19,51	10,40
Merasa pendidikan cukup	7,48	7,70	7,59
Belum cukup umur	22,65	21,86	22,27
Malu karena ekonomi	0,56	0,42	0,49
Sekolah jauh	1,11	1,10	1,10
Cacat	1,10	0,93	1,02
Menunggu pengumuman	0,44	0,42	0,43
Tidak diterima	0,14	0,13	0,13
Lainnya	13,85	8,68	11,34

Sumber: Susenas KOR, 2014

Tabel 6.8 memperlihatkan alasan penduduk yang tidak bersekolah menurut status ekonomi rumah tangganya. Penduduk yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya semakin sedikit seiring dengan kenaikan status ekonomi (kuintil pengeluaran). Pada penduduk dengan rumah tangga berstatus ekonomi rendah, khususnya untuk kuintil I (pertama) dan II (kedua) terlihat alasan utama tidak bersekolah yang menempati persentase terbesar adalah karena tidak ada biaya. Akan tetapi, untuk penduduk dengan rumah tangga berstatus ekonomi tinggi, khususnya kuintil V (lima) tidak ada biaya bukan lagi alasan dominan, tetapi sudah bergeser ke alasan bekerja/mencari nafkah. Pola serupa juga terjadi untuk alasan malu karena ekonomi dan sekolah jauh. Persentase penduduk yang tidak bersekolah cenderung menurun seiring kenaikan status ekonomi rumah tangga untuk alasan malu karena ekonomi dan sekolah jauh. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk dengan status ekonomi tinggi lebih dapat mengatasi kesulitan akses sekolah secara jarak.

Tabel 6.8
Persentase Penduduk Umur 5-24 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utamanya dan Status Ekonomi, 2014

Alasan utama	Status Ekonomi				
	Kuintil I	Kuintil II	Kuintil III	Kuintil IV	Kuintil V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak ada biaya	35,51	32,07	28,49	23,56	15,96
Bekerja/mencari nafkah	9,42	13,24	16,14	21,63	30,36
Menikah/mengurus RT	10,52	10,27	11,27	10,31	9,41
Merasa pendidikan cukup	5,10	6,61	7,61	9,00	10,47
Belum cukup umur	23,16	23,27	22,23	21,71	20,51
Malu karena ekonomi	0,68	0,44	0,58	0,41	0,30
Sekolah jauh	1,97	1,30	0,88	0,73	0,43
Cacat	1,53	1,16	0,85	0,81	0,59
Menunggu pengumuman	0,15	0,27	0,40	0,68	0,76
Tidak diterima	0,10	0,13	0,11	0,15	0,19
Lainnya	11,86	11,24	11,44	11,01	11,03

Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas KOR, 2014

6.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu dan kualitas SDM-nya. Kualitas SDM merupakan modal dalam menghadapi persaingan global.

Tabel 6.9 menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD/MI/Paket A menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 27,41 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas masih banyak yang bersekolah hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Bahkan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan SMP/MTS/Paket B hanya sebesar 20,82 persen, lebih rendah dari angka pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Hal sebaliknya terjadi untuk jenjang pendidikan menengah. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang

menamatkan SMA/MA/SMK/Paket C tercatat sebesar 25,18 persen. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang Perguruan Tinggi sebesar 7,46 persen.

Tabel 6.9
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2014

Jenjang Pendidikan	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	3,24	7,78	5,47
Tidak tamat SD	9,29	18,22	13,67
SD/MI/Paket A	20,96	34,12	27,41
SMP/MTS/Paket B	21,21	20,41	20,82
SMA/MA/SMK/Paket C	33,94	16,07	25,18
Perguruan Tinggi	11,36	3,42	7,46
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas KOR, 2014

Tabel 6.9 juga menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dilihat dari tipe daerah. Secara umum penduduk perkotaan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibanding penduduk perdesaan. Hal ini terlihat pada persentase penduduk perkotaan yang tidak/belum pernah bersekolah, yang tidak tamat SD, atau pun yang hanya tamat SD/MI/Paket A, lebih rendah dari penduduk perdesaan. Sebaliknya, untuk penduduk yang tamat SMP/MTs/Paket B hingga yang menyelesaikan perguruan tinggi, persentasenya lebih tinggi dari perdesaan. Bahkan untuk jenjang perguruan tinggi, persentase penduduk perkotaan (11,36 persen) mencapai tiga kali lipat persentase penduduk perdesaan (3,42 persen).

Tabel 6.10 memperlihatkan persentase penduduk laki-laki yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah masih lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Untuk jenjang pendidikan tinggi, penduduk laki-laki maupun perempuan yang melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi memiliki persentase yang tidak jauh berbeda. Laki-laki paling banyak bersekolah sampai jenjang SMA/MA/SMK/Paket C, yaitu sebesar 28,10 persen. Sementara untuk perempuan, persentase terbesar pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, yaitu 27,35 persen.

Tabel 6.10
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2014

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	3,14	7,78	5,47
Tidak tamat SD	12,74	14,60	13,67
SD/MI/Paket A	27,47	27,35	27,41
SMP/MTS/Paket B	21,15	20,49	20,82
SMA/MA/SMK/Paket C	28,10	22,27	25,18
Perguruan Tinggi	7,41	7,52	7,46
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas KOR, 2014

Persentase penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas yang tidak/belum bersekolah (7,78 persen) lebih dari dua kali lipat dibandingkan persentase laki-laki (3,14 persen). Sebaliknya, untuk jenjang perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dari persentase perempuan yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi relatif sama besar dengan laki-laki.

Tabel 6.11
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Ekonomi, 2014

Jenjang Pendidikan	Status Ekonomi				
	Kuintil I	Kuintil II	Kuintil III	Kuintil IV	Kuintil V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/belum pernah sekolah	10,44	6,77	5,17	3,89	1,88
Tidak tamat SD	20,53	17,20	14,67	11,44	5,98
SD/MI/Paket A	36,34	33,71	29,76	24,92	14,56
SMP/MTS/Paket B	19,63	22,16	23,03	22,40	17,12
SMA/MA/SMK/Paket C	12,16	18,23	23,88	30,23	38,64
Perguruan Tinggi	0,90	1,93	3,49	7,11	21,81
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas KOR, 2014

Tabel 6.11 jelas memperlihatkan bahwa status ekonomi rumah tangga mempengaruhi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah, tidak tamat SD, tamat SD/MI/Paket A, semakin kecil seiring dengan kenaikan status ekonomi (kuintil). Sebaliknya untuk penduduk yang tamat SMA/MA/SMK/Paket C dan perguruan tinggi, persentasenya semakin besar seiring dengan kenaikan status ekonomi. Bahkan, untuk jenjang perguruan tinggi terlihat ketimpangan antara kuintil V (lima), yaitu 21,81 persen, sedangkan untuk penduduk yang di kuintil I (pertama) hanya 0,90 persen.

6.4 Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun, dan seterusnya. Penghitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 6.12
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	9,83	9,10	9,46
Perdesaan	7,33	6,56	6,94
Perkotaan + Perdesaan	8,61	7,85	8,23

Sumber: Susenas KOR, 2014

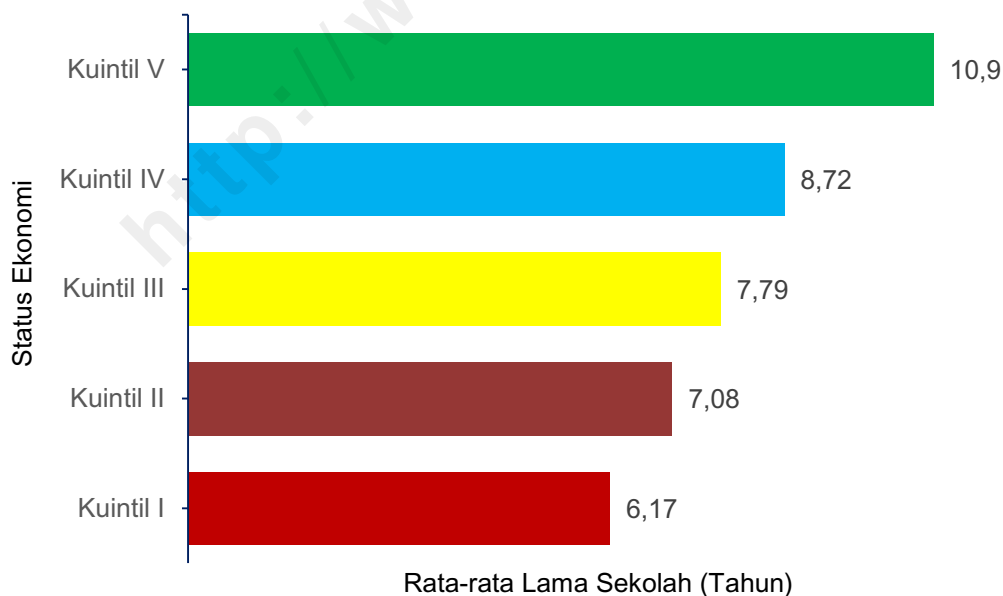
Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan pendidikan nasional. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dicantumkan target nasional rata-rata lama sekolah yaitu sekurang-kurangnya 8,25 tahun pada tahun 2014. Pada Tabel 6.12 terlihat bahwa rata-rata lama

sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 8,23 tahun. Angka tersebut hampir menyamai target yang ditetapkan dalam Renstra 2014.

Penduduk di perkotaan mengenyam pendidikan di bangku sekolah lebih lama dibandingkan dengan penduduk di perdesaan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.12, dimana rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di perkotaan adalah 9,46 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di perdesaan yang hanya 6,94 tahun. Sementara itu, dilihat dari perbandingan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih lama mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Rata-rata lama sekolah untuk penduduk laki-laki adalah 8,61 persen, sedangkan untuk perempuan adalah 7,85 persen.

Rata-rata lama sekolah penduduk perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan, sudah melebihi target pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah penduduk perdesaan belum dapat memenuhi target. Angka tersebut bahkan belum memenuhi target sasaran Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di perkotaan sudah lebih maju dibandingkan di perdesaan.

Gambar 6.1
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014



Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas KOR, 2014

Gambar 6.1 menunjukkan bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi rata-rata lama sekolah. Untuk status ekonomi terendah (kuantil I), rata-rata lama sekolah hanya mencapai 6,17 tahun. Sebaliknya rata-rata lama sekolah untuk status ekonomi tertinggi (kuantil V) mencapai 10,9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan lebih banyak diakses oleh penduduk dengan status ekonomi tinggi.

Tabel 6.13
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 18 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	9,90	9,09	9,50
Perdesaan	7,25	6,41	6,82
Perkotaan + Perdesaan	8,60	7,77	8,19

Sumber: Susenas KOR, 2014

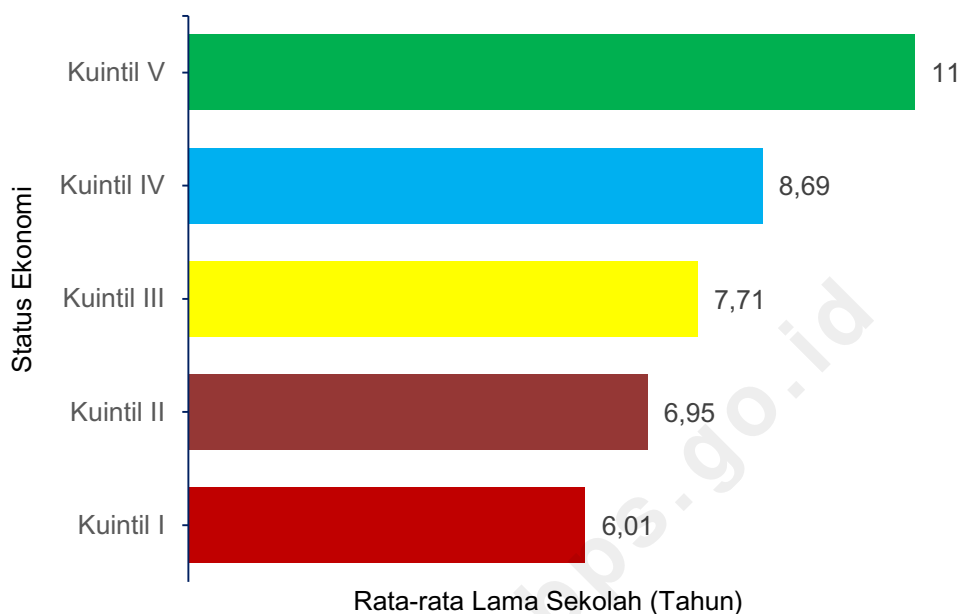
Secara umum rata-rata lama sekolah untuk penduduk umur 18 tahun ke atas mempunyai pola yang sama dengan rata-rata lama sekolah untuk penduduk umur 15 tahun ke atas. Penduduk di perkotaan mempunyai rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan penduduk di perdesaan. Sementara itu, dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki-laki mempunyai rata-rata lama sekolah lebih lama dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 8,60 tahun berbanding 7,77 tahun.

Akan tetapi terdapat perubahan dari rata-rata lama sekolah untuk penduduk umur 15 tahun ke atas, yaitu untuk rata-rata lama sekolah di perkotaan naik menjadi 9,50 tahun, sedangkan di perdesaan justru turun menjadi 6,82 persen. Hal ini dimungkinkan sangat erat kaitannya dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dimana di perkotaan penduduk yang yang tamat SMA/MA/SMK/Paket C mencapai 33,94 persen, sedangkan di perdesaan hanya 16,07 persen. (Lihat kembali Tabel 6.9)

Gambar 6.2 menunjukkan hubungan serah antara status ekonomi rumah tangga dengan rata-rata lama sekolah. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi rata-rata lama sekolah. Untuk status ekonomi terendah (kuantil I), rata-rata lama sekolah hanya hanya 6,01 tahun. Sebaliknya rata-rata lama sekolah untuk status ekonomi tertinggi (kuantil V) mencapai 11 tahun. Hal ini

menunjukkan bahwa penduduk dengan status ekonomi tinggi lebih lama mendapatkan pendidikan di sekolah.

Gambar 6.2
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 18 Tahun ke Atas Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014



Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas KOR, 2014

6.5 Angka Melek Huruf

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk diantaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Pembangunan pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pendidikan yang diperlukan untuk mengukur indeks pembangunan manusia antara lain tingkat literasi/melek huruf. Biasanya, tingkat melek huruf dihitung dari persentase penduduk dewasa yang bisa membaca dan menulis. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi (UNESCO). Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik.

Persentase penduduk umur 15-24 tahun yang melek huruf sudah cukup besar, yaitu 99,68 persen. Tabel 6.14 menunjukkan persentase penduduk umur 15-24 tahun di perkotaan yang melek huruf lebih besar dibandingkan di perdesaan. Walaupun perbedaannya tidak signifikan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan antara penduduk laki-laki dan perempuan.

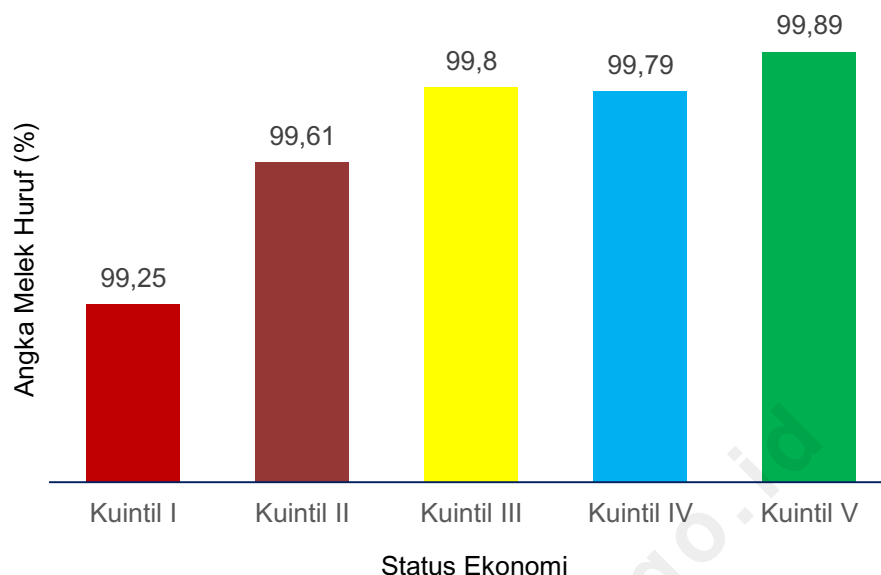
Tabel 6.14
Persentase Penduduk Umur 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	99,97	99,97	99,97
Perdesaan	99,35	99,34	99,35
Perkotaan + Perdesaan	99,68	99,68	99,68

Sumber: Susenas KOR, 2014

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa kecenderungan penduduk pada status ekonomi tinggi lebih melek huruf dibandingkan dengan yang status ekonomi rendah. Penduduk umur 15-24 tahun pada kuantil V (lima) memiliki persentase melek huruf sebesar 99,89 persen. Sebaliknya persentase penduduk umur 15-24 tahun pada kuantil I (pertama) yang melek huruf masih lebih kecil, yaitu sebesar 99,25 persen.

Gambar 6.3
Persentase Penduduk Umur 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014



Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas KOR, 2014

Tabel 6.15 memperlihatkan bahwa AMH sudah melebihi target Renstra Kemdikbud (95,8 persen). Apabila dilihat dari tipe daerah, AMH penduduk umur 15-59 tahun yang tinggal di perkotaan juga sudah mencapai target Kemdikbud. Sementara AMH perdesaan hampir mendekati target Renstra Kemdikbud, yaitu sebesar 95,42 persen. Ketimpangan gender masih terlihat melalui AMH perempuan yang lebih rendah dari laki-laki, baik di perkotaan maupun perdesaan. Bahkan AMH penduduk perempuan yang tinggal di perdesaan belum mencapai target Kemdikbud.

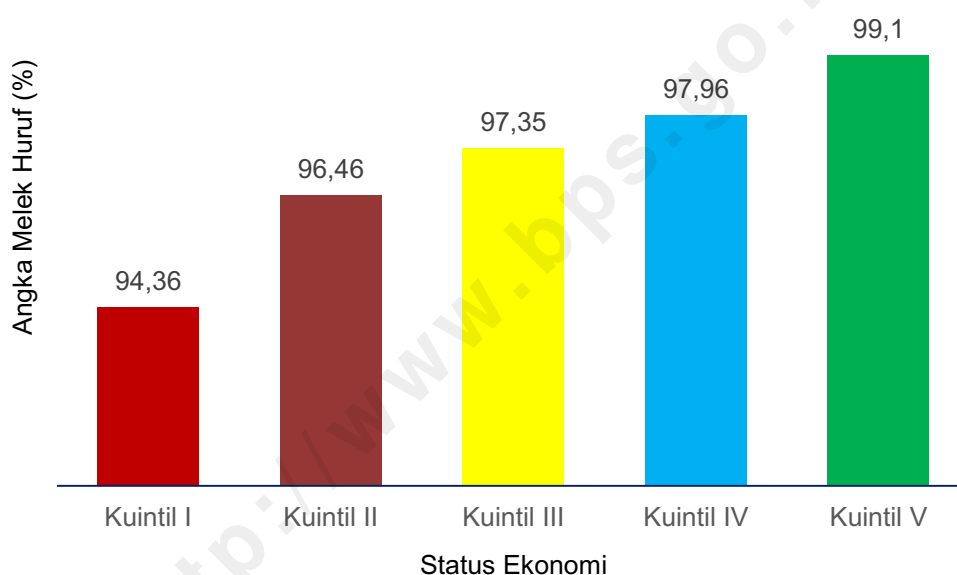
Tabel 6.15
Persentase Penduduk Umur 15-59 Tahun yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	99,44	98,18	98,81
Perdesaan	97,09	93,72	95,42
Perkotaan + Perdesaan	98,30	96,02	97,17

Sumber: Susenas KOR, 2014

Dilihat dari status ekonomi, AMH penduduk umur 15-59 tahun sudah melebihi 90 persen. Namun demikian, AMH penduduk yang memiliki status ekonomi terendah (Kuintil I) tidak mencapai target Renstra Kemdikbud. Pola hubungan searah antara AMH dan status ekonomi juga tampak terlihat pada Gambar 6.4. Kenaikan status ekonomi meningkatkan persentase penduduk umur 15-59 tahun yang melek huruf. Persentase penduduk 15-59 tahun yang melek huruf mencapai 99,1 persen untuk rumah tangga dengan status ekonomi tertinggi (Kuintil V). Hal ini semakin menegaskan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penentu taraf pendidikan seseorang.

Gambar 6.4
Persentase Penduduk Umur 15-59 Tahun yang Melek Huruf Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014

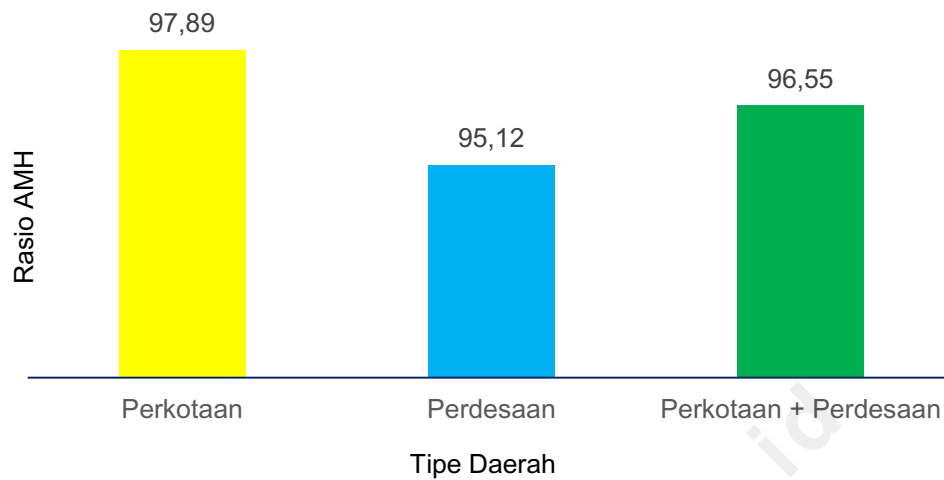


Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas KOR, 2014

Salah satu paradigma pendidikan yang dianut oleh pemerintah adalah pendidikan untuk semua. Program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan yang berkesetaraan gender. Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia pendidikan, dituangkan ke dalam Renstra Kemdikbud.

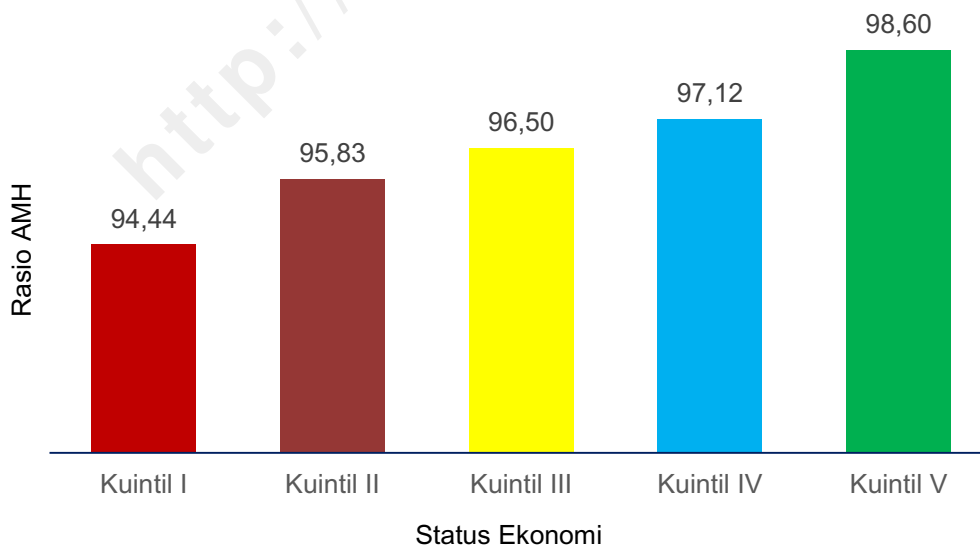
Gambar 6.5
Rasio Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut
Tipe Daerah, 2014



Sumber: Susenas KOR, 2014

Gambar 6.5 memperlihatkan perbandingan AMH perempuan terhadap laki-laki. Rasio AMH tidak mencapai angka 100 persen, baik di perkotaan maupun perdesaan. Artinya, penduduk perempuan masih lebih banyak yang buta huruf dibandingkan dengan laki-laki.

Gambar 6.6
Rasio Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut
Status Ekonomi Rumah Tangga, 2014



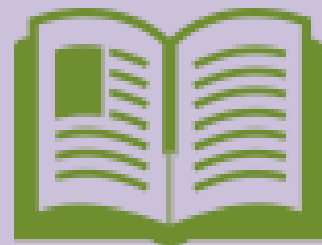
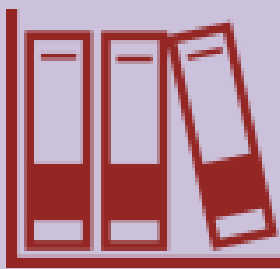
Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Sumber: Susenas KOR, 2014

Gambar 6.6 memperlihatkan pola hubungan yang searah antara status ekonomi dan rasio AMH. Semakin tinggi status ekonomi, semakin besar rasio AMH. Semakin besar rasio AMH, semakin mengarah ke terwujudnya kesetaraan gender melek huruf. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam indikator melek huruf cenderung akan terwujud pada tingkat ekonomi yang tinggi.

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

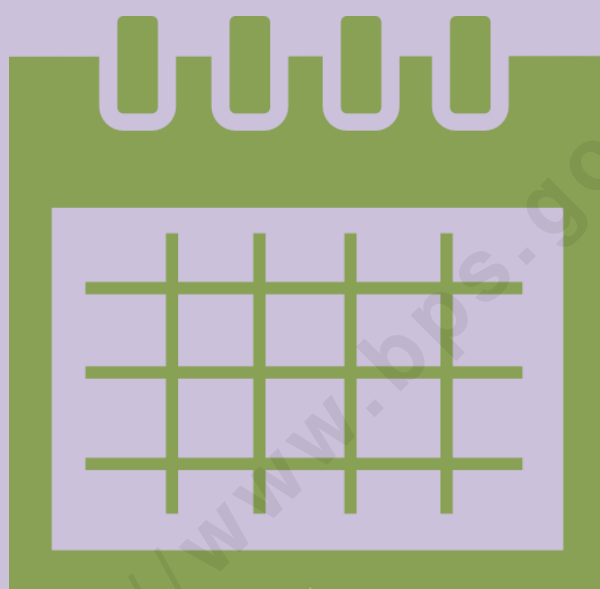


<http://www.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, *Buku 2 Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014, Pedoman Pencacahan KOR*, Jakarta, 2014
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan 2009*, Jakarta, 2010
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan 2012*, Jakarta, 2013
- Horrigan, John B. 2002. New Internet Users: What They Do Online, What They Don't, and Implications for the 'Net's Future, tersedia pada http://www.pewinternet.org/pdfs/New_User_Report.pdf. Diakses pada November 2015.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Ringkasan Statistik Pendidikan Indonesia 2012/2013. Jakarta: Kemdikbud.
- Maryono, Y dan Istiana, B. Patmi. 2007. Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yudhistira: Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Pendidikan Anak Usia Dini. 2015. Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat. <http://paudni.kemdikbud.go.id/segment/19.html>. Diakses September 2015.
- Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010-2014, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, 2010
- Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Unesco. 2015. Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges.
- Unicef Indonesia. Oktober 2012. Ringkasan Kajian Pendidikan dan Perkembangan Anak Usia Dini.

LAMPIRAN TABEL



Tabel 3.1.1 Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Negeri				
Provinsi	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3264	810	344	110
Sumatera Utara	8303	1252	377	215
Sumatera Barat	3946	641	209	93
Riau	3129	735	257	83
Jambi	2302	533	141	70
Sumatera Selatan	4344	815	289	73
Bengkulu	1293	366	96	55
Lampung	4401	674	211	79
Kep. Bangka Belitung	740	148	39	29
Kepulauan Riau	677	201	73	24
DKI Jakarta	2198	322	117	62
Jawa Barat	18593	2117	440	242
Jawa Tengah	18395	1918	360	210
DI Yogyakarta	1455	216	69	55
Jawa Timur	18259	1871	409	280
Banten	4071	558	144	67
Bali	2332	256	77	44
Nusa Tenggara Barat	3001	648	145	82
Nusa Tenggara Timur	3043	998	251	84
Kalimantan Barat	4000	850	204	77
Kalimantan Tengah	2403	620	149	70
Kalimantan Selatan	2776	534	125	54
Kalimantan Timur	2068	503	161	87
Sulawesi Utara	1379	449	100	67
Sulawesi Tengah	2602	666	140	70
Sulawesi Selatan	6112	1220	308	133
Sulawesi Tenggara	2246	635	198	70
Gorontalo	896	305	44	33
Sulawesi Barat	1288	270	57	43
Maluku	1186	405	163	53
Maluku Utara	1075	297	113	51
Papua Barat	592	155	55	19
Papua	1505	337	113	57
Indonesia	133874	22325	5978	2841

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.1.2 Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Swasta				
Provinsi	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	118	163	116	59
Sumatera Utara	1182	1102	610	621
Sumatera Barat	151	102	80	99
Riau	360	229	134	123
Jambi	94	76	69	65
Sumatera Selatan	290	389	265	140
Bengkulu	47	32	32	26
Lampung	248	592	236	259
Kep. Bangka Belitung	41	43	26	22
Kepulauan Riau	195	80	28	42
DKI Jakarta	862	744	352	553
Jawa Barat	1388	2338	880	1656
Jawa Tengah	967	1387	491	1090
DI Yogyakarta	391	219	94	170
Jawa Timur	1483	2441	888	1233
Banten	522	731	317	448
Bali	98	142	89	108
Nusa Tenggara Barat	114	177	134	131
Nusa Tenggara Timur	1777	370	168	82
Kalimantan Barat	217	272	161	85
Kalimantan Tengah	136	107	67	34
Kalimantan Selatan	124	66	57	50
Kalimantan Timur	189	185	100	129
Sulawesi Utara	842	228	106	81
Sulawesi Tengah	209	112	45	62
Sulawesi Selatan	220	345	231	241
Sulawesi Tenggara	33	43	57	51
Gorontalo	19	13	7	13
Sulawesi Barat	26	45	16	44
Maluku	553	146	78	35
Maluku Utara	193	105	51	36
Papua Barat	383	58	51	16
Papua	926	120	93	28
Indonesia	14398	13202	6129	7832

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.1.3 Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Negeri+Swasta				
Provinsi	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3382	973	460	169
Sumatera Utara	9485	2354	987	836
Sumatera Barat	4097	743	289	192
Riau	3489	964	391	206
Jambi	2396	609	210	135
Sumatera Selatan	4634	1204	554	213
Bengkulu	1340	398	128	81
Lampung	4649	1266	447	338
Kep. Bangka Belitung	781	191	65	51
Kepulauan Riau	872	281	101	66
DKI Jakarta	3060	1066	469	615
Jawa Barat	19981	4455	1320	1898
Jawa Tengah	19362	3305	851	1300
DI Yogyakarta	1846	435	163	225
Jawa Timur	19742	4312	1297	1513
Banten	4593	1289	461	515
Bali	2430	398	166	152
Nusa Tenggara Barat	3115	825	279	213
Nusa Tenggara Timur	4820	1368	419	166
Kalimantan Barat	4217	1122	365	162
Kalimantan Tengah	2539	727	216	104
Kalimantan Selatan	2900	600	182	104
Kalimantan Timur	2257	688	261	216
Sulawesi Utara	2221	677	206	148
Sulawesi Tengah	2811	778	185	132
Sulawesi Selatan	6332	1565	539	374
Sulawesi Tenggara	2279	678	255	121
Gorontalo	915	318	51	46
Sulawesi Barat	1314	315	73	87
Maluku	1739	551	241	88
Maluku Utara	1268	402	164	87
Papua Barat	975	213	106	35
Papua	2431	457	206	85
Indonesia	148272	35527	12107	10673

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.2. Jumlah Ruang Kelas Menurut Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Provinsi	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	22 606	8 082	7 001
Sumatera Utara	63 783	20 308	19 691
Sumatera Barat	28 869	7 842	7 061
Riau	28 897	7 790	6 577
Jambi	16 718	4 404	3 581
Sumatera Selatan	36 177	10 308	8 982
Bengkulu	9 003	3 222	2 341
Lampung	31 538	10 332	7 503
Kep. Bangka Belitung	6 191	1 669	1 274
Kepulauan Riau	7 219	2 317	1 709
DKI Jakarta	25 205	11 473	12 010
Jawa Barat	153 008	49 169	44 100
Jawa Tengah	122 942	40 972	32 772
DI Yogyakarta	13 433	4 342	4 492
Jawa Timur	131 173	41 712	35 192
Banten	38 614	12 134	10 759
Bali	15 650	55 577	4 492
Nusa Tenggara Barat	20 753	6 285	5 263
Nusa Tenggara Timur	30 837	9 344	7 001
Kalimantan Barat	30 583	6 850	4 208
Kalimantan Tengah	16 403	3 701	2 512
Kalimantan Selatan	19 918	4 573	3 011
Kalimantan Timur	19 546	5 551	4 367
Sulawesi Utara	13 237	4 681	3 193
Sulawesi Tengah	15 550	4 997	2 795
Sulawesi Selatan	44 528	14 029	9 709
Sulawesi Tenggara	19 206	4 905	3 117
Gorontalo	6 006	1 949	1 322
Sulawesi Barat	8 081	2 078	1 577
Maluku	10 508	3 131	2 263
Maluku Utara	7 980	2 015	1 811
Papua Barat	4 665	930	1 062
Papua	13 991	1 768	2 656
Indonesia	1 032 818	318 440	265 404

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.3.1 Jumlah Laboratorium Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Negeri			
Provinsi	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	843	743	135
Sumatera Utara	924	811	191
Sumatera Barat	503	528	95
Riau	545	373	105
Jambi	390	278	66
Sumatera Selatan	609	551	94
Bengkulu	271	211	55
Lampung	615	436	134
Kep. Bangka Belitung	165	154	42
Kepulauan Riau	133	151	24
DKI Jakarta	528	629	198
Jawa Barat	1986	1346	434
Jawa Tengah	2373	1857	525
DI Yogyakarta	371	317	124
Jawa Timur	2655	1531	459
Banten	403	317	80
Bali	318	329	58
Nusa Tenggara Barat	544	337	81
Nusa Tenggara Timur	383	250	99
Kalimantan Barat	407	352	95
Kalimantan Tengah	335	271	87
Kalimantan Selatan	605	272	92
Kalimantan Timur	359	307	118
Sulawesi Utara	339	247	46
Sulawesi Tengah	357	225	29
Sulawesi Selatan	993	800	193
Sulawesi Tenggara	435	236	39
Gorontalo	204	114	27
Sulawesi Barat	143	99	46
Maluku	179	210	52
Maluku Utara	134	121	27
Papua Barat	47	75	33
Papua	113	157	66
Indonesia	19209	14635	3949

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.3.2 Jumlah Laboratorium Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Swasta

Provinsi	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	76	131	23
Sumatera Utara	635	1613	388
Sumatera Barat	48	145	31
Riau	128	72	63
Jambi	48	76	25
Sumatera Selatan	172	439	78
Bengkulu	11	40	-
Lampung	354	366	68
Kep. Bangka Belitung	28	63	16
Kepulauan Riau	44	85	46
DKI Jakarta	666	1157	428
Jawa Barat	1308	1691	999
Jawa Tengah	980	1554	747
DI Yogyakarta	210	301	106
Jawa Timur	1329	1760	868
Banten	431	604	338
Bali	111	237	76
Nusa Tenggara Barat	58	95	28
Nusa Tenggara Timur	131	256	17
Kalimantan Barat	87	201	36
Kalimantan Tengah	38	56	7
Kalimantan Selatan	66	68	30
Kalimantan Timur	115	160	68
Sulawesi Utara	105	146	19
Sulawesi Tengah	38	41	5
Sulawesi Selatan	210	745	174
Sulawesi Tenggara	27	37	24
Gorontalo	13	12	3
Sulawesi Barat	14	11	9
Maluku	51	71	6
Maluku Utara	24	41	10
Papua Barat	17	42	1
Papua	43	142	14
Indonesia	7616	12458	4751

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.3.3 Jumlah Laboratorium Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Negeri+Swasta			
Provinsi	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	919	874	158
Sumatera Utara	1559	2424	579
Sumatera Barat	551	673	126
Riau	673	445	168
Jambi	438	354	91
Sumatera Selatan	781	990	172
Bengkulu	282	251	55
Lampung	969	802	202
Kep. Bangka Belitung	193	217	58
Kepulauan Riau	177	236	70
DKI Jakarta	1194	1786	626
Jawa Barat	3294	3037	1433
Jawa Tengah	3353	3411	1272
DI Yogyakarta	581	618	230
Jawa Timur	3984	3291	1327
Banten	834	921	418
Bali	429	566	134
Nusa Tenggara Barat	602	432	109
Nusa Tenggara Timur	514	506	116
Kalimantan Barat	494	553	131
Kalimantan Tengah	373	327	94
Kalimantan Selatan	671	340	122
Kalimantan Timur	474	467	186
Sulawesi Utara	444	393	65
Sulawesi Tengah	395	266	34
Sulawesi Selatan	1203	1545	367
Sulawesi Tenggara	462	273	63
Gorontalo	217	126	30
Sulawesi Barat	157	110	55
Maluku	230	281	58
Maluku Utara	158	162	37
Papua Barat	64	117	34
Papua	156	299	80
Indonesia	26825	27093	8700

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.4.1 Jumlah Perpustakaan Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Negeri			
Provinsi	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	625	265	56
Sumatera Utara	763	298	84
Sumatera Barat	479	203	61
Riau	481	251	42
Jambi	377	135	37
Sumatera Selatan	552	289	42
Bengkulu	240	95	25
Lampung	466	179	51
Kep. Bangka Belitung	127	39	30
Kepulauan Riau	126	74	9
DKI Jakarta	247	119	54
Jawa Barat	1398	318	136
Jawa Tengah	1479	366	153
DI Yogyakarta	194	70	47
Jawa Timur	1409	418	176
Banten	354	145	18
Bali	209	78	35
Nusa Tenggara Barat	397	145	29
Nusa Tenggara Timur	455	136	48
Kalimantan Barat	533	175	28
Kalimantan Tengah	340	48	29
Kalimantan Selatan	397	130	39
Kalimantan Timur	341	159	41
Sulawesi Utara	322	99	27
Sulawesi Tengah	360	130	29
Sulawesi Selatan	839	167	61
Sulawesi Tenggara	375	178	30
Gorontalo	177	45	11
Sulawesi Barat	154	57	14
Maluku	188	107	26
Maluku Utara	155	89	12
Papua Barat	61	48	10
Papua	91	108	31
Indonesia	14711	5163	1521

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.4.2 Jumlah Perpustakaan Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Swasta

Provinsi	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	77	98	21
Sumatera Utara	599	421	297
Sumatera Barat	78	80	60
Riau	129	134	62
Jambi	46	48	35
Sumatera Selatan	255	265	60
Bengkulu	21	32	15
Lampung	365	185	105
Kep. Bangka Belitung	28	26	30
Kepulauan Riau	44	28	23
DKI Jakarta	500	409	436
Jawa Barat	1337	652	892
Jawa Tengah	983	491	665
DI Yogyakarta	190	94	133
Jawa Timur	1360	888	692
Banten	414	317	205
Bali	104	89	54
Nusa Tenggara Barat	67	134	34
Nusa Tenggara Timur	188	168	40
Kalimantan Barat	131	89	26
Kalimantan Tengah	51	24	16
Kalimantan Selatan	47	57	22
Kalimantan Timur	117	100	74
Sulawesi Utara	129	86	17
Sulawesi Tengah	41	24	10
Sulawesi Selatan	206	205	141
Sulawesi Tenggara	26	18	20
Gorontalo	10	7	4
Sulawesi Barat	14	10	4
Maluku	61	78	6
Maluku Utara	32	51	5
Papua Barat	23	51	2
Papua	29	93	11
Indonesia	7702	5452	4217

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.4.3 Jumlah Perpustakaan Menurut Status Sekolah, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Negeri+Swasta			
Provinsi	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	702	363	77
Sumatera Utara	1362	719	381
Sumatera Barat	557	283	121
Riau	610	385	104
Jambi	423	183	72
Sumatera Selatan	807	554	102
Bengkulu	261	127	40
Lampung	831	364	156
Kep. Bangka Belitung	155	65	60
Kepulauan Riau	170	102	32
DKI Jakarta	747	528	490
Jawa Barat	2735	970	1028
Jawa Tengah	2462	857	818
DI Yogyakarta	384	164	180
Jawa Timur	2769	1306	868
Banten	768	462	223
Bali	313	167	89
Nusa Tenggara Barat	464	279	63
Nusa Tenggara Timur	643	304	88
Kalimantan Barat	664	264	54
Kalimantan Tengah	391	72	45
Kalimantan Selatan	444	187	61
Kalimantan Timur	458	259	115
Sulawesi Utara	451	185	44
Sulawesi Tengah	401	154	39
Sulawesi Selatan	1045	372	202
Sulawesi Tenggara	401	196	50
Gorontalo	187	52	15
Sulawesi Barat	168	67	18
Maluku	249	185	32
Maluku Utara	187	140	17
Papua Barat	84	99	12
Papua	120	201	42
Indonesia	22413	10615	5738

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.5.1 Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Laki-laki			
Provinsi	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13 458	6 244	5 641
Sumatera Utara	27 268	16 275	15 856
Sumatera Barat	9 991	4 951	5 249
Riau	14 984	5 445	4 737
Jambi	9 522	4 067	3 125
Sumatera Selatan	18 666	7 545	6 016
Bengkulu	6 380	2 722	2 167
Lampung	20 453	9 743	7 003
Kep. Bangka Belitung	3 138	1 209	1 176
Kepulauan Riau	3 866	5 445	1 369
DKI Jakarta	15 050	9 828	11 720
Jawa Barat	92 196	38 282	29 718
Jawa Tengah	89 305	33 569	28 031
DI Yogyakarta	9 527	4 875	6 233
Jawa Timur	103 407	39 507	29 183
Banten	23 224	10 293	4 388
Bali	14 019	6 045	5 465
Nusa Tenggara Barat	18 430	6 330	4 723
Nusa Tenggara Timur	20 284	8 165	5 707
Kalimantan Barat	17 247	5 987	4 005
Kalimantan Tengah	9 572	3 633	2 507
Kalimantan Selatan	15 969	3 732	2 562
Kalimantan Timur	11 679	5 106	4 439
Sulawesi Utara	4 288	3 041	2 601
Sulawesi Tengah	10 270	3 533	2 410
Sulawesi Selatan	24 204	10 617	8 825
Sulawesi Tenggara	9 090	4 805	3 867
Gorontalo	2 286	1 275	877
Sulawesi Barat	5 139	1 962	1 183
Maluku	6 067	2 906	2 610
Maluku Utara	3 637	1 808	1 442
Papua Barat	2 458	1 151	793
Papua	6 990	2 631	2 374
Indonesia	642 064	268 770	221 061

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.5.2 Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Provinsi	Perempuan		
	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	34 447	12 495	9 162
Sumatera Utara	77 016	26 158	20 677
Sumatera Barat	32 636	12 406	10 258
Riau	33 969	10 311	7 609
Jambi	15 939	5 492	3 466
Sumatera Selatan	41 307	13 662	9 346
Bengkulu	9 894	3 911	2 921
Lampung	37 039	11 687	7 811
Kep. Bangka Belitung	5 947	1 596	1 096
Kepulauan Riau	7 255	2 343	1 692
DKI Jakarta	31 130	11 506	12 738
Jawa Barat	135 261	35 837	26 435
Jawa Tengah	115 176	34 123	23 684
DI Yogyakarta	15 473	5 339	5 573
Jawa Timur	131 797	38 247	26 608
Banten	35 076	9 173	6 485
Bali	15 648	1 939	3 570
Nusa Tenggara Barat	19 510	5 180	3 416
Nusa Tenggara Timur	27 422	7 427	4 549
Kalimantan Barat	19 495	6 163	3 735
Kalimantan Tengah	15 124	4 846	3 149
Kalimantan Selatan	25 129	5 266	3 201
Kalimantan Timur	18 231	5 464	4 360
Sulawesi Utara	14 338	6 416	3 713
Sulawesi Tengah	16 498	4 058	2 596
Sulawesi Selatan	52 575	14 469	9 361
Sulawesi Tenggara	14 715	4 924	3 263
Gorontalo	6 813	2 860	1 393
Sulawesi Barat	7 515	2 036	1 037
Maluku	12 431	4 482	3 475
Maluku Utara	5 730	1 878	1 357
Papua Barat	2 665	1 233	884
Papua	6 998	2 913	2 270
Indonesia	1 040 199	318 840	230 980

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.5.3 Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Laki-laki+Perempuan			
Provinsi	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	47 905	18 739	14 803
Sumatera Utara	104 284	42 433	36 533
Sumatera Barat	42 627	17 357	15 507
Riau	48 953	15 756	12 346
Jambi	25 461	9 559	6 591
Sumatera Selatan	59 973	21 207	15 452
Bengkulu	16 274	6 633	5 088
Lampung	57 492	21 430	14 814
Kep. Bangka Belitung	9 085	2 805	5 088
Kepulauan Riau	11 121	3 831	3 061
DKI Jakarta	46 180	21 334	24 458
Jawa Barat	227 457	74 119	56 153
Jawa Tengah	204 481	67 692	51 715
DI Yogyakarta	25 000	10 214	11 806
Jawa Timur	235 204	77 754	55 791
Banten	58 300	19 466	13 932
Bali	29 667	10 984	9 035
Nusa Tenggara Barat	37 940	11 510	8 139
Nusa Tenggara Timur	47 706	15 592	10 256
Kalimantan Barat	36 742	12 150	7 740
Kalimantan Tengah	24 696	8 479	5 565
Kalimantan Selatan	41 098	8 998	5 763
Kalimantan Timur	29 910	10 570	8 799
Sulawesi Utara	18 626	9 457	6 314
Sulawesi Tengah	26 768	7 591	5 006
Sulawesi Selatan	76 779	25 086	18 186
Sulawesi Tenggara	23 805	9 729	7 130
Gorontalo	9 099	4 135	2 270
Sulawesi Barat	12 654	3 998	2 220
Maluku	18 498	7 388	6 085
Maluku Utara	9 367	3 686	2 799
Papua Barat	5 123	2 384	1 677
Papua	13 988	5 544	4 644
Indonesia	1 682 263	587 610	452 041

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.6.1 Jumlah Murid Menurut Jenis Kelamin, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Laki-laki

Provinsi	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	260 494	104 132	110 367
Sumatera Utara	916 921	327 305	385 747
Sumatera Barat	349 683	102 695	117 419
Riau	372 022	115 873	109 147
Jambi	208 185	60 799	58 511
Sumatera Selatan	470 805	162 213	152 647
Bengkulu	121 112	41 707	36 989
Lampung	507 372	156 696	127 493
Kep. Bangka Belitung	76 674	25 980	20 561
Kepulauan Riau	87 812	32 945	30 004
DKI Jakarta	425 326	183 435	208 823
Jawa Barat	2 432 496	878 330	778 090
Jawa Tengah	1 669 719	614 836	596 433
DI Yogyakarta	152 400	65 798	73 908
Jawa Timur	1 623 460	640 403	694 744
Banten	621 945	212 934	199 614
Bali	212 390	98 699	88 199
Nusa Tenggara Barat	277 800	92 114	80 823
Nusa Tenggara Timur	410 836	131 118	98 939
Kalimantan Barat	323 801	98 316	75 396
Kalimantan Tengah	158 687	44 346	37 802
Kalimantan Selatan	208 361	56 214	50 817
Kalimantan Timur	223 561	79 818	75 409
Sulawesi Utara	142 866	56 584	52 985
Sulawesi Tengah	182 380	56 393	47 905
Sulawesi Selatan	533 351	191 087	175 538
Sulawesi Tenggara	174 796	59 916	53 340
Gorontalo	82 042	22 376	19 673
Sulawesi Barat	90 874	29 508	24 203
Maluku	137 871	42 486	40 032
Maluku Utara	88 604	28 590	24 235
Papua Barat	61 124	21 410	20 972
Papua	180 188	60 531	42 972
Indonesia	13 785 958	4 895 587	4 709 977

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.6.2 Jumlah Murid Menurut Jenis Kelamin, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Provinsi	Perempuan		
	SD	SMP	SM
	(1)	(2)	(3)
Aceh	243 855	100 449	96 775
Sumatera Utara	765 619	313 589	301 760
Sumatera Barat	316 918	104 826	100 911
Riau	346 491	114 329	88 020
Jambi	196 303	59 561	53 003
Sumatera Selatan	443 835	161 708	138 371
Bengkulu	113 280	41 373	34 446
Lampung	479 197	160 238	103 725
Kep. Bangka Belitung	72 301	27 392	21 041
Kepulauan Riau	84 108	31 517	25 516
DKI Jakarta	402 125	181 984	215 167
Jawa Barat	2328 625	863 135	535 625
Jawa Tengah	1 565 528	603 080	424 071
DI Yogyakarta	142 308	63 670	64 100
Jawa Timur	1 514 460	590 989	497 679
Banten	590 830	202 000	140 376
Bali	198 522	88 783	72 041
Nusa Tenggara Barat	262 314	86 872	67 986
Nusa Tenggara Timur	383 272	133 811	98 162
Kalimantan Barat	303 193	103 333	70 916
Kalimantan Tengah	151 400	43 233	34 072
Kalimantan Selatan	192 083	52 525	44 668
Kalimantan Timur	209 317	76 329	67 593
Sulawesi Utara	135 101	54 446	52 793
Sulawesi Tengah	173 379	56 777	45 860
Sulawesi Selatan	501 069	193 857	147 910
Sulawesi Tenggara	166 764	59 597	53 712
Gorontalo	78 968	23 516	19 885
Sulawesi Barat	86 939	26 176	23 602
Maluku	130 654	40 415	40 737
Maluku Utara	90 725	27 093	23 094
Papua Barat	57 787	19 711	16 935
Papua	156 452	51 192	31 850
Indonesia	12 983 722	4 757 506	3 752 402

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 3.6.3 Jumlah Murid Menurut Jenis Kelamin, Provinsi, dan Jenjang Satuan Pendidikan, Tahun Ajaran 2012/2013

Laki-laki + Perempuan

Provinsi	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	504 349	204 581	207 142
Sumatera Utara	1 782 540	640 894	687 507
Sumatera Barat	666 601	207 521	218 330
Riau	718 513	230 202	197 407
Jambi	404 488	120 360	111 514
Sumatera Selatan	914 640	323 921	291 018
Bengkulu	234 392	83 080	71 435
Lampung	986 569	316 934	231 218
Kep. Bangka Belitung	148 975	53 372	41 502
Kepulauan Riau	171 920	64 462	55 520
DKI Jakarta	827 451	365 419	423 990
Jawa Barat	4 761 121	1 741 465	1 313 715
Jawa Tengah	3 235 247	1 217 916	1 020 504
DI Yogyakarta	294 708	129 468	138 008
Jawa Timur	3 137 920	1 231 392	1 192 423
Banten	1 212 775	414 934	339 990
Bali	410 912	187 482	160 240
Nusa Tenggara Barat	540 114	178 986	148 809
Nusa Tenggara Timur	794 108	264 929	197 101
Kalimantan Barat	626 994	201 649	146 312
Kalimantan Tengah	310 087	87 579	71 874
Kalimantan Selatan	400 444	108 739	95 485
Kalimantan Timur	432 878	156 147	143 002
Sulawesi Utara	277 967	111 030	105 778
Sulawesi Tengah	355 759	113 170	93 765
Sulawesi Selatan	1 034 420	384 944	323 448
Sulawesi Tenggara	341 560	119 513	107 052
Gorontalo	161 010	45 892	39 558
Sulawesi Barat	177 813	55 684	47 805
Maluku	268 525	82 901	80 769
Maluku Utara	179 329	55 683	47 329
Papua Barat	118 911	41 121	37 907
Papua	336 640	111 723	74 822
Indonesia	26 769 680	9 653 093	8 462 379

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TA 2012/2013

Tabel 4.1.1 Persentase Penduduk Berumur 0–6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	16,69	18,38	17,52
Sumatera Utara	13,60	13,34	13,48
Sumatera Barat	12,77	12,93	12,84
Riau	12,62	11,09	11,87
Jambi	13,78	13,37	13,58
Sumatera Selatan	10,30	13,97	12,17
Bengkulu	12,44	12,45	12,44
Lampung	14,85	14,18	14,52
Kep. Bangka Belitung	15,54	11,63	13,63
Kepulauan Riau	11,61	14,54	13,09
DKI Jakarta	18,42	23,80	20,99
Jawa Barat	17,71	18,70	18,19
Jawa Tengah	25,56	25,49	25,52
DI Yogyakarta	34,82	39,89	37,19
Jawa Timur	28,99	31,08	30,01
Banten	16,57	14,21	15,42
Bali	15,22	17,05	16,10
Nusa Tenggara Barat	19,26	16,83	18,07
Nusa Tenggara Timur	17,16	19,31	18,25
Kalimantan Barat	11,27	13,71	12,49
Kalimantan Tengah	17,69	15,85	16,76
Kalimantan Selatan	21,04	19,48	20,26
Kalimantan Timur	15,99	14,89	15,44
Sulawesi Utara	12,30	9,45	10,88
Sulawesi Tengah	18,41	23,60	21,01
Sulawesi Selatan	13,27	15,50	14,36
Sulawesi Tenggara	14,48	9,98	12,29
Gorontalo	23,30	29,42	26,37
Sulawesi Barat	19,01	22,39	20,67
Maluku	9,35	12,87	11,03
Maluku Utara	10,99	9,70	10,37
Papua Barat	12,13	13,97	13,00
Papua	10,87	9,57	10,26
Indonesia	19,07	20,00	19,52

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.1.2 Persentase Penduduk Berumur 0–6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,60	10,92	11,26
Sumatera Utara	8,98	10,14	9,55
Sumatera Barat	10,08	12,20	11,12
Riau	10,70	10,19	10,45
Jambi	10,58	11,48	11,03
Sumatera Selatan	8,96	9,28	9,12
Bengkulu	9,53	9,10	9,32
Lampung	12,46	13,54	12,98
Kep. Bangka Belitung	15,38	14,21	14,81
Kepulauan Riau	12,14	14,76	13,52
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	12,84	13,95	13,38
Jawa Tengah	20,41	20,35	20,38
DI Yogyakarta	37,47	41,96	39,66
Jawa Timur	26,83	25,32	26,09
Banten	7,39	10,46	8,91
Bali	11,00	9,11	10,09
Nusa Tenggara Barat	15,71	16,57	16,14
Nusa Tenggara Timur	9,85	12,64	11,22
Kalimantan Barat	5,26	4,35	4,81
Kalimantan Tengah	15,58	15,07	15,33
Kalimantan Selatan	23,26	23,01	23,14
Kalimantan Timur	16,38	12,13	14,29
Sulawesi Utara	11,73	12,16	11,94
Sulawesi Tengah	18,19	17,23	17,72
Sulawesi Selatan	12,35	13,43	12,88
Sulawesi Tenggara	12,31	11,34	11,83
Gorontalo	26,71	26,15	26,44
Sulawesi Barat	14,62	16,33	15,44
Maluku	7,42	10,79	9,02
Maluku Utara	11,26	12,14	11,68
Papua Barat	11,23	12,13	11,67
Papua	2,91	4,66	3,73
Indonesia	14,84	15,23	19,52

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.1.3 Persentase Penduduk Berumur 0–6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13,04	13,02	13,03
Sumatera Utara	11,14	11,58	11,35
Sumatera Barat	11,10	12,47	11,77
Riau	11,43	10,54	10,99
Jambi	11,55	12,06	11,80
Sumatera Selatan	9,42	10,98	10,19
Bengkulu	10,43	10,14	10,29
Lampung	13,04	13,70	13,36
Kep. Bangka Belitung	15,46	12,95	14,24
Kepulauan Riau	11,68	14,57	13,15
DKI Jakarta	18,42	23,80	20,99
Jawa Barat	16,09	17,11	16,59
Jawa Tengah	22,76	22,68	22,72
DI Yogyakarta	35,71	40,62	38,04
Jawa Timur	27,88	28,12	28,00
Banten	13,56	12,95	13,26
Bali	13,61	14,02	13,81
Nusa Tenggara Barat	17,21	16,68	16,94
Nusa Tenggara Timur	11,15	13,89	12,51
Kalimantan Barat	7,04	7,16	7,10
Kalimantan Tengah	16,29	15,35	15,83
Kalimantan Selatan	22,36	21,58	21,97
Kalimantan Timur	16,14	13,85	15,00
Sulawesi Utara	11,98	10,94	11,46
Sulawesi Tengah	18,24	18,78	18,51
Sulawesi Selatan	12,69	14,18	13,42
Sulawesi Tenggara	12,89	10,98	11,95
Gorontalo	25,54	27,32	26,41
Sulawesi Barat	15,58	17,69	16,60
Maluku	8,10	11,53	9,73
Maluku Utara	11,19	11,51	11,34
Papua Barat	11,52	12,69	12,09
Papua	4,99	5,96	5,44
Indonesia	16,92	17,57	17,24

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan					
	3-5 Tahun			3-6 Tahun		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	29,50	32,87	31,13	26,07	28,13	27,10
Sumatera Utara	22,84	23,93	23,34	21,44	22,36	21,86
Sumatera Barat	17,58	20,44	18,99	21,95	22,50	22,21
Riau	18,02	14,88	16,46	21,40	18,54	19,99
Jambi	23,50	24,51	24,02	22,55	21,38	21,95
Sumatera Selatan	20,17	26,15	23,42	18,52	22,17	20,48
Bengkulu	19,22	24,79	21,82	21,29	20,84	21,07
Lampung	25,04	26,52	25,78	24,40	24,32	24,36
Kep. Bangka Belitung	25,11	22,31	23,82	25,21	22,38	23,95
Kepulauan Riau	19,88	25,37	22,71	20,11	25,34	22,75
DKI Jakarta	30,75	36,20	33,29	32,68	38,87	35,75
Jawa Barat	26,03	30,92	28,36	28,23	31,17	29,64
Jawa Tengah	46,14	48,64	47,34	44,39	42,86	43,64
DI Yogyakarta	51,20	61,91	56,64	55,91	55,30	55,60
Jawa Timur	44,22	49,55	46,84	48,32	50,62	49,45
Banten	26,58	26,22	26,41	26,66	24,85	25,83
Bali	27,74	29,30	28,50	28,40	30,13	29,26
Nusa Tenggara Barat	29,86	29,31	29,59	32,17	29,21	30,74
Nusa Tenggara Timur	34,40	33,29	33,83	27,43	30,30	28,91
Kalimantan Barat	18,66	21,97	20,33	19,99	21,64	20,84
Kalimantan Tengah	33,50	26,34	29,64	30,40	26,32	28,28
Kalimantan Selatan	32,83	34,17	33,49	34,29	33,16	33,73
Kalimantan Timur	26,13	24,88	25,49	27,37	24,75	26,04
Sulawesi Utara	24,47	20,15	22,39	20,53	16,02	18,28
Sulawesi Tengah	23,88	39,72	31,32	29,17	39,08	34,08
Sulawesi Selatan	23,42	27,53	25,33	22,70	27,87	25,18
Sulawesi Tenggara	24,20	18,76	21,62	22,44	17,14	19,98
Gorontalo	47,71	55,76	52,04	41,32	43,22	42,35
Sulawesi Barat	29,44	37,13	33,81	31,58	35,53	33,62
Maluku	19,20	31,05	24,63	15,60	23,82	19,34
Maluku Utara	19,95	17,95	19,10	17,98	16,50	17,32
Papua Barat	23,68	25,36	24,50	20,20	23,56	21,78
Papua	17,69	18,76	18,19	16,75	15,98	16,39
Indonesia	29,50	32,87	31,13	26,07	28,13	27,10

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perdesaan					
	3-5 Tahun			3-6 Tahun		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	18,17	17,92	18,05	18,42	18,17	18,30
Sumatera Utara	16,16	18,27	17,22	14,28	16,26	15,25
Sumatera Barat	15,42	17,64	16,52	16,85	20,07	18,44
Riau	14,38	16,75	15,54	16,75	16,88	16,81
Jambi	21,67	21,47	21,57	17,59	20,02	18,77
Sumatera Selatan	15,62	16,98	16,31	14,91	15,34	15,12
Bengkulu	16,47	16,99	16,72	16,31	15,63	15,98
Lampung	21,05	25,10	23,04	21,54	24,14	22,78
Kep. Bangka Belitung	26,41	21,94	24,38	26,55	24,68	25,65
Kepulauan Riau	18,37	28,33	23,71	19,95	24,35	22,24
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	19,19	21,19	20,18	21,20	22,97	22,07
Jawa Tengah	34,70	37,68	36,13	34,60	34,93	34,76
DI Yogyakarta	60,35	65,66	63,02	59,23	61,09	60,19
Jawa Timur	41,47	41,71	41,59	43,85	42,45	43,18
Banten	14,90	18,47	16,64	12,59	18,73	15,55
Bali	15,64	12,98	14,42	17,28	16,48	16,92
Nusa Tenggara Barat	27,90	28,37	28,13	25,06	27,48	26,25
Nusa Tenggara Timur	16,84	22,13	19,50	16,26	19,88	18,07
Kalimantan Barat	8,24	8,33	8,28	8,39	7,36	7,90
Kalimantan Tengah	23,52	23,70	23,61	24,22	23,10	23,68
Kalimantan Selatan	38,84	38,68	38,76	38,26	37,22	37,73
Kalimantan Timur	23,89	22,25	23,13	25,81	21,28	23,70
Sulawesi Utara	21,63	21,10	21,35	20,07	19,35	19,69
Sulawesi Tengah	31,33	30,41	30,89	30,04	28,82	29,45
Sulawesi Selatan	22,62	23,88	23,27	22,15	22,16	22,16
Sulawesi Tenggara	21,92	21,26	21,60	20,13	19,85	20,00
Gorontalo	49,31	46,55	47,99	43,61	42,95	43,29
Sulawesi Barat	22,44	27,86	24,96	23,81	27,90	25,73
Maluku	13,26	20,31	16,57	11,86	17,21	14,44
Maluku Utara	21,31	22,02	21,67	18,40	19,63	19,00
Papua Barat	17,48	21,05	19,26	17,35	19,92	18,63
Papua	4,19	5,27	4,69	3,98	6,39	5,08
Indonesia	24,32	25,96	25,13	24,38	25,31	24,83

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					
	3-5 Tahun			3-6 Tahun		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	21,40	22,28	21,82	20,59	21,15	20,86
Sumatera Utara	19,38	20,74	20,04	17,67	18,93	18,26
Sumatera Barat	16,20	18,65	17,41	18,74	20,95	19,82
Riau	15,72	16,05	15,88	18,46	17,52	18,01
Jambi	22,24	22,44	22,34	19,06	20,46	19,75
Sumatera Selatan	17,10	20,28	18,75	16,07	17,82	16,96
Bengkulu	17,32	19,29	18,26	17,83	17,28	17,56
Lampung	22,05	25,47	23,73	22,26	24,18	23,18
Kep. Bangka Belitung	25,78	22,13	24,11	25,88	23,61	24,82
Kepulauan Riau	19,68	25,81	22,85	20,09	25,19	22,68
DKI Jakarta	30,75	36,20	33,29	32,68	38,87	35,75
Jawa Barat	23,85	27,67	25,69	25,97	28,43	27,16
Jawa Tengah	39,88	42,65	41,21	39,00	38,56	38,79
DI Yogyakarta	54,56	63,26	58,97	57,05	57,37	57,21
Jawa Timur	42,79	45,52	44,13	46,00	46,46	46,22
Banten	22,80	23,68	23,23	22,18	22,78	22,46
Bali	22,95	23,29	23,11	23,76	25,04	24,37
Nusa Tenggara Barat	28,71	28,75	28,73	27,98	28,18	28,08
Nusa Tenggara Timur	20,00	24,21	22,13	18,26	21,84	20,06
Kalimantan Barat	11,27	12,48	11,87	11,62	11,74	11,68
Kalimantan Tengah	26,55	24,61	25,57	26,11	24,18	25,15
Kalimantan Selatan	36,34	36,90	36,62	36,66	35,62	36,14
Kalimantan Timur	25,23	23,94	24,59	26,74	23,49	25,14
Sulawesi Utara	22,96	20,69	21,82	20,28	17,88	19,06
Sulawesi Tengah	29,63	32,49	30,99	29,84	31,29	30,55
Sulawesi Selatan	22,93	25,11	24,00	22,36	24,14	23,25
Sulawesi Tenggara	22,55	20,57	21,61	20,77	19,12	19,99
Gorontalo	48,81	49,92	49,36	42,87	43,05	42,96
Sulawesi Barat	23,69	30,15	26,83	25,38	29,68	27,44
Maluku	15,28	23,87	19,28	13,20	19,40	16,13
Maluku Utara	20,93	21,11	21,02	18,29	18,89	18,58
Papua Barat	19,51	22,41	20,94	18,29	21,05	19,64
Papua	7,39	8,54	7,92	6,96	8,66	7,74
Indonesia	27,43	29,89	28,62	27,92	29,19	28,54

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan					
	3-5 Tahun			3-6 Tahun		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34,85	40,10	37,39	26,62	28,65	27,64
Sumatera Utara	28,65	29,79	29,17	21,45	22,51	21,93
Sumatera Barat	30,60	30,21	30,41	22,20	22,70	22,44
Riau	30,20	26,11	28,17	21,40	18,81	20,13
Jambi	30,89	28,74	29,79	23,65	21,78	22,69
Sumatera Selatan	25,66	30,43	28,25	18,82	22,81	20,97
Bengkulu	27,59	29,96	28,69	21,47	20,84	21,16
Lampung	33,41	31,58	32,49	24,83	24,54	24,69
Kep. Bangka Belitung	35,81	29,89	33,09	25,39	22,38	24,05
Kepulauan Riau	27,20	32,84	30,10	20,26	25,40	22,86
DKI Jakarta	39,95	54,17	46,59	32,68	39,45	36,03
Jawa Barat	37,28	41,59	39,33	28,23	31,24	29,67
Jawa Tengah	58,71	59,87	59,27	45,07	44,43	44,76
DI Yogyakarta	82,56	80,63	81,58	60,63	60,85	60,74
Jawa Timur	66,48	70,63	68,52	49,37	52,16	50,74
Banten	38,08	33,23	35,74	27,03	25,81	26,47
Bali	35,65	39,39	37,47	28,40	30,13	29,26
Nusa Tenggara Barat	42,83	38,60	40,78	32,45	29,45	31,00
Nusa Tenggara Timur	39,85	43,65	41,80	29,24	31,89	30,60
Kalimantan Barat	25,74	30,62	28,20	19,99	22,62	21,35
Kalimantan Tengah	43,30	34,36	38,49	31,52	26,88	29,11
Kalimantan Selatan	45,80	43,21	44,52	34,94	33,16	34,06
Kalimantan Timur	38,98	34,85	36,87	27,37	24,78	26,05
Sulawesi Utara	26,84	22,03	24,52	20,95	16,02	18,49
Sulawesi Tengah	43,47	63,10	52,70	31,44	41,15	36,26
Sulawesi Selatan	29,87	38,09	33,69	23,14	27,87	25,40
Sulawesi Tenggara	30,89	22,37	26,84	22,65	17,14	20,09
Gorontalo	59,19	64,33	61,96	42,86	46,12	44,62
Sulawesi Barat	55,05	47,06	50,51	34,25	36,20	35,26
Maluku	22,31	33,16	27,29	15,80	23,82	19,45
Maluku Utara	22,99	24,96	23,82	17,98	17,90	17,94
Papua Barat	27,97	30,46	29,18	20,49	23,56	21,94
Papua	23,46	21,22	22,42	17,22	15,98	16,65
Indonesia	42,51	45,48	43,94	32,01	33,94	32,95

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perdesaan					
	3-5 Tahun			3-6 Tahun		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	24,57	24,92	24,73	18,60	18,49	18,55
Sumatera Utara	20,10	21,44	20,78	14,54	16,34	15,42
Sumatera Barat	22,45	26,87	24,63	16,87	20,24	18,53
Riau	24,40	22,80	23,62	17,28	17,11	17,20
Jambi	24,31	26,31	25,30	17,81	20,13	18,94
Sumatera Selatan	20,69	20,07	20,38	14,91	15,34	15,12
Bengkulu	21,18	20,38	20,80	16,31	15,63	15,98
Lampung	28,98	31,01	29,98	21,54	24,29	22,86
Kep. Bangka Belitung	35,62	37,32	36,39	26,55	25,14	25,87
Kepulauan Riau	27,86	32,56	30,38	19,95	24,98	22,56
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	28,99	31,16	30,06	21,66	23,36	22,50
Jawa Tengah	46,09	47,67	46,85	35,00	35,88	35,42
DI Yogyakarta	77,41	81,55	79,49	62,98	62,98	62,98
Jawa Timur	59,73	57,54	58,67	44,59	43,19	43,91
Banten	17,31	25,28	21,19	12,59	18,73	15,55
Bali	24,33	22,30	23,40	17,71	16,73	17,27
Nusa Tenggara Barat	33,34	36,87	35,08	25,30	28,35	26,79
Nusa Tenggara Timur	23,11	28,33	25,73	16,87	20,82	18,85
Kalimantan Barat	11,67	9,88	10,80	8,55	7,36	7,98
Kalimantan Tengah	33,04	31,39	32,23	24,33	23,60	23,98
Kalimantan Selatan	52,91	49,09	50,94	38,26	37,53	37,89
Kalimantan Timur	36,81	30,47	33,86	25,86	21,34	23,75
Sulawesi Utara	27,49	25,59	26,49	20,86	19,72	20,27
Sulawesi Tengah	41,18	41,27	41,22	30,69	29,65	30,19
Sulawesi Selatan	29,28	29,17	29,22	22,23	22,37	22,30
Sulawesi Tenggara	27,56	26,71	27,15	20,20	19,85	20,04
Gorontalo	58,77	58,99	58,87	45,09	44,08	44,60
Sulawesi Barat	32,69	39,15	35,69	23,81	27,90	25,73
Maluku	16,77	24,83	20,55	12,79	17,93	15,27
Maluku Utara	26,07	25,75	25,91	19,12	19,86	19,49
Papua Barat	26,14	27,58	26,86	19,48	20,67	20,07
Papua	5,51	9,19	7,19	3,98	6,70	5,22
Indonesia	33,37	34,25	33,80	24,75	25,76	25,24

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah di TK/BA/RA/PAUD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					
	3-5 Tahun			3-6 Tahun		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	27,50	29,35	28,38	20,87	21,54	21,19
Sumatera Utara	24,23	25,08	24,64	17,81	19,05	18,40
Sumatera Barat	25,40	28,07	26,72	18,84	21,13	19,96
Riau	26,54	24,04	25,31	18,80	17,76	18,30
Jambi	26,33	27,08	26,71	19,55	20,66	20,10
Sumatera Selatan	22,31	23,80	23,08	16,17	18,06	17,13
Bengkulu	23,15	23,21	23,18	17,89	17,28	17,59
Lampung	30,09	31,16	30,62	22,37	24,36	23,32
Kep. Bangka Belitung	35,71	33,66	34,77	25,97	23,85	24,99
Kepulauan Riau	27,29	32,80	30,14	20,22	25,33	22,81
DKI Jakarta	39,95	54,17	46,59	32,68	39,45	36,03
Jawa Barat	34,64	38,11	36,31	26,12	28,60	27,32
Jawa Tengah	51,81	53,20	52,48	39,54	39,79	39,66
DI Yogyakarta	80,67	80,96	80,82	61,44	61,61	61,53
Jawa Timur	62,97	63,90	63,43	46,89	47,59	47,23
Banten	31,36	30,63	31,00	22,43	23,42	22,89
Bali	31,17	33,09	32,08	23,94	25,13	24,51
Nusa Tenggara Barat	37,24	37,57	37,40	28,23	28,79	28,51
Nusa Tenggara Timur	26,12	31,19	28,68	19,09	22,90	21,01
Kalimantan Barat	15,75	16,20	15,97	11,73	12,04	11,88
Kalimantan Tengah	36,16	32,42	34,27	26,53	24,70	25,62
Kalimantan Selatan	49,95	46,77	48,33	36,92	35,81	36,36
Kalimantan Timur	38,11	33,28	35,73	26,76	23,53	25,17
Sulawesi Utara	27,19	24,07	25,61	20,90	18,09	19,47
Sulawesi Tengah	41,70	46,15	43,81	30,87	32,42	31,63
Sulawesi Selatan	29,50	32,17	30,82	22,57	24,27	23,42
Sulawesi Tenggara	28,48	25,52	27,07	20,88	19,12	20,05
Gorontalo	58,90	60,94	59,92	44,36	44,85	44,61
Sulawesi Barat	36,67	41,11	38,83	25,92	29,84	27,80
Maluku	18,66	27,59	22,81	13,87	19,88	16,71
Maluku Utara	25,20	25,58	25,38	18,82	19,40	19,10
Papua Barat	26,74	28,49	27,61	19,81	21,56	20,67
Papua	9,76	12,11	10,84	7,07	8,90	7,90
Indonesia	37,89	39,72	38,78	28,31	29,76	29,02

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	35,15	34,40	34,78
Sumatera Utara	31,09	30,98	31,03
Sumatera Barat	31,43	31,59	31,51
Riau	31,36	31,03	31,20
Jambi	29,09	29,48	29,28
Sumatera Selatan	29,99	28,36	29,18
Bengkulu	31,81	32,30	32,06
Lampung	28,92	28,28	28,60
Kep. Bangka Belitung	25,70	26,55	26,11
Kepulauan Riau	24,41	24,50	24,45
DKI Jakarta	22,58	22,33	22,45
Jawa Barat	26,39	26,13	26,26
Jawa Tengah	25,29	23,86	24,56
DI Yogyakarta	28,70	26,77	27,72
Jawa Timur	24,40	22,64	23,51
Banten	26,81	26,60	26,71
Bali	24,60	23,33	23,97
Nusa Tenggara Barat	31,82	28,16	29,92
Nusa Tenggara Timur	39,37	36,01	37,70
Kalimantan Barat	29,38	29,85	29,62
Kalimantan Tengah	29,76	29,56	29,67
Kalimantan Selatan	28,60	27,79	28,20
Kalimantan Timur	28,08	28,97	28,50
Sulawesi Utara	26,89	27,26	27,07
Sulawesi Tengah	31,58	32,35	31,96
Sulawesi Selatan	31,91	29,98	30,92
Sulawesi Tenggara	38,05	37,68	37,87
Gorontalo	30,05	32,05	31,07
Sulawesi Barat	33,14	33,74	33,45
Maluku	37,01	36,62	36,82
Maluku Utara	36,28	36,38	36,33
Papua Barat	31,97	33,28	32,59
Papua	31,67	33,41	32,48
Indonesia	27,04	26,28	26,66

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.4.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,22	31,10	31,66
Sumatera Utara	32,67	31,31	31,99
Sumatera Barat	28,93	28,77	28,85
Riau	27,92	28,63	28,26
Jambi	27,15	27,33	27,24
Sumatera Selatan	25,97	26,17	26,07
Bengkulu	27,12	27,79	27,45
Lampung	25,32	25,41	25,37
Kep. Bangka Belitung	23,86	25,54	24,66
Kepulauan Riau	27,87	26,52	27,23
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	25,28	24,13	24,71
Jawa Tengah	24,13	22,57	23,34
DI Yogyakarta	23,24	18,98	21,04
Jawa Timur	22,54	20,31	21,40
Banten	28,45	27,65	28,06
Bali	23,73	21,76	22,75
Nusa Tenggara Barat	30,66	26,62	28,59
Nusa Tenggara Timur	34,67	33,08	33,86
Kalimantan Barat	27,38	27,42	27,40
Kalimantan Tengah	26,32	27,53	26,89
Kalimantan Selatan	25,53	24,80	25,17
Kalimantan Timur	28,16	29,75	28,90
Sulawesi Utara	25,02	25,26	25,13
Sulawesi Tengah	27,28	28,34	27,80
Sulawesi Selatan	29,30	27,26	28,25
Sulawesi Tenggara	32,81	31,52	32,17
Gorontalo	28,53	29,00	28,76
Sulawesi Barat	28,89	30,22	29,55
Maluku	34,17	34,58	34,37
Maluku Utara	32,49	32,63	32,56
Papua Barat	32,27	31,23	31,78
Papua	25,09	23,61	24,39
Indonesia	26,58	25,45	26,02

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.4.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	33,06	32,03	32,54
Sumatera Utara	31,89	31,15	31,52
Sumatera Barat	29,91	29,87	29,89
Riau	29,26	29,57	29,41
Jambi	27,74	27,99	27,86
Sumatera Selatan	27,40	26,97	27,19
Bengkulu	28,56	29,24	28,90
Lampung	26,25	26,18	26,21
Kep. Bangka Belitung	24,76	26,04	25,38
Kepulauan Riau	25,00	24,83	24,92
DKI Jakarta	22,58	22,33	22,45
Jawa Barat	26,02	25,46	25,74
Jawa Tengah	24,66	23,16	23,90
DI Yogyakarta	26,86	24,09	25,45
Jawa Timur	23,43	21,42	22,41
Banten	27,33	26,93	27,14
Bali	24,26	22,71	23,49
Nusa Tenggara Barat	31,14	27,27	29,14
Nusa Tenggara Timur	35,62	33,65	34,62
Kalimantan Barat	27,98	28,17	28,08
Kalimantan Tengah	27,47	28,22	27,83
Kalimantan Selatan	26,83	26,06	26,45
Kalimantan Timur	28,11	29,26	28,65
Sulawesi Utara	25,85	26,17	26,01
Sulawesi Tengah	28,31	29,35	28,82
Sulawesi Selatan	30,28	28,27	29,24
Sulawesi Tenggara	34,29	33,27	33,78
Gorontalo	29,04	30,06	29,55
Sulawesi Barat	29,86	31,04	30,45
Maluku	35,27	35,38	35,33
Maluku Utara	33,53	33,68	33,60
Papua Barat	32,17	31,88	32,04
Papua	26,79	26,05	26,44
Indonesia	26,81	25,86	26,34

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.5.1 Persentase Penduduk Berumur 5-24 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014

Perkotaan

Jenis Kelamin/ Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	8,39	66,70	24,91	100,00
5 - 6	76,37	23,63	0,00	100,00
7 - 12	0,44	99,38	0,18	100,00
13 - 15	0,32	95,90	3,78	100,00
16 - 18	0,40	74,28	25,32	100,00
19 - 24	0,52	28,11	71,37	100,00
Perempuan	8,05	67,11	24,84	100,00
5 - 6	73,74	26,26	0,00	100,00
7 - 12	0,47	99,46	0,07	100,00
13 - 15	0,40	97,08	2,52	100,00
16 - 18	0,39	75,53	24,09	100,00
19 - 24	0,30	27,90	71,80	100,00
Laki-laki+Perempuan	8,22	66,90	24,88	100,00
5 - 6	75,08	24,92	0,00	100,00
7 - 12	0,45	99,42	0,12	100,00
13 - 15	0,36	96,48	3,16	100,00
16 - 18	0,39	74,90	24,71	100,00
19 - 24	0,41	28,01	71,58	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.5.2 Persentase Penduduk Berumur 5-24 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014

Perdesaan

Jenis Kelamin/ Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	9,36	65,65	24,99	100,00
5 - 6	73,70	26,29	0,01	100,00
7 - 12	1,34	98,32	0,35	100,00
13 - 15	0,94	91,68	7,38	100,00
16 - 18	1,15	65,40	33,45	100,00
19 - 24	1,47	16,62	81,90	100,00
Perempuan	8,92	65,98	25,10	100,00
5 - 6	71,22	28,78	0,00	100,00
7 - 12	1,16	98,62	0,21	100,00
13 - 15	0,94	93,63	5,42	100,00
16 - 18	1,17	65,46	33,37	100,00
19 - 24	1,68	16,14	82,18	100,00
Laki-laki+Perempuan	9,15	65,81	25,04	100,00
5 - 6	72,51	27,49	0,00	100,00
7 - 12	1,25	98,47	0,28	100,00
13 - 15	0,94	92,62	6,43	100,00
16 - 18	1,16	65,43	33,41	100,00
19 - 24	1,58	16,38	82,04	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.5.3 Persentase Penduduk Berumur 5-24 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Jenis Kelamin/ Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	8,88	66,17	24,95	100,00
5 - 6	74,99	25,01	0,00	100,00
7 - 12	0,92	98,82	0,27	100,00
13 - 15	0,65	93,66	5,69	100,00
16 - 18	0,77	69,91	29,33	100,00
19 - 24	0,95	22,98	76,07	100,00
Perempuan	8,48	66,55	24,97	100,00
5 - 6	72,46	27,54	0,00	100,00
7 - 12	0,83	99,02	0,15	100,00
13 - 15	0,68	95,27	4,05	100,00
16 - 18	0,76	70,73	28,51	100,00
19 - 24	0,92	22,66	76,42	100,00
Laki-laki+Perempuan	8,68	66,36	24,96	100,00
5 - 6	73,76	26,24	0,00	100,00
7 - 12	0,87	98,92	0,21	100,00
13 - 15	0,67	94,44	4,89	100,00
16 - 18	0,77	70,31	28,93	100,00
19 - 24	0,93	22,82	76,24	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan
			Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	99,86	99,94
Sumatera Utara	99,46	99,24	99,35
Sumatera Barat	99,80	99,42	99,62
Riau	99,26	98,63	98,95
Jambi	99,50	99,79	99,65
Sumatera Selatan	99,72	99,66	99,69
Bengkulu	100,00	100,00	100,00
Lampung	99,63	99,52	99,58
Kep. Bangka Belitung	99,46	100,00	99,72
Kepulauan Riau	99,01	99,62	99,30
DKI Jakarta	99,42	99,51	99,47
Jawa Barat	99,36	99,40	99,38
Jawa Tengah	99,44	99,64	99,54
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00
Jawa Timur	99,48	99,54	99,51
Banten	99,32	99,83	99,57
Bali	99,42	99,05	99,24
Nusa Tenggara Barat	99,31	99,90	99,59
Nusa Tenggara Timur	98,82	98,67	98,75
Kalimantan Barat	99,49	99,22	99,36
Kalimantan Tengah	99,74	99,29	99,52
Kalimantan Selatan	98,71	99,78	99,22
Kalimantan Timur	99,12	99,25	99,18
Sulawesi Utara	98,67	99,09	98,88
Sulawesi Tengah	99,59	98,41	99,04
Sulawesi Selatan	98,80	99,45	99,11
Sulawesi Tenggara	99,33	99,53	99,43
Gorontalo	99,62	99,24	99,43
Sulawesi Barat	97,62	98,56	98,08
Maluku	99,75	99,43	99,60
Maluku Utara	99,84	99,88	99,86
Papua Barat	98,30	98,13	98,21
Papua	97,70	97,78	97,74
Indonesia	99,38	99,46	99,42

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.6.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,73	99,89	99,81
Sumatera Utara	99,28	99,09	99,19
Sumatera Barat	98,94	99,21	99,07
Riau	98,72	98,27	98,50
Jambi	98,96	99,85	99,38
Sumatera Selatan	99,34	99,37	99,36
Bengkulu	99,20	99,26	99,23
Lampung	99,50	99,62	99,56
Kep. Bangka Belitung	97,97	99,41	98,67
Kepulauan Riau	99,36	97,11	98,32
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	99,03	99,24	99,13
Jawa Tengah	99,34	99,64	99,48
DI Yogyakarta	100,00	99,63	99,81
Jawa Timur	99,07	99,46	99,26
Banten	98,31	99,22	98,76
Bali	99,82	99,23	99,52
Nusa Tenggara Barat	98,40	99,25	98,79
Nusa Tenggara Timur	97,04	98,65	97,84
Kalimantan Barat	97,39	98,10	97,74
Kalimantan Tengah	99,11	99,77	99,43
Kalimantan Selatan	99,20	99,29	99,24
Kalimantan Timur	99,62	99,58	99,60
Sulawesi Utara	98,89	99,12	99,00
Sulawesi Tengah	96,92	97,82	97,36
Sulawesi Selatan	98,41	99,24	98,81
Sulawesi Tenggara	98,81	99,17	98,99
Gorontalo	96,79	99,14	97,95
Sulawesi Barat	97,69	98,02	97,86
Maluku	99,23	98,71	98,97
Maluku Utara	98,45	98,72	98,59
Papua Barat	96,50	95,51	96,02
Papua	77,48	74,90	76,27
Indonesia	98,32	98,62	98,47

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.6.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,81	99,89	99,84
Sumatera Utara	99,36	99,16	99,26
Sumatera Barat	99,26	99,29	99,27
Riau	98,92	98,41	98,67
Jambi	99,11	99,83	99,46
Sumatera Selatan	99,47	99,47	99,47
Bengkulu	99,42	99,48	99,45
Lampung	99,53	99,59	99,56
Kep. Bangka Belitung	98,67	99,68	99,16
Kepulauan Riau	99,07	99,18	99,12
DKI Jakarta	99,42	99,51	99,47
Jawa Barat	99,25	99,35	99,30
Jawa Tengah	99,38	99,64	99,51
DI Yogyakarta	100,00	99,88	99,94
Jawa Timur	99,26	99,50	99,38
Banten	98,98	99,62	99,29
Bali	99,58	99,12	99,36
Nusa Tenggara Barat	98,76	99,52	99,11
Nusa Tenggara Timur	97,35	98,66	97,99
Kalimantan Barat	97,98	98,40	98,18
Kalimantan Tengah	99,30	99,62	99,46
Kalimantan Selatan	99,00	99,49	99,24
Kalimantan Timur	99,33	99,38	99,35
Sulawesi Utara	98,80	99,11	98,95
Sulawesi Tengah	97,50	97,94	97,71
Sulawesi Selatan	98,54	99,31	98,91
Sulawesi Tenggara	98,94	99,27	99,11
Gorontalo	97,63	99,17	98,40
Sulawesi Barat	97,67	98,14	97,91
Maluku	99,41	98,95	99,19
Maluku Utara	98,79	99,00	98,89
Papua Barat	97,02	96,27	96,65
Papua	81,52	79,78	80,69
Indonesia	98,82	99,02	98,92

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.7.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	98,30	97,74	98,02
Sumatera Utara	96,74	97,80	97,28
Sumatera Barat	95,79	99,57	97,70
Riau	97,20	97,52	97,37
Jambi	97,21	99,28	98,18
Sumatera Selatan	97,14	98,14	97,62
Bengkulu	98,18	98,16	98,17
Lampung	93,26	95,49	94,29
Kep. Bangka Belitung	94,75	95,62	95,18
Kepulauan Riau	99,08	99,57	99,32
DKI Jakarta	96,88	96,48	96,69
Jawa Barat	93,62	96,17	94,87
Jawa Tengah	96,16	96,44	96,29
DI Yogyakarta	100,00	99,84	99,92
Jawa Timur	97,92	98,54	98,22
Banten	96,60	96,21	96,41
Bali	97,94	98,56	98,26
Nusa Tenggara Barat	97,25	97,12	97,18
Nusa Tenggara Timur	97,88	96,71	97,30
Kalimantan Barat	95,19	97,44	96,31
Kalimantan Tengah	97,22	96,98	97,10
Kalimantan Selatan	90,94	95,04	92,74
Kalimantan Timur	97,20	98,70	97,89
Sulawesi Utara	93,85	96,39	95,01
Sulawesi Tengah	91,30	98,50	95,33
Sulawesi Selatan	95,21	96,31	95,76
Sulawesi Tenggara	94,46	96,88	95,57
Gorontalo	91,88	92,65	92,23
Sulawesi Barat	90,16	98,28	94,32
Maluku	99,56	97,73	98,60
Maluku Utara	97,96	98,84	98,43
Papua Barat	98,12	97,91	98,01
Papua	97,20	97,38	97,29
Indonesia	95,90	97,08	96,48

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.7.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	96,08	98,28	97,14
Sumatera Utara	94,07	96,06	95,02
Sumatera Barat	92,47	97,05	94,74
Riau	92,72	92,56	92,64
Jambi	91,42	95,06	93,35
Sumatera Selatan	90,27	92,63	91,37
Bengkulu	96,95	95,12	96,03
Lampung	91,49	96,63	93,92
Kep. Bangka Belitung	88,50	87,36	87,93
Kepulauan Riau	93,82	98,19	95,70
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	88,26	90,15	89,20
Jawa Tengah	92,72	94,73	93,71
DI Yogyakarta	98,26	99,38	98,71
Jawa Timur	94,40	94,97	94,68
Banten	92,01	92,26	92,13
Bali	96,17	95,36	95,78
Nusa Tenggara Barat	96,91	97,81	97,33
Nusa Tenggara Timur	92,96	94,33	93,61
Kalimantan Barat	89,37	90,59	89,96
Kalimantan Tengah	89,93	91,79	90,83
Kalimantan Selatan	88,45	93,98	91,20
Kalimantan Timur	98,43	97,26	97,90
Sulawesi Utara	91,96	95,70	93,82
Sulawesi Tengah	88,76	91,47	90,06
Sulawesi Selatan	89,02	92,60	90,84
Sulawesi Tenggara	91,80	94,03	92,82
Gorontalo	86,85	92,78	89,61
Sulawesi Barat	82,99	93,18	87,84
Maluku	94,68	95,53	95,10
Maluku Utara	95,32	95,74	95,52
Papua Barat	95,84	95,13	95,51
Papua	71,06	73,70	72,28
Indonesia	91,68	93,63	92,62

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.7.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	96,67	98,13	97,38
Sumatera Utara	95,25	96,89	96,06
Sumatera Barat	93,69	98,00	95,84
Riau	94,30	94,42	94,36
Jambi	93,41	96,29	94,88
Sumatera Selatan	92,41	94,42	93,36
Bengkulu	97,34	96,08	96,71
Lampung	91,93	96,35	94,01
Kep. Bangka Belitung	91,64	91,43	91,53
Kepulauan Riau	97,90	99,31	98,56
DKI Jakarta	96,88	96,48	96,69
Jawa Barat	91,72	93,99	92,84
Jawa Tengah	94,26	95,47	94,85
DI Yogyakarta	99,29	99,69	99,48
Jawa Timur	96,07	96,68	96,36
Banten	94,90	94,85	94,87
Bali	97,18	97,27	97,23
Nusa Tenggara Barat	97,03	97,51	97,27
Nusa Tenggara Timur	93,81	94,77	94,26
Kalimantan Barat	90,98	92,57	91,76
Kalimantan Tengah	92,36	93,55	92,94
Kalimantan Selatan	89,54	94,39	91,83
Kalimantan Timur	97,70	98,13	97,89
Sulawesi Utara	92,82	95,99	94,34
Sulawesi Tengah	89,25	93,22	91,23
Sulawesi Selatan	91,21	93,90	92,57
Sulawesi Tenggara	92,49	94,77	93,53
Gorontalo	88,51	92,73	90,47
Sulawesi Barat	84,47	94,36	89,26
Maluku	96,35	96,35	96,35
Maluku Utara	95,92	96,57	96,24
Papua Barat	96,48	96,07	96,28
Papua	77,00	79,29	78,07
Indonesia	93,66	95,27	94,44

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.8.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan
			Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	86,15	91,97	89,08
Sumatera Utara	73,85	79,94	76,80
Sumatera Barat	81,23	92,54	87,18
Riau	80,17	82,38	81,14
Jambi	81,60	85,45	83,50
Sumatera Selatan	78,17	78,55	78,36
Bengkulu	84,67	85,78	85,21
Lampung	76,49	79,56	78,06
Kep. Bangka Belitung	70,76	74,89	72,91
Kepulauan Riau	81,93	83,88	82,98
DKI Jakarta	72,53	68,16	70,23
Jawa Barat	68,10	69,90	68,98
Jawa Tengah	70,71	74,19	72,42
DI Yogyakarta	86,99	86,87	86,94
Jawa Timur	79,51	77,02	78,25
Banten	70,12	68,12	69,14
Bali	87,09	81,03	84,16
Nusa Tenggara Barat	79,13	82,96	80,98
Nusa Tenggara Timur	86,83	81,81	84,53
Kalimantan Barat	74,92	84,69	80,16
Kalimantan Tengah	83,14	76,22	79,64
Kalimantan Selatan	77,22	76,84	77,02
Kalimantan Timur	82,11	83,68	82,86
Sulawesi Utara	69,94	75,67	72,84
Sulawesi Tengah	83,97	86,52	85,17
Sulawesi Selatan	72,99	76,49	74,71
Sulawesi Tenggara	80,17	82,51	81,38
Gorontalo	63,42	87,33	76,03
Sulawesi Barat	69,57	89,12	78,91
Maluku	75,55	81,99	78,74
Maluku Utara	83,03	89,13	86,10
Papua Barat	86,31	83,89	85,25
Papua	85,41	85,04	85,24
Indonesia	74,28	75,53	74,90

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.8.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	76,73	78,95	77,82
Sumatera Utara	70,84	78,90	74,78
Sumatera Barat	72,17	84,69	78,38
Riau	68,40	74,68	71,44
Jambi	63,46	66,83	65,09
Sumatera Selatan	57,68	63,23	60,26
Bengkulu	70,93	77,07	73,91
Lampung	64,97	65,02	64,99
Kep. Bangka Belitung	58,84	58,89	58,86
Kepulauan Riau	69,66	86,46	76,76
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	61,68	53,71	57,86
Jawa Tengah	63,35	61,80	62,63
DI Yogyakarta	87,57	82,17	85,32
Jawa Timur	66,04	59,88	62,98
Banten	61,51	59,47	60,56
Bali	79,06	75,45	77,37
Nusa Tenggara Barat	73,31	69,81	71,46
Nusa Tenggara Timur	69,17	71,94	70,53
Kalimantan Barat	57,92	60,78	59,26
Kalimantan Tengah	59,11	56,63	57,96
Kalimantan Selatan	58,87	58,16	58,53
Kalimantan Timur	76,98	76,20	76,59
Sulawesi Utara	67,81	75,21	71,20
Sulawesi Tengah	64,80	73,07	68,53
Sulawesi Selatan	63,66	67,80	65,67
Sulawesi Tenggara	67,70	68,81	68,23
Gorontalo	64,21	65,79	65,01
Sulawesi Barat	56,24	70,17	63,21
Maluku	73,11	80,38	76,49
Maluku Utara	70,89	69,29	70,10
Papua Barat	77,48	76,61	77,09
Papua	52,48	53,90	53,10
Indonesia	65,40	65,46	65,43

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.8.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	79,25	82,57	80,89
Sumatera Utara	72,33	79,41	75,78
Sumatera Barat	75,73	88,00	81,97
Riau	73,31	77,57	75,30
Jambi	68,64	72,28	70,41
Sumatera Selatan	65,96	69,90	67,84
Bengkulu	75,78	80,17	77,92
Lampung	68,08	69,48	68,75
Kep. Bangka Belitung	64,37	67,26	65,78
Kepulauan Riau	78,62	84,36	81,57
DKI Jakarta	72,53	68,16	70,23
Jawa Barat	66,04	64,88	65,48
Jawa Tengah	66,93	68,20	67,54
DI Yogyakarta	87,18	85,48	86,44
Jawa Timur	72,40	68,10	70,25
Banten	67,12	65,31	66,25
Bali	83,99	78,97	81,59
Nusa Tenggara Barat	76,03	75,35	75,68
Nusa Tenggara Timur	73,70	74,24	73,96
Kalimantan Barat	63,27	69,80	66,48
Kalimantan Tengah	67,41	64,14	65,84
Kalimantan Selatan	66,99	67,38	67,18
Kalimantan Timur	80,23	80,78	80,50
Sulawesi Utara	68,78	75,44	71,98
Sulawesi Tengah	70,53	77,33	73,64
Sulawesi Selatan	67,46	71,40	69,38
Sulawesi Tenggara	71,32	73,22	72,25
Gorontalo	63,95	73,19	68,69
Sulawesi Barat	59,54	74,55	66,97
Maluku	74,15	81,11	77,48
Maluku Utara	74,42	75,26	74,83
Papua Barat	80,51	79,06	79,87
Papua	60,79	62,69	61,63
Indonesia	69,91	70,73	70,31

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.9.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan
			Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	43,70	52,24	47,65
Sumatera Utara	28,64	32,02	30,26
Sumatera Barat	45,08	47,76	46,41
Riau	38,14	34,44	36,44
Jambi	29,72	28,33	29,06
Sumatera Selatan	31,57	27,02	29,32
Bengkulu	44,33	48,19	46,21
Lampung	32,97	28,61	30,77
Kep. Bangka Belitung	13,95	13,70	13,83
Kepulauan Riau	16,66	19,17	17,92
DKI Jakarta	22,26	22,77	22,52
Jawa Barat	21,08	21,14	21,11
Jawa Tengah	25,53	23,96	24,73
DI Yogyakarta	59,13	52,85	56,02
Jawa Timur	29,27	26,42	27,84
Banten	21,56	22,82	22,17
Bali	29,52	25,26	27,44
Nusa Tenggara Barat	37,74	31,80	34,79
Nusa Tenggara Timur	51,29	47,04	49,10
Kalimantan Barat	34,00	35,90	34,97
Kalimantan Tengah	35,95	29,68	32,84
Kalimantan Selatan	28,76	33,81	31,12
Kalimantan Timur	29,44	33,56	31,43
Sulawesi Utara	26,62	34,77	30,45
Sulawesi Tengah	39,00	49,90	44,36
Sulawesi Selatan	40,11	41,40	40,78
Sulawesi Tenggara	52,79	53,48	53,15
Gorontalo	37,44	44,02	40,75
Sulawesi Barat	36,14	40,12	38,16
Maluku	46,20	56,20	51,12
Maluku Utara	50,71	52,92	51,77
Papua Barat	34,10	32,98	33,56
Papua	33,47	39,60	35,97
Indonesia	28,11	27,90	28,01

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.9.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23,33	28,34	25,71
Sumatera Utara	16,30	19,73	17,91
Sumatera Barat	19,63	25,50	22,43
Riau	14,99	13,83	14,45
Jambi	18,78	19,12	18,94
Sumatera Selatan	8,91	7,75	8,35
Bengkulu	17,08	19,09	18,04
Lampung	12,60	14,61	13,59
Kep. Bangka Belitung	9,67	12,01	10,75
Kepulauan Riau	9,59	19,58	14,04
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	16,79	12,80	14,83
Jawa Tengah	16,96	15,52	16,20
DI Yogyakarta	22,84	25,51	24,26
Jawa Timur	16,70	14,24	15,46
Banten	13,59	13,07	13,35
Bali	16,90	14,43	15,72
Nusa Tenggara Barat	20,96	19,51	20,22
Nusa Tenggara Timur	17,62	18,40	18,02
Kalimantan Barat	16,69	17,39	17,03
Kalimantan Tengah	15,75	16,01	15,87
Kalimantan Selatan	11,14	11,08	11,11
Kalimantan Timur	21,10	20,09	20,65
Sulawesi Utara	9,94	11,58	10,71
Sulawesi Tengah	15,17	16,41	15,76
Sulawesi Selatan	20,65	22,99	21,84
Sulawesi Tenggara	14,66	14,82	14,74
Gorontalo	21,24	20,16	20,71
Sulawesi Barat	17,38	16,19	16,78
Maluku	22,79	23,60	23,19
Maluku Utara	18,83	19,91	19,37
Papua Barat	32,89	21,50	27,50
Papua	17,10	13,14	15,18
Indonesia	16,62	16,14	16,38

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.9.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,14	36,06	32,93
Sumatera Utara	23,15	26,66	24,82
Sumatera Barat	30,48	35,45	32,89
Riau	25,59	23,19	24,48
Jambi	22,19	22,03	22,11
Sumatera Selatan	17,95	15,72	16,87
Bengkulu	26,75	29,65	28,14
Lampung	18,52	18,82	18,67
Kep. Bangka Belitung	11,68	12,83	12,22
Kepulauan Riau	15,61	19,22	17,40
DKI Jakarta	22,26	22,77	22,52
Jawa Barat	19,83	18,69	19,27
Jawa Tengah	21,33	19,68	20,48
DI Yogyakarta	51,63	46,55	49,08
Jawa Timur	23,19	20,50	21,84
Banten	19,16	20,10	19,61
Bali	25,32	21,76	23,59
Nusa Tenggara Barat	28,60	24,91	26,73
Nusa Tenggara Timur	26,48	25,97	26,22
Kalimantan Barat	22,46	23,91	23,18
Kalimantan Tengah	22,94	21,59	22,31
Kalimantan Selatan	19,32	21,55	20,36
Kalimantan Timur	26,13	28,70	27,34
Sulawesi Utara	18,53	23,60	20,91
Sulawesi Tengah	22,78	27,49	25,05
Sulawesi Selatan	29,21	31,20	30,23
Sulawesi Tenggara	28,29	29,25	28,78
Gorontalo	27,00	28,90	27,94
Sulawesi Barat	21,51	21,56	21,53
Maluku	33,92	39,04	36,44
Maluku Utara	30,41	31,29	30,85
Papua Barat	33,32	25,62	29,66
Papua	23,38	21,42	22,48
Indonesia	22,98	22,66	22,82

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.10.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	96,90	96,83	96,86
Sumatera Utara	96,69	95,40	96,03
Sumatera Barat	98,19	97,68	97,94
Riau	97,13	96,32	96,72
Jambi	95,69	96,53	96,11
Sumatera Selatan	94,49	92,12	93,36
Bengkulu	97,96	97,59	97,77
Lampung	99,16	96,74	97,96
Kep. Bangka Belitung	97,67	96,88	97,29
Kepulauan Riau	98,10	98,50	98,28
DKI Jakarta	97,11	96,57	96,84
Jawa Barat	97,76	97,08	97,43
Jawa Tengah	96,53	96,57	96,55
DI Yogyakarta	98,63	99,66	99,17
Jawa Timur	97,31	96,90	97,11
Banten	96,90	97,05	96,97
Bali	95,49	93,16	94,36
Nusa Tenggara Barat	98,56	98,63	98,59
Nusa Tenggara Timur	93,81	90,86	92,41
Kalimantan Barat	95,66	95,13	95,41
Kalimantan Tengah	97,61	97,41	97,52
Kalimantan Selatan	97,38	96,86	97,13
Kalimantan Timur	95,81	96,23	96,02
Sulawesi Utara	93,70	90,52	92,14
Sulawesi Tengah	93,18	92,44	92,84
Sulawesi Selatan	97,16	96,75	96,96
Sulawesi Tenggara	96,78	96,88	96,83
Gorontalo	98,49	96,80	97,62
Sulawesi Barat	96,04	96,57	96,30
Maluku	90,64	92,09	91,33
Maluku Utara	94,77	93,11	93,98
Papua Barat	92,52	91,80	92,17
Papua	91,41	88,54	90,00
Indonesia	97,00	96,44	96,73

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.10.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	98,34	97,91	98,13
Sumatera Utara	96,80	96,21	96,51
Sumatera Barat	97,89	97,92	97,90
Riau	96,65	95,83	96,24
Jambi	97,17	98,03	97,57
Sumatera Selatan	97,86	97,12	97,49
Bengkulu	98,51	97,71	98,13
Lampung	97,64	98,36	97,99
Kep. Bangka Belitung	95,62	95,95	95,78
Kepulauan Riau	98,63	97,11	97,93
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	98,38	97,46	97,94
Jawa Tengah	96,49	96,23	96,36
DI Yogyakarta	99,27	97,98	98,61
Jawa Timur	96,38	97,37	96,86
Banten	95,63	96,68	96,14
Bali	97,30	95,88	96,59
Nusa Tenggara Barat	96,35	97,68	96,96
Nusa Tenggara Timur	94,29	95,73	95,00
Kalimantan Barat	96,07	95,67	95,88
Kalimantan Tengah	98,06	98,77	98,41
Kalimantan Selatan	97,83	97,46	97,65
Kalimantan Timur	98,43	97,48	97,97
Sulawesi Utara	94,72	93,88	94,33
Sulawesi Tengah	92,53	90,41	91,49
Sulawesi Selatan	95,91	96,28	96,09
Sulawesi Tenggara	96,00	95,31	95,66
Gorontalo	95,23	97,52	96,36
Sulawesi Barat	94,32	94,85	94,58
Maluku	95,44	94,52	94,98
Maluku Utara	96,88	96,96	96,92
Papua Barat	93,16	92,83	93,00
Papua	76,59	73,92	75,34
Indonesia	96,24	96,16	96,20

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.10.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	97,95	97,63	97,80
Sumatera Utara	96,75	95,83	96,29
Sumatera Barat	98,00	97,83	97,92
Riau	96,82	96,01	96,42
Jambi	96,76	97,58	97,15
Sumatera Selatan	96,72	95,53	96,13
Bengkulu	98,36	97,68	98,03
Lampung	98,03	97,93	97,98
Kep. Bangka Belitung	96,59	96,39	96,49
Kepulauan Riau	98,19	98,25	98,22
DKI Jakarta	97,11	96,57	96,84
Jawa Barat	97,97	97,21	97,60
Jawa Tengah	96,51	96,38	96,45
DI Yogyakarta	98,85	99,10	98,98
Jawa Timur	96,81	97,15	96,98
Banten	96,46	96,93	96,69
Bali	96,23	94,31	95,29
Nusa Tenggara Barat	97,22	98,07	97,62
Nusa Tenggara Timur	94,21	94,94	94,56
Kalimantan Barat	95,95	95,53	95,75
Kalimantan Tengah	97,92	98,36	98,13
Kalimantan Selatan	97,65	97,21	97,44
Kalimantan Timur	96,88	96,74	96,81
Sulawesi Utara	94,31	92,45	93,42
Sulawesi Tengah	92,67	90,81	91,77
Sulawesi Selatan	96,34	96,44	96,39
Sulawesi Tenggara	96,21	95,73	95,97
Gorontalo	96,20	97,29	96,74
Sulawesi Barat	94,71	95,24	94,97
Maluku	93,76	93,71	93,74
Maluku Utara	96,36	96,05	96,21
Papua Barat	92,98	92,53	92,76
Papua	79,55	77,04	78,36
Indonesia	96,60	96,29	96,45

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.11.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	88,17	84,51	86,36
Sumatera Utara	78,84	81,54	80,22
Sumatera Barat	78,25	86,48	82,39
Riau	78,21	85,72	82,13
Jambi	77,73	85,22	81,25
Sumatera Selatan	80,83	79,13	80,01
Bengkulu	82,94	75,50	79,22
Lampung	81,43	82,77	82,05
Kep. Bangka Belitung	74,39	76,26	75,30
Kepulauan Riau	85,70	84,88	85,31
DKI Jakarta	78,26	81,02	79,61
Jawa Barat	79,67	83,24	81,42
Jawa Tengah	79,57	81,04	80,28
DI Yogyakarta	84,24	82,05	83,14
Jawa Timur	81,77	85,39	83,52
Banten	80,96	82,95	81,93
Bali	82,96	89,35	86,20
Nusa Tenggara Barat	79,65	86,22	83,16
Nusa Tenggara Timur	72,21	73,66	72,92
Kalimantan Barat	72,01	73,36	72,69
Kalimantan Tengah	77,00	81,72	79,32
Kalimantan Selatan	70,09	79,90	74,40
Kalimantan Timur	78,39	77,86	78,15
Sulawesi Utara	70,06	72,54	71,19
Sulawesi Tengah	70,52	71,13	70,86
Sulawesi Selatan	73,35	77,80	75,60
Sulawesi Tenggara	80,08	74,48	77,51
Gorontalo	67,17	68,56	67,82
Sulawesi Barat	70,81	71,19	71,01
Maluku	73,42	66,14	69,60
Maluku Utara	86,33	69,39	77,23
Papua Barat	76,74	76,74	76,74
Papua	75,18	71,70	73,53
Indonesia	79,39	82,08	80,71

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.11.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	82,86	86,85	84,78
Sumatera Utara	75,40	78,17	76,72
Sumatera Barat	66,33	76,96	71,61
Riau	72,85	77,40	75,11
Jambi	70,99	79,55	75,53
Sumatera Selatan	70,25	78,12	73,94
Bengkulu	74,10	76,21	75,16
Lampung	72,99	80,74	76,65
Kep. Bangka Belitung	64,86	71,96	68,39
Kepulauan Riau	69,33	84,82	75,97
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	72,87	78,20	75,52
Jawa Tengah	74,60	79,90	77,21
DI Yogyakarta	80,10	81,28	80,57
Jawa Timur	79,15	78,00	78,60
Banten	75,61	74,98	75,33
Bali	83,92	80,56	82,30
Nusa Tenggara Barat	82,02	81,36	81,71
Nusa Tenggara Timur	59,96	69,19	64,33
Kalimantan Barat	56,81	65,23	60,90
Kalimantan Tengah	71,05	75,94	73,42
Kalimantan Selatan	66,82	75,25	71,00
Kalimantan Timur	81,90	78,03	80,15
Sulawesi Utara	72,06	74,35	73,20
Sulawesi Tengah	67,13	74,23	70,55
Sulawesi Selatan	70,26	73,42	71,87
Sulawesi Tenggara	72,53	75,36	73,82
Gorontalo	66,54	70,82	68,53
Sulawesi Barat	65,74	69,73	67,64
Maluku	75,19	74,91	75,05
Maluku Utara	74,57	74,00	74,30
Papua Barat	64,01	64,77	64,36
Papua	47,82	47,56	47,70
Indonesia	72,75	76,75	74,68

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.11.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	84,26	86,21	85,20
Sumatera Utara	76,93	79,77	78,33
Sumatera Barat	70,72	80,53	75,61
Riau	74,74	80,52	77,67
Jambi	73,30	81,20	77,34
Sumatera Selatan	73,55	78,45	75,87
Bengkulu	76,91	75,98	76,44
Lampung	75,10	81,23	77,98
Kep. Bangka Belitung	69,64	74,08	71,83
Kepulauan Riau	82,04	84,87	83,36
DKI Jakarta	78,26	81,02	79,61
Jawa Barat	77,26	81,41	79,30
Jawa Tengah	76,83	80,39	78,57
DI Yogyakarta	82,54	81,81	82,20
Jawa Timur	80,39	81,53	80,94
Banten	78,98	80,21	79,56
Bali	83,37	85,80	84,58
Nusa Tenggara Barat	81,16	83,43	82,29
Nusa Tenggara Timur	62,06	70,02	65,86
Kalimantan Barat	61,00	67,58	64,23
Kalimantan Tengah	73,03	77,91	75,40
Kalimantan Selatan	68,25	77,03	72,40
Kalimantan Timur	79,82	77,93	78,96
Sulawesi Utara	71,15	73,60	72,32
Sulawesi Tengah	67,79	73,46	70,62
Sulawesi Selatan	71,36	74,95	73,18
Sulawesi Tenggara	74,47	75,13	74,77
Gorontalo	66,75	70,08	68,29
Sulawesi Barat	66,79	70,07	68,37
Maluku	74,59	71,63	73,10
Maluku Utara	77,26	72,76	75,03
Papua Barat	67,58	68,80	68,18
Papua	54,04	53,26	53,68
Indonesia	75,87	79,28	77,53

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.12.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan
			Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	75,18	75,03	75,11
Sumatera Utara	63,94	70,06	66,91
Sumatera Barat	68,86	76,75	73,01
Riau	65,31	69,91	67,34
Jambi	67,99	75,20	71,54
Sumatera Selatan	66,40	66,81	66,60
Bengkulu	68,83	70,94	69,86
Lampung	66,10	64,58	65,32
Kep. Bangka Belitung	59,82	66,63	63,36
Kepulauan Riau	73,28	72,30	72,75
DKI Jakarta	61,89	56,00	58,79
Jawa Barat	59,39	61,04	60,20
Jawa Tengah	61,62	62,55	62,08
DI Yogyakarta	66,25	65,83	66,06
Jawa Timur	68,98	66,45	67,70
Banten	61,32	61,08	61,20
Bali	77,59	64,95	71,47
Nusa Tenggara Barat	67,62	69,47	68,51
Nusa Tenggara Timur	72,01	67,55	69,97
Kalimantan Barat	58,71	68,91	64,17
Kalimantan Tengah	66,78	62,45	64,59
Kalimantan Selatan	61,40	63,98	62,75
Kalimantan Timur	69,48	71,53	70,46
Sulawesi Utara	59,39	57,29	58,33
Sulawesi Tengah	77,38	66,81	72,40
Sulawesi Selatan	62,63	60,18	61,42
Sulawesi Tenggara	65,39	65,96	65,69
Gorontalo	50,29	71,64	61,55
Sulawesi Barat	62,37	79,00	70,32
Maluku	61,62	61,36	61,49
Maluku Utara	70,66	73,66	72,17
Papua Barat	75,96	66,40	71,78
Papua	66,70	62,55	64,74
Indonesia	63,79	64,04	63,91

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.12.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	65,15	68,89	66,98
Sumatera Utara	62,53	67,00	64,72
Sumatera Barat	55,13	69,07	62,05
Riau	54,82	63,43	58,99
Jambi	50,98	57,65	54,21
Sumatera Selatan	49,08	54,63	51,66
Bengkulu	57,88	65,80	61,72
Lampung	52,30	57,10	54,54
Kep. Bangka Belitung	50,23	51,20	50,68
Kepulauan Riau	60,49	66,27	62,93
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	50,32	46,31	48,40
Jawa Tengah	53,54	54,81	54,13
DI Yogyakarta	73,43	74,22	73,76
Jawa Timur	54,68	51,31	53,00
Banten	49,63	46,88	48,35
Bali	69,93	69,58	69,77
Nusa Tenggara Barat	61,36	59,94	60,61
Nusa Tenggara Timur	43,26	49,59	46,36
Kalimantan Barat	40,89	44,58	42,61
Kalimantan Tengah	42,51	46,63	44,42
Kalimantan Selatan	49,33	47,07	48,26
Kalimantan Timur	61,61	63,10	62,35
Sulawesi Utara	62,93	66,95	64,77
Sulawesi Tengah	55,37	63,49	59,03
Sulawesi Selatan	55,69	59,37	57,47
Sulawesi Tenggara	60,10	60,39	60,24
Gorontalo	48,90	57,65	53,32
Sulawesi Barat	47,20	57,48	52,35
Maluku	61,47	65,77	63,47
Maluku Utara	57,69	60,96	59,29
Papua Barat	57,63	57,11	57,40
Papua	34,60	36,19	35,29
Indonesia	53,63	55,45	54,50

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.12.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67,83	70,60	69,20
Sumatera Utara	63,23	68,50	65,80
Sumatera Barat	60,53	72,31	66,52
Riau	59,20	65,86	62,31
Jambi	55,84	62,79	59,22
Sumatera Selatan	56,08	59,93	57,92
Bengkulu	61,74	67,63	64,61
Lampung	56,03	59,39	57,64
Kep. Bangka Belitung	54,68	59,28	56,93
Kepulauan Riau	69,83	71,18	70,52
DKI Jakarta	61,89	56,00	58,79
Jawa Barat	56,49	56,47	56,48
Jawa Tengah	57,47	58,81	58,11
DI Yogyakarta	68,57	68,30	68,46
Jawa Timur	61,43	58,58	60,00
Banten	57,25	56,46	56,87
Bali	74,64	66,66	70,83
Nusa Tenggara Barat	64,28	63,95	64,11
Nusa Tenggara Timur	50,64	53,78	52,15
Kalimantan Barat	46,50	53,76	50,06
Kalimantan Tengah	50,89	52,69	51,75
Kalimantan Selatan	54,67	55,41	55,04
Kalimantan Timur	66,60	68,27	67,41
Sulawesi Utara	61,32	62,08	61,69
Sulawesi Tengah	61,95	64,54	63,13
Sulawesi Selatan	58,52	59,70	59,10
Sulawesi Tenggara	61,64	62,19	61,91
Gorontalo	49,35	62,45	56,07
Sulawesi Barat	50,96	62,45	56,65
Maluku	61,54	63,77	62,60
Maluku Utara	61,46	64,78	63,10
Papua Barat	63,92	60,24	62,29
Papua	42,70	43,63	43,11
Indonesia	58,78	59,95	59,35

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.13.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	42,06	50,81	46,10
Sumatera Utara	26,65	30,05	28,28
Sumatera Barat	39,72	44,36	42,03
Riau	34,41	31,53	33,09
Jambi	26,97	28,09	27,50
Sumatera Selatan	29,09	23,73	26,44
Bengkulu	39,48	45,77	42,53
Lampung	30,18	27,66	28,91
Kep. Bangka Belitung	10,63	10,84	10,73
Kepulauan Riau	14,02	18,27	16,16
DKI Jakarta	20,21	20,97	20,59
Jawa Barat	19,06	19,86	19,45
Jawa Tengah	22,16	21,64	21,89
DI Yogyakarta	55,10	50,30	52,72
Jawa Timur	25,78	24,84	25,31
Banten	18,40	20,97	19,65
Bali	27,83	23,04	25,49
Nusa Tenggara Barat	35,85	29,68	32,78
Nusa Tenggara Timur	42,49	44,00	43,27
Kalimantan Barat	30,09	32,89	31,51
Kalimantan Tengah	33,22	28,49	30,87
Kalimantan Selatan	25,55	30,75	27,98
Kalimantan Timur	24,42	31,39	27,79
Sulawesi Utara	26,09	33,30	29,48
Sulawesi Tengah	36,71	49,51	43,00
Sulawesi Selatan	36,30	38,21	37,28
Sulawesi Tenggara	47,45	51,49	49,57
Gorontalo	34,21	42,96	38,61
Sulawesi Barat	27,76	32,84	30,33
Maluku	45,51	53,94	49,66
Maluku Utara	48,60	50,44	49,48
Papua Barat	30,85	29,78	30,34
Papua	29,00	35,36	31,60
Indonesia	25,27	26,00	25,63

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.13.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	19,22	25,18	22,05
Sumatera Utara	12,54	16,28	14,30
Sumatera Barat	13,89	21,29	17,41
Riau	10,86	10,87	10,86
Jambi	16,36	17,37	16,84
Sumatera Selatan	5,70	6,65	6,16
Bengkulu	14,11	16,08	15,05
Lampung	10,13	12,63	11,36
Kep. Bangka Belitung	6,12	8,40	7,18
Kepulauan Riau	4,11	18,02	10,30
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	14,08	11,28	12,70
Jawa Tengah	13,58	14,02	13,81
DI Yogyakarta	17,32	23,66	20,68
Jawa Timur	13,42	12,96	13,19
Banten	10,01	10,63	10,30
Bali	14,28	12,29	13,33
Nusa Tenggara Barat	17,97	17,62	17,79
Nusa Tenggara Timur	8,99	11,98	10,52
Kalimantan Barat	12,12	13,60	12,84
Kalimantan Tengah	12,22	14,03	13,02
Kalimantan Selatan	6,54	9,14	7,76
Kalimantan Timur	17,47	17,05	17,28
Sulawesi Utara	7,65	9,79	8,65
Sulawesi Tengah	12,87	14,03	13,42
Sulawesi Selatan	17,88	20,85	19,39
Sulawesi Tenggara	10,90	13,08	12,01
Gorontalo	15,89	16,15	16,02
Sulawesi Barat	14,14	14,15	14,14
Maluku	17,31	20,40	18,84
Maluku Utara	14,76	16,43	15,59
Papua Barat	24,32	16,84	20,78
Papua	8,53	6,15	7,37
Indonesia	12,98	13,87	13,42

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.13.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	26,86	33,46	29,96
Sumatera Utara	20,37	24,05	22,12
Sumatera Barat	24,90	31,61	28,15
Riau	21,64	20,25	21,00
Jambi	19,67	20,75	20,18
Sumatera Selatan	15,03	13,72	14,39
Bengkulu	23,11	26,85	24,91
Lampung	15,95	17,16	16,55
Kep. Bangka Belitung	8,24	9,59	8,87
Kepulauan Riau	12,55	18,24	15,37
DKI Jakarta	20,21	20,97	20,59
Jawa Barat	17,61	17,34	17,48
Jawa Tengah	17,95	17,78	17,86
DI Yogyakarta	47,29	44,16	45,72
Jawa Timur	19,80	19,07	19,43
Banten	15,87	18,09	16,94
Bali	23,32	19,56	21,50
Nusa Tenggara Barat	26,11	22,92	24,50
Nusa Tenggara Timur	17,81	20,44	19,16
Kalimantan Barat	18,11	20,39	19,24
Kalimantan Tengah	19,69	19,93	19,80
Kalimantan Selatan	15,36	19,09	17,11
Kalimantan Timur	21,66	26,22	23,80
Sulawesi Utara	17,15	21,97	19,41
Sulawesi Tengah	20,48	25,77	23,03
Sulawesi Selatan	25,99	28,59	27,32
Sulawesi Tenggara	23,97	27,42	25,74
Gorontalo	22,41	25,97	24,17
Sulawesi Barat	17,14	18,34	17,74
Maluku	30,72	36,28	33,46
Maluku Utara	27,05	28,16	27,60
Papua Barat	26,64	21,49	24,19
Papua	16,37	15,29	15,88
Indonesia	19,78	20,60	20,18

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.14.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	111,57	115,40	113,39
Sumatera Utara	111,76	106,72	109,20
Sumatera Barat	109,47	108,42	108,97
Riau	111,54	108,03	109,78
Jambi	109,89	111,83	110,86
Sumatera Selatan	111,17	110,66	110,93
Bengkulu	109,40	113,04	111,24
Lampung	112,84	107,50	110,19
Kep. Bangka Belitung	118,11	113,27	115,78
Kepulauan Riau	107,56	108,88	108,18
DKI Jakarta	104,93	103,43	104,18
Jawa Barat	106,90	106,69	106,80
Jawa Tengah	108,99	110,84	109,89
DI Yogyakarta	106,76	109,87	108,38
Jawa Timur	105,91	105,45	105,69
Banten	110,59	106,58	108,61
Bali	104,71	103,32	104,04
Nusa Tenggara Barat	108,21	107,58	107,91
Nusa Tenggara Timur	112,31	106,48	109,53
Kalimantan Barat	109,14	109,85	109,47
Kalimantan Tengah	112,18	111,04	111,63
Kalimantan Selatan	110,59	107,08	108,90
Kalimantan Timur	108,56	108,86	108,71
Sulawesi Utara	110,22	110,07	110,15
Sulawesi Tengah	102,57	108,30	105,21
Sulawesi Selatan	109,09	106,89	108,04
Sulawesi Tenggara	112,95	110,27	111,61
Gorontalo	116,53	115,91	116,21
Sulawesi Barat	107,36	104,87	106,12
Maluku	110,70	109,69	110,22
Maluku Utara	106,91	106,39	106,66
Papua Barat	110,02	104,96	107,52
Papua	106,96	101,42	104,25
Indonesia	108,25	107,33	107,80

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.14.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	111,82	110,23	111,04
Sumatera Utara	113,36	109,21	111,32
Sumatera Barat	112,49	111,50	112,01
Riau	112,17	106,14	109,20
Jambi	111,91	109,30	110,68
Sumatera Selatan	114,46	110,62	112,53
Bengkulu	116,70	113,22	115,03
Lampung	114,03	113,25	113,65
Kep. Bangka Belitung	111,13	110,77	110,95
Kepulauan Riau	116,35	108,43	112,68
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	107,13	107,55	107,33
Jawa Tengah	110,36	110,47	110,41
DI Yogyakarta	112,50	108,68	110,55
Jawa Timur	107,13	108,78	107,93
Banten	114,57	110,06	112,38
Bali	111,55	103,95	107,77
Nusa Tenggara Barat	109,01	110,87	109,87
Nusa Tenggara Timur	116,84	114,57	115,72
Kalimantan Barat	116,99	113,64	115,36
Kalimantan Tengah	112,33	112,00	112,17
Kalimantan Selatan	111,87	111,35	111,62
Kalimantan Timur	112,62	112,72	112,67
Sulawesi Utara	107,34	108,62	107,94
Sulawesi Tengah	106,85	102,22	104,58
Sulawesi Selatan	109,66	109,54	109,60
Sulawesi Tenggara	114,37	110,96	112,68
Gorontalo	109,01	110,96	109,97
Sulawesi Barat	107,75	110,46	109,10
Maluku	111,83	112,05	111,94
Maluku Utara	111,87	112,23	112,05
Papua Barat	110,00	110,21	110,10
Papua	88,49	85,61	87,14
Indonesia	110,37	109,29	109,84

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.14.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	111,75	111,57	111,66
Sumatera Utara	112,63	108,04	110,34
Sumatera Barat	111,38	110,36	110,89
Riau	111,94	106,85	109,42
Jambi	111,35	110,06	110,73
Sumatera Selatan	113,34	110,63	112,01
Bengkulu	114,70	113,17	113,95
Lampung	113,72	111,71	112,74
Kep. Bangka Belitung	114,43	111,94	113,22
Kepulauan Riau	109,15	108,80	108,99
DKI Jakarta	104,93	103,43	104,18
Jawa Barat	106,98	106,98	106,98
Jawa Tengah	109,76	110,63	110,18
DI Yogyakarta	108,72	109,47	109,11
Jawa Timur	106,56	107,21	106,88
Banten	111,95	107,75	109,89
Bali	107,51	103,59	105,59
Nusa Tenggara Barat	108,70	109,53	109,08
Nusa Tenggara Timur	116,06	113,25	114,68
Kalimantan Barat	114,78	112,64	113,75
Kalimantan Tengah	112,28	111,71	112,01
Kalimantan Selatan	111,36	109,61	110,52
Kalimantan Timur	110,22	110,43	110,32
Sulawesi Utara	108,51	109,24	108,86
Sulawesi Tengah	105,91	103,43	104,71
Sulawesi Selatan	109,46	108,63	109,06
Sulawesi Tenggara	114,00	110,78	112,40
Gorontalo	111,24	112,52	111,88
Sulawesi Barat	107,66	109,19	108,42
Maluku	111,44	111,26	111,35
Maluku Utara	110,65	110,85	110,75
Papua Barat	110,01	108,68	109,36
Papua	92,18	88,98	90,67
Indonesia	109,37	108,35	108,87

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.15.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,29	94,84	97,59
Sumatera Utara	89,89	92,71	91,32
Sumatera Barat	88,78	98,42	93,64
Riau	89,14	97,31	93,40
Jambi	89,52	93,85	91,55
Sumatera Selatan	100,09	100,03	100,06
Bengkulu	98,73	82,88	90,80
Lampung	86,41	92,58	89,26
Kep. Bangka Belitung	82,76	84,67	83,69
Kepulauan Riau	92,21	93,31	92,73
DKI Jakarta	87,67	94,19	90,86
Jawa Barat	87,50	92,04	89,72
Jawa Tengah	90,54	91,01	90,77
DI Yogyakarta	96,37	86,34	91,34
Jawa Timur	92,09	95,21	93,59
Banten	90,77	91,90	91,32
Bali	94,97	102,03	98,56
Nusa Tenggara Barat	89,10	95,64	92,59
Nusa Tenggara Timur	94,02	98,60	96,29
Kalimantan Barat	89,75	89,86	89,80
Kalimantan Tengah	85,05	89,04	87,02
Kalimantan Selatan	78,81	89,38	83,45
Kalimantan Timur	91,82	89,59	90,79
Sulawesi Utara	82,62	94,59	88,08
Sulawesi Tengah	91,20	83,04	86,64
Sulawesi Selatan	81,22	87,77	84,52
Sulawesi Tenggara	89,22	83,23	86,47
Gorontalo	72,74	79,55	75,89
Sulawesi Barat	78,55	79,07	78,82
Maluku	96,74	82,29	89,16
Maluku Utara	105,01	83,85	93,64
Papua Barat	99,06	95,31	97,06
Papua	100,28	98,92	99,63
Indonesia	89,70	92,66	91,15

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.15.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	93,39	97,23	95,23
Sumatera Utara	86,28	92,83	89,41
Sumatera Barat	80,60	88,96	84,75
Riau	88,03	90,58	89,30
Jambi	83,87	88,09	86,11
Sumatera Selatan	78,73	87,86	83,01
Bengkulu	86,34	87,74	87,04
Lampung	84,30	87,79	85,95
Kep. Bangka Belitung	78,27	84,50	81,37
Kepulauan Riau	76,17	96,01	84,68
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	81,05	86,03	83,53
Jawa Tengah	87,32	89,33	88,31
DI Yogyakarta	92,41	85,08	89,47
Jawa Timur	93,04	87,78	90,51
Banten	86,87	85,78	86,37
Bali	94,08	90,55	92,38
Nusa Tenggara Barat	93,03	91,55	92,33
Nusa Tenggara Timur	83,05	91,42	87,01
Kalimantan Barat	71,58	81,41	76,35
Kalimantan Tengah	83,67	83,96	83,81
Kalimantan Selatan	77,55	85,99	81,74
Kalimantan Timur	94,96	92,57	93,89
Sulawesi Utara	85,78	89,05	87,40
Sulawesi Tengah	82,36	96,29	89,06
Sulawesi Selatan	81,02	82,59	81,82
Sulawesi Tenggara	82,91	89,27	85,80
Gorontalo	80,09	79,86	79,98
Sulawesi Barat	78,76	83,18	80,86
Maluku	91,58	90,89	91,24
Maluku Utara	84,36	82,69	83,55
Papua Barat	85,51	81,78	83,77
Papua	64,13	60,41	62,40
Indonesia	85,10	87,75	86,38

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.15.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95,20	96,57	95,87
Sumatera Utara	87,88	92,77	90,29
Sumatera Barat	83,61	92,50	88,05
Riau	88,42	93,11	90,79
Jambi	85,81	89,76	87,83
Sumatera Selatan	85,39	91,81	88,43
Bengkulu	90,27	86,20	88,23
Lampung	84,83	88,94	86,76
Kep. Bangka Belitung	80,52	84,58	82,52
Kepulauan Riau	88,63	93,82	91,06
DKI Jakarta	87,67	94,19	90,86
Jawa Barat	85,21	89,86	87,50
Jawa Tengah	88,76	90,06	89,40
DI Yogyakarta	94,75	85,94	90,66
Jawa Timur	92,58	91,32	91,98
Banten	89,33	89,79	89,55
Bali	94,59	97,39	95,99
Nusa Tenggara Barat	91,59	93,29	92,44
Nusa Tenggara Timur	84,94	92,75	88,66
Kalimantan Barat	76,59	83,85	80,15
Kalimantan Tengah	84,13	85,69	84,89
Kalimantan Selatan	78,10	87,29	82,45
Kalimantan Timur	93,10	90,78	92,04
Sulawesi Utara	84,34	91,35	87,70
Sulawesi Tengah	84,09	92,99	88,53
Sulawesi Selatan	81,09	84,40	82,77
Sulawesi Tenggara	84,53	87,70	85,97
Gorontalo	77,67	79,76	78,64
Sulawesi Barat	78,72	82,22	80,41
Maluku	93,35	87,68	90,50
Maluku Utara	89,07	83,00	86,06
Papua Barat	89,32	86,34	87,86
Papua	72,35	69,50	71,02
Indonesia	87,26	90,08	88,63

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.16.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan
			Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	84,30	87,53	85,92
Sumatera Utara	80,10	87,89	83,89
Sumatera Barat	84,27	88,47	86,48
Riau	79,71	86,61	82,75
Jambi	86,93	86,66	86,80
Sumatera Selatan	77,93	85,23	81,56
Bengkulu	86,73	93,74	90,16
Lampung	77,03	75,01	76,00
Kep. Bangka Belitung	82,32	88,70	85,63
Kepulauan Riau	86,22	81,95	83,90
DKI Jakarta	79,52	70,39	74,71
Jawa Barat	71,80	72,56	72,17
Jawa Tengah	77,39	77,83	77,61
DI Yogyakarta	88,86	90,16	89,44
Jawa Timur	85,75	77,17	81,41
Banten	77,54	77,39	77,47
Bali	92,28	77,36	85,06
Nusa Tenggara Barat	79,13	81,77	80,40
Nusa Tenggara Timur	96,28	91,37	94,03
Kalimantan Barat	76,22	86,49	81,72
Kalimantan Tengah	89,27	76,85	83,00
Kalimantan Selatan	81,52	76,43	78,87
Kalimantan Timur	93,02	92,85	92,94
Sulawesi Utara	83,70	77,55	80,58
Sulawesi Tengah	92,77	93,06	92,91
Sulawesi Selatan	83,90	81,09	82,52
Sulawesi Tenggara	92,31	84,09	88,07
Gorontalo	77,40	93,26	85,76
Sulawesi Barat	89,13	118,43	103,13
Maluku	82,94	95,49	89,15
Maluku Utara	85,78	109,31	97,62
Papua Barat	90,18	96,64	93,00
Papua	92,67	93,40	93,01
Indonesia	79,62	78,77	79,20

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.16.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	79,45	80,32	79,88
Sumatera Utara	80,08	84,11	82,06
Sumatera Barat	71,15	81,57	76,32
Riau	66,61	77,93	72,09
Jambi	64,17	72,66	68,28
Sumatera Selatan	66,72	65,17	66,00
Bengkulu	67,30	80,37	73,64
Lampung	64,63	66,40	65,45
Kep. Bangka Belitung	62,59	69,33	65,69
Kepulauan Riau	69,73	76,68	72,67
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	63,04	58,12	60,69
Jawa Tengah	68,62	70,47	69,47
DI Yogyakarta	111,40	98,63	106,10
Jawa Timur	66,90	60,90	63,91
Banten	60,67	67,89	64,02
Bali	82,04	89,71	85,62
Nusa Tenggara Barat	74,92	72,64	73,72
Nusa Tenggara Timur	62,22	67,21	64,66
Kalimantan Barat	56,05	58,69	57,28
Kalimantan Tengah	57,84	60,41	59,03
Kalimantan Selatan	67,10	62,14	64,77
Kalimantan Timur	73,96	74,89	74,43
Sulawesi Utara	80,94	92,30	86,14
Sulawesi Tengah	72,76	86,86	79,12
Sulawesi Selatan	70,96	80,79	75,72
Sulawesi Tenggara	79,87	79,39	79,64
Gorontalo	66,91	78,05	72,54
Sulawesi Barat	61,13	74,57	67,86
Maluku	80,67	86,97	83,60
Maluku Utara	76,92	80,37	78,62
Papua Barat	81,03	74,27	78,02
Papua	48,25	52,60	50,14
Indonesia	68,29	69,81	69,02

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.16.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	80,74	82,33	81,53
Sumatera Utara	80,09	85,97	82,96
Sumatera Barat	76,31	84,48	80,46
Riau	72,08	81,19	76,33
Jambi	70,67	76,75	73,63
Sumatera Selatan	71,25	73,89	72,51
Bengkulu	74,15	85,13	79,49
Lampung	67,98	69,04	68,49
Kep. Bangka Belitung	71,74	79,46	75,51
Kepulauan Riau	81,77	80,97	81,36
DKI Jakarta	79,52	70,39	74,71
Jawa Barat	69,00	68,08	68,55
Jawa Tengah	72,89	74,27	73,55
DI Yogyakarta	96,15	92,65	94,62
Jawa Timur	75,80	68,71	72,24
Banten	71,67	74,30	72,94
Bali	88,33	81,92	85,27
Nusa Tenggara Barat	76,89	76,48	76,68
Nusa Tenggara Timur	70,96	72,84	71,86
Kalimantan Barat	62,40	69,18	65,72
Kalimantan Tengah	68,69	66,71	67,74
Kalimantan Selatan	73,48	69,20	71,36
Kalimantan Timur	86,04	85,90	85,97
Sulawesi Utara	82,20	84,87	83,48
Sulawesi Tengah	78,75	88,82	83,35
Sulawesi Selatan	76,23	80,91	78,51
Sulawesi Tenggara	83,48	80,90	82,22
Gorontalo	70,30	83,27	76,95
Sulawesi Barat	68,06	84,71	76,30
Maluku	81,63	90,84	86,04
Maluku Utara	79,49	89,08	84,23
Papua Barat	84,17	81,79	83,12
Papua	59,46	64,11	61,53
Indonesia	74,03	74,50	74,26

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.17.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

				Perkotaan
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Aceh	53,09	63,88	58,07	
Sumatera Utara	32,29	35,77	33,96	
Sumatera Barat	50,50	53,40	51,94	
Riau	44,25	37,21	41,02	
Jambi	35,64	39,98	37,71	
Sumatera Selatan	36,49	32,19	34,37	
Bengkulu	51,39	61,15	56,13	
Lampung	37,22	38,07	37,65	
Kep. Bangka Belitung	16,99	19,14	18,01	
Kepulauan Riau	21,65	26,15	23,91	
DKI Jakarta	27,86	27,34	27,60	
Jawa Barat	24,57	24,70	24,63	
Jawa Tengah	28,49	28,81	28,65	
DI Yogyakarta	67,89	61,46	64,71	
Jawa Timur	31,65	30,91	31,28	
Banten	23,78	24,83	24,29	
Bali	33,90	32,72	33,32	
Nusa Tenggara Barat	42,65	36,28	39,49	
Nusa Tenggara Timur	61,10	56,88	58,93	
Kalimantan Barat	36,56	41,75	39,20	
Kalimantan Tengah	40,73	36,90	38,83	
Kalimantan Selatan	33,79	40,88	37,10	
Kalimantan Timur	32,34	37,44	34,81	
Sulawesi Utara	36,54	49,15	42,47	
Sulawesi Tengah	49,35	65,39	57,23	
Sulawesi Selatan	46,50	50,11	48,36	
Sulawesi Tenggara	67,33	70,99	69,24	
Gorontalo	45,33	56,96	51,18	
Sulawesi Barat	46,27	48,33	47,31	
Maluku	63,41	70,87	67,08	
Maluku Utara	61,64	62,35	61,98	
Papua Barat	41,82	40,23	41,06	
Papua	39,24	51,72	44,34	
Indonesia	32,39	33,07	32,73	

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.17.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	25,21	32,43	28,64
Sumatera Utara	15,90	19,50	17,60
Sumatera Barat	16,49	28,85	22,37
Riau	14,24	14,27	14,25
Jambi	20,74	21,40	21,05
Sumatera Selatan	8,77	10,07	9,39
Bengkulu	17,32	21,37	19,25
Lampung	13,74	16,25	14,97
Kep. Bangka Belitung	8,52	10,22	9,30
Kepulauan Riau	14,91	25,74	19,73
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	16,43	12,67	14,59
Jawa Tengah	16,77	17,24	17,02
DI Yogyakarta	18,69	31,45	25,45
Jawa Timur	16,29	16,09	16,19
Banten	13,70	18,63	15,97
Bali	16,35	14,18	15,31
Nusa Tenggara Barat	20,70	21,05	20,88
Nusa Tenggara Timur	13,78	19,22	16,57
Kalimantan Barat	15,53	15,91	15,72
Kalimantan Tengah	14,90	16,42	15,57
Kalimantan Selatan	9,14	12,92	10,92
Kalimantan Timur	21,55	21,36	21,46
Sulawesi Utara	9,95	17,00	13,24
Sulawesi Tengah	17,41	22,41	19,80
Sulawesi Selatan	21,63	26,86	24,29
Sulawesi Tenggara	19,14	20,39	19,77
Gorontalo	20,52	22,87	21,67
Sulawesi Barat	19,72	21,37	20,55
Maluku	22,34	30,01	26,13
Maluku Utara	19,35	18,54	18,95
Papua Barat	36,31	26,35	31,60
Papua	10,99	10,19	10,60
Indonesia	16,37	17,89	17,12

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 4.17.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan+Perdesaan
			Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	34,53	42,59	38,32
Sumatera Utara	25,00	28,68	26,75
Sumatera Barat	30,98	39,83	35,27
Riau	27,98	24,68	26,46
Jambi	25,39	27,26	26,28
Sumatera Selatan	19,83	19,22	19,53
Bengkulu	29,41	35,80	32,47
Lampung	20,56	22,82	21,68
Kep. Bangka Belitung	12,50	14,55	13,46
Kepulauan Riau	20,65	26,10	23,34
DKI Jakarta	27,86	27,34	27,60
Jawa Barat	22,20	21,17	21,70
Jawa Tengah	22,74	22,95	22,85
DI Yogyakarta	57,72	54,54	56,13
Jawa Timur	24,23	23,70	23,96
Banten	20,75	23,10	21,88
Bali	28,06	26,72	27,41
Nusa Tenggara Barat	30,69	27,74	29,20
Nusa Tenggara Timur	26,23	29,18	27,75
Kalimantan Barat	22,54	25,01	23,76
Kalimantan Tengah	24,09	24,78	24,41
Kalimantan Selatan	20,58	25,80	23,02
Kalimantan Timur	28,06	31,63	29,74
Sulawesi Utara	23,65	33,66	28,34
Sulawesi Tengah	27,61	36,63	31,96
Sulawesi Selatan	32,58	37,22	34,96
Sulawesi Tenggara	36,36	39,28	37,86
Gorontalo	29,35	35,36	32,33
Sulawesi Barat	25,56	27,42	26,49
Maluku	41,87	49,36	45,56
Maluku Utara	34,72	33,65	34,19
Papua Barat	38,27	31,34	34,98
Papua	21,82	23,19	22,45
Indonesia	25,24	26,30	25,76

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.1.1 Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan
			Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	26,06	30,66	28,34
Sumatera Utara	33,13	33,58	33,36
Sumatera Barat	44,18	47,35	45,79
Riau	41,23	39,76	40,52
Jambi	34,50	38,00	36,23
Sumatera Selatan	40,16	40,24	40,20
Bengkulu	44,17	46,21	45,21
Lampung	25,85	31,00	28,37
Kep. Bangka Belitung	28,60	28,28	28,44
Kepulauan Riau	38,91	36,59	37,77
DKI Jakarta	52,34	49,66	51,00
Jawa Barat	35,23	35,58	35,40
Jawa Tengah	38,30	40,61	39,44
DI Yogyakarta	61,73	60,55	61,15
Jawa Timur	40,61	42,12	41,35
Banten	36,69	36,19	36,44
Bali	43,20	46,62	44,86
Nusa Tenggara Barat	25,14	31,33	28,17
Nusa Tenggara Timur	28,20	30,44	29,27
Kalimantan Barat	40,47	38,82	39,64
Kalimantan Tengah	34,70	36,67	35,64
Kalimantan Selatan	37,39	41,08	39,18
Kalimantan Timur	41,62	40,75	41,20
Sulawesi Utara	39,86	40,26	40,06
Sulawesi Tengah	37,18	40,39	38,81
Sulawesi Selatan	39,82	45,66	42,71
Sulawesi Tenggara	32,04	39,37	35,68
Gorontalo	34,55	42,02	38,49
Sulawesi Barat	24,86	23,81	24,32
Maluku	34,98	38,74	36,87
Maluku Utara	25,77	31,35	28,55
Papua Barat	25,98	28,57	27,24
Papua	20,40	24,62	22,41
Indonesia	38,15	39,28	38,71

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.1.2 Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	8,75	9,94	9,33
Sumatera Utara	11,67	13,07	12,35
Sumatera Barat	14,71	18,88	16,80
Riau	11,80	14,88	13,31
Jambi	13,34	17,06	15,15
Sumatera Selatan	11,00	11,24	11,12
Bengkulu	10,28	15,39	12,78
Lampung	11,29	14,30	12,74
Kep. Bangka Belitung	11,22	15,21	13,20
Kepulauan Riau	14,51	17,56	15,93
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	16,07	16,23	16,15
Jawa Tengah	21,05	23,09	22,04
DI Yogyakarta	37,81	35,09	36,53
Jawa Timur	19,97	23,01	21,44
Banten	8,79	11,99	10,30
Bali	24,96	26,26	25,58
Nusa Tenggara Barat	7,34	10,91	9,04
Nusa Tenggara Timur	3,00	3,12	3,06
Kalimantan Barat	7,41	8,32	7,85
Kalimantan Tengah	10,98	11,34	11,15
Kalimantan Selatan	15,81	17,89	16,82
Kalimantan Timur	15,29	19,22	17,17
Sulawesi Utara	14,51	19,04	16,71
Sulawesi Tengah	7,75	9,57	8,64
Sulawesi Selatan	12,37	17,91	15,13
Sulawesi Tenggara	8,48	9,53	8,99
Gorontalo	14,89	18,78	16,82
Sulawesi Barat	6,45	10,60	8,57
Maluku	4,24	5,82	5,03
Maluku Utara	3,12	3,56	3,33
Papua Barat	11,30	8,62	10,05
Papua	2,01	2,10	2,05
Indonesia	13,92	15,95	14,91

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.1.3 Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13,93	16,19	15,05
Sumatera Utara	21,97	23,20	22,58
Sumatera Barat	26,69	30,62	28,68
Riau	24,04	25,12	24,57
Jambi	19,99	23,77	21,84
Sumatera Selatan	22,27	22,30	22,28
Bengkulu	21,67	26,20	23,92
Lampung	15,40	19,09	17,19
Kep. Bangka Belitung	20,04	21,79	20,90
Kepulauan Riau	34,26	33,25	33,77
DKI Jakarta	52,34	49,66	51,00
Jawa Barat	28,93	29,38	29,15
Jawa Tengah	29,10	31,38	30,22
DI Yogyakarta	54,79	53,65	54,23
Jawa Timur	30,20	32,58	31,36
Banten	27,41	28,49	27,93
Bali	36,10	38,83	37,42
Nusa Tenggara Barat	14,85	19,78	17,23
Nusa Tenggara Timur	8,49	8,71	8,60
Kalimantan Barat	17,80	18,28	18,03
Kalimantan Tengah	19,50	20,30	19,88
Kalimantan Selatan	25,47	28,33	26,85
Kalimantan Timur	31,37	32,55	31,94
Sulawesi Utara	26,12	29,06	27,57
Sulawesi Tengah	15,42	18,01	16,70
Sulawesi Selatan	23,08	28,69	25,87
Sulawesi Tenggara	15,68	18,93	17,27
Gorontalo	21,61	27,37	24,53
Sulawesi Barat	10,98	13,87	12,46
Maluku	16,56	19,16	17,86
Maluku Utara	9,71	11,83	10,76
Papua Barat	15,94	15,28	15,63
Papua	7,48	9,17	8,27
Indonesia	26,10	27,83	26,95

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.2.1 Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Provinsi	Perkotaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,39	23,32	48,33	76,45
Sumatera Utara	9,40	46,17	65,88	71,90
Sumatera Barat	15,11	63,10	80,92	79,50
Riau	13,17	59,64	71,99	75,86
Jambi	9,79	51,95	78,95	66,08
Sumatera Selatan	10,82	53,93	72,38	79,22
Bengkulu	13,53	53,10	71,36	82,26
Lampung	5,58	40,89	59,16	60,13
Kep. Bangka Belitung	6,77	40,07	68,13	72,94
Kepulauan Riau	17,73	60,61	74,75	75,17
DKI Jakarta	23,43	74,12	85,03	83,39
Jawa Barat	10,97	49,93	77,49	72,10
Jawa Tengah	10,46	59,03	78,84	70,21
DI Yogyakarta	18,62	79,61	82,59	92,83
Jawa Timur	14,53	60,61	79,41	66,02
Banten	13,05	50,93	70,03	74,68
Bali	14,60	57,28	81,87	81,86
Nusa Tenggara Barat	4,14	25,95	62,54	76,74
Nusa Tenggara Timur	5,10	31,70	49,17	74,73
Kalimantan Barat	13,22	53,31	64,61	81,51
Kalimantan Tengah	11,63	51,78	70,13	59,98
Kalimantan Selatan	14,07	51,50	69,96	80,56
Kalimantan Timur	15,28	62,62	76,79	64,98
Sulawesi Utara	12,70	49,36	71,65	79,36
Sulawesi Tengah	9,55	46,05	62,96	73,07
Sulawesi Selatan	10,26	55,80	74,54	81,27
Sulawesi Tenggara	6,94	37,86	63,51	80,73
Gorontalo	7,67	46,07	76,50	82,24
Sulawesi Barat	4,69	28,24	48,81	70,28
Maluku	5,37	39,16	65,81	78,50
Maluku Utara	1,10	29,61	48,44	69,75
Papua Barat	2,16	33,89	52,84	73,83
Papua	3,18	20,14	43,62	61,91
Indonesia	12,20	53,94	74,53	74,38

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.2.2 Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Provinsi	Perdesaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,30	4,83	20,72	58,00
Sumatera Utara	1,35	16,94	40,82	35,66
Sumatera Barat	1,94	25,08	55,29	36,38
Riau	0,97	20,48	44,80	41,83
Jambi	1,05	22,22	51,65	39,38
Sumatera Selatan	1,25	15,05	38,92	58,57
Bengkulu	1,13	15,55	44,76	34,97
Lampung	1,48	19,71	42,86	31,64
Kep. Bangka Belitung	0,56	19,78	48,25	48,43
Kepulauan Riau	2,42	25,92	46,87	54,10
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	1,70	28,68	55,36	31,92
Jawa Tengah	3,34	36,36	69,80	29,64
DI Yogyakarta	9,82	49,09	78,41	65,52
Jawa Timur	3,26	35,47	64,14	40,68
Banten	0,24	13,53	39,19	33,42
Bali	4,23	36,43	69,78	61,82
Nusa Tenggara Barat	0,68	10,30	29,38	31,76
Nusa Tenggara Timur	0,20	2,56	15,15	27,05
Kalimantan Barat	0,80	13,10	33,11	22,75
Kalimantan Tengah	1,57	20,63	44,47	22,80
Kalimantan Selatan	2,03	25,66	63,17	70,18
Kalimantan Timur	3,16	29,28	47,53	37,47
Sulawesi Utara	2,46	24,25	42,75	75,58
Sulawesi Tengah	0,72	13,12	28,23	34,46
Sulawesi Selatan	0,99	18,01	50,16	44,35
Sulawesi Tenggara	0,32	10,58	30,19	61,87
Gorontalo	1,59	18,63	55,98	56,29
Sulawesi Barat	0,45	8,46	25,57	54,11
Maluku	0,30	3,81	15,03	33,51
Maluku Utara	0,28	2,64	11,84	19,19
Papua Barat	0,82	4,84	25,20	61,48
Papua	0,01	2,06	7,42	26,73
Indonesia	1,77	23,13	48,55	38,59

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.2.3 Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Perkotaan+Perdesaan				
Provinsi	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1,13	9,88	28,65	67,32
Sumatera Utara	5,03	30,51	53,33	61,63
Sumatera Barat	6,72	40,09	66,52	64,15
Riau	5,54	35,16	56,53	66,33
Jambi	3,57	32,02	60,98	50,93
Sumatera Selatan	4,37	29,03	54,67	73,70
Bengkulu	4,57	27,79	55,45	64,48
Lampung	2,53	25,06	48,07	46,54
Kep. Bangka Belitung	3,56	30,01	59,36	63,63
Kepulauan Riau	14,90	53,89	69,10	72,98
DKI Jakarta	23,43	74,12	85,03	83,39
Jawa Barat	7,75	42,65	71,32	63,65
Jawa Tengah	6,47	46,53	74,57	55,11
DI Yogyakarta	15,63	68,57	81,26	90,13
Jawa Timur	8,49	47,65	72,34	57,60
Banten	8,59	38,01	61,15	66,35
Bali	10,21	48,94	77,29	78,05
Nusa Tenggara Barat	2,06	16,50	44,83	58,81
Nusa Tenggara Timur	0,99	8,20	26,07	55,31
Kalimantan Barat	4,07	25,82	46,69	56,06
Kalimantan Tengah	4,64	31,37	55,87	45,23
Kalimantan Selatan	6,83	36,44	66,69	78,19
Kalimantan Timur	10,23	48,91	67,26	57,59
Sulawesi Utara	6,77	35,25	56,10	78,55
Sulawesi Tengah	2,57	20,27	40,11	58,05
Sulawesi Selatan	4,15	31,58	60,68	67,05
Sulawesi Tenggara	2,05	17,67	41,11	75,31
Gorontalo	3,52	27,34	63,65	71,35
Sulawesi Barat	1,39	12,70	33,09	60,18
Maluku	2,02	16,27	38,10	65,45
Maluku Utara	0,47	9,94	24,38	50,79
Papua Barat	1,20	14,72	35,72	66,95
Papua	0,76	7,93	21,99	50,61
Indonesia	6,66	38,08	62,84	63,84

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.3.1 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,62	6,34	7,99
Sumatera Utara	9,59	6,90	8,23
Sumatera Barat	9,86	5,63	7,69
Riau	12,73	8,45	10,63
Jambi	11,57	7,21	9,45
Sumatera Selatan	7,98	10,90	9,37
Bengkulu	11,10	5,68	8,34
Lampung	13,10	8,10	10,60
Kep. Bangka Belitung	6,17	5,38	5,77
Kepulauan Riau	5,94	5,41	5,67
DKI Jakarta	5,51	7,90	6,70
Jawa Barat	6,02	5,19	5,61
Jawa Tengah	7,83	7,57	7,70
DI Yogyakarta	9,44	6,24	7,90
Jawa Timur	9,68	7,73	8,73
Banten	7,44	7,11	7,28
Bali	12,69	12,55	12,62
Nusa Tenggara Barat	7,72	6,37	7,06
Nusa Tenggara Timur	8,58	6,31	7,49
Kalimantan Barat	9,81	8,08	8,93
Kalimantan Tengah	16,03	7,79	12,06
Kalimantan Selatan	9,63	9,17	9,40
Kalimantan Timur	7,17	9,08	8,10
Sulawesi Utara	3,69	5,31	4,50
Sulawesi Tengah	13,64	9,09	11,30
Sulawesi Selatan	10,49	6,73	8,61
Sulawesi Tenggara	12,08	11,97	12,02
Gorontalo	12,56	7,10	9,62
Sulawesi Barat	12,05	11,06	11,53
Maluku	5,36	3,79	4,57
Maluku Utara	11,01	5,10	8,11
Papua Barat	8,59	9,28	8,92
Papua	8,06	4,21	6,22
Indonesia	8,24	7,03	7,64

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.3.2 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,23	4,91	7,07
Sumatera Utara	19,12	15,12	17,14
Sumatera Barat	12,47	6,85	9,62
Riau	10,46	4,75	7,64
Jambi	11,49	3,91	7,70
Sumatera Selatan	7,96	4,50	6,25
Bengkulu	13,04	6,55	9,86
Lampung	14,15	4,81	9,61
Kep. Bangka Belitung	11,81	8,07	9,98
Kepulauan Riau	12,23	7,38	9,89
DKI Jakarta			
Jawa Barat	7,68	3,65	5,75
Jawa Tengah	8,44	5,92	7,21
DI Yogyakarta	12,78	14,64	13,65
Jawa Timur	10,01	6,29	8,22
Banten	9,20	5,01	7,20
Bali	21,09	20,69	20,90
Nusa Tenggara Barat	17,10	10,83	14,07
Nusa Tenggara Timur	13,46	8,09	10,81
Kalimantan Barat	10,30	6,65	8,51
Kalimantan Tengah	16,39	7,68	12,20
Kalimantan Selatan	9,02	6,29	7,68
Kalimantan Timur	10,67	4,07	7,52
Sulawesi Utara	6,59	3,14	4,91
Sulawesi Tengah	20,23	9,69	15,04
Sulawesi Selatan	17,81	8,74	13,25
Sulawesi Tenggara	20,23	10,71	15,65
Gorontalo	11,27	5,77	8,54
Sulawesi Barat	21,67	9,23	15,31
Maluku	10,41	4,90	7,70
Maluku Utara	14,24	7,45	10,92
Papua Barat	8,30	5,74	7,13
Papua	19,94	14,20	17,36
Indonesia	11,81	7,00	9,47

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.3.3 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,35	5,35	7,36
Sumatera Utara	14,41	11,00	12,71
Sumatera Barat	11,35	6,32	8,79
Riau	11,43	6,31	8,91
Jambi	11,51	4,96	8,27
Sumatera Selatan	7,97	7,02	7,51
Bengkulu	12,34	6,22	9,30
Lampung	13,85	5,79	9,90
Kep. Bangka Belitung	8,98	6,69	7,84
Kepulauan Riau	7,17	5,77	6,47
DKI Jakarta	5,51	7,90	6,70
Jawa Barat	6,56	4,70	5,66
Jawa Tengah	8,15	6,70	7,44
DI Yogyakarta	10,37	8,48	9,47
Jawa Timur	9,84	7,03	8,48
Banten	8,01	6,45	7,25
Bali	15,87	15,62	15,75
Nusa Tenggara Barat	12,97	8,83	10,96
Nusa Tenggara Timur	12,33	7,69	10,06
Kalimantan Barat	10,14	7,14	8,65
Kalimantan Tengah	16,26	7,72	12,15
Kalimantan Selatan	9,30	7,64	8,49
Kalimantan Timur	8,49	7,22	7,88
Sulawesi Utara	5,22	4,19	4,71
Sulawesi Tengah	18,35	9,51	13,94
Sulawesi Selatan	14,82	7,92	11,36
Sulawesi Tenggara	17,60	11,14	14,44
Gorontalo	11,72	6,28	8,94
Sulawesi Barat	19,28	9,71	14,34
Maluku	8,32	4,42	6,38
Maluku Utara	13,22	6,70	10,02
Papua Barat	8,40	6,95	7,72
Papua	16,11	10,73	13,65
Indonesia	9,98	7,01	8,53

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.4.1 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Provinsi	Perkotaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,25	1,64	11,03	19,24
Sumatera Utara	1,46	2,95	9,36	27,48
Sumatera Barat	1,14	4,83	8,04	20,83
Riau	2,06	5,51	8,67	31,48
Jambi	0,69	3,72	10,68	35,27
Sumatera Selatan	2,10	3,28	9,10	29,67
Bengkulu	1,75	3,95	7,62	21,09
Lampung	0,50	5,39	11,31	34,24
Kep. Bangka Belitung	0,75	2,32	8,62	31,79
Kepulauan Riau	0,05	2,30	6,76	29,22
DKI Jakarta	0,27	0,94	4,97	28,64
Jawa Barat	0,50	1,16	6,73	26,54
Jawa Tengah	0,68	2,54	9,14	32,03
DI Yogyakarta	0,92	1,57	11,15	13,14
Jawa Timur	0,47	3,21	8,47	36,62
Banten	0,62	2,45	6,15	34,00
Bali	2,13	7,08	17,53	31,92
Nusa Tenggara Barat	1,62	3,73	8,17	20,15
Nusa Tenggara Timur	1,11	6,39	9,89	13,61
Kalimantan Barat	0,13	2,77	15,65	22,34
Kalimantan Tengah	2,45	3,99	9,74	39,11
Kalimantan Selatan	1,12	2,49	13,87	27,29
Kalimantan Timur	0,54	1,44	6,08	35,01
Sulawesi Utara	0,35	1,27	6,21	11,58
Sulawesi Tengah	3,71	4,32	12,59	23,34
Sulawesi Selatan	1,44	3,85	10,80	19,98
Sulawesi Tenggara	4,33	8,18	16,76	19,26
Gorontalo	0,62	5,49	10,49	23,45
Sulawesi Barat	3,77	4,76	16,24	31,93
Maluku	0,57	1,69	4,14	10,28
Maluku Utara	1,94	2,96	9,28	17,18
Papua Barat	1,95	5,90	10,57	21,38
Papua	0,73	2,95	7,32	17,29
Indonesia	0,81	2,59	8,42	27,53

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.4.2 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Provinsi	Perdesaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,61	3,05	10,35	29,53
Sumatera Utara	7,21	17,26	25,74	44,03
Sumatera Barat	2,31	6,13	14,07	44,68
Riau	1,11	5,60	12,58	45,50
Jambi	0,67	3,76	8,93	43,23
Sumatera Selatan	0,94	4,56	12,47	39,67
Bengkulu	1,70	6,20	14,90	48,67
Lampung	1,99	6,51	16,48	47,95
Kep. Bangka Belitung	0,88	6,29	19,69	68,32
Kepulauan Riau	0,35	5,55	19,60	59,12
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	0,20	1,59	9,56	44,86
Jawa Tengah	0,71	4,12	8,64	51,16
DI Yogyakarta	1,82	6,82	15,72	61,11
Jawa Timur	1,34	5,09	12,53	44,13
Banten	0,65	3,00	11,38	47,40
Bali	8,29	22,88	27,47	56,79
Nusa Tenggara Barat	5,68	11,71	18,32	45,46
Nusa Tenggara Timur	3,92	10,71	21,33	47,33
Kalimantan Barat	1,13	4,37	17,29	52,49
Kalimantan Tengah	3,33	8,85	22,66	53,57
Kalimantan Selatan	1,64	6,04	15,42	43,42
Kalimantan Timur	0,72	3,48	10,51	38,30
Sulawesi Utara	1,77	3,16	10,11	11,60
Sulawesi Tengah	5,93	11,69	25,92	52,84
Sulawesi Selatan	4,77	12,57	16,66	39,69
Sulawesi Tenggara	7,54	17,02	24,21	32,28
Gorontalo	2,16	7,17	8,06	38,06
Sulawesi Barat	6,31	15,65	24,76	37,81
Maluku	2,45	5,21	11,38	30,51
Maluku Utara	2,70	9,11	16,44	46,57
Papua Barat	2,84	8,87	11,98	10,41
Papua	5,14	21,98	35,35	50,68
Indonesia	2,25	6,92	14,71	44,52

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.4.3 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Perkotaan+Perdesaan				
Provinsi	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,52	2,66	10,55	24,33
Sumatera Utara	4,63	10,62	17,57	32,17
Sumatera Barat	1,87	5,62	11,43	29,32
Riau	1,45	5,56	10,89	35,41
Jambi	0,68	3,75	9,53	39,79
Sumatera Selatan	1,29	4,10	10,88	32,34
Bengkulu	1,71	5,47	11,98	31,46
Lampung	1,62	6,23	14,83	40,79
Kep. Bangka Belitung	0,82	4,29	13,50	45,67
Kepulauan Riau	0,11	2,93	9,37	32,31
DKI Jakarta	0,27	0,94	4,97	28,64
Jawa Barat	0,39	1,31	7,52	30,39
Jawa Tengah	0,70	3,41	8,90	39,15
DI Yogyakarta	1,26	3,47	12,61	17,88
Jawa Timur	0,94	4,18	10,35	39,11
Banten	0,63	2,64	7,65	36,70
Bali	4,84	13,40	21,30	36,66
Nusa Tenggara Barat	4,01	8,55	13,59	30,24
Nusa Tenggara Timur	3,52	9,87	17,66	27,34
Kalimantan Barat	0,89	3,86	16,58	35,40
Kalimantan Tengah	3,07	7,18	16,92	44,85
Kalimantan Selatan	1,44	4,56	14,62	30,98
Kalimantan Timur	0,62	2,28	7,52	35,89
Sulawesi Utara	1,20	2,33	8,31	11,59
Sulawesi Tengah	5,45	10,09	21,36	34,82
Sulawesi Selatan	3,64	9,44	14,13	27,58
Sulawesi Tenggara	6,72	14,72	21,77	23,00
Gorontalo	1,70	6,64	8,97	29,59
Sulawesi Barat	5,76	13,31	22,00	35,60
Maluku	1,89	3,97	8,09	16,14
Maluku Utara	2,53	7,44	13,99	28,20
Papua Barat	2,61	7,86	11,44	15,27
Papua	4,14	15,80	24,07	28,02
Indonesia	1,59	4,82	11,25	32,53

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.5.1 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,66	36,36	23,41
Sumatera Utara	10,14	32,35	21,32
Sumatera Barat	19,69	45,15	32,75
Riau	40,46	57,35	48,74
Jambi	8,72	29,50	18,82
Sumatera Selatan	10,74	33,84	21,73
Bengkulu	20,44	48,24	34,59
Lampung	17,14	45,14	31,14
Kep. Bangka Belitung	13,80	44,98	29,43
Kepulauan Riau	26,72	45,89	36,34
DKI Jakarta	7,77	17,18	12,46
Jawa Barat	11,11	24,82	17,87
Jawa Tengah	23,91	44,17	33,83
DI Yogyakarta	57,44	69,85	63,40
Jawa Timur	14,99	33,16	23,85
Banten	5,65	19,02	12,19
Bali	56,13	70,49	63,04
Nusa Tenggara Barat	14,58	37,31	25,73
Nusa Tenggara Timur	46,75	68,25	57,07
Kalimantan Barat	11,65	38,86	25,49
Kalimantan Tengah	24,15	46,66	34,98
Kalimantan Selatan	13,19	32,07	22,54
Kalimantan Timur	7,85	26,37	16,83
Sulawesi Utara	15,91	32,05	23,95
Sulawesi Tengah	35,96	60,23	48,46
Sulawesi Selatan	14,09	45,37	29,72
Sulawesi Tenggara	44,24	65,75	55,04
Gorontalo	28,44	57,03	43,85
Sulawesi Barat	39,57	75,72	58,69
Maluku	49,49	72,15	60,96
Maluku Utara	22,25	51,66	36,70
Papua Barat	27,46	39,30	33,14
Papua	14,66	31,92	22,89
Indonesia	16,98	34,99	25,86

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.5.2 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,62	22,63	13,11
Sumatera Utara	17,67	43,18	30,34
Sumatera Barat	11,32	39,46	25,60
Riau	20,59	38,90	29,64
Jambi	8,90	36,58	22,72
Sumatera Selatan	11,79	37,09	24,25
Bengkulu	18,25	51,46	34,51
Lampung	19,21	52,01	35,15
Kep. Bangka Belitung	19,20	57,02	37,72
Kepulauan Riau	18,20	41,31	29,34
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	9,94	29,82	19,42
Jawa Tengah	18,37	39,07	28,42
DI Yogyakarta	38,42	66,68	51,59
Jawa Timur	12,39	33,06	22,32
Banten	9,68	33,53	21,04
Bali	70,24	79,67	74,75
Nusa Tenggara Barat	11,40	42,17	26,27
Nusa Tenggara Timur	34,98	51,35	43,05
Kalimantan Barat	5,65	27,28	16,26
Kalimantan Tengah	18,56	41,20	29,46
Kalimantan Selatan	9,19	34,67	21,68
Kalimantan Timur	5,12	20,25	12,33
Sulawesi Utara	15,39	33,77	24,31
Sulawesi Tengah	26,51	52,41	39,26
Sulawesi Selatan	10,43	39,42	24,98
Sulawesi Tenggara	31,86	66,91	48,76
Gorontalo	21,42	38,71	30,00
Sulawesi Barat	30,01	66,55	48,70
Maluku	26,22	47,19	36,55
Maluku Utara	23,02	48,90	35,68
Papua Barat	20,42	30,56	25,08
Papua	7,50	22,39	14,20
Indonesia	15,82	38,79	27,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.5.3 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,81	26,88	16,31
Sumatera Utara	13,95	37,75	25,85
Sumatera Barat	14,90	41,92	28,68
Riau	29,05	46,68	37,73
Jambi	8,84	34,31	21,45
Sumatera Selatan	11,36	35,81	23,24
Bengkulu	19,04	50,24	34,54
Lampung	18,62	49,96	33,98
Kep. Bangka Belitung	16,48	50,83	33,51
Kepulauan Riau	25,06	45,05	35,01
DKI Jakarta	7,77	17,18	12,46
Jawa Barat	10,72	26,39	18,37
Jawa Tengah	20,99	41,50	30,99
DI Yogyakarta	52,16	69,00	60,19
Jawa Timur	13,70	33,11	23,10
Banten	6,96	23,57	15,02
Bali	61,49	73,95	67,47
Nusa Tenggara Barat	12,80	40,00	26,03
Nusa Tenggara Timur	37,71	55,11	46,24
Kalimantan Barat	7,62	31,25	19,35
Kalimantan Tengah	20,66	43,25	31,53
Kalimantan Selatan	11,05	33,45	22,09
Kalimantan Timur	6,82	24,10	15,14
Sulawesi Utara	15,63	32,93	24,14
Sulawesi Tengah	29,20	54,79	41,97
Sulawesi Selatan	11,93	41,84	26,92
Sulawesi Tenggara	35,87	66,52	50,85
Gorontalo	23,84	45,76	35,06
Sulawesi Barat	32,39	68,95	51,25
Maluku	35,86	57,86	46,82
Maluku Utara	22,78	49,78	36,01
Papua Barat	22,69	33,54	27,75
Papua	9,81	25,69	17,09
Indonesia	16,42	36,82	26,41

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.6.1 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Provinsi	Perkotaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6,66	15,67	23,08	47,24
Sumatera Utara	13,49	21,66	27,33	27,21
Sumatera Barat	21,36	33,20	35,77	46,27
Riau	35,18	50,78	43,12	72,08
Jambi	11,45	15,54	29,18	25,37
Sumatera Selatan	10,70	19,07	27,81	32,95
Bengkulu	18,24	26,95	44,42	50,47
Lampung	17,75	29,29	39,77	45,95
Kep. Bangka Belitung	17,79	28,80	40,37	47,53
Kepulauan Riau	26,92	38,06	42,86	50,06
DKI Jakarta	6,95	12,03	15,26	19,24
Jawa Barat	10,43	17,38	21,52	32,33
Jawa Tengah	19,09	31,97	41,90	56,87
DI Yogyakarta	39,68	52,72	61,34	82,48
Jawa Timur	12,00	22,13	29,97	43,74
Banten	4,13	12,55	17,19	21,89
Bali	51,74	62,97	68,65	73,97
Nusa Tenggara Barat	11,50	23,01	33,02	46,32
Nusa Tenggara Timur	37,50	52,72	63,85	77,65
Kalimantan Barat	10,28	21,88	38,75	37,55
Kalimantan Tengah	21,28	31,00	41,41	54,25
Kalimantan Selatan	14,18	18,60	26,60	37,04
Kalimantan Timur	7,80	16,02	21,31	28,06
Sulawesi Utara	12,83	20,93	23,05	42,47
Sulawesi Tengah	28,09	40,97	53,90	70,13
Sulawesi Selatan	17,76	26,14	34,44	42,89
Sulawesi Tenggara	38,92	49,97	53,46	76,40
Gorontalo	32,59	35,89	48,04	60,86
Sulawesi Barat	46,33	59,86	66,91	70,55
Maluku	40,55	54,39	65,15	78,14
Maluku Utara	14,28	30,27	44,17	56,35
Papua Barat	16,80	34,52	39,28	47,87
Papua	11,45	19,29	27,05	39,39
Indonesia	14,53	23,99	30,85	43,41

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.6.2 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Provinsi	Perdesaan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5,23	12,34	17,27	29,57
Sumatera Utara	23,28	31,62	36,80	42,90
Sumatera Barat	17,38	26,24	30,35	49,95
Riau	22,15	30,50	36,79	51,27
Jambi	12,58	24,47	29,02	44,36
Sumatera Selatan	14,34	27,66	34,87	43,85
Bengkulu	22,14	36,04	46,77	55,83
Lampung	26,64	36,73	42,85	54,64
Kep. Bangka Belitung	29,12	43,74	41,39	58,93
Kepulauan Riau	21,42	33,37	29,18	64,20
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	11,13	21,23	26,84	40,37
Jawa Tengah	16,02	29,60	38,31	61,96
DI Yogyakarta	38,12	53,08	58,77	71,20
Jawa Timur	13,22	22,63	31,09	45,32
Banten	14,36	22,38	25,21	38,19
Bali	65,27	77,97	81,17	89,28
Nusa Tenggara Barat	18,17	26,06	32,05	46,39
Nusa Tenggara Timur	35,39	46,25	53,77	63,58
Kalimantan Barat	9,32	17,38	24,07	40,37
Kalimantan Tengah	21,04	32,34	39,88	45,19
Kalimantan Selatan	13,90	23,80	30,79	44,00
Kalimantan Timur	5,86	11,47	18,79	26,07
Sulawesi Utara	17,21	25,59	30,66	36,33
Sulawesi Tengah	28,67	42,23	51,14	54,39
Sulawesi Selatan	16,08	26,12	30,53	42,72
Sulawesi Tenggara	39,10	51,97	57,81	63,85
Gorontalo	20,76	33,79	37,01	43,18
Sulawesi Barat	37,78	55,35	58,83	57,02
Maluku	26,38	38,03	43,73	57,43
Maluku Utara	25,79	38,20	44,10	55,57
Papua Barat	11,38	22,52	31,94	66,96
Papua	8,34	15,75	22,97	33,57
Indonesia	17,97	28,52	35,00	47,83

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 5.6.3 Persentase Siswa Berumur 10–24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Perkotaan+Perdesaan				
Provinsi	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5,60	13,25	18,94	38,49
Sumatera Utara	18,88	27,00	32,07	31,66
Sumatera Barat	18,86	28,99	32,72	47,58
Riau	26,81	38,10	39,52	66,25
Jambi	12,27	21,52	29,07	36,15
Sumatera Selatan	13,24	24,57	31,55	35,86
Bengkulu	21,05	33,08	45,82	52,48
Lampung	24,46	34,85	41,87	50,09
Kep. Bangka Belitung	23,89	36,21	40,82	51,86
Kepulauan Riau	25,81	37,15	40,09	51,52
DKI Jakarta	6,95	12,03	15,26	19,24
Jawa Barat	10,68	18,70	23,01	34,02
Jawa Tengah	17,31	30,67	40,21	58,76
DI Yogyakarta	39,10	52,85	60,52	81,37
Jawa Timur	12,65	22,39	30,49	44,26
Banten	7,79	15,95	19,50	25,18
Bali	57,69	68,97	73,40	76,88
Nusa Tenggara Barat	15,43	24,85	32,50	46,35
Nusa Tenggara Timur	35,69	47,50	57,00	71,92
Kalimantan Barat	9,55	18,80	30,40	38,77
Kalimantan Tengah	21,11	31,88	40,55	50,66
Kalimantan Selatan	14,01	21,63	28,62	38,63
Kalimantan Timur	6,98	14,15	20,49	27,52
Sulawesi Utara	15,46	23,55	27,15	41,16
Sulawesi Tengah	28,54	41,95	52,09	64,01
Sulawesi Selatan	16,65	26,13	32,21	42,83
Sulawesi Tenggara	39,05	51,45	56,38	72,79
Gorontalo	24,34	34,45	41,13	53,44
Sulawesi Barat	39,64	56,32	61,44	62,10
Maluku	30,61	43,80	53,46	72,13
Maluku Utara	23,23	36,05	44,12	56,06
Papua Barat	12,76	26,61	34,73	58,51
Papua	9,05	16,90	24,61	37,52
Indonesia	16,40	26,33	32,72	44,71

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.1.1 Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut atau Lebih Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,79	2,75	2,77
Sumatera Utara	4,01	3,58	3,79
Sumatera Barat	3,91	3,52	3,71
Riau	21,74	21,86	21,80
Jambi	2,13	3,07	2,60
Sumatera Selatan	2,76	1,76	2,28
Bengkulu	4,45	1,84	3,13
Lampung	3,06	1,56	2,33
Kep. Bangka Belitung	1,74	3,52	2,61
Kepulauan Riau	3,40	2,67	3,04
DKI Jakarta	2,87	2,93	2,90
Jawa Barat	3,99	3,48	3,74
Jawa Tengah	3,52	2,99	3,26
DI Yogyakarta	3,50	3,94	3,71
Jawa Timur	3,54	3,37	3,46
Banten	3,44	3,95	3,69
Bali	3,88	3,71	3,79
Nusa Tenggara Barat	3,53	2,74	3,14
Nusa Tenggara Timur	4,44	4,35	4,40
Kalimantan Barat	1,70	2,56	2,13
Kalimantan Tengah	4,33	3,19	3,78
Kalimantan Selatan	3,23	2,05	2,66
Kalimantan Timur	3,78	3,64	3,71
Sulawesi Utara	5,78	4,19	4,99
Sulawesi Tengah	6,23	5,49	5,86
Sulawesi Selatan	3,55	3,77	3,66
Sulawesi Tenggara	1,93	3,61	2,77
Gorontalo	8,40	7,19	7,76
Sulawesi Barat	7,26	8,05	7,67
Maluku	4,63	2,94	3,78
Maluku Utara	13,68	14,12	13,90
Papua Barat	4,44	5,04	4,73
Papua	5,04	6,64	5,80
Indonesia	4,08	3,79	3,94

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.1.2 Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut atau Lebih Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,09	2,80	2,95
Sumatera Utara	4,52	3,77	4,15
Sumatera Barat	3,53	3,75	3,64
Riau	12,71	13,14	12,92
Jambi	3,82	2,84	3,34
Sumatera Selatan	3,07	3,07	3,07
Bengkulu	4,78	4,50	4,64
Lampung	3,06	2,64	2,86
Kep. Bangka Belitung	1,95	1,88	1,92
Kepulauan Riau	2,36	3,62	2,95
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	3,64	3,93	3,78
Jawa Tengah	3,30	2,76	3,04
DI Yogyakarta	9,67	5,56	7,73
Jawa Timur	3,75	2,93	3,35
Banten	2,41	3,81	3,07
Bali	3,94	3,50	3,73
Nusa Tenggara Barat	3,18	4,45	3,79
Nusa Tenggara Timur	5,21	5,34	5,27
Kalimantan Barat	5,04	4,38	4,72
Kalimantan Tengah	5,21	6,48	5,82
Kalimantan Selatan	2,57	2,74	2,65
Kalimantan Timur	3,09	2,96	3,03
Sulawesi Utara	6,39	5,87	6,14
Sulawesi Tengah	6,61	4,90	5,77
Sulawesi Selatan	4,41	4,42	4,41
Sulawesi Tenggara	5,32	5,72	5,52
Gorontalo	4,85	5,44	5,14
Sulawesi Barat	10,37	10,20	10,28
Maluku	3,64	4,26	3,95
Maluku Utara	5,62	4,17	4,91
Papua Barat	8,65	9,06	8,84
Papua	8,20	8,05	8,14
Indonesia	4,32	4,11	4,22

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.1.3 Persentase Siswa Berumur 5–24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut atau Lebih Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	(2)	(3)	(4)
(1)			
Aceh	3,00	2,79	2,89
Sumatera Utara	4,28	3,68	3,98
Sumatera Barat	3,68	3,65	3,67
Riau	16,46	16,73	16,59
Jambi	3,29	2,92	3,11
Sumatera Selatan	2,95	2,57	2,77
Bengkulu	4,67	3,57	4,12
Lampung	3,06	2,33	2,71
Kep. Bangka Belitung	1,84	2,71	2,27
Kepulauan Riau	3,20	2,84	3,03
DKI Jakarta	2,87	2,93	2,90
Jawa Barat	3,87	3,63	3,75
Jawa Tengah	3,40	2,86	3,14
DI Yogyakarta	5,29	4,38	4,84
Jawa Timur	3,64	3,15	3,40
Banten	3,10	3,91	3,49
Bali	3,90	3,63	3,77
Nusa Tenggara Barat	3,33	3,71	3,51
Nusa Tenggara Timur	5,04	5,13	5,09
Kalimantan Barat	3,99	3,79	3,89
Kalimantan Tengah	4,89	5,31	5,09
Kalimantan Selatan	2,86	2,43	2,65
Kalimantan Timur	3,51	3,38	3,45
Sulawesi Utara	6,11	5,08	5,60
Sulawesi Tengah	6,51	5,07	5,79
Sulawesi Selatan	4,08	4,17	4,12
Sulawesi Tenggara	4,29	5,06	4,66
Gorontalo	6,06	6,09	6,07
Sulawesi Barat	9,60	9,67	9,64
Maluku	4,04	3,73	3,88
Maluku Utara	7,97	7,13	7,56
Papua Barat	7,32	7,72	7,51
Papua	7,26	7,61	7,42
Indonesia	4,20	3,95	4,08

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, dan Tipe Daerah, 2014

Jenis Kelamin/ Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki			
Tidak/belum Pernah Sekolah	1,66	4,67	3,14
Tidak tamat SD/ sederajat	8,22	17,44	12,74
Tamat SD/ sederajat	20,21	35,03	27,47
Tamat SMP/ sederajat	21,09	21,21	21,15
Tamat SM/ sederajat	37,41	18,41	28,10
Tamat Perguruan Tinggi	11,41	3,25	7,41
Perempuan			
Tidak/belum Pernah Sekolah	4,81	10,87	7,78
Tidak tamat SD/ sederajat	10,36	18,99	14,60
Tamat SD/ sederajat	21,71	33,21	27,35
Tamat SMP/ sederajat	21,33	19,61	20,49
Tamat SM/ sederajat	30,49	13,74	22,27
Tamat Perguruan Tinggi	11,30	3,59	7,52
Laki-laki+Perempuan			
Tidak/belum Pernah Sekolah	3,24	7,78	5,47
Tidak tamat SD/ sederajat	9,29	18,22	13,67
Tamat SD/ sederajat	20,96	34,12	27,41
Tamat SMP/ sederajat	21,21	20,41	20,82
Tamat SM/ sederajat	33,94	16,07	25,18
Tamat Perguruan Tinggi	11,36	3,42	7,46

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,86	8,58	9,24
Sumatera Utara	10,26	8,28	9,29
Sumatera Barat	10,22	7,58	8,63
Riau	10,41	7,82	8,86
Jambi	10,18	7,55	8,36
Sumatera Selatan	9,91	7,17	8,18
Bengkulu	10,94	7,65	8,70
Lampung	9,60	7,39	7,97
Kep. Bangka Belitung	9,05	6,49	7,76
Kepulauan Riau	10,39	6,58	9,77
DKI Jakarta	10,63	-	10,63
Jawa Barat	9,02	6,53	8,19
Jawa Tengah	8,51	6,64	7,50
DI Yogyakarta	10,40	7,55	9,43
Jawa Timur	8,91	6,41	7,61
Banten	9,63	6,37	8,63
Bali	9,65	7,01	8,62
Nusa Tenggara Barat	8,40	6,81	7,49
Nusa Tenggara Timur	10,33	6,56	7,35
Kalimantan Barat	9,53	6,41	7,39
Kalimantan Tengah	9,79	7,41	8,23
Kalimantan Selatan	9,45	6,95	8,02
Kalimantan Timur	10,19	7,85	9,31
Sulawesi Utara	10,27	8,25	9,18
Sulawesi Tengah	10,56	7,52	8,30
Sulawesi Selatan	10,07	6,85	8,07
Sulawesi Tenggara	10,82	7,79	8,67
Gorontalo	9,27	6,65	7,56
Sulawesi Barat	9,36	6,83	7,42
Maluku	11,26	8,30	9,51
Maluku Utara	10,85	7,95	8,79
Papua Barat	10,83	8,62	9,34
Papua	10,80	4,58	6,25
Indonesia	9,46	6,94	8,23

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.4 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,50	8,98	9,24
Sumatera Utara	9,55	9,02	9,29
Sumatera Barat	8,65	8,61	8,63
Riau	9,06	8,64	8,86
Jambi	8,73	7,98	8,36
Sumatera Selatan	8,46	7,90	8,18
Bengkulu	8,93	8,46	8,70
Lampung	8,24	7,70	7,97
Kep. Bangka Belitung	8,03	7,46	7,76
Kepulauan Riau	9,92	9,61	9,77
DKI Jakarta	10,98	10,27	10,63
Jawa Barat	8,58	7,80	8,19
Jawa Tengah	7,92	7,11	7,50
DI Yogyakarta	9,89	8,98	9,43
Jawa Timur	8,13	7,11	7,61
Banten	9,07	8,17	8,63
Bali	9,37	7,87	8,62
Nusa Tenggara Barat	8,12	6,93	7,49
Nusa Tenggara Timur	7,52	7,19	7,35
Kalimantan Barat	7,75	7,02	7,39
Kalimantan Tengah	8,50	7,93	8,23
Kalimantan Selatan	8,38	7,67	8,02
Kalimantan Timur	9,66	8,91	9,31
Sulawesi Utara	9,13	9,23	9,18
Sulawesi Tengah	8,46	8,14	8,30
Sulawesi Selatan	8,30	7,86	8,07
Sulawesi Tenggara	9,05	8,30	8,67
Gorontalo	7,26	7,86	7,56
Sulawesi Barat	7,69	7,15	7,42
Maluku	9,69	9,34	9,51
Maluku Utara	9,18	8,40	8,79
Papua Barat	9,84	8,77	9,34
Papua	6,98	5,44	6,25
Indonesia	8,61	7,85	8,23

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.5 Rasio Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	98,97	97,62	98,01
Sumatera Utara	99,46	97,67	98,59
Sumatera Barat	99,76	98,49	99,00
Riau	99,55	98,44	98,89
Jambi	99,49	97,23	97,94
Sumatera Selatan	98,85	97,97	98,31
Bengkulu	99,35	95,39	96,70
Lampung	99,24	97,82	98,23
Kep. Bangka Belitung	99,32	96,22	97,79
Kepulauan Riau	99,44	95,65	98,87
DKI Jakarta	99,27		99,27
Jawa Barat	98,53	97,03	98,03
Jawa Tengah	96,06	93,18	94,54
DI Yogyakarta	96,56	91,58	94,83
Jawa Timur	96,96	92,69	94,75
Banten	97,15	97,87	97,37
Bali	94,98	88,08	92,29
Nusa Tenggara Barat	94,02	91,32	92,50
Nusa Tenggara Timur	97,96	97,40	97,46
Kalimantan Barat	97,65	91,41	93,48
Kalimantan Tengah	98,76	98,61	98,66
Kalimantan Selatan	98,65	97,02	97,72
Kalimantan Timur	99,24	97,78	98,72
Sulawesi Utara	99,75	99,53	99,64
Sulawesi Tengah	99,13	97,65	98,08
Sulawesi Selatan	97,91	95,20	96,22
Sulawesi Tenggara	97,42	92,93	94,30
Gorontalo	100,38	102,09	101,51
Sulawesi Barat	100,61	95,53	96,78
Maluku	99,64	98,88	99,20
Maluku Utara	99,43	97,84	98,32
Papua Barat	99,40	93,88	95,72
Papua	98,88	76,48	83,61
Indonesia	97,89	95,12	96,55

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.6.1 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-24 Tahun Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	100,00	100,00
Sumatera Utara	100,00	99,97	99,99
Sumatera Barat	100,00	100,00	100,00
Riau	100,00	100,00	100,00
Jambi	100,00	100,00	100,00
Sumatera Selatan	100,00	100,00	100,00
Bengkulu	100,00	100,00	100,00
Lampung	100,00	100,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	99,84	100,00	99,92
Kepulauan Riau	100,00	100,00	100,00
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00
Jawa Barat	99,98	99,97	99,98
Jawa Tengah	100,00	99,97	99,99
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00
Jawa Timur	99,94	99,97	99,96
Banten	100,00	100,00	100,00
Bali	100,00	99,94	99,97
Nusa Tenggara Barat	100,00	100,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	99,98	100,00	99,99
Kalimantan Barat	99,79	99,88	99,84
Kalimantan Tengah	100,00	100,00	100,00
Kalimantan Selatan	100,00	100,00	100,00
Kalimantan Timur	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Utara	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Tengah	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Selatan	99,70	99,71	99,71
Sulawesi Tenggara	100,00	100,00	100,00
Gorontalo	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Barat	99,55	100,00	99,78
Maluku	100,00	100,00	100,00
Maluku Utara	100,00	100,00	100,00
Papua Barat	100,00	100,00	100,00
Papua	99,51	99,48	99,50
Indonesia	99,97	99,97	99,97

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.6.2 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-24 Tahun Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	99,92	99,96
Sumatera Utara	99,65	99,45	99,55
Sumatera Barat	99,85	99,98	99,91
Riau	100,00	100,00	100,00
Jambi	99,84	99,83	99,84
Sumatera Selatan	99,94	99,83	99,88
Bengkulu	99,85	100,00	99,92
Lampung	99,84	100,00	99,92
Kep. Bangka Belitung	100,00	100,00	100,00
Kepulauan Riau	99,01	100,00	99,43
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00
Jawa Tengah	99,92	99,96	99,94
DI Yogyakarta	99,65	100,00	99,82
Jawa Timur	99,86	99,74	99,80
Banten	99,85	99,62	99,74
Bali	99,67	99,69	99,68
Nusa Tenggara Barat	99,69	99,97	99,83
Nusa Tenggara Timur	97,31	98,35	97,83
Kalimantan Barat	99,55	99,87	99,70
Kalimantan Tengah	99,84	99,99	99,91
Kalimantan Selatan	100,00	99,81	99,91
Kalimantan Timur	99,96	99,95	99,96
Sulawesi Utara	99,97	100,00	99,99
Sulawesi Tengah	99,04	99,48	99,25
Sulawesi Selatan	98,75	99,58	99,17
Sulawesi Tenggara	99,11	99,48	99,30
Gorontalo	98,96	99,71	99,33
Sulawesi Barat	99,60	98,27	98,94
Maluku	99,34	99,02	99,19
Maluku Utara	99,69	99,61	99,65
Papua Barat	99,27	99,47	99,36
Papua	81,43	74,75	78,36
Indonesia	99,35	99,34	99,35

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.6.3 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-24 Tahun Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	99,94	99,97
Sumatera Utara	99,83	99,73	99,78
Sumatera Barat	99,91	99,99	99,95
Riau	100,00	100,00	100,00
Jambi	99,89	99,88	99,89
Sumatera Selatan	99,96	99,90	99,93
Bengkulu	99,90	100,00	99,95
Lampung	99,89	100,00	99,94
Kep. Bangka Belitung	99,92	100,00	99,96
Kepulauan Riau	99,81	100,00	99,91
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00
Jawa Barat	99,98	99,98	99,98
Jawa Tengah	99,96	99,97	99,96
DI Yogyakarta	99,91	100,00	99,95
Jawa Timur	99,90	99,85	99,88
Banten	99,95	99,88	99,92
Bali	99,88	99,86	99,87
Nusa Tenggara Barat	99,83	99,98	99,91
Nusa Tenggara Timur	97,98	98,76	98,37
Kalimantan Barat	99,63	99,87	99,75
Kalimantan Tengah	99,90	99,99	99,94
Kalimantan Selatan	100,00	99,90	99,95
Kalimantan Timur	99,98	99,98	99,98
Sulawesi Utara	99,99	100,00	99,99
Sulawesi Tengah	99,33	99,65	99,48
Sulawesi Selatan	99,15	99,64	99,40
Sulawesi Tenggara	99,41	99,66	99,53
Gorontalo	99,32	99,81	99,56
Sulawesi Barat	99,59	98,67	99,13
Maluku	99,64	99,47	99,56
Maluku Utara	99,79	99,74	99,76
Papua Barat	99,52	99,65	99,58
Papua	87,16	82,02	84,84
Indonesia	99,68	99,68	99,68

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.7.1 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-59 Tahun Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,93	99,68	99,81
Sumatera Utara	99,93	99,80	99,86
Sumatera Barat	99,76	99,68	99,72
Riau	99,80	99,66	99,73
Jambi	99,71	99,24	99,48
Sumatera Selatan	99,66	99,20	99,43
Bengkulu	99,94	99,53	99,74
Lampung	99,96	99,04	99,51
Kep. Bangka Belitung	99,38	99,05	99,22
Kepulauan Riau	99,86	99,41	99,64
DKI Jakarta	99,95	99,37	99,66
Jawa Barat	99,51	98,49	99,01
Jawa Tengah	99,05	96,63	97,82
DI Yogyakarta	99,85	98,50	99,18
Jawa Timur	99,06	97,33	98,19
Banten	99,49	97,58	98,55
Bali	99,46	96,63	98,07
Nusa Tenggara Barat	97,03	91,98	94,36
Nusa Tenggara Timur	99,57	98,68	99,13
Kalimantan Barat	98,99	97,32	98,15
Kalimantan Tengah	99,59	99,13	99,37
Kalimantan Selatan	99,81	99,34	99,58
Kalimantan Timur	99,79	99,34	99,58
Sulawesi Utara	99,92	99,89	99,91
Sulawesi Tengah	100,00	99,71	99,86
Sulawesi Selatan	98,70	97,91	98,30
Sulawesi Tenggara	99,62	98,42	99,01
Gorontalo	99,19	99,61	99,40
Sulawesi Barat	98,68	98,65	98,66
Maluku	99,83	99,90	99,86
Maluku Utara	100,00	99,85	99,92
Papua Barat	99,91	99,42	99,68
Papua	99,57	98,78	99,21
Indonesia	99,44	98,18	98,81

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.6.2 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-59 Tahun Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,34	97,61	98,47
Sumatera Utara	98,95	97,15	98,05
Sumatera Barat	99,00	97,79	98,39
Riau	99,07	97,89	98,50
Jambi	99,21	96,86	98,07
Sumatera Selatan	99,04	97,78	98,43
Bengkulu	99,28	96,54	97,95
Lampung	98,99	97,57	98,30
Kep. Bangka Belitung	98,51	95,29	96,99
Kepulauan Riau	98,17	94,36	96,36
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	98,89	96,56	97,74
Jawa Tengah	97,73	94,10	95,90
DI Yogyakarta	99,43	96,34	97,86
Jawa Timur	95,84	90,19	92,97
Banten	98,89	97,22	98,08
Bali	96,88	89,14	93,01
Nusa Tenggara Barat	93,26	85,79	89,29
Nusa Tenggara Timur	93,85	92,73	93,27
Kalimantan Barat	97,28	90,47	93,98
Kalimantan Tengah	99,52	98,63	99,10
Kalimantan Selatan	99,19	97,27	98,25
Kalimantan Timur	99,04	97,43	98,30
Sulawesi Utara	99,72	99,37	99,55
Sulawesi Tengah	97,65	96,60	97,15
Sulawesi Selatan	93,75	91,54	92,61
Sulawesi Tenggara	96,97	93,22	95,10
Gorontalo	96,51	98,30	97,39
Sulawesi Barat	95,36	91,15	93,26
Maluku	98,82	97,93	98,38
Maluku Utara	99,28	98,06	98,68
Papua Barat	98,40	92,86	95,81
Papua	68,07	51,62	60,21
Indonesia	97,09	93,72	95,42

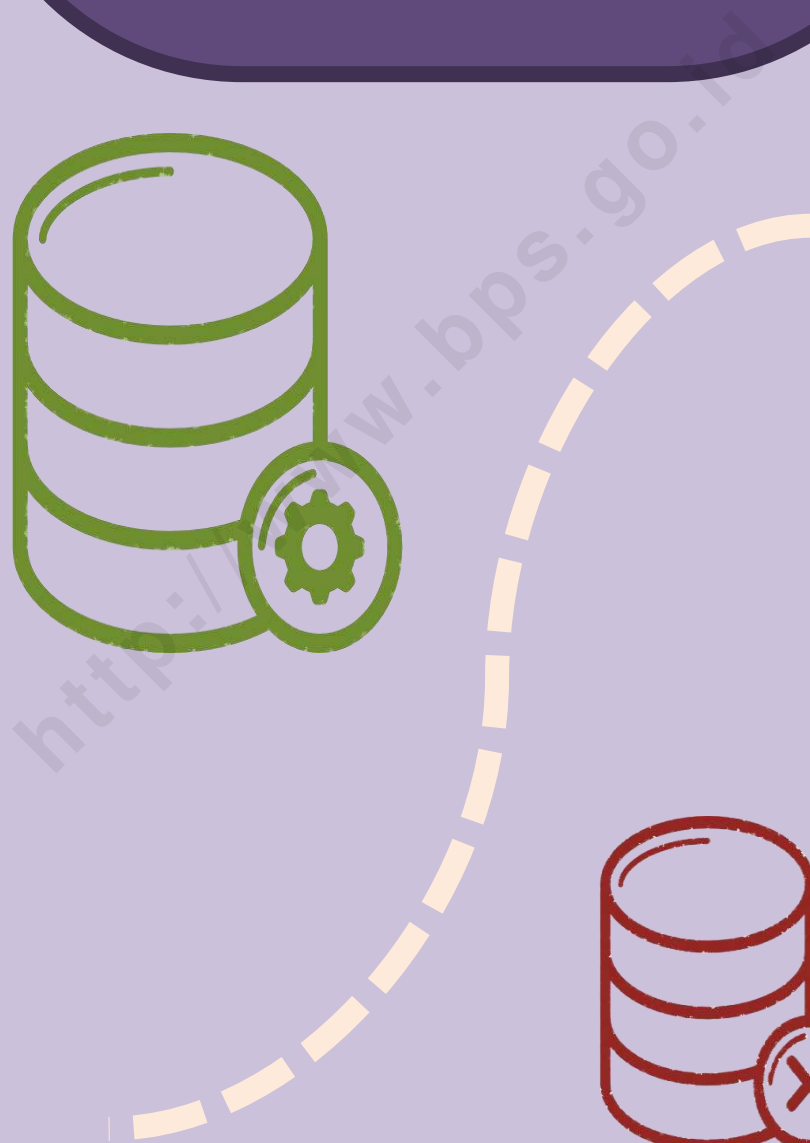
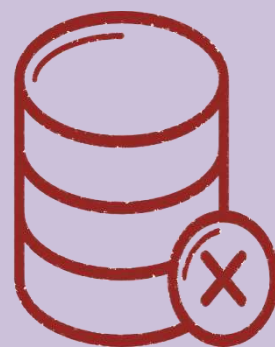
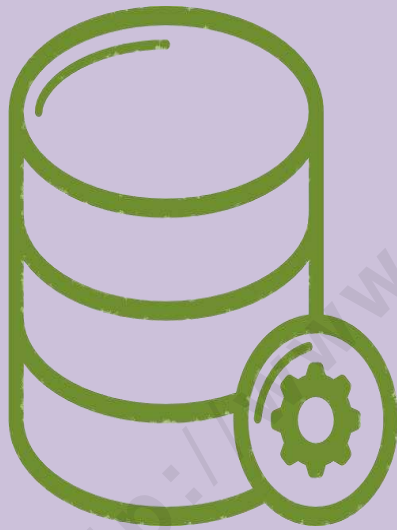
Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 6.6.3 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15-59 Tahun Menurut Tipe Daerah, Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2014

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,51	98,21	98,86
Sumatera Utara	99,45	98,51	98,98
Sumatera Barat	99,31	98,55	98,93
Riau	99,36	98,60	98,99
Jambi	99,36	97,60	98,50
Sumatera Selatan	99,26	98,32	98,80
Bengkulu	99,49	97,53	98,53
Lampung	99,24	97,97	98,63
Kep. Bangka Belitung	98,93	97,17	98,09
Kepulauan Riau	99,59	98,64	99,13
DKI Jakarta	99,95	99,37	99,66
Jawa Barat	99,31	97,86	98,59
Jawa Tengah	98,35	95,29	96,80
DI Yogyakarta	99,72	97,79	98,75
Jawa Timur	97,40	93,63	95,49
Banten	99,31	97,47	98,41
Bali	98,49	93,77	96,15
Nusa Tenggara Barat	94,88	88,44	91,47
Nusa Tenggara Timur	95,11	93,97	94,53
Kalimantan Barat	97,80	92,68	95,29
Kalimantan Tengah	99,55	98,80	99,20
Kalimantan Selatan	99,46	98,17	98,82
Kalimantan Timur	99,51	98,64	99,10
Sulawesi Utara	99,81	99,61	99,71
Sulawesi Tengah	98,25	97,43	97,85
Sulawesi Selatan	95,68	93,98	94,80
Sulawesi Tenggara	97,75	94,78	96,26
Gorontalo	97,44	98,76	98,10
Sulawesi Barat	96,11	92,91	94,51
Maluku	99,23	98,74	98,99
Maluku Utara	99,49	98,59	99,05
Papua Barat	98,90	95,02	97,09
Papua	76,62	63,71	70,51
Indonesia	98,30	96,02	97,17

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING



ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING (SAMPLING ERROR ESTIMATES)

Estimasi sampel Susenas 2014 dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *non-sampling error* dan *sampling error*. *Non-sampling error* adalah kesalahan yang terjadi dalam pengumpulan maupun pengolahan data, seperti kesalahan dalam menemukan dan mewawancarai responden dalam rumah tangga terpilih, kesalahan petugas maupun responden dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner dan kesalahan dalam proses entri data.

Sampling error adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* (galat baku) dari suatu angka estimasi, rata-rata, persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2014. Untuk mengukur presisi dari suatu angka tersebut digunakan *relative standard error* (kesalahan relatif), yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%). *Standard error* dapat digunakan untuk menghitung selang kepercayaan yang dapat digunakan untuk melihat selang dari angka sebenarnya yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*.

Penghitungan *sampling error* pada variabel dalam publikasi Statistik Pendidikan 2014 menggunakan *software* STATA versi 13.0. Variabel yang dihitung *sampling error*-nya dalam publikasi ini antara lain meliputi pendidikan pemuda, angka buta huruf, keluhan kesehatan, angka kesakitan, dan akses terhadap media.

Sampling error dalam publikasi ini disajikan dalam 52 tabel lampiran pada halaman yang pada setiap tabel memuat 33 provinsi menurut tipe daerah

(perkotaan dan perdesaan), dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Tabel 7.1 sampai tabel 7.52 menyajikan nilai-nilai estimasi dari masing-masing indikator, *standard error* (galat baku), selang kepercayaan, dan *relative standard error*.

<http://www.bps.go.id>

Tabel 7.1.1 *Sampling error* Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	75,11	2,11	70,96	79,25	2,81
Sumatera Utara	66,91	1,73	63,53	70,30	2,58
Sumatera Barat	73,01	2,07	68,96	77,06	2,83
Riau	67,34	2,62	62,20	72,48	3,89
Jambi	71,54	3,07	65,52	77,56	4,29
Sumatera Selatan	66,60	2,29	62,12	71,09	3,44
Bengkulu	69,86	3,64	62,72	77,00	5,21
Lampung	65,32	2,61	60,20	70,44	4,00
Kep. Bangka Belitung	63,36	3,01	57,46	69,25	4,75
Kepulauan Riau	72,75	3,53	65,83	79,68	4,86
DKI Jakarta	58,79	1,87	55,13	62,45	3,18
Jawa Barat	60,20	1,18	57,89	62,50	1,96
Jawa Tengah	62,08	1,23	59,66	64,49	1,98
DI Yogyakarta	66,07	2,81	60,56	71,57	4,25
Jawa Timur	67,70	1,19	65,38	70,03	1,75
Banten	61,20	2,04	57,20	65,20	3,33
Bali	71,47	2,17	67,21	75,72	3,04
Nusa Tenggara Barat	68,51	2,43	63,74	73,28	3,55
Nusa Tenggara Timur	69,97	2,56	64,96	74,98	3,65
Kalimantan Barat	64,17	3,00	58,30	70,05	4,67
Kalimantan Tengah	64,59	2,98	58,75	70,43	4,61
Kalimantan Selatan	62,75	2,51	57,82	67,67	4,00
Kalimantan Timur	70,46	2,04	66,47	74,46	2,89
Sulawesi Utara	58,33	2,67	53,09	63,56	4,58
Sulawesi Tengah	72,40	3,26	66,02	78,78	4,50
Sulawesi Selatan	61,42	2,31	56,90	65,94	3,75
Sulawesi Tenggara	65,69	3,16	59,49	71,88	4,81
Gorontalo	61,55	4,37	52,99	70,12	7,10
Sulawesi Barat	70,32	4,54	61,42	79,21	6,45
Maluku	61,49	3,22	55,18	67,81	5,24
Maluku Utara	72,17	3,84	64,65	79,69	5,32
Papua Barat	71,78	3,05	65,81	77,75	4,24
Papua	64,74	3,28	58,31	71,17	5,07
Indonesia	63,91	0,46	63,01	64,81	0,72

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.1.2 Sampling error Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	66,99	1,44	64,15	69,82	2,16
Sumatera Utara	64,72	1,39	61,99	67,45	2,15
Sumatera Barat	62,05	1,78	58,56	65,54	2,87
Riau	58,99	2,01	55,05	62,92	3,40
Jambi	54,21	2,04	50,21	58,21	3,77
Sumatera Selatan	51,66	1,79	48,15	55,18	3,47
Bengkulu	61,72	2,25	57,32	66,13	3,64
Lampung	54,54	1,73	51,16	57,92	3,16
Kep. Bangka Belitung	50,68	3,11	44,58	56,77	6,14
Kepulauan Riau	62,93	4,67	53,79	72,08	7,41
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	48,40	1,82	44,83	51,97	3,76
Jawa Tengah	54,13	1,34	51,49	56,76	2,48
DI Yogyakarta	73,76	4,03	65,85	81,66	5,47
Jawa Timur	53,00	1,38	50,29	55,71	2,61
Banten	48,35	2,70	43,06	53,64	5,59
Bali	69,77	2,85	64,19	75,35	4,08
Nusa Tenggara Barat	60,61	2,57	55,57	65,64	4,24
Nusa Tenggara Timur	46,36	1,68	43,06	49,66	3,63
Kalimantan Barat	42,61	2,08	38,55	46,68	4,87
Kalimantan Tengah	44,42	2,61	39,30	49,55	5,88
Kalimantan Selatan	48,26	2,50	43,36	53,17	5,18
Kalimantan Timur	62,36	2,97	56,54	68,17	4,76
Sulawesi Utara	64,77	2,31	60,25	69,29	3,56
Sulawesi Tengah	59,03	2,26	54,60	63,46	3,83
Sulawesi Selatan	57,47	1,61	54,33	60,62	2,79
Sulawesi Tenggara	60,24	2,26	55,80	64,68	3,76
Gorontalo	53,33	3,20	47,05	59,61	6,01
Sulawesi Barat	52,35	3,21	46,05	58,65	6,14
Maluku	63,47	2,30	58,96	67,98	3,63
Maluku Utara	59,30	2,56	54,29	64,31	4,31
Papua Barat	57,40	3,57	50,41	64,39	6,21
Papua	35,29	1,98	31,42	39,16	5,60
Indonesia	54,50	0,44	53,64	55,36	0,80

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.1.3 Sampling error Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	69,20	1,20	66,84	71,55	1,74
Sumatera Utara	65,80	1,11	63,63	67,97	1,68
Sumatera Barat	66,52	1,36	63,86	69,18	2,04
Riau	62,31	1,59	59,19	65,42	2,55
Jambi	59,22	1,74	55,81	62,63	2,94
Sumatera Selatan	57,92	1,43	55,11	60,73	2,47
Bengkulu	64,61	1,92	60,85	68,37	2,97
Lampung	57,65	1,45	54,81	60,48	2,51
Kep. Bangka Belitung	56,93	2,19	52,64	61,22	3,85
Kepulauan Riau	70,53	2,96	64,73	76,32	4,19
DKI Jakarta	58,79	1,87	55,13	62,45	3,18
Jawa Barat	56,48	0,99	54,54	58,42	1,75
Jawa Tengah	58,11	0,91	56,33	59,89	1,56
DI Yogyakarta	68,46	2,32	63,90	73,01	3,39
Jawa Timur	60,00	0,93	58,19	61,81	1,54
Banten	56,87	1,63	53,68	60,06	2,86
Bali	70,83	1,73	67,45	74,21	2,44
Nusa Tenggara Barat	64,11	1,80	60,59	67,64	2,81
Nusa Tenggara Timur	52,15	1,40	49,41	54,89	2,68
Kalimantan Barat	50,06	1,73	46,67	53,44	3,45
Kalimantan Tengah	51,75	1,99	47,86	55,65	3,84
Kalimantan Selatan	55,04	1,79	51,53	58,55	3,26
Kalimantan Timur	67,41	1,69	64,11	70,72	2,50
Sulawesi Utara	61,69	1,76	58,24	65,14	2,86
Sulawesi Tengah	63,13	1,86	59,48	66,78	2,95
Sulawesi Selatan	59,10	1,33	56,48	61,71	2,26
Sulawesi Tenggara	61,91	1,84	58,30	65,51	2,97
Gorontalo	56,07	2,59	51,00	61,15	4,62
Sulawesi Barat	56,65	2,69	51,39	61,91	4,74
Maluku	62,60	1,93	58,83	66,38	3,07
Maluku Utara	63,10	2,14	58,90	67,30	3,39
Papua Barat	62,29	2,54	57,31	67,28	4,08
Papua	43,11	1,66	39,86	46,36	3,85
Indonesia	59,35	0,32	58,73	59,97	0,53

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.2.1 *Sampling error* Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-Laki

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	67,83	1,66	64,58	71,08	2,44
Sumatera Utara	63,23	1,49	60,32	66,14	2,35
Sumatera Barat	60,53	1,86	56,88	64,18	3,08
Riau	59,20	2,19	54,90	63,50	3,71
Jambi	55,84	2,26	51,40	60,27	4,05
Sumatera Selatan	56,08	1,90	52,36	59,80	3,38
Bengkulu	61,74	2,70	56,45	67,03	4,37
Lampung	56,03	2,06	52,00	60,07	3,67
Kep. Bangka Belitung	54,68	3,02	48,76	60,60	5,52
Kepulauan Riau	69,83	4,23	61,54	78,13	6,06
DKI Jakarta	61,89	2,67	56,66	67,12	4,31
Jawa Barat	56,49	1,29	53,95	59,02	2,29
Jawa Tengah	57,47	1,22	55,07	59,87	2,13
DI Yogyakarta	68,58	3,00	62,69	74,46	4,38
Jawa Timur	61,43	1,25	58,99	63,88	2,03
Banten	57,25	2,13	53,08	61,43	3,72
Bali	74,64	2,40	69,92	79,35	3,22
Nusa Tenggara Barat	64,28	2,41	59,56	69,00	3,75
Nusa Tenggara Timur	50,64	1,89	46,93	54,35	3,74
Kalimantan Barat	46,50	2,21	42,17	50,83	4,75
Kalimantan Tengah	50,89	2,43	46,13	55,66	4,78
Kalimantan Selatan	54,67	2,49	49,80	59,54	4,55
Kalimantan Timur	66,60	2,30	62,10	71,10	3,45
Sulawesi Utara	61,32	2,36	56,70	65,94	3,84
Sulawesi Tengah	61,95	2,35	57,35	66,55	3,79
Sulawesi Selatan	58,52	1,77	55,04	61,99	3,03
Sulawesi Tenggara	61,64	2,36	57,02	66,25	3,82
Gorontalo	49,35	3,40	42,69	56,01	6,88
Sulawesi Barat	50,96	3,34	44,41	57,50	6,55
Maluku	61,54	2,48	56,68	66,39	4,03
Maluku Utara	61,46	2,78	56,01	66,91	4,53
Papua Barat	63,92	3,64	56,79	71,05	5,69
Papua	42,70	1,97	38,84	46,55	4,60
Indonesia	58,78	0,42	57,96	59,61	0,72

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.2.2 *Sampling error* Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	70,60	1,59	67,48	73,72	2,26
Sumatera Utara	68,50	1,48	65,60	71,41	2,16
Sumatera Barat	72,31	1,76	68,87	75,75	2,43
Riau	65,86	2,03	61,89	69,83	3,08
Jambi	62,79	2,55	57,79	67,78	4,06
Sumatera Selatan	59,93	2,11	55,80	64,05	3,51
Bengkulu	67,63	2,56	62,60	72,65	3,79
Lampung	59,39	2,09	55,29	63,49	3,52
Kep. Bangka Belitung	59,28	3,36	52,69	65,86	5,67
Kepulauan Riau	71,18	3,82	63,70	78,66	5,36
DKI Jakarta	56,01	2,68	50,76	61,25	4,78
Jawa Barat	56,47	1,37	53,78	59,15	2,43
Jawa Tengah	58,81	1,28	56,30	61,32	2,18
DI Yogyakarta	68,30	3,40	61,64	74,97	4,98
Jawa Timur	58,58	1,28	56,07	61,09	2,19
Banten	56,46	2,29	51,96	60,95	4,06
Bali	66,66	2,62	61,53	71,79	3,92
Nusa Tenggara Barat	63,95	2,44	59,17	68,73	3,81
Nusa Tenggara Timur	53,78	1,83	50,19	57,37	3,40
Kalimantan Barat	53,76	2,24	49,37	58,15	4,17
Kalimantan Tengah	52,69	2,86	47,09	58,29	5,42
Kalimantan Selatan	55,41	2,50	50,52	60,31	4,50
Kalimantan Timur	68,27	2,45	63,47	73,07	3,58
Sulawesi Utara	62,08	2,51	57,17	67,00	4,04
Sulawesi Tengah	64,54	2,47	59,70	69,38	3,83
Sulawesi Selatan	59,70	1,83	56,12	63,29	3,06
Sulawesi Tenggara	62,19	2,53	57,23	67,14	4,06
Gorontalo	62,45	3,38	55,83	69,08	5,41
Sulawesi Barat	62,45	3,89	54,84	70,07	6,22
Maluku	63,77	2,90	58,09	69,44	4,54
Maluku Utara	64,78	2,76	59,37	70,19	4,26
Papua Barat	60,24	3,12	54,12	66,35	5,18
Papua	43,63	2,26	39,21	48,05	5,17
Indonesia	59,95	0,44	59,08	60,81	0,74

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.2.3 Sampling error Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-Laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	69,20	1,20	66,84	71,55	1,74
Sumatera Utara	65,80	1,11	63,63	67,97	1,68
Sumatera Barat	66,52	1,36	63,86	69,18	2,04
Riau	62,31	1,59	59,19	65,42	2,55
Jambi	59,22	1,74	55,81	62,63	2,94
Sumatera Selatan	57,92	1,43	55,11	60,73	2,47
Bengkulu	64,61	1,92	60,85	68,37	2,97
Lampung	57,65	1,45	54,81	60,48	2,51
Kep. Bangka Belitung	56,93	2,19	52,64	61,22	3,85
Kepulauan Riau	70,53	2,96	64,73	76,32	4,19
DKI Jakarta	58,79	1,87	55,13	62,45	3,18
Jawa Barat	56,48	0,99	54,54	58,42	1,75
Jawa Tengah	58,11	0,91	56,33	59,89	1,56
DI Yogyakarta	68,46	2,32	63,90	73,01	3,39
Jawa Timur	60,00	0,93	58,19	61,81	1,54
Banten	56,87	1,63	53,68	60,06	2,86
Bali	70,83	1,73	67,45	74,21	2,44
Nusa Tenggara Barat	64,11	1,80	60,59	67,64	2,81
Nusa Tenggara Timur	52,15	1,40	49,41	54,89	2,68
Kalimantan Barat	50,06	1,73	46,67	53,44	3,45
Kalimantan Tengah	51,75	1,99	47,86	55,65	3,84
Kalimantan Selatan	55,04	1,79	51,53	58,55	3,26
Kalimantan Timur	67,41	1,69	64,11	70,72	2,50
Sulawesi Utara	61,69	1,76	58,24	65,14	2,86
Sulawesi Tengah	63,13	1,86	59,48	66,78	2,95
Sulawesi Selatan	59,10	1,33	56,48	61,71	2,26
Sulawesi Tenggara	61,91	1,84	58,30	65,51	2,97
Gorontalo	56,07	2,59	51,00	61,15	4,62
Sulawesi Barat	56,65	2,69	51,39	61,91	4,74
Maluku	62,60	1,93	58,83	66,38	3,07
Maluku Utara	63,10	2,14	58,90	67,30	3,39
Papua Barat	62,29	2,54	57,31	67,28	4,08
Papua	43,11	1,66	39,86	46,36	3,85
Indonesia	59,35	0,32	58,73	59,97	0,53

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.3.1 Sampling error Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	40,74	2,74	35,38	46,11	6,72
Sumatera Utara	25,05	1,51	22,10	28,01	6,02
Sumatera Barat	36,01	2,48	31,15	40,88	6,89
Riau	30,34	2,65	25,15	35,53	8,73
Jambi	26,02	2,74	20,64	31,40	10,55
Sumatera Selatan	23,01	2,33	18,44	27,59	10,14
Bengkulu	37,96	3,16	31,76	44,16	8,33
Lampung	25,22	2,70	19,94	30,50	10,69
Kep. Bangka Belitung	8,67	1,60	5,54	11,80	18,39
Kepulauan Riau	14,36	2,44	9,58	19,15	16,98
DKI Jakarta	17,02	1,38	14,32	19,72	8,10
Jawa Barat	17,14	0,92	15,34	18,93	5,35
Jawa Tengah	18,89	1,09	16,75	21,02	5,76
DI Yogyakarta	45,56	2,72	40,23	50,88	5,96
Jawa Timur	23,29	1,14	21,05	25,53	4,90
Banten	17,72	1,46	14,87	20,58	8,21
Bali	21,06	1,96	17,21	24,90	9,31
Nusa Tenggara Barat	29,66	2,93	23,91	35,41	9,89
Nusa Tenggara Timur	40,76	3,07	34,74	46,79	7,54
Kalimantan Barat	24,70	2,81	19,20	30,21	11,37
Kalimantan Tengah	29,05	2,77	23,62	34,48	9,53
Kalimantan Selatan	24,45	2,39	19,76	29,14	9,79
Kalimantan Timur	23,04	2,04	19,05	27,04	8,84
Sulawesi Utara	27,36	2,78	21,91	32,81	10,17
Sulawesi Tengah	38,83	2,98	32,99	44,68	7,67
Sulawesi Selatan	34,41	2,51	29,49	39,32	7,28
Sulawesi Tenggara	43,42	4,02	35,54	51,30	9,26
Gorontalo	35,71	3,17	29,50	41,92	8,87
Sulawesi Barat	24,40	4,51	15,56	33,23	18,47
Maluku	44,47	3,46	37,70	51,25	7,77
Maluku Utara	46,01	4,34	37,52	54,51	9,42
Papua Barat	26,42	2,95	20,63	32,20	11,18
Papua	29,13	2,61	24,01	34,25	8,96
Indonesia	22,63	0,40	21,86	23,41	1,75

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.3.2 *Sampling error* Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	19,23	1,19	16,90	21,56	6,18
Sumatera Utara	13,50	1,14	11,28	15,73	8,41
Sumatera Barat	16,40	1,63	13,20	19,60	9,95
Riau	10,43	1,14	8,19	12,67	10,97
Jambi	16,23	1,83	12,65	19,80	11,25
Sumatera Selatan	5,72	0,68	4,39	7,04	11,80
Bengkulu	14,15	1,74	10,75	17,56	12,26
Lampung	10,48	1,11	8,31	12,66	10,56
Kep. Bangka Belitung	6,56	1,80	3,03	10,09	27,45
Kepulauan Riau	8,82	2,71	3,51	14,13	30,70
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	11,81	1,23	9,40	14,23	10,43
Jawa Tengah	13,29	0,98	11,37	15,20	7,35
DI Yogyakarta	19,65	5,62	8,64	30,65	28,58
Jawa Timur	12,54	0,83	10,91	14,18	6,65
Banten	10,17	2,14	5,98	14,36	21,03
Bali	11,68	2,25	7,27	16,09	19,27
Nusa Tenggara Barat	16,62	2,25	12,20	21,03	13,55
Nusa Tenggara Timur	9,82	1,00	7,87	11,78	10,15
Kalimantan Barat	12,18	1,36	9,51	14,85	11,20
Kalimantan Tengah	11,84	1,63	8,64	15,03	13,76
Kalimantan Selatan	6,82	0,86	5,15	8,50	12,53
Kalimantan Timur	16,06	2,81	10,56	21,56	17,47
Sulawesi Utara	7,30	1,30	4,76	9,84	17,74
Sulawesi Tengah	12,68	1,56	9,63	15,74	12,28
Sulawesi Selatan	17,73	1,15	15,46	19,99	6,51
Sulawesi Tenggara	10,57	1,28	8,07	13,08	12,10
Gorontalo	14,73	2,87	9,11	20,34	19,45
Sulawesi Barat	11,74	2,09	7,65	15,83	17,77
Maluku	17,71	2,72	12,38	23,03	15,33
Maluku Utara	14,86	2,12	10,70	19,01	14,26
Papua Barat	18,71	3,94	10,99	26,44	21,06
Papua	6,24	0,85	4,56	7,91	13,68
Indonesia	12,54	0,30	11,94	13,13	2,43

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.3.3 Sampling error Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	26,31	1,29	23,79	28,84	4,90
Sumatera Utara	19,96	1,01	17,98	21,95	5,07
Sumatera Barat	24,96	1,50	22,01	27,90	6,03
Riau	19,51	1,47	16,62	22,39	7,55
Jambi	19,30	1,52	16,33	22,27	7,86
Sumatera Selatan	12,74	1,09	10,61	14,88	8,55
Bengkulu	22,69	1,70	19,36	26,02	7,49
Lampung	14,84	1,13	12,64	17,05	7,59
Kep. Bangka Belitung	7,57	1,21	5,20	9,93	15,94
Kepulauan Riau	13,62	2,13	9,44	17,79	15,64
DKI Jakarta	17,02	1,38	14,32	19,72	8,10
Jawa Barat	15,58	0,74	14,13	17,03	4,76
Jawa Tengah	16,09	0,73	14,66	17,53	4,56
DI Yogyakarta	39,89	2,53	34,93	44,85	6,35
Jawa Timur	18,08	0,72	16,66	19,50	4,00
Banten	15,53	1,20	13,18	17,87	7,70
Bali	17,98	1,49	15,05	20,90	8,31
Nusa Tenggara Barat	22,45	1,85	18,82	26,08	8,24
Nusa Tenggara Timur	17,99	1,24	15,55	20,42	6,91
Kalimantan Barat	16,47	1,34	13,84	19,10	8,15
Kalimantan Tengah	18,38	1,50	15,44	21,32	8,16
Kalimantan Selatan	14,97	1,25	12,52	17,43	8,37
Kalimantan Timur	20,39	1,64	17,18	23,60	8,02
Sulawesi Utara	17,66	1,71	14,31	21,02	9,69
Sulawesi Tengah	21,18	1,51	18,21	24,15	7,14
Sulawesi Selatan	25,11	1,36	22,46	27,77	5,40
Sulawesi Tenggara	22,58	1,99	18,69	26,47	8,79
Gorontalo	22,30	2,23	17,94	26,67	9,99
Sulawesi Barat	14,55	1,90	10,83	18,27	13,04
Maluku	30,41	2,38	25,73	35,08	7,84
Maluku Utara	25,89	2,25	21,49	30,30	8,68
Papua Barat	21,46	2,68	16,21	26,71	12,48
Papua	14,27	1,18	11,96	16,59	8,27
Indonesia	18,13	0,26	17,62	18,64	1,43

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.4.1 *Sampling error* Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	23,63	1,57	20,56	26,70	6,63
Sumatera Utara	18,31	1,24	15,89	20,73	6,75
Sumatera Barat	22,05	1,97	18,19	25,91	8,94
Riau	20,65	1,96	16,81	24,49	9,49
Jambi	19,13	1,82	15,56	22,71	9,53
Sumatera Selatan	13,29	1,50	10,35	16,23	11,30
Bengkulu	22,38	2,04	18,39	26,38	9,11
Lampung	14,28	1,36	11,63	16,94	9,49
Kep. Bangka Belitung	6,58	1,37	3,89	9,27	20,89
Kepulauan Riau	11,88	2,60	6,77	16,98	21,92
DKI Jakarta	16,99	1,62	13,81	20,17	9,56
Jawa Barat	15,77	0,93	13,94	17,60	5,92
Jawa Tengah	16,32	0,91	14,54	18,10	5,57
DI Yogyakarta	41,64	3,22	35,33	47,95	7,73
Jawa Timur	18,84	0,91	17,07	20,62	4,80
Banten	14,64	1,39	11,92	17,37	9,49
Bali	19,74	2,28	15,29	24,20	11,52
Nusa Tenggara Barat	23,86	2,32	19,32	28,41	9,72
Nusa Tenggara Timur	16,71	1,47	13,83	19,59	8,80
Kalimantan Barat	15,73	1,59	12,61	18,85	10,12
Kalimantan Tengah	19,08	1,81	15,53	22,64	9,51
Kalimantan Selatan	14,19	1,57	11,11	17,28	11,08
Kalimantan Timur	18,44	1,82	14,87	22,01	9,88
Sulawesi Utara	15,76	2,02	11,81	19,71	12,79
Sulawesi Tengah	19,71	1,74	16,29	23,12	8,84
Sulawesi Selatan	24,86	1,74	21,45	28,27	7,00
Sulawesi Tenggara	22,57	2,30	18,07	27,07	10,18
Gorontalo	20,06	2,71	14,75	25,37	13,50
Sulawesi Barat	14,69	2,48	9,84	19,54	16,86
Maluku	28,07	2,85	22,49	33,64	10,14
Maluku Utara	25,99	2,56	20,97	31,01	9,86
Papua Barat	23,98	3,28	17,55	30,40	13,67
Papua	15,26	1,52	12,28	18,24	9,96
Indonesia	18,00	0,32	17,37	18,63	1,79

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.4.2 Sampling error Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(1)	(2)	
Perempuan					
Aceh	29,33	1,67	26,05	32,61	5,70
Sumatera Utara	21,78	1,26	19,32	24,25	5,78
Sumatera Barat	28,04	1,77	24,57	31,52	6,33
Riau	18,17	1,61	15,02	21,32	8,84
Jambi	19,48	1,85	15,86	23,10	9,49
Sumatera Selatan	12,16	1,14	9,93	14,40	9,38
Bengkulu	23,03	2,27	18,57	27,48	9,87
Lampung	15,41	1,43	12,61	18,22	9,29
Kep. Bangka Belitung	8,69	1,64	5,48	11,89	18,82
Kepulauan Riau	15,39	2,80	9,90	20,89	18,22
DKI Jakarta	17,04	1,96	13,19	20,89	11,52
Jawa Barat	15,38	0,93	13,56	17,20	6,05
Jawa Tengah	15,88	0,91	14,11	17,66	5,70
DI Yogyakarta	38,16	3,22	31,86	44,46	8,43
Jawa Timur	17,33	0,88	15,61	19,05	5,08
Banten	16,48	1,49	13,56	19,41	9,06
Bali	16,10	1,71	12,76	19,45	10,61
Nusa Tenggara Barat	21,07	2,19	16,77	25,37	10,40
Nusa Tenggara Timur	19,20	1,47	16,32	22,08	7,67
Kalimantan Barat	17,22	1,68	13,93	20,52	9,76
Kalimantan Tengah	17,56	1,82	13,99	21,13	10,36
Kalimantan Selatan	15,86	1,47	12,97	18,74	9,28
Kalimantan Timur	22,60	2,31	18,07	27,13	10,24
Sulawesi Utara	19,82	2,30	15,32	24,33	11,60
Sulawesi Tengah	22,76	2,01	18,83	26,69	8,81
Sulawesi Selatan	25,36	1,55	22,33	28,39	6,10
Sulawesi Tenggara	22,59	2,20	18,28	26,90	9,74
Gorontalo	24,58	2,58	19,52	29,64	10,50
Sulawesi Barat	14,42	2,26	9,99	18,85	15,67
Maluku	32,82	2,90	27,13	38,50	8,84
Maluku Utara	25,79	2,79	20,33	31,26	10,81
Papua Barat	18,69	2,52	13,75	23,62	13,48
Papua	13,11	1,41	10,35	15,87	10,73
Indonesia	18,26	0,32	17,63	18,90	1,77

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.4.3 *Sampling error* Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-Laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	26,31	1,29	23,79	28,84	4,90
Sumatera Utara	19,96	1,01	17,98	21,95	5,07
Sumatera Barat	24,96	1,50	22,01	27,90	6,03
Riau	19,51	1,47	16,62	22,39	7,55
Jambi	19,30	1,52	16,33	22,27	7,86
Sumatera Selatan	12,74	1,09	10,61	14,88	8,55
Bengkulu	22,69	1,70	19,36	26,02	7,49
Lampung	14,84	1,13	12,64	17,05	7,59
Kep. Bangka Belitung	7,57	1,21	5,20	9,93	15,94
Kepulauan Riau	13,62	2,13	9,44	17,79	15,64
DKI Jakarta	17,02	1,38	14,32	19,72	8,10
Jawa Barat	15,58	0,74	14,13	17,03	4,76
Jawa Tengah	16,09	0,73	14,66	17,53	4,56
DI Yogyakarta	39,89	2,53	34,93	44,85	6,35
Jawa Timur	18,08	0,72	16,66	19,50	4,00
Banten	15,53	1,20	13,18	17,87	7,70
Bali	17,98	1,49	15,05	20,90	8,31
Nusa Tenggara Barat	22,45	1,85	18,82	26,08	8,24
Nusa Tenggara Timur	17,99	1,24	15,55	20,42	6,91
Kalimantan Barat	16,47	1,34	13,84	19,10	8,15
Kalimantan Tengah	18,38	1,50	15,44	21,32	8,16
Kalimantan Selatan	14,97	1,25	12,52	17,43	8,37
Kalimantan Timur	20,39	1,64	17,18	23,60	8,02
Sulawesi Utara	17,66	1,71	14,31	21,02	9,69
Sulawesi Tengah	21,18	1,51	18,21	24,15	7,14
Sulawesi Selatan	25,11	1,36	22,46	27,77	5,40
Sulawesi Tenggara	22,58	1,99	18,69	26,47	8,79
Gorontalo	22,30	2,23	17,94	26,67	9,99
Sulawesi Barat	14,55	1,90	10,83	18,27	13,04
Maluku	30,41	2,38	25,73	35,08	7,84
Maluku Utara	25,89	2,25	21,49	30,30	8,68
Papua Barat	21,46	2,68	16,21	26,71	12,48
Papua	14,27	1,18	11,96	16,59	8,27
Indonesia	18,13	0,26	17,62	18,64	1,43

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.5.1 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Perkotaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,13	0,15	0,84	1,42	12,97
Sumatera Utara	0,96	0,11	0,74	1,17	11,61
Sumatera Barat	1,14	0,19	0,76	1,51	16,74
Riau	1,22	0,18	0,86	1,58	14,99
Jambi	1,97	0,31	1,36	2,57	15,66
Sumatera Selatan	1,76	0,25	1,27	2,26	14,34
Bengkulu	1,05	0,18	0,70	1,40	17,00
Lampung	2,44	0,24	1,96	2,91	9,85
Kep. Bangka Belitung	2,63	0,29	2,06	3,19	11,05
Kepulauan Riau	1,73	0,38	0,98	2,48	22,16
DKI Jakarta	1,21	0,12	0,97	1,45	10,16
Jawa Barat	3,02	0,16	2,71	3,34	5,36
Jawa Tengah	5,39	0,18	5,03	5,75	3,41
DI Yogyakarta	3,78	0,31	3,18	4,38	8,09
Jawa Timur	4,74	0,19	4,36	5,11	4,08
Banten	3,31	0,29	2,74	3,87	8,71
Bali	5,63	0,38	4,90	6,37	6,67
Nusa Tenggara Barat	9,44	0,67	8,13	10,76	7,12
Nusa Tenggara Timur	2,39	0,30	1,79	2,98	12,70
Kalimantan Barat	4,82	0,47	3,89	5,75	9,83
Kalimantan Tengah	1,80	0,34	1,15	2,46	18,57
Kalimantan Selatan	1,79	0,25	1,30	2,28	14,02
Kalimantan Timur	1,16	0,12	0,93	1,39	10,00
Sulawesi Utara	0,54	0,11	0,34	0,75	19,34
Sulawesi Tengah	1,00	0,40	0,22	1,79	39,92
Sulawesi Selatan	3,06	0,28	2,52	3,61	9,11
Sulawesi Tenggara	2,31	0,33	1,66	2,96	14,34
Gorontalo	0,89	0,19	0,51	1,27	21,73
Sulawesi Barat	3,57	0,65	2,30	4,83	18,08
Maluku	0,52	0,14	0,25	0,79	26,69
Maluku Utara	0,66	0,18	0,31	1,01	27,19
Papua Barat	0,81	0,18	0,45	1,17	22,65
Papua	1,65	0,37	0,93	2,37	22,28
Indonesia	3,24	0,06	3,12	3,36	1,91

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.5.2 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3,58	0,21	3,17	3,99	5,81
Sumatera Utara	3,20	0,25	2,70	3,70	7,94
Sumatera Barat	2,78	0,23	2,33	3,23	8,25
Riau	3,61	0,33	2,96	4,26	9,14
Jambi	4,64	0,29	4,06	5,21	6,34
Sumatera Selatan	3,21	0,20	2,82	3,61	6,26
Bengkulu	4,11	0,29	3,54	4,67	7,04
Lampung	3,95	0,20	3,55	4,34	5,09
Kep. Bangka Belitung	5,05	0,56	3,96	6,14	11,04
Kepulauan Riau	8,98	1,46	6,12	11,85	16,27
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5,30	0,28	4,75	5,85	5,28
Jawa Tengah	8,17	0,24	7,70	8,64	2,94
DI Yogyakarta	10,42	1,09	8,28	12,56	10,46
Jawa Timur	11,88	0,32	11,25	12,52	2,72
Banten	5,77	0,49	4,82	6,72	8,43
Bali	13,47	0,82	11,87	15,08	6,06
Nusa Tenggara Barat	13,48	0,66	12,18	14,78	4,93
Nusa Tenggara Timur	8,96	0,36	8,24	9,67	4,06
Kalimantan Barat	10,40	0,44	9,54	11,25	4,20
Kalimantan Tengah	2,92	0,37	2,21	3,64	12,48
Kalimantan Selatan	3,97	0,35	3,28	4,65	8,82
Kalimantan Timur	4,42	0,41	3,61	5,23	9,34
Sulawesi Utara	0,76	0,13	0,51	1,01	16,78
Sulawesi Tengah	3,91	0,38	3,17	4,65	9,63
Sulawesi Selatan	11,19	0,39	10,42	11,95	3,50
Sulawesi Tenggara	6,42	0,36	5,71	7,13	5,64
Gorontalo	2,57	0,35	1,89	3,25	13,49
Sulawesi Barat	8,99	0,63	7,76	10,22	6,97
Maluku	3,18	0,50	2,20	4,15	15,62
Maluku Utara	3,06	0,35	2,36	3,75	11,58
Papua Barat	6,03	0,78	4,50	7,56	12,96
Papua	42,94	1,28	40,42	45,45	2,99
Indonesia	7,78	0,09	7,60	7,95	1,16

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.5.3 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,87	0,15	2,57	3,17	5,33
Sumatera Utara	2,06	0,14	1,79	2,32	6,61
Sumatera Barat	2,12	0,16	1,81	2,43	7,44
Riau	2,66	0,21	2,24	3,07	8,02
Jambi	3,82	0,23	3,37	4,26	5,92
Sumatera Selatan	2,68	0,16	2,37	2,99	5,90
Bengkulu	3,13	0,21	2,72	3,54	6,71
Lampung	3,55	0,16	3,23	3,86	4,54
Kep. Bangka Belitung	3,85	0,31	3,23	4,46	8,17
Kepulauan Riau	2,91	0,41	2,11	3,72	14,14
DKI Jakarta	1,21	0,12	0,97	1,45	10,16
Jawa Barat	3,78	0,14	3,50	4,06	3,78
Jawa Tengah	6,89	0,15	6,58	7,19	2,24
DI Yogyakarta	6,04	0,45	5,16	6,92	7,43
Jawa Timur	8,47	0,19	8,09	8,85	2,28
Banten	4,07	0,25	3,58	4,55	6,10
Bali	8,70	0,39	7,94	9,46	4,46
Nusa Tenggara Barat	11,76	0,48	10,82	12,69	4,05
Nusa Tenggara Timur	7,58	0,30	7,00	8,16	3,92
Kalimantan Barat	8,64	0,34	7,98	9,31	3,92
Kalimantan Tengah	2,54	0,27	2,02	3,06	10,48
Kalimantan Selatan	3,03	0,23	2,59	3,48	7,52
Kalimantan Timur	2,39	0,17	2,05	2,73	7,29
Sulawesi Utara	0,66	0,08	0,50	0,82	12,75
Sulawesi Tengah	3,17	0,30	2,58	3,76	9,47
Sulawesi Selatan	8,12	0,29	7,55	8,68	3,55
Sulawesi Tenggara	5,22	0,28	4,68	5,77	5,30
Gorontalo	1,98	0,24	1,51	2,45	12,05
Sulawesi Barat	7,74	0,51	6,73	8,74	6,62
Maluku	2,09	0,30	1,50	2,67	14,31
Maluku Utara	2,36	0,26	1,86	2,87	10,93
Papua Barat	4,32	0,53	3,28	5,36	12,22
Papua	31,83	0,98	29,90	33,75	3,09
Indonesia	5,47	0,05	5,36	5,57	0,99

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.6.1 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-Laki

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,38	0,12	1,15	1,62	8,74
Sumatera Utara	1,14	0,11	0,92	1,36	9,75
Sumatera Barat	1,28	0,14	1,00	1,55	11,05
Riau	1,35	0,17	1,02	1,68	12,43
Jambi	1,76	0,17	1,42	2,10	9,86
Sumatera Selatan	1,55	0,15	1,26	1,84	9,48
Bengkulu	1,40	0,16	1,09	1,70	11,16
Lampung	1,82	0,13	1,56	2,08	7,32
Kep. Bangka Belitung	1,95	0,25	1,47	2,44	12,75
Kepulauan Riau	2,18	0,40	1,41	2,95	18,13
DKI Jakarta	0,61	0,11	0,40	0,81	17,52
Jawa Barat	2,14	0,12	1,91	2,37	5,43
Jawa Tengah	3,52	0,13	3,26	3,78	3,76
DI Yogyakarta	2,96	0,48	2,01	3,91	16,35
Jawa Timur	4,56	0,16	4,26	4,87	3,42
Banten	2,02	0,21	1,61	2,43	10,41
Bali	3,87	0,30	3,29	4,45	7,68
Nusa Tenggara Barat	7,54	0,45	6,66	8,42	5,95
Nusa Tenggara Timur	5,88	0,31	5,29	6,48	5,18
Kalimantan Barat	4,98	0,30	4,40	5,56	5,94
Kalimantan Tengah	1,47	0,22	1,03	1,91	15,19
Kalimantan Selatan	1,69	0,21	1,28	2,09	12,34
Kalimantan Timur	1,59	0,18	1,23	1,95	11,57
Sulawesi Utara	0,63	0,11	0,41	0,84	17,76
Sulawesi Tengah	2,23	0,29	1,66	2,79	12,89
Sulawesi Selatan	6,04	0,27	5,50	6,58	4,54
Sulawesi Tenggara	3,00	0,25	2,51	3,49	8,31
Gorontalo	1,52	0,26	1,02	2,02	16,79
Sulawesi Barat	5,34	0,57	4,23	6,45	10,60
Maluku	1,40	0,26	0,89	1,90	18,42
Maluku Utara	1,36	0,24	0,89	1,83	17,50
Papua Barat	2,47	0,40	1,68	3,26	16,23
Papua	26,00	0,94	24,16	27,83	3,60
Indonesia	3,14	0,05	3,05	3,23	1,47

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.6.2 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4,32	0,24	3,86	4,79	5,48
Sumatera Utara	2,95	0,19	2,58	3,32	6,48
Sumatera Barat	2,94	0,22	2,50	3,37	7,56
Riau	4,05	0,32	3,43	4,67	7,85
Jambi	5,97	0,36	5,26	6,68	6,06
Sumatera Selatan	3,85	0,23	3,40	4,30	5,98
Bengkulu	4,92	0,34	4,26	5,59	6,89
Lampung	5,37	0,26	4,87	5,87	4,79
Kep. Bangka Belitung	5,89	0,47	4,96	6,82	8,04
Kepulauan Riau	3,68	0,49	2,73	4,64	13,28
DKI Jakarta	1,82	0,20	1,43	2,20	10,78
Jawa Barat	5,46	0,21	5,06	5,86	3,75
Jawa Tengah	10,12	0,22	9,69	10,55	2,18
DI Yogyakarta	9,00	0,61	7,80	10,21	6,82
Jawa Timur	12,19	0,26	11,67	12,70	2,16
Banten	6,19	0,36	5,47	6,90	5,88
Bali	13,54	0,58	12,40	14,68	4,29
Nusa Tenggara Barat	15,50	0,61	14,30	16,71	3,96
Nusa Tenggara Timur	9,19	0,36	8,48	9,89	3,91
Kalimantan Barat	12,44	0,49	11,48	13,39	3,92
Kalimantan Tengah	3,73	0,37	3,00	4,45	9,93
Kalimantan Selatan	4,40	0,32	3,77	5,02	7,28
Kalimantan Timur	3,29	0,24	2,82	3,76	7,27
Sulawesi Utara	0,69	0,10	0,49	0,89	14,70
Sulawesi Tengah	4,15	0,39	3,39	4,92	9,36
Sulawesi Selatan	10,02	0,36	9,32	10,72	3,56
Sulawesi Tenggara	7,41	0,40	6,62	8,20	5,45
Gorontalo	2,44	0,33	1,80	3,09	13,38
Sulawesi Barat	10,10	0,66	8,80	11,40	6,55
Maluku	2,78	0,38	2,03	3,53	13,80
Maluku Utara	3,39	0,35	2,70	4,09	10,44
Papua Barat	6,44	0,84	4,80	8,08	12,98
Papua	38,37	1,13	36,15	40,58	2,95
Indonesia	7,78	0,08	7,63	7,93	0,98

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.6.3 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-Laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,87	0,15	2,57	3,17	5,33
Sumatera Utara	2,06	0,14	1,79	2,32	6,61
Sumatera Barat	2,12	0,16	1,81	2,43	7,44
Riau	2,66	0,21	2,24	3,07	8,02
Jambi	3,82	0,23	3,37	4,26	5,92
Sumatera Selatan	2,68	0,16	2,37	2,99	5,90
Bengkulu	3,13	0,21	2,72	3,54	6,71
Lampung	3,55	0,16	3,23	3,86	4,54
Kep. Bangka Belitung	3,85	0,31	3,23	4,46	8,17
Kepulauan Riau	2,91	0,41	2,11	3,72	14,14
DKI Jakarta	1,21	0,12	0,97	1,45	10,16
Jawa Barat	3,78	0,14	3,50	4,06	3,78
Jawa Tengah	6,89	0,15	6,58	7,19	2,24
DI Yogyakarta	6,04	0,45	5,16	6,92	7,43
Jawa Timur	8,47	0,19	8,09	8,85	2,28
Banten	4,07	0,25	3,58	4,55	6,10
Bali	8,70	0,39	7,94	9,46	4,46
Nusa Tenggara Barat	11,76	0,48	10,82	12,69	4,05
Nusa Tenggara Timur	7,58	0,30	7,00	8,16	3,92
Kalimantan Barat	8,64	0,34	7,98	9,31	3,92
Kalimantan Tengah	2,54	0,27	2,02	3,06	10,48
Kalimantan Selatan	3,03	0,23	2,59	3,48	7,52
Kalimantan Timur	2,39	0,17	2,05	2,73	7,29
Sulawesi Utara	0,66	0,08	0,50	0,82	12,75
Sulawesi Tengah	3,17	0,30	2,58	3,76	9,47
Sulawesi Selatan	8,12	0,29	7,55	8,68	3,55
Sulawesi Tenggara	5,22	0,28	4,68	5,77	5,30
Gorontalo	1,98	0,24	1,51	2,45	12,05
Sulawesi Barat	7,74	0,51	6,73	8,74	6,62
Maluku	2,09	0,30	1,50	2,67	14,31
Maluku Utara	2,36	0,26	1,86	2,87	10,93
Papua Barat	4,32	0,53	3,28	5,36	12,22
Papua	31,83	0,98	29,90	33,75	3,09
Indonesia	5,47	0,05	5,36	5,57	0,99

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.7.1 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Tamat SD Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,06	0,43	4,23	5,89	8,40
Sumatera Utara	5,54	0,30	4,96	6,13	5,38
Sumatera Barat	10,06	0,65	8,79	11,34	6,45
Riau	5,45	0,43	4,60	6,29	7,89
Jambi	7,84	0,75	6,37	9,30	9,51
Sumatera Selatan	10,45	0,65	9,16	11,73	6,26
Bengkulu	5,81	0,64	4,55	7,06	11,04
Lampung	10,65	0,78	9,13	12,17	7,29
Kep. Bangka Belitung	12,69	0,90	10,92	14,45	7,09
Kepulauan Riau	5,91	0,71	4,52	7,30	12,00
DKI Jakarta	5,00	0,28	4,45	5,55	5,64
Jawa Barat	9,71	0,32	9,08	10,34	3,33
Jawa Tengah	12,13	0,29	11,55	12,70	2,42
DI Yogyakarta	7,38	0,48	6,44	8,32	6,51
Jawa Timur	11,31	0,29	10,75	11,88	2,55
Banten	9,06	0,57	7,94	10,17	6,27
Bali	8,19	0,50	7,22	9,16	6,05
Nusa Tenggara Barat	13,27	0,66	11,97	14,57	5,00
Nusa Tenggara Timur	7,68	0,66	6,38	8,97	8,60
Kalimantan Barat	10,65	0,76	9,16	12,13	7,11
Kalimantan Tengah	8,85	0,75	7,37	10,33	8,51
Kalimantan Selatan	11,80	0,80	10,24	13,36	6,74
Kalimantan Timur	6,45	0,44	5,58	7,31	6,84
Sulawesi Utara	10,35	0,73	8,92	11,77	7,04
Sulawesi Tengah	6,68	0,81	5,09	8,27	12,11
Sulawesi Selatan	8,44	0,57	7,32	9,56	6,76
Sulawesi Tenggara	6,35	0,75	4,89	7,81	11,75
Gorontalo	17,67	1,50	14,73	20,61	8,48
Sulawesi Barat	15,31	1,58	12,22	18,40	10,30
Maluku	4,08	0,47	3,16	4,99	11,41
Maluku Utara	6,54	0,88	4,80	8,27	13,51
Papua Barat	4,80	0,54	3,75	5,86	11,22
Papua	4,27	0,44	3,41	5,14	10,32
Indonesia	9,29	0,11	9,07	9,52	1,23

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.7.2 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Tamat SD Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10,63	0,37	9,90	11,37	3,52
Sumatera Utara	13,64	0,40	12,85	14,42	2,93
Sumatera Barat	23,96	0,63	22,73	25,19	2,62
Riau	15,44	0,63	14,20	16,68	4,10
Jambi	16,09	0,57	14,97	17,21	3,54
Sumatera Selatan	20,43	0,56	19,33	21,53	2,75
Bengkulu	18,84	0,62	17,62	20,05	3,28
Lampung	18,08	0,45	17,20	18,95	2,47
Kep. Bangka Belitung	25,48	1,27	23,00	27,96	4,96
Kepulauan Riau	23,89	1,81	20,34	27,44	7,58
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	17,95	0,56	16,85	19,04	3,11
Jawa Tengah	18,15	0,33	17,50	18,80	1,82
DI Yogyakarta	12,56	1,13	10,35	14,77	8,97
Jawa Timur	18,52	0,33	17,88	19,16	1,76
Banten	24,48	0,99	22,55	26,42	4,03
Bali	15,23	0,76	13,74	16,73	5,01
Nusa Tenggara Barat	19,37	0,69	18,02	20,72	3,56
Nusa Tenggara Timur	23,07	0,56	21,97	24,17	2,43
Kalimantan Barat	22,02	0,70	20,64	23,40	3,19
Kalimantan Tengah	16,17	0,89	14,43	17,92	5,50
Kalimantan Selatan	23,10	0,69	21,76	24,45	2,98
Kalimantan Timur	14,43	0,86	12,75	16,12	5,96
Sulawesi Utara	20,06	0,76	18,58	21,55	3,77
Sulawesi Tengah	16,22	0,65	14,95	17,49	3,99
Sulawesi Selatan	19,10	0,43	18,25	19,95	2,27
Sulawesi Tenggara	16,03	0,62	14,82	17,24	3,86
Gorontalo	34,75	1,32	32,17	37,33	3,79
Sulawesi Barat	22,29	1,02	20,29	24,29	4,59
Maluku	13,76	0,73	12,34	15,18	5,28
Maluku Utara	17,37	0,91	15,58	19,15	5,23
Papua Barat	14,71	1,12	12,51	16,92	7,63
Papua	9,25	0,50	8,27	10,22	5,38
Indonesia	18,22	0,13	17,97	18,47	0,69

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.7.3 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Tamat SD Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9,02	0,30	8,45	9,60	3,27
Sumatera Utara	9,51	0,27	8,99	10,04	2,83
Sumatera Barat	18,42	0,49	17,45	19,39	2,68
Riau	11,44	0,43	10,61	12,28	3,71
Jambi	13,55	0,47	12,63	14,46	3,45
Sumatera Selatan	16,74	0,45	15,87	17,62	2,67
Bengkulu	14,69	0,50	13,71	15,67	3,40
Lampung	16,11	0,39	15,35	16,87	2,42
Kep. Bangka Belitung	19,13	0,77	17,61	20,65	4,05
Kepulauan Riau	8,85	0,72	7,43	10,27	8,18
DKI Jakarta	5,00	0,28	4,45	5,55	5,64
Jawa Barat	12,46	0,29	11,89	13,02	2,33
Jawa Tengah	15,36	0,22	14,92	15,80	1,46
DI Yogyakarta	9,14	0,52	8,13	10,16	5,65
Jawa Timur	15,08	0,22	14,64	15,51	1,47
Banten	13,80	0,49	12,84	14,77	3,57
Bali	10,95	0,42	10,11	11,78	3,87
Nusa Tenggara Barat	16,77	0,49	15,81	17,72	2,92
Nusa Tenggara Timur	19,85	0,48	18,91	20,79	2,41
Kalimantan Barat	18,45	0,54	17,38	19,51	2,95
Kalimantan Tengah	13,65	0,65	12,37	14,92	4,77
Kalimantan Selatan	18,25	0,53	17,22	19,28	2,89
Kalimantan Timur	9,45	0,42	8,62	10,28	4,48
Sulawesi Utara	15,62	0,54	14,56	16,68	3,47
Sulawesi Tengah	13,78	0,54	12,73	14,82	3,88
Sulawesi Selatan	15,08	0,37	14,35	15,80	2,46
Sulawesi Tenggara	13,22	0,50	12,24	14,19	3,76
Gorontalo	28,77	1,02	26,78	30,77	3,54
Sulawesi Barat	20,67	0,87	18,97	22,38	4,22
Maluku	9,80	0,51	8,81	10,80	5,17
Maluku Utara	14,22	0,71	12,83	15,61	4,99
Papua Barat	11,47	0,73	10,03	12,90	6,39
Papua	7,91	0,38	7,16	8,66	4,83
Indonesia	13,67	0,09	13,50	13,84	0,63

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.8.1 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Tamat SD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-Laki

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,63	0,33	6,98	8,28	4,38
Sumatera Utara	7,76	0,27	7,22	8,29	3,53
Sumatera Barat	17,63	0,56	16,53	18,74	3,19
Riau	10,37	0,47	9,44	11,29	4,54
Jambi	12,08	0,54	11,03	13,14	4,45
Sumatera Selatan	15,27	0,51	14,28	16,26	3,31
Bengkulu	13,94	0,58	12,80	15,08	4,18
Lampung	15,15	0,46	14,26	16,05	3,01
Kep. Bangka Belitung	18,26	0,86	16,58	19,94	4,70
Kepulauan Riau	8,69	0,80	7,13	10,25	9,17
DKI Jakarta	3,95	0,32	3,33	4,58	8,05
Jawa Barat	11,21	0,32	10,58	11,84	2,86
Jawa Tengah	14,39	0,27	13,87	14,92	1,86
DI Yogyakarta	7,77	0,63	6,54	8,99	8,05
Jawa Timur	14,53	0,27	14,00	15,06	1,85
Banten	12,34	0,52	11,31	13,36	4,25
Bali	10,16	0,51	9,17	11,16	4,99
Nusa Tenggara Barat	16,76	0,63	15,52	18,00	3,77
Nusa Tenggara Timur	20,72	0,56	19,61	21,82	2,72
Kalimantan Barat	18,77	0,64	17,52	20,03	3,41
Kalimantan Tengah	12,53	0,71	11,14	13,93	5,68
Kalimantan Selatan	16,66	0,61	15,47	17,85	3,65
Kalimantan Timur	7,54	0,42	6,72	8,36	5,56
Sulawesi Utara	15,71	0,62	14,49	16,93	3,96
Sulawesi Tengah	13,42	0,61	12,23	14,61	4,52
Sulawesi Selatan	15,61	0,46	14,72	16,50	2,92
Sulawesi Tenggara	12,72	0,58	11,58	13,86	4,58
Gorontalo	32,27	1,23	29,87	34,68	3,81
Sulawesi Barat	21,45	1,13	19,25	23,66	5,25
Maluku	8,79	0,54	7,74	9,84	6,09
Maluku Utara	11,58	0,72	10,16	12,99	6,25
Papua Barat	9,76	0,74	8,31	11,22	7,61
Papua	7,07	0,38	6,31	7,82	5,42
Indonesia	12,74	0,10	12,54	12,93	0,78

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.8.2 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Tamat SD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10,38	0,35	9,69	11,07	3,38
Sumatera Utara	11,22	0,33	10,58	11,87	2,93
Sumatera Barat	19,18	0,54	18,12	20,23	2,81
Riau	12,59	0,48	11,64	13,54	3,84
Jambi	15,08	0,53	14,04	16,11	3,50
Sumatera Selatan	18,27	0,50	17,28	19,25	2,74
Bengkulu	15,46	0,57	14,35	16,57	3,66
Lampung	17,12	0,45	16,24	18,00	2,63
Kep. Bangka Belitung	20,08	0,86	18,40	21,75	4,26
Kepulauan Riau	9,02	0,83	7,39	10,65	9,23
DKI Jakarta	6,05	0,37	5,33	6,77	6,07
Jawa Barat	13,73	0,32	13,09	14,36	2,36
Jawa Tengah	16,29	0,25	15,79	16,78	1,54
DI Yogyakarta	10,47	0,57	9,36	11,58	5,42
Jawa Timur	15,60	0,25	15,12	16,08	1,57
Banten	15,33	0,57	14,20	16,45	3,73
Bali	11,73	0,51	10,72	12,73	4,36
Nusa Tenggara Barat	16,77	0,57	15,66	17,88	3,38
Nusa Tenggara Timur	19,03	0,51	18,02	20,04	2,70
Kalimantan Barat	18,11	0,59	16,95	19,27	3,27
Kalimantan Tengah	14,88	0,71	13,50	16,27	4,76
Kalimantan Selatan	19,86	0,60	18,67	21,04	3,04
Kalimantan Timur	11,61	0,54	10,56	12,67	4,63
Sulawesi Utara	15,53	0,58	14,40	16,66	3,72
Sulawesi Tengah	14,15	0,60	12,97	15,32	4,23
Sulawesi Selatan	14,59	0,38	13,84	15,34	2,62
Sulawesi Tenggara	13,71	0,55	12,64	14,78	3,98
Gorontalo	25,30	1,02	23,30	27,30	4,04
Sulawesi Barat	19,91	0,90	18,14	21,67	4,52
Maluku	10,81	0,63	9,58	12,05	5,84
Maluku Utara	16,94	0,85	15,27	18,62	5,04
Papua Barat	13,41	0,91	11,64	15,19	6,75
Papua	8,86	0,48	7,92	9,80	5,41
Indonesia	14,60	0,10	14,41	14,79	0,66

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.8.3 *Sampling error* Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Tamat SD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-Laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9,02	0,30	8,45	9,60	3,27
Sumatera Utara	9,51	0,27	8,99	10,04	2,83
Sumatera Barat	18,42	0,49	17,45	19,39	2,68
Riau	11,44	0,43	10,61	12,28	3,71
Jambi	13,55	0,47	12,63	14,46	3,45
Sumatera Selatan	16,74	0,45	15,87	17,62	2,67
Bengkulu	14,69	0,50	13,71	15,67	3,40
Lampung	16,11	0,39	15,35	16,87	2,42
Kep. Bangka Belitung	19,13	0,77	17,61	20,65	4,05
Kepulauan Riau	8,85	0,72	7,43	10,27	8,18
DKI Jakarta	5,00	0,28	4,45	5,55	5,64
Jawa Barat	12,46	0,29	11,89	13,02	2,33
Jawa Tengah	15,36	0,22	14,92	15,80	1,46
DI Yogyakarta	9,14	0,52	8,13	10,16	5,65
Jawa Timur	15,08	0,22	14,64	15,51	1,47
Banten	13,80	0,49	12,84	14,77	3,57
Bali	10,95	0,42	10,11	11,78	3,87
Nusa Tenggara Barat	16,77	0,49	15,81	17,72	2,92
Nusa Tenggara Timur	19,85	0,48	18,91	20,79	2,41
Kalimantan Barat	18,45	0,54	17,38	19,51	2,95
Kalimantan Tengah	13,65	0,65	12,37	14,92	4,77
Kalimantan Selatan	18,25	0,53	17,22	19,28	2,89
Kalimantan Timur	9,45	0,42	8,62	10,28	4,48
Sulawesi Utara	15,62	0,54	14,56	16,68	3,47
Sulawesi Tengah	13,78	0,54	12,73	14,82	3,88
Sulawesi Selatan	15,08	0,37	14,35	15,80	2,46
Sulawesi Tenggara	13,22	0,50	12,24	14,19	3,76
Gorontalo	28,77	1,02	26,78	30,77	3,54
Sulawesi Barat	20,67	0,87	18,97	22,38	4,22
Maluku	9,80	0,51	8,81	10,80	5,17
Maluku Utara	14,22	0,71	12,83	15,61	4,99
Papua Barat	11,47	0,73	10,03	12,90	6,39
Papua	7,91	0,38	7,16	8,66	4,83
Indonesia	13,67	0,09	13,50	13,84	0,63

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.9.1 *Sampling error* Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	31,13	2,46	26,32	35,95	7,89
Sumatera Utara	23,34	1,55	20,30	26,39	6,65
Sumatera Barat	18,99	1,94	15,18	22,80	10,23
Riau	16,46	1,85	12,84	20,08	11,21
Jambi	24,02	2,83	18,47	29,57	11,78
Sumatera Selatan	23,42	2,33	18,85	27,99	9,96
Bengkulu	21,82	2,83	16,27	27,36	12,97
Lampung	25,78	2,23	21,41	30,16	8,65
Kep. Bangka Belitung	23,82	2,91	18,13	29,52	12,19
Kepulauan Riau	22,71	3,06	16,72	28,70	13,45
DKI Jakarta	33,29	1,81	29,74	36,85	5,45
Jawa Barat	28,36	1,11	26,18	30,53	3,91
Jawa Tengah	47,34	1,27	44,84	49,83	2,69
DI Yogyakarta	56,64	3,56	49,67	63,61	6,28
Jawa Timur	46,84	1,27	44,35	49,33	2,71
Banten	26,41	1,91	22,66	30,16	7,24
Bali	28,50	2,08	24,41	32,59	7,31
Nusa Tenggara Barat	29,59	2,77	24,16	35,02	9,35
Nusa Tenggara Timur	33,83	2,73	28,48	39,18	8,07
Kalimantan Barat	20,33	2,65	15,13	25,53	13,04
Kalimantan Tengah	29,64	2,88	24,00	35,29	9,72
Kalimantan Selatan	33,50	2,42	28,75	38,24	7,22
Kalimantan Timur	25,49	2,04	21,50	29,48	7,98
Sulawesi Utara	22,39	2,52	17,44	27,34	11,27
Sulawesi Tengah	31,32	3,55	24,38	38,27	11,32
Sulawesi Selatan	25,33	2,21	21,00	29,66	8,71
Sulawesi Tenggara	21,62	2,43	16,86	26,37	11,23
Gorontalo	52,04	3,57	45,05	59,03	6,85
Sulawesi Barat	33,81	4,36	25,27	42,35	12,89
Maluku	24,63	2,82	19,10	30,16	11,46
Maluku Utara	19,10	3,67	11,90	26,30	19,22
Papua Barat	24,50	3,25	18,13	30,86	13,26
Papua	18,19	2,26	13,76	22,63	12,44
Indonesia	32,25	0,45	31,36	33,14	1,40

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.9.2 *Sampling error* Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	18,05	1,10	15,90	20,21	6,08
Sumatera Utara	17,22	1,05	15,17	19,28	6,10
Sumatera Barat	16,52	1,28	14,01	19,03	7,76
Riau	15,54	1,38	12,85	18,24	8,85
Jambi	21,57	1,60	18,44	24,70	7,40
Sumatera Selatan	16,31	1,21	13,94	18,68	7,42
Bengkulu	16,72	1,64	13,50	19,94	9,82
Lampung	23,04	1,46	20,17	25,91	6,35
Kep. Bangka Belitung	24,38	2,52	19,45	29,31	10,32
Kepulauan Riau	23,71	4,77	14,36	33,06	20,12
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	20,18	1,34	17,55	22,81	6,65
Jawa Tengah	36,13	1,26	33,67	38,60	3,48
DI Yogyakarta	63,02	4,60	54,00	72,03	7,30
Jawa Timur	41,59	1,27	39,10	44,08	3,05
Banten	16,64	2,00	12,72	20,56	12,02
Bali	14,42	2,66	9,20	19,64	18,47
Nusa Tenggara Barat	28,13	2,04	24,14	32,12	7,24
Nusa Tenggara Timur	19,50	1,12	17,31	21,69	5,74
Kalimantan Barat	8,28	1,03	6,27	10,30	12,42
Kalimantan Tengah	23,61	1,82	20,03	27,18	7,73
Kalimantan Selatan	38,76	1,99	34,86	42,66	5,13
Kalimantan Timur	23,13	2,17	18,88	27,38	9,38
Sulawesi Utara	21,35	1,83	17,77	24,94	8,57
Sulawesi Tengah	30,89	1,74	27,49	34,30	5,62
Sulawesi Selatan	23,27	1,29	20,73	25,80	5,56
Sulawesi Tenggara	21,60	1,55	18,56	24,65	7,19
Gorontalo	47,99	3,22	41,68	54,29	6,70
Sulawesi Barat	24,96	2,49	20,08	29,83	9,96
Maluku	16,57	1,76	13,12	20,01	10,61
Maluku Utara	21,67	2,29	17,17	26,16	10,58
Papua Barat	19,26	2,38	14,59	23,93	12,36
Papua	4,69	0,75	3,22	6,16	16,02
Indonesia	25,13	0,35	24,43	25,82	1,40

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.9.3 *Sampling error* Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	21,83	1,08	19,71	23,94	4,95
Sumatera Utara	20,04	0,91	18,25	21,83	4,56
Sumatera Barat	17,41	1,08	15,30	19,52	6,18
Riau	15,88	1,10	13,72	18,05	6,95
Jambi	22,34	1,41	19,57	25,11	6,32
Sumatera Selatan	18,75	1,13	16,53	20,96	6,03
Bengkulu	18,26	1,42	15,47	21,04	7,78
Lampung	23,73	1,23	21,32	26,15	5,18
Kep. Bangka Belitung	24,11	1,92	20,35	27,86	7,96
Kepulauan Riau	22,85	2,71	17,55	28,15	11,84
DKI Jakarta	33,29	1,81	29,74	36,85	5,45
Jawa Barat	25,69	0,87	23,98	27,40	3,39
Jawa Tengah	41,21	0,91	39,43	43,00	2,21
DI Yogyakarta	58,97	2,82	53,44	64,49	4,78
Jawa Timur	44,13	0,90	42,36	45,89	2,04
Banten	23,23	1,45	20,39	26,06	6,23
Bali	23,11	1,60	19,98	26,24	6,92
Nusa Tenggara Barat	28,73	1,66	25,48	31,97	5,76
Nusa Tenggara Timur	22,13	1,05	20,06	24,19	4,76
Kalimantan Barat	11,87	1,08	9,74	13,99	9,13
Kalimantan Tengah	25,57	1,55	22,53	28,61	6,07
Kalimantan Selatan	36,62	1,54	33,60	39,65	4,21
Kalimantan Timur	24,59	1,51	21,63	27,55	6,14
Sulawesi Utara	21,82	1,51	18,85	24,78	6,94
Sulawesi Tengah	30,99	1,56	27,92	34,06	5,05
Sulawesi Selatan	24,00	1,15	21,76	26,25	4,77
Sulawesi Tenggara	21,61	1,31	19,04	24,17	6,06
Gorontalo	49,36	2,45	44,56	54,17	4,97
Sulawesi Barat	26,83	2,18	22,57	31,10	8,11
Maluku	19,28	1,50	16,33	22,22	7,80
Maluku Utara	21,02	1,95	17,20	24,83	9,27
Papua Barat	20,94	1,92	17,19	24,70	9,15
Papua	7,92	0,81	6,34	9,50	10,18
Indonesia	28,62	0,29	28,06	29,19	1,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.10.1 Sampling error Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-Laki

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	21,40	1,32	18,82	23,99	6,17
Sumatera Utara	19,38	1,17	17,09	21,68	6,04
Sumatera Barat	16,20	1,46	13,35	19,06	8,99
Riau	15,72	1,44	12,89	18,55	9,19
Jambi	22,24	2,03	18,26	26,21	9,12
Sumatera Selatan	17,10	1,47	14,22	19,98	8,58
Bengkulu	17,32	1,97	13,46	21,18	11,37
Lampung	22,05	1,63	18,85	25,25	7,41
Kep. Bangka Belitung	25,78	2,67	20,54	31,01	10,36
Kepulauan Riau	19,68	3,35	13,10	26,25	17,05
DKI Jakarta	30,75	2,32	26,20	35,30	7,55
Jawa Barat	23,85	1,14	21,61	26,09	4,80
Jawa Tengah	39,88	1,14	37,65	42,12	2,86
DI Yogyakarta	54,56	3,65	47,41	61,71	6,68
Jawa Timur	42,79	1,22	40,41	45,18	2,84
Banten	22,80	1,87	19,13	26,47	8,21
Bali	22,95	2,45	18,15	27,75	10,67
Nusa Tenggara Barat	28,71	2,21	24,37	33,04	7,70
Nusa Tenggara Timur	20,00	1,27	17,52	22,49	6,34
Kalimantan Barat	11,27	1,29	8,74	13,79	11,43
Kalimantan Tengah	26,55	2,03	22,58	30,52	7,63
Kalimantan Selatan	36,34	2,09	32,24	40,44	5,76
Kalimantan Timur	25,23	2,01	21,30	29,16	7,95
Sulawesi Utara	22,96	2,16	18,74	27,18	9,39
Sulawesi Tengah	29,63	2,02	25,66	33,60	6,83
Sulawesi Selatan	22,93	1,43	20,12	25,73	6,24
Sulawesi Tenggara	22,55	1,71	19,21	25,89	7,57
Gorontalo	48,81	3,40	42,15	55,47	6,96
Sulawesi Barat	23,69	2,71	18,38	29,00	11,44
Maluku	15,28	1,69	11,97	18,60	11,07
Maluku Utara	20,93	2,35	16,33	25,52	11,21
Papua Barat	19,51	2,30	14,99	24,02	11,81
Papua	7,39	1,04	5,35	9,42	14,04
Indonesia	27,43	0,38	26,69	28,16	1,37

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.10.2 Sampling error Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perempuan					
Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	22,28	1,46	19,42	25,15	6,55
Sumatera Utara	20,74	1,21	18,37	23,11	5,82
Sumatera Barat	18,65	1,44	15,82	21,48	7,74
Riau	16,05	1,59	12,93	19,17	9,91
Jambi	22,44	1,82	18,87	26,01	8,12
Sumatera Selatan	20,28	1,56	17,22	23,33	7,68
Bengkulu	19,29	2,09	15,19	23,38	10,84
Lampung	25,47	1,69	22,15	28,78	6,64
Kep. Bangka Belitung	22,13	2,51	17,21	27,04	11,33
Kepulauan Riau	25,81	3,69	18,58	33,04	14,30
DKI Jakarta	36,20	2,64	31,03	41,38	7,29
Jawa Barat	27,67	1,17	25,37	29,97	4,24
Jawa Tengah	42,65	1,27	40,16	45,14	2,98
DI Yogyakarta	63,26	3,67	56,06	70,47	5,81
Jawa Timur	45,52	1,27	43,04	48,00	2,78
Banten	23,68	1,87	20,02	27,34	7,88
Bali	23,29	2,16	19,05	27,52	9,28
Nusa Tenggara Barat	28,75	2,24	24,36	33,14	7,79
Nusa Tenggara Timur	24,21	1,45	21,36	27,06	6,00
Kalimantan Barat	12,49	1,56	9,43	15,54	12,49
Kalimantan Tengah	24,61	1,89	20,90	28,32	7,69
Kalimantan Selatan	36,90	2,08	32,81	40,98	5,65
Kalimantan Timur	23,94	1,96	20,10	27,77	8,17
Sulawesi Utara	20,69	1,88	17,01	24,37	9,08
Sulawesi Tengah	32,49	2,20	28,19	36,80	6,76
Sulawesi Selatan	25,11	1,60	21,97	28,24	6,38
Sulawesi Tenggara	20,57	1,77	17,10	24,05	8,61
Gorontalo	49,92	3,20	43,65	56,19	6,41
Sulawesi Barat	30,15	2,99	24,29	36,02	9,93
Maluku	23,87	2,29	19,37	28,36	9,61
Maluku Utara	21,11	2,35	16,50	25,72	11,14
Papua Barat	22,41	2,53	17,45	27,37	11,30
Papua	8,54	1,07	6,45	10,64	12,50
Indonesia	29,89	0,39	29,12	30,65	1,31

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.10.3 Sampling error Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-5 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-Laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	21,83	1,08	19,71	23,94	4,95
Sumatera Utara	20,04	0,91	18,25	21,83	4,56
Sumatera Barat	17,41	1,08	15,30	19,52	6,18
Riau	15,88	1,10	13,72	18,05	6,95
Jambi	22,34	1,41	19,57	25,11	6,32
Sumatera Selatan	18,75	1,13	16,53	20,96	6,03
Bengkulu	18,26	1,42	15,47	21,04	7,78
Lampung	23,73	1,23	21,32	26,15	5,18
Kep. Bangka Belitung	24,11	1,92	20,35	27,86	7,96
Kepulauan Riau	22,85	2,71	17,55	28,15	11,84
DKI Jakarta	33,29	1,81	29,74	36,85	5,45
Jawa Barat	25,69	0,87	23,98	27,40	3,39
Jawa Tengah	41,21	0,91	39,43	43,00	2,21
DI Yogyakarta	58,97	2,82	53,44	64,49	4,78
Jawa Timur	44,13	0,90	42,36	45,89	2,04
Banten	23,23	1,45	20,39	26,06	6,23
Bali	23,11	1,60	19,98	26,24	6,92
Nusa Tenggara Barat	28,73	1,66	25,48	31,97	5,76
Nusa Tenggara Timur	22,13	1,05	20,06	24,19	4,76
Kalimantan Barat	11,87	1,08	9,74	13,99	9,13
Kalimantan Tengah	25,57	1,55	22,53	28,61	6,07
Kalimantan Selatan	36,62	1,54	33,60	39,65	4,21
Kalimantan Timur	24,59	1,51	21,63	27,55	6,14
Sulawesi Utara	21,82	1,51	18,85	24,78	6,94
Sulawesi Tengah	30,99	1,56	27,92	34,06	5,05
Sulawesi Selatan	24,00	1,15	21,76	26,25	4,77
Sulawesi Tenggara	21,61	1,31	19,04	24,17	6,06
Gorontalo	49,36	2,45	44,56	54,17	4,97
Sulawesi Barat	26,83	2,18	22,57	31,10	8,11
Maluku	19,28	1,50	16,33	22,22	7,80
Maluku Utara	21,02	1,95	17,20	24,83	9,27
Papua Barat	20,94	1,92	17,19	24,70	9,15
Papua	7,92	0,81	6,34	9,50	10,18
Indonesia	28,62	0,29	28,06	29,19	1,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.11.1 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Aceh	27,10	2,06	23,06	31,14	7,60
Sumatera Utara	21,86	1,27	19,36	24,35	5,82
Sumatera Barat	22,21	1,70	18,88	25,55	7,67
Riau	19,99	1,71	16,65	23,34	8,53
Jambi	21,95	2,35	17,35	26,54	10,68
Sumatera Selatan	20,48	1,92	16,73	24,24	9,36
Bengkulu	21,07	2,67	15,83	26,31	12,69
Lampung	24,36	1,90	20,64	28,08	7,79
Kep. Bangka Belitung	23,95	2,38	19,28	28,61	9,94
Kepulauan Riau	22,75	2,55	17,76	27,74	11,19
DKI Jakarta	35,75	1,64	32,55	38,96	4,57
Jawa Barat	29,64	1,02	27,65	31,62	3,43
Jawa Tengah	43,64	1,10	41,49	45,79	2,52
DI Yogyakarta	55,60	2,84	50,04	61,17	5,10
Jawa Timur	49,46	1,05	47,39	51,52	2,13
Banten	25,83	1,64	22,61	29,05	6,36
Bali	29,26	1,79	25,75	32,77	6,12
Nusa Tenggara Barat	30,74	2,35	26,14	35,34	7,63
Nusa Tenggara Timur	28,91	2,30	24,41	33,41	7,94
Kalimantan Barat	20,84	2,19	16,54	25,14	10,53
Kalimantan Tengah	28,28	2,45	23,47	33,09	8,68
Kalimantan Selatan	33,73	2,13	29,56	37,91	6,32
Kalimantan Timur	26,04	1,65	22,80	29,27	6,34
Sulawesi Utara	18,28	2,01	14,35	22,21	10,97
Sulawesi Tengah	34,08	2,77	28,66	39,50	8,12
Sulawesi Selatan	25,18	1,91	21,44	28,92	7,58
Sulawesi Tenggara	19,98	2,12	15,83	24,13	10,60
Gorontalo	42,35	3,29	35,90	48,80	7,77
Sulawesi Barat	33,62	3,85	26,07	41,16	11,45
Maluku	19,34	2,29	14,86	23,83	11,83
Maluku Utara	17,32	3,17	11,10	23,54	18,32
Papua Barat	21,79	2,63	16,63	26,94	12,08
Papua	16,39	1,82	12,82	19,97	11,11
Indonesia	32,39	0,40	31,61	33,17	1,23

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.11.2 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	18,30	0,98	16,38	20,22	5,36
Sumatera Utara	15,25	0,85	13,58	16,91	5,57
Sumatera Barat	18,44	1,13	16,23	20,65	6,11
Riau	16,81	1,23	14,41	19,22	7,30
Jambi	18,77	1,33	16,16	21,38	7,09
Sumatera Selatan	15,12	1,02	13,12	17,12	6,75
Bengkulu	15,98	1,40	13,24	18,73	8,77
Lampung	22,78	1,32	20,19	25,38	5,81
Kep. Bangka Belitung	25,65	2,24	21,26	30,03	8,72
Kepulauan Riau	22,24	4,22	13,98	30,50	18,96
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	22,08	1,24	19,64	24,51	5,62
Jawa Tengah	34,76	1,10	32,61	36,91	3,16
DI Yogyakarta	60,19	3,99	52,36	68,02	6,63
Jawa Timur	43,18	1,12	40,99	45,37	2,59
Banten	15,55	1,85	11,92	19,18	11,92
Bali	16,92	2,38	12,25	21,59	14,08
Nusa Tenggara Barat	26,25	1,77	22,78	29,71	6,73
Nusa Tenggara Timur	18,08	0,93	16,25	19,90	5,15
Kalimantan Barat	7,90	0,91	6,12	9,67	11,46
Kalimantan Tengah	23,68	1,57	20,61	26,74	6,61
Kalimantan Selatan	37,73	1,70	34,41	41,06	4,49
Kalimantan Timur	23,70	1,74	20,28	27,12	7,36
Sulawesi Utara	19,69	1,59	16,57	22,82	8,09
Sulawesi Tengah	29,45	1,54	26,42	32,47	5,24
Sulawesi Selatan	22,16	1,08	20,05	24,27	4,86
Sulawesi Tenggara	20,00	1,33	17,39	22,61	6,65
Gorontalo	43,29	2,81	37,79	48,79	6,48
Sulawesi Barat	25,73	2,17	21,47	29,99	8,45
Maluku	14,44	1,46	11,58	17,31	10,12
Maluku Utara	19,00	1,86	15,36	22,65	9,79
Papua Barat	18,63	2,04	14,63	22,63	10,96
Papua	5,08	0,73	3,64	6,51	14,42
Indonesia	24,83	0,31	24,22	25,45	1,26

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.11.3 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	20,86	0,93	19,04	22,69	4,46
Sumatera Utara	18,27	0,75	16,80	19,73	4,08
Sumatera Barat	19,82	0,95	17,96	21,68	4,79
Riau	18,01	1,00	16,05	19,97	5,56
Jambi	19,75	1,18	17,45	22,06	5,95
Sumatera Selatan	16,96	0,94	15,12	18,80	5,54
Bengkulu	17,56	1,27	15,07	20,06	7,25
Lampung	23,18	1,10	21,03	25,34	4,74
Kep. Bangka Belitung	24,82	1,64	21,62	28,03	6,59
Kepulauan Riau	22,68	2,26	18,25	27,11	9,97
DKI Jakarta	35,75	1,64	32,55	38,96	4,57
Jawa Barat	27,16	0,80	25,60	28,72	2,94
Jawa Tengah	38,79	0,79	37,25	40,33	2,02
DI Yogyakarta	57,21	2,32	52,67	61,76	4,05
Jawa Timur	46,22	0,77	44,72	47,73	1,66
Banten	22,46	1,26	19,98	24,94	5,63
Bali	24,37	1,42	21,59	27,16	5,83
Nusa Tenggara Barat	28,08	1,43	25,29	30,87	5,07
Nusa Tenggara Timur	20,06	0,87	18,35	21,78	4,36
Kalimantan Barat	11,68	0,92	9,88	13,48	7,85
Kalimantan Tengah	25,16	1,33	22,55	27,76	5,28
Kalimantan Selatan	36,14	1,33	33,53	38,74	3,68
Kalimantan Timur	25,14	1,22	22,75	27,53	4,85
Sulawesi Utara	19,06	1,26	16,59	21,53	6,61
Sulawesi Tengah	30,55	1,35	27,91	33,19	4,41
Sulawesi Selatan	23,25	0,97	21,34	25,15	4,18
Sulawesi Tenggara	19,99	1,13	17,79	22,20	5,64
Gorontalo	42,96	2,16	38,73	47,19	5,02
Sulawesi Barat	27,44	1,91	23,71	31,18	6,94
Maluku	16,13	1,24	13,71	18,56	7,67
Maluku Utara	18,58	1,61	15,43	21,73	8,64
Papua Barat	19,64	1,62	16,47	22,82	8,25
Papua	7,74	0,72	6,33	9,14	9,28
Indonesia	28,54	0,25	28,04	29,03	0,88

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.12.1 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	20,59	1,14	18,35	22,83	5,56
Sumatera Utara	17,67	0,96	15,79	19,55	5,43
Sumatera Barat	18,74	1,26	16,28	21,20	6,70
Riau	18,47	1,28	15,96	20,97	6,92
Jambi	19,07	1,66	15,81	22,32	8,72
Sumatera Selatan	16,07	1,21	13,69	18,45	7,55
Bengkulu	17,83	1,78	14,34	21,33	10,00
Lampung	22,26	1,43	19,46	25,05	6,41
Kep. Bangka Belitung	25,88	2,32	21,33	30,42	8,97
Kepulauan Riau	20,09	2,87	14,46	25,72	14,30
DKI Jakarta	32,68	2,18	28,41	36,96	6,68
Jawa Barat	25,97	1,04	23,95	28,00	3,98
Jawa Tengah	39,01	1,01	37,03	40,98	2,58
DI Yogyakarta	57,05	3,07	51,03	63,07	5,38
Jawa Timur	46,00	1,04	43,97	48,04	2,26
Banten	22,18	1,63	18,98	25,38	7,36
Bali	23,76	2,09	19,67	27,85	8,79
Nusa Tenggara Barat	27,98	1,86	24,33	31,64	6,66
Nusa Tenggara Timur	18,26	1,05	16,21	20,31	5,73
Kalimantan Barat	11,62	1,15	9,37	13,87	9,87
Kalimantan Tengah	26,11	1,74	22,71	29,52	6,65
Kalimantan Selatan	36,66	1,84	33,04	40,27	5,03
Kalimantan Timur	26,74	1,77	23,28	30,20	6,60
Sulawesi Utara	20,28	1,77	16,81	23,75	8,74
Sulawesi Tengah	29,84	1,75	26,40	33,27	5,88
Sulawesi Selatan	22,36	1,23	19,94	24,77	5,51
Sulawesi Tenggara	20,77	1,49	17,85	23,69	7,17
Gorontalo	42,87	2,98	37,03	48,71	6,95
Sulawesi Barat	25,38	2,37	20,73	30,03	9,35
Maluku	13,20	1,44	10,37	16,02	10,92
Maluku Utara	18,29	1,86	14,64	21,93	10,17
Papua Barat	18,29	1,95	14,47	22,11	10,65
Papua	6,96	0,85	5,31	8,62	12,15
Indonesia	27,92	0,33	27,27	28,56	1,18

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.12.2 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	21,15	1,27	18,67	23,64	5,98
Sumatera Utara	18,93	1,01	16,94	20,92	5,36
Sumatera Barat	20,95	1,31	18,38	23,51	6,25
Riau	17,52	1,38	14,82	20,22	7,87
Jambi	20,46	1,55	17,42	23,49	7,57
Sumatera Selatan	17,82	1,29	15,30	20,35	7,24
Bengkulu	17,28	1,71	13,92	20,63	9,90
Lampung	24,19	1,49	21,27	27,10	6,15
Kep. Bangka Belitung	23,61	2,17	19,35	27,86	9,19
Kepulauan Riau	25,19	3,01	19,29	31,09	11,96
DKI Jakarta	38,88	2,28	34,42	43,33	5,85
Jawa Barat	28,43	1,03	26,41	30,45	3,62
Jawa Tengah	38,56	1,07	36,47	40,64	2,76
DI Yogyakarta	57,37	3,15	51,19	63,55	5,50
Jawa Timur	46,46	1,07	44,36	48,55	2,30
Banten	22,78	1,64	19,56	26,00	7,22
Bali	25,04	1,96	21,20	28,88	7,82
Nusa Tenggara Barat	28,18	1,98	24,31	32,06	7,02
Nusa Tenggara Timur	21,84	1,19	19,50	24,18	5,47
Kalimantan Barat	11,74	1,24	9,31	14,17	10,56
Kalimantan Tengah	24,18	1,64	20,97	27,40	6,78
Kalimantan Selatan	35,62	1,79	32,12	39,12	5,02
Kalimantan Timur	23,49	1,64	20,27	26,71	6,99
Sulawesi Utara	17,88	1,54	14,86	20,91	8,63
Sulawesi Tengah	31,29	1,78	27,81	34,78	5,68
Sulawesi Selatan	24,14	1,35	21,50	26,79	5,59
Sulawesi Tenggara	19,12	1,50	16,19	22,06	7,83
Gorontalo	43,05	2,89	37,38	48,71	6,72
Sulawesi Barat	29,68	2,61	24,56	34,80	8,80
Maluku	19,40	1,82	15,83	22,98	9,39
Maluku Utara	18,90	2,01	14,95	22,84	10,65
Papua Barat	21,05	2,14	16,85	25,25	10,18
Papua	8,66	1,03	6,64	10,68	11,88
Indonesia	29,19	0,34	28,53	29,85	1,15

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.12.3 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Umur 3-6 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	20,86	0,93	19,04	22,69	4,46
Sumatera Utara	18,27	0,75	16,80	19,73	4,08
Sumatera Barat	19,82	0,95	17,96	21,68	4,79
Riau	18,01	1,00	16,05	19,97	5,56
Jambi	19,75	1,18	17,45	22,06	5,95
Sumatera Selatan	16,96	0,94	15,12	18,80	5,54
Bengkulu	17,56	1,27	15,07	20,06	7,25
Lampung	23,18	1,10	21,03	25,34	4,74
Kep. Bangka Belitung	24,82	1,64	21,62	28,03	6,59
Kepulauan Riau	22,68	2,26	18,25	27,11	9,97
DKI Jakarta	35,75	1,64	32,55	38,96	4,57
Jawa Barat	27,16	0,80	25,60	28,72	2,94
Jawa Tengah	38,79	0,79	37,25	40,33	2,02
DI Yogyakarta	57,21	2,32	52,67	61,76	4,05
Jawa Timur	46,22	0,77	44,72	47,73	1,66
Banten	22,46	1,26	19,98	24,94	5,63
Bali	24,37	1,42	21,59	27,16	5,83
Nusa Tenggara Barat	28,08	1,43	25,29	30,87	5,07
Nusa Tenggara Timur	20,06	0,87	18,35	21,78	4,36
Kalimantan Barat	11,68	0,92	9,88	13,48	7,85
Kalimantan Tengah	25,16	1,33	22,55	27,76	5,28
Kalimantan Selatan	36,14	1,33	33,53	38,74	3,68
Kalimantan Timur	25,14	1,22	22,75	27,53	4,85
Sulawesi Utara	19,06	1,26	16,59	21,53	6,61
Sulawesi Tengah	30,55	1,35	27,91	33,19	4,41
Sulawesi Selatan	23,25	0,97	21,34	25,15	4,18
Sulawesi Tenggara	19,99	1,13	17,79	22,20	5,64
Gorontalo	42,96	2,16	38,73	47,19	5,02
Sulawesi Barat	27,44	1,91	23,71	31,18	6,94
Maluku	16,13	1,24	13,71	18,56	7,67
Maluku Utara	18,58	1,61	15,43	21,73	8,64
Papua Barat	19,64	1,62	16,47	22,82	8,25
Papua	7,74	0,72	6,33	9,14	9,28
Indonesia	28,54	0,25	28,04	29,03	0,88

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.13.1 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	28,34	1,56	25,29	31,39	5,49
Sumatera Utara	33,36	1,16	31,08	35,64	3,49
Sumatera Barat	45,79	1,71	42,43	49,14	3,74
Riau	40,52	1,74	37,10	43,93	4,29
Jambi	36,23	2,04	32,23	40,24	5,64
Sumatera Selatan	40,20	1,74	36,79	43,60	4,32
Bengkulu	45,21	2,18	40,93	49,48	4,83
Lampung	28,37	1,73	24,98	31,77	6,10
Kep. Bangka Belitung	28,44	1,75	25,02	31,87	6,14
Kepulauan Riau	37,77	2,52	32,84	42,70	6,66
DKI Jakarta	51,00	1,28	48,49	53,51	2,51
Jawa Barat	35,40	0,77	33,90	36,91	2,17
Jawa Tengah	39,44	0,79	37,89	40,99	2,01
DI Yogyakarta	61,15	1,86	57,50	64,80	3,05
Jawa Timur	41,35	0,81	39,77	42,93	1,95
Banten	36,44	1,36	33,78	39,11	3,73
Bali	44,86	1,57	41,77	47,95	3,51
Nusa Tenggara Barat	28,17	1,83	24,59	31,75	6,48
Nusa Tenggara Timur	29,27	1,77	25,80	32,73	6,04
Kalimantan Barat	39,64	2,18	35,36	43,92	5,50
Kalimantan Tengah	35,64	1,85	32,01	39,27	5,20
Kalimantan Selatan	39,18	1,80	35,64	42,71	4,60
Kalimantan Timur	41,20	1,40	38,46	43,93	3,39
Sulawesi Utara	40,06	1,82	36,50	43,63	4,54
Sulawesi Tengah	38,81	2,56	33,79	43,82	6,59
Sulawesi Selatan	42,71	1,52	39,74	45,69	3,55
Sulawesi Tenggara	35,69	2,54	30,71	40,66	7,12
Gorontalo	38,49	2,41	33,77	43,21	6,25
Sulawesi Barat	24,32	2,94	18,57	30,08	12,07
Maluku	36,87	2,48	32,00	41,74	6,73
Maluku Utara	28,55	2,71	23,23	33,87	9,51
Papua Barat	27,24	1,93	23,46	31,02	7,08
Papua	22,41	1,44	19,60	25,23	6,41
Indonesia	38,71	0,30	38,12	39,30	0,78

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.13.2 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9,34	0,50	8,35	10,32	5,38
Sumatera Utara	12,35	0,55	11,28	13,43	4,44
Sumatera Barat	16,80	0,79	15,26	18,35	4,68
Riau	13,31	0,76	11,82	14,81	5,72
Jambi	15,15	0,86	13,48	16,83	5,64
Sumatera Selatan	11,12	0,61	9,92	12,32	5,51
Bengkulu	12,78	0,90	11,02	14,55	7,06
Lampung	12,74	0,71	11,36	14,13	5,56
Kep. Bangka Belitung	13,20	1,24	10,76	15,63	9,42
Kepulauan Riau	15,93	2,21	11,60	20,26	13,88
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	16,15	0,70	14,79	17,51	4,30
Jawa Tengah	22,04	0,64	20,79	23,30	2,90
DI Yogyakarta	36,53	2,38	31,86	41,20	6,53
Jawa Timur	21,44	0,63	20,20	22,67	2,94
Banten	10,30	0,97	8,41	12,20	9,38
Bali	25,58	1,77	22,11	29,06	6,93
Nusa Tenggara Barat	9,04	0,88	7,31	10,78	9,78
Nusa Tenggara Timur	3,06	0,36	2,35	3,77	11,87
Kalimantan Barat	7,85	0,73	6,43	9,28	9,26
Kalimantan Tengah	11,15	0,84	9,52	12,79	7,49
Kalimantan Selatan	16,82	0,85	15,15	18,48	5,05
Kalimantan Timur	17,17	1,56	14,11	20,22	9,08
Sulawesi Utara	16,71	1,05	14,65	18,76	6,27
Sulawesi Tengah	8,64	0,66	7,36	9,93	7,60
Sulawesi Selatan	15,13	0,61	13,94	16,31	4,00
Sulawesi Tenggara	8,99	0,70	7,63	10,36	7,76
Gorontalo	16,82	1,56	13,76	19,89	9,30
Sulawesi Barat	8,57	1,03	6,55	10,58	12,03
Maluku	5,03	0,78	3,51	6,55	15,42
Maluku Utara	3,33	0,51	2,33	4,33	15,30
Papua Barat	10,05	2,21	5,71	14,39	22,03
Papua	2,05	0,34	1,39	2,72	16,55
Indonesia	14,91	0,18	14,56	15,26	1,19

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.13.3 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	15,05	0,61	13,85	16,25	4,06
Sumatera Utara	22,58	0,67	21,27	23,90	2,98
Sumatera Barat	28,68	0,94	26,83	30,52	3,29
Riau	24,57	0,93	22,74	26,40	3,80
Jambi	21,84	0,94	19,99	23,69	4,32
Sumatera Selatan	22,28	0,90	20,53	24,04	4,03
Bengkulu	23,92	1,09	21,79	26,05	4,54
Lampung	17,19	0,72	15,77	18,61	4,21
Kep. Bangka Belitung	20,90	1,09	18,77	23,04	5,21
Kepulauan Riau	33,77	2,10	29,66	37,88	6,21
DKI Jakarta	51,00	1,28	48,49	53,51	2,51
Jawa Barat	29,15	0,58	28,02	30,29	1,99
Jawa Tengah	30,22	0,51	29,21	31,23	1,70
DI Yogyakarta	54,23	1,52	51,25	57,22	2,81
Jawa Timur	31,36	0,53	30,33	32,38	1,67
Banten	27,93	0,99	26,00	29,87	3,53
Bali	37,42	1,20	35,06	39,78	3,22
Nusa Tenggara Barat	17,23	0,96	15,35	19,11	5,57
Nusa Tenggara Timur	8,60	0,51	7,60	9,59	5,89
Kalimantan Barat	18,03	0,93	16,20	19,87	5,18
Kalimantan Tengah	19,88	0,89	18,14	21,63	4,48
Kalimantan Selatan	26,85	1,00	24,90	28,81	3,72
Kalimantan Timur	31,94	1,09	29,81	34,07	3,40
Sulawesi Utara	27,57	1,10	25,42	29,71	3,97
Sulawesi Tengah	16,70	0,90	14,94	18,46	5,38
Sulawesi Selatan	25,87	0,83	24,24	27,50	3,21
Sulawesi Tenggara	17,27	1,00	15,31	19,23	5,78
Gorontalo	24,53	1,32	21,95	27,12	5,38
Sulawesi Barat	12,46	1,08	10,35	14,57	8,66
Maluku	17,86	1,36	15,20	20,52	7,59
Maluku Utara	10,76	0,98	8,83	12,68	9,11
Papua Barat	15,63	1,54	12,62	18,64	9,83
Papua	8,27	0,54	7,20	9,33	6,58
Indonesia	26,95	0,18	26,59	27,31	0,68

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.14.1 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	13,93	0,67	12,61	15,25	4,84
Sumatera Utara	21,97	0,84	20,34	23,61	3,80
Sumatera Barat	26,69	1,11	24,52	28,86	4,15
Riau	24,04	1,15	21,79	26,29	4,78
Jambi	19,99	1,16	17,71	22,27	5,82
Sumatera Selatan	22,27	1,10	20,11	24,43	4,94
Bengkulu	21,67	1,31	19,11	24,24	6,03
Lampung	15,40	0,80	13,83	16,97	5,19
Kep. Bangka Belitung	20,04	1,37	17,36	22,72	6,82
Kepulauan Riau	34,26	2,48	29,40	39,12	7,24
DKI Jakarta	52,34	1,62	49,17	55,51	3,09
Jawa Barat	28,93	0,69	27,58	30,28	2,38
Jawa Tengah	29,10	0,61	27,91	30,30	2,09
DI Yogyakarta	54,79	2,06	50,75	58,83	3,76
Jawa Timur	30,20	0,63	28,96	31,44	2,09
Banten	27,41	1,14	25,18	29,64	4,15
Bali	36,10	1,45	33,26	38,95	4,02
Nusa Tenggara Barat	14,85	1,04	12,80	16,89	7,03
Nusa Tenggara Timur	8,49	0,61	7,30	9,67	7,14
Kalimantan Barat	17,80	1,10	15,64	19,96	6,20
Kalimantan Tengah	19,50	1,09	17,35	21,64	5,61
Kalimantan Selatan	25,47	1,14	23,23	27,71	4,49
Kalimantan Timur	31,37	1,25	28,92	33,81	3,97
Sulawesi Utara	26,12	1,33	23,50	28,73	5,11
Sulawesi Tengah	15,42	1,04	13,38	17,45	6,73
Sulawesi Selatan	23,08	1,02	21,09	25,07	4,40
Sulawesi Tenggara	15,68	1,04	13,64	17,72	6,63
Gorontalo	21,61	1,41	18,86	24,37	6,51
Sulawesi Barat	10,98	1,21	8,60	13,36	11,05
Maluku	16,56	1,44	13,73	19,39	8,71
Maluku Utara	9,71	1,00	7,76	11,67	10,25
Papua Barat	15,94	2,10	11,82	20,07	13,19
Papua	7,49	0,57	6,36	8,61	7,64
Indonesia	26,10	0,22	25,67	26,53	0,84

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.14.2 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	16,19	0,79	14,65	17,73	4,85
Sumatera Utara	23,20	0,76	21,72	24,68	3,26
Sumatera Barat	30,62	1,07	28,53	32,72	3,49
Riau	25,12	1,04	23,08	27,17	4,15
Jambi	23,77	1,15	21,52	26,01	4,82
Sumatera Selatan	22,30	1,00	20,34	24,27	4,50
Bengkulu	26,20	1,26	23,73	28,66	4,81
Lampung	19,09	0,95	17,23	20,95	4,98
Kep. Bangka Belitung	21,79	1,40	19,05	24,53	6,41
Kepulauan Riau	33,25	2,52	28,32	38,19	7,57
DKI Jakarta	49,66	1,53	46,66	52,66	3,08
Jawa Barat	29,38	0,70	28,02	30,75	2,37
Jawa Tengah	31,38	0,64	30,13	32,64	2,04
DI Yogyakarta	53,65	1,94	49,84	57,45	3,62
Jawa Timur	32,58	0,66	31,29	33,86	2,01
Banten	28,50	1,18	26,19	30,80	4,13
Bali	38,83	1,47	35,94	41,71	3,79
Nusa Tenggara Barat	19,78	1,24	17,35	22,21	6,27
Nusa Tenggara Timur	8,71	0,58	7,58	9,84	6,61
Kalimantan Barat	18,28	1,03	16,26	20,29	5,62
Kalimantan Tengah	20,30	1,12	18,09	22,50	5,54
Kalimantan Selatan	28,33	1,25	25,88	30,78	4,41
Kalimantan Timur	32,55	1,31	29,99	35,11	4,02
Sulawesi Utara	29,06	1,37	26,39	31,74	4,70
Sulawesi Tengah	18,01	1,04	15,97	20,04	5,78
Sulawesi Selatan	28,69	1,00	26,72	30,66	3,50
Sulawesi Tenggara	18,93	1,19	16,59	21,27	6,30
Gorontalo	27,37	1,71	24,01	30,72	6,26
Sulawesi Barat	13,87	1,35	11,23	16,52	9,72
Maluku	19,16	1,59	16,05	22,28	8,29
Maluku Utara	11,83	1,24	9,40	14,26	10,48
Papua Barat	15,28	1,28	12,77	17,80	8,40
Papua	9,17	0,71	7,78	10,56	7,73
Indonesia	27,83	0,22	27,40	28,26	0,79

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.14.3 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	15,05	0,61	13,85	16,25	4,06
Sumatera Utara	22,58	0,67	21,27	23,90	2,98
Sumatera Barat	28,68	0,94	26,83	30,52	3,29
Riau	24,57	0,93	22,74	26,40	3,80
Jambi	21,84	0,94	19,99	23,69	4,32
Sumatera Selatan	22,28	0,90	20,53	24,04	4,03
Bengkulu	23,92	1,09	21,79	26,05	4,54
Lampung	17,19	0,72	15,77	18,61	4,21
Kep. Bangka Belitung	20,90	1,09	18,77	23,04	5,21
Kepulauan Riau	33,77	2,10	29,66	37,88	6,21
DKI Jakarta	51,00	1,28	48,49	53,51	2,51
Jawa Barat	29,15	0,58	28,02	30,29	1,99
Jawa Tengah	30,22	0,51	29,21	31,23	1,70
DI Yogyakarta	54,23	1,52	51,25	57,22	2,81
Jawa Timur	31,36	0,53	30,33	32,38	1,67
Banten	27,93	0,99	26,00	29,87	3,53
Bali	37,42	1,20	35,06	39,78	3,22
Nusa Tenggara Barat	17,23	0,96	15,35	19,11	5,57
Nusa Tenggara Timur	8,60	0,51	7,60	9,59	5,89
Kalimantan Barat	18,03	0,93	16,20	19,87	5,18
Kalimantan Tengah	19,88	0,89	18,14	21,63	4,48
Kalimantan Selatan	26,85	1,00	24,90	28,81	3,72
Kalimantan Timur	31,94	1,09	29,81	34,07	3,40
Sulawesi Utara	27,57	1,10	25,42	29,71	3,97
Sulawesi Tengah	16,70	0,90	14,94	18,46	5,38
Sulawesi Selatan	25,87	0,83	24,24	27,50	3,21
Sulawesi Tenggara	17,27	1,00	15,31	19,23	5,78
Gorontalo	24,53	1,32	21,95	27,12	5,38
Sulawesi Barat	12,46	1,08	10,35	14,57	8,66
Maluku	17,86	1,36	15,20	20,52	7,59
Maluku Utara	10,76	0,98	8,83	12,68	9,11
Papua Barat	15,63	1,54	12,62	18,64	9,83
Papua	8,27	0,54	7,20	9,33	6,58
Indonesia	26,95	0,18	26,59	27,31	0,68

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.15.1 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,99	0,83	6,36	9,62	10,40
Sumatera Utara	8,23	0,59	7,08	9,39	7,15
Sumatera Barat	7,69	0,73	6,26	9,12	9,49
Riau	10,63	1,03	8,62	12,65	9,66
Jambi	9,45	1,21	7,08	11,82	12,81
Sumatera Selatan	9,37	1,06	7,29	11,46	11,36
Bengkulu	8,34	1,17	6,05	10,63	14,03
Lampung	10,60	1,42	7,82	13,38	13,38
Kep. Bangka Belitung	5,77	0,91	3,99	7,55	15,75
Kepulauan Riau	5,67	1,16	3,41	7,94	20,38
DKI Jakarta	6,70	0,75	5,23	8,17	11,19
Jawa Barat	5,61	0,39	4,85	6,37	6,94
Jawa Tengah	7,70	0,42	6,88	8,52	5,42
DI Yogyakarta	7,90	0,85	6,24	9,57	10,75
Jawa Timur	8,73	0,45	7,85	9,60	5,11
Banten	7,28	0,68	5,95	8,61	9,32
Bali	12,62	1,18	10,30	14,94	9,37
Nusa Tenggara Barat	7,06	0,81	5,46	8,65	11,53
Nusa Tenggara Timur	7,49	1,01	5,52	9,46	13,42
Kalimantan Barat	8,93	0,98	7,01	10,84	10,94
Kalimantan Tengah	12,06	1,20	9,72	14,41	9,92
Kalimantan Selatan	9,40	1,24	6,98	11,83	13,16
Kalimantan Timur	8,10	0,79	6,55	9,64	9,76
Sulawesi Utara	4,50	0,61	3,31	5,69	13,52
Sulawesi Tengah	11,30	1,46	8,43	14,17	12,96
Sulawesi Selatan	8,61	0,80	7,04	10,19	9,32
Sulawesi Tenggara	12,03	1,36	9,37	14,69	11,28
Gorontalo	9,62	1,34	6,99	12,25	13,95
Sulawesi Barat	11,53	1,53	8,54	14,52	13,24
Maluku	4,57	0,73	3,13	6,01	16,08
Maluku Utara	8,11	1,31	5,55	10,67	16,09
Papua Barat	8,92	1,46	6,06	11,79	16,38
Papua	6,23	1,13	4,00	8,45	18,22
Indonesia	7,64	0,16	7,33	7,95	2,07

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.15.2 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,07	0,51	6,07	8,08	7,24
Sumatera Utara	17,14	0,81	15,54	18,73	4,74
Sumatera Barat	9,62	0,70	8,25	10,99	7,27
Riau	7,64	0,67	6,33	8,95	8,74
Jambi	7,70	0,75	6,22	9,18	9,78
Sumatera Selatan	6,25	0,50	5,27	7,23	8,00
Bengkulu	9,86	0,89	8,12	11,61	9,03
Lampung	9,61	0,69	8,26	10,97	7,21
Kep. Bangka Belitung	9,98	1,43	7,18	12,78	14,32
Kepulauan Riau	9,89	1,94	6,10	13,69	19,56
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5,76	0,63	4,53	6,98	10,88
Jawa Tengah	7,21	0,44	6,35	8,08	6,11
DI Yogyakarta	13,65	3,19	7,40	19,89	23,35
Jawa Timur	8,22	0,45	7,33	9,11	5,51
Banten	7,21	1,20	4,84	9,57	16,71
Bali	20,90	1,98	17,02	24,77	9,46
Nusa Tenggara Barat	14,07	1,30	11,52	16,62	9,24
Nusa Tenggara Timur	10,81	0,69	9,47	12,16	6,34
Kalimantan Barat	8,51	0,62	7,29	9,73	7,30
Kalimantan Tengah	12,20	1,11	10,02	14,38	9,11
Kalimantan Selatan	7,68	0,69	6,34	9,03	8,93
Kalimantan Timur	7,52	1,18	5,20	9,84	15,71
Sulawesi Utara	4,91	0,61	3,72	6,11	12,39
Sulawesi Tengah	15,04	1,11	12,86	17,22	7,41
Sulawesi Selatan	13,26	0,75	11,79	14,72	5,62
Sulawesi Tenggara	15,65	0,95	13,79	17,51	6,06
Gorontalo	8,54	0,98	6,61	10,47	11,52
Sulawesi Barat	15,31	1,45	12,47	18,15	9,46
Maluku	7,70	0,98	5,78	9,62	12,72
Maluku Utara	10,92	0,99	8,99	12,85	9,04
Papua Barat	7,13	0,98	5,21	9,04	13,72
Papua	17,36	1,32	14,78	19,94	7,58
Indonesia	9,47	0,16	9,15	9,79	1,71

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.15.3 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,36	0,44	6,50	8,21	5,94
Sumatera Utara	12,71	0,50	11,72	13,69	3,95
Sumatera Barat	8,79	0,51	7,79	9,79	5,79
Riau	8,91	0,58	7,77	10,05	6,53
Jambi	8,27	0,64	7,01	9,53	7,76
Sumatera Selatan	7,51	0,53	6,47	8,54	7,03
Bengkulu	9,30	0,71	7,90	10,70	7,68
Lampung	9,90	0,64	8,64	11,16	6,49
Kep. Bangka Belitung	7,84	0,85	6,17	9,51	10,85
Kepulauan Riau	6,47	1,01	4,49	8,45	15,61
DKI Jakarta	6,70	0,75	5,23	8,17	11,19
Jawa Barat	5,66	0,33	5,01	6,31	5,87
Jawa Tengah	7,44	0,31	6,85	8,04	4,10
DI Yogyakarta	9,47	1,09	7,34	11,60	11,47
Jawa Timur	8,48	0,32	7,86	9,10	3,75
Banten	7,26	0,60	6,08	8,43	8,28
Bali	15,75	1,06	13,67	17,84	6,76
Nusa Tenggara Barat	10,96	0,82	9,34	12,57	7,51
Nusa Tenggara Timur	10,06	0,58	8,92	11,19	5,76
Kalimantan Barat	8,65	0,53	7,62	9,68	6,09
Kalimantan Tengah	12,15	0,83	10,53	13,77	6,81
Kalimantan Selatan	8,49	0,69	7,14	9,84	8,11
Kalimantan Timur	7,88	0,66	6,58	9,18	8,40
Sulawesi Utara	4,71	0,43	3,87	5,56	9,14
Sulawesi Tengah	13,94	0,90	12,17	15,71	6,49
Sulawesi Selatan	11,36	0,56	10,27	12,46	4,91
Sulawesi Tenggara	14,44	0,78	12,91	15,98	5,42
Gorontalo	8,94	0,80	7,38	10,49	8,90
Sulawesi Barat	14,34	1,15	12,08	16,60	8,04
Maluku	6,38	0,65	5,11	7,65	10,14
Maluku Utara	10,02	0,79	8,47	11,58	7,91
Papua Barat	7,72	0,82	6,11	9,34	10,66
Papua	13,65	0,97	11,75	15,55	7,11
Indonesia	8,53	0,11	8,30	8,75	1,33

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.16.1 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Laki-laki					
Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	9,35	0,61	8,15	10,55	6,53
Sumatera Utara	14,41	0,62	13,19	15,63	4,33
Sumatera Barat	11,35	0,74	9,89	12,81	6,55
Riau	11,43	0,87	9,72	13,14	7,62
Jambi	11,51	1,00	9,55	13,48	8,70
Sumatera Selatan	7,97	0,64	6,72	9,21	7,98
Bengkulu	12,34	1,10	10,19	14,50	8,91
Lampung	13,85	0,95	11,99	15,71	6,84
Kep. Bangka Belitung	8,98	1,27	6,49	11,47	14,16
Kepulauan Riau	7,17	1,68	3,87	10,46	23,46
DKI Jakarta	5,52	0,88	3,78	7,25	16,03
Jawa Barat	6,56	0,46	5,66	7,47	7,03
Jawa Tengah	8,15	0,42	7,32	8,98	5,19
DI Yogyakarta	10,37	1,32	7,79	12,95	12,68
Jawa Timur	9,84	0,45	8,96	10,72	4,56
Banten	8,01	0,86	6,32	9,70	10,75
Bali	15,87	1,51	12,92	18,83	9,49
Nusa Tenggara Barat	12,97	1,16	10,70	15,24	8,92
Nusa Tenggara Timur	12,33	0,75	10,87	13,79	6,06
Kalimantan Barat	10,14	0,76	8,64	11,64	7,54
Kalimantan Tengah	16,26	1,20	13,91	18,61	7,36
Kalimantan Selatan	9,31	0,93	7,48	11,13	9,98
Kalimantan Timur	8,49	0,97	6,60	10,39	11,37
Sulawesi Utara	5,22	0,62	4,01	6,43	11,82
Sulawesi Tengah	18,35	1,25	15,90	20,80	6,81
Sulawesi Selatan	14,82	0,85	13,15	16,49	5,75
Sulawesi Tenggara	17,60	1,09	15,47	19,73	6,18
Gorontalo	11,72	1,22	9,33	14,11	10,39
Sulawesi Barat	19,28	1,74	15,87	22,69	9,04
Maluku	8,32	1,05	6,27	10,37	12,60
Maluku Utara	13,22	1,20	10,87	15,56	9,05
Papua Barat	8,40	1,18	6,09	10,70	14,03
Papua	16,11	1,17	13,82	18,41	7,26
Indonesia	9,98	0,16	9,67	10,29	1,57

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.16.2 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,35	0,53	4,32	6,38	9,85
Sumatera Utara	11,00	0,57	9,89	12,12	5,16
Sumatera Barat	6,32	0,55	5,24	7,41	8,76
Riau	6,31	0,62	5,11	7,52	9,74
Jambi	4,96	0,66	3,68	6,25	13,20
Sumatera Selatan	7,02	0,74	5,58	8,47	10,48
Bengkulu	6,22	0,68	4,88	7,56	11,00
Lampung	5,79	0,62	4,57	7,01	10,75
Kep. Bangka Belitung	6,69	0,95	4,83	8,55	14,21
Kepulauan Riau	5,77	1,24	3,34	8,20	21,46
DKI Jakarta	7,90	1,04	5,86	9,95	13,21
Jawa Barat	4,71	0,36	4,00	5,41	7,61
Jawa Tengah	6,70	0,37	5,98	7,43	5,55
DI Yogyakarta	8,48	1,43	5,68	11,27	16,85
Jawa Timur	7,03	0,37	6,31	7,75	5,24
Banten	6,45	0,64	5,20	7,70	9,89
Bali	15,62	1,32	13,02	18,21	8,48
Nusa Tenggara Barat	8,83	0,91	7,05	10,62	10,33
Nusa Tenggara Timur	7,69	0,60	6,52	8,87	7,80
Kalimantan Barat	7,14	0,61	5,94	8,35	8,60
Kalimantan Tengah	7,72	0,80	6,15	9,29	10,35
Kalimantan Selatan	7,64	0,76	6,16	9,13	9,90
Kalimantan Timur	7,22	0,77	5,71	8,74	10,70
Sulawesi Utara	4,19	0,59	3,05	5,34	13,96
Sulawesi Tengah	9,51	0,98	7,60	11,42	10,26
Sulawesi Selatan	7,92	0,55	6,85	9,00	6,90
Sulawesi Tenggara	11,14	0,98	9,23	13,05	8,75
Gorontalo	6,28	0,89	4,54	8,02	14,15
Sulawesi Barat	9,71	1,11	7,53	11,89	11,45
Maluku	4,43	0,62	3,21	5,64	13,97
Maluku Utara	6,70	0,85	5,02	8,37	12,75
Papua Barat	6,95	0,87	5,24	8,66	12,58
Papua	10,74	1,05	8,67	12,80	9,81
Indonesia	7,01	0,13	6,76	7,27	1,84

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.16.3 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Bekerja dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,36	0,44	6,50	8,21	5,94
Sumatera Utara	12,71	0,50	11,72	13,69	3,95
Sumatera Barat	8,79	0,51	7,79	9,79	5,79
Riau	8,91	0,58	7,77	10,05	6,53
Jambi	8,27	0,64	7,01	9,53	7,76
Sumatera Selatan	7,51	0,53	6,47	8,54	7,03
Bengkulu	9,30	0,71	7,90	10,70	7,68
Lampung	9,90	0,64	8,64	11,16	6,49
Kep. Bangka Belitung	7,84	0,85	6,17	9,51	10,85
Kepulauan Riau	6,47	1,01	4,49	8,45	15,61
DKI Jakarta	6,70	0,75	5,23	8,17	11,19
Jawa Barat	5,66	0,33	5,01	6,31	5,87
Jawa Tengah	7,44	0,31	6,85	8,04	4,10
DI Yogyakarta	9,47	1,09	7,34	11,60	11,47
Jawa Timur	8,48	0,32	7,86	9,10	3,75
Banten	7,26	0,60	6,08	8,43	8,28
Bali	15,75	1,06	13,67	17,84	6,76
Nusa Tenggara Barat	10,96	0,82	9,34	12,57	7,51
Nusa Tenggara Timur	10,06	0,58	8,92	11,19	5,76
Kalimantan Barat	8,65	0,53	7,62	9,68	6,09
Kalimantan Tengah	12,15	0,83	10,53	13,77	6,81
Kalimantan Selatan	8,49	0,69	7,14	9,84	8,11
Kalimantan Timur	7,88	0,66	6,58	9,18	8,40
Sulawesi Utara	4,71	0,43	3,87	5,56	9,14
Sulawesi Tengah	13,94	0,90	12,17	15,71	6,49
Sulawesi Selatan	11,36	0,56	10,27	12,46	4,91
Sulawesi Tenggara	14,44	0,78	12,91	15,98	5,42
Gorontalo	8,94	0,80	7,38	10,49	8,90
Sulawesi Barat	14,34	1,15	12,08	16,60	8,04
Maluku	6,38	0,65	5,11	7,65	10,14
Maluku Utara	10,02	0,79	8,47	11,58	7,91
Papua Barat	7,72	0,82	6,11	9,34	10,66
Papua	13,65	0,97	11,75	15,55	7,11
Indonesia	8,53	0,11	8,30	8,75	1,33

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.17.1 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	23,41	1,99	19,52	27,30	8,48
Sumatera Utara	21,32	1,37	18,64	24,00	6,42
Sumatera Barat	32,75	2,45	27,95	37,54	7,47
Riau	48,74	2,74	43,37	54,10	5,62
Jambi	18,82	2,15	14,61	23,03	11,42
Sumatera Selatan	21,73	1,82	18,16	25,31	8,39
Bengkulu	34,59	2,89	28,92	40,26	8,36
Lampung	31,14	2,43	26,38	35,91	7,80
Kep. Bangka Belitung	29,43	2,59	24,36	34,50	8,79
Kepulauan Riau	36,34	3,48	29,51	43,16	9,59
DKI Jakarta	12,46	1,43	9,67	15,25	11,44
Jawa Barat	17,87	0,92	16,08	19,66	5,12
Jawa Tengah	33,84	1,04	31,80	35,87	3,06
DI Yogyakarta	63,40	2,60	58,31	68,49	4,10
Jawa Timur	23,85	0,91	22,08	25,63	3,80
Banten	12,20	1,14	9,96	14,43	9,34
Bali	63,04	2,35	58,45	67,64	3,72
Nusa Tenggara Barat	25,73	2,06	21,69	29,78	8,02
Nusa Tenggara Timur	57,07	2,73	51,72	62,43	4,79
Kalimantan Barat	25,49	2,06	21,45	29,52	8,07
Kalimantan Tengah	34,98	2,53	30,02	39,95	7,24
Kalimantan Selatan	22,54	1,95	18,72	26,37	8,66
Kalimantan Timur	16,83	1,57	13,74	19,91	9,35
Sulawesi Utara	23,95	2,48	19,08	28,81	10,36
Sulawesi Tengah	48,46	3,61	41,39	55,53	7,44
Sulawesi Selatan	29,72	1,80	26,19	33,25	6,06
Sulawesi Tenggara	55,04	3,68	47,83	62,26	6,69
Gorontalo	43,85	3,81	36,38	51,31	8,68
Sulawesi Barat	58,69	4,22	50,42	66,97	7,19
Maluku	60,96	3,45	54,20	67,71	5,65
Maluku Utara	36,70	3,67	29,51	43,90	10,00
Papua Barat	33,14	3,53	26,23	40,06	10,64
Papua	22,89	2,23	18,52	27,26	9,75
Indonesia	25,86	0,36	25,15	26,56	1,39

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.17.2 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	13,11	0,77	11,59	14,62	5,90
Sumatera Utara	30,34	1,13	28,13	32,56	3,72
Sumatera Barat	25,61	1,30	23,06	28,15	5,06
Riau	29,64	1,65	26,40	32,88	5,58
Jambi	22,72	1,40	19,98	25,47	6,17
Sumatera Selatan	24,25	1,20	21,91	26,60	4,93
Bengkulu	34,51	1,75	31,09	37,94	5,07
Lampung	35,15	1,49	32,24	38,06	4,23
Kep. Bangka Belitung	37,72	2,77	32,30	43,14	7,33
Kepulauan Riau	29,34	4,14	21,21	37,46	14,12
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	19,42	1,07	17,33	21,52	5,50
Jawa Tengah	28,42	1,01	26,44	30,40	3,55
DI Yogyakarta	51,59	4,75	42,27	60,90	9,21
Jawa Timur	22,32	0,85	20,65	23,98	3,81
Banten	21,04	2,10	16,93	25,16	9,98
Bali	74,75	2,50	69,86	79,65	3,34
Nusa Tenggara Barat	26,27	1,81	22,72	29,83	6,90
Nusa Tenggara Timur	43,05	1,44	40,24	45,87	3,34
Kalimantan Barat	16,26	1,08	14,15	18,37	6,62
Kalimantan Tengah	29,46	1,72	26,09	32,82	5,83
Kalimantan Selatan	21,69	1,32	19,11	24,26	6,06
Kalimantan Timur	12,33	1,49	9,40	15,25	12,10
Sulawesi Utara	24,31	1,86	20,68	27,95	7,64
Sulawesi Tengah	39,26	1,78	35,76	42,75	4,54
Sulawesi Selatan	24,98	1,08	22,87	27,10	4,31
Sulawesi Tenggara	48,76	1,87	45,09	52,43	3,84
Gorontalo	30,00	2,48	25,15	34,85	8,25
Sulawesi Barat	48,70	2,58	43,63	53,76	5,31
Maluku	36,55	2,54	31,58	41,52	6,94
Maluku Utara	35,68	2,27	31,24	40,12	6,35
Papua Barat	25,08	3,22	18,77	31,39	12,84
Papua	14,20	1,14	11,95	16,44	8,06
Indonesia	27,00	0,30	26,41	27,60	1,13

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.17.3 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	16,31	0,83	14,68	17,94	5,10
Sumatera Utara	25,86	0,90	24,09	27,62	3,48
Sumatera Barat	28,68	1,30	26,14	31,22	4,52
Riau	37,73	1,57	34,66	40,80	4,16
Jambi	21,45	1,18	19,13	23,77	5,52
Sumatera Selatan	23,24	1,03	21,23	25,25	4,42
Bengkulu	34,54	1,54	31,53	37,55	4,45
Lampung	33,98	1,27	31,49	36,47	3,74
Kep. Bangka Belitung	33,51	1,87	29,84	37,18	5,59
Kepulauan Riau	35,01	2,95	29,23	40,80	8,43
DKI Jakarta	12,46	1,43	9,67	15,25	11,44
Jawa Barat	18,37	0,71	16,98	19,76	3,86
Jawa Tengah	30,99	0,72	29,57	32,41	2,34
DI Yogyakarta	60,19	2,34	55,61	64,76	3,88
Jawa Timur	23,10	0,62	21,88	24,32	2,69
Banten	15,02	1,03	13,00	17,04	6,87
Bali	67,47	1,78	63,99	70,95	2,63
Nusa Tenggara Barat	26,03	1,36	23,36	28,70	5,23
Nusa Tenggara Timur	46,24	1,28	43,74	48,75	2,77
Kalimantan Barat	19,35	1,00	17,40	21,31	5,16
Kalimantan Tengah	31,53	1,44	28,70	34,36	4,58
Kalimantan Selatan	22,09	1,15	19,83	24,34	5,21
Kalimantan Timur	15,14	1,14	12,91	17,38	7,52
Sulawesi Utara	24,14	1,53	21,14	27,14	6,34
Sulawesi Tengah	41,97	1,66	38,71	45,23	3,96
Sulawesi Selatan	26,92	0,97	25,01	28,82	3,61
Sulawesi Tenggara	50,85	1,75	47,41	54,28	3,45
Gorontalo	35,06	2,15	30,84	39,28	6,14
Sulawesi Barat	51,25	2,22	46,90	55,60	4,33
Maluku	46,82	2,24	42,44	51,21	4,78
Maluku Utara	36,01	1,94	32,21	39,80	5,38
Papua Barat	27,75	2,38	23,08	32,42	8,59
Papua	17,09	1,07	15,00	19,19	6,24
Indonesia	26,41	0,24	25,95	26,88	0,90

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.18.1 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Laki-laki					
Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,82	0,71	4,43	7,20	12,16
Sumatera Utara	13,95	0,76	12,46	15,44	5,46
Sumatera Barat	14,90	1,35	12,26	17,54	9,05
Riau	29,05	1,82	25,48	32,61	6,27
Jambi	8,84	1,01	6,86	10,82	11,43
Sumatera Selatan	11,36	0,91	9,58	13,14	7,98
Bengkulu	19,04	1,56	15,99	22,10	8,19
Lampung	18,62	1,32	16,03	21,20	7,08
Kep. Bangka Belitung	16,48	1,94	12,68	20,29	11,79
Kepulauan Riau	25,06	3,13	18,92	31,20	12,49
DKI Jakarta	7,77	1,18	5,46	10,09	15,18
Jawa Barat	10,73	0,71	9,33	12,12	6,62
Jawa Tengah	20,99	0,77	19,48	22,50	3,68
DI Yogyakarta	52,16	3,03	46,22	58,10	5,81
Jawa Timur	13,71	0,61	12,52	14,89	4,42
Banten	6,96	1,07	4,86	9,05	15,36
Bali	61,49	2,02	57,53	65,44	3,28
Nusa Tenggara Barat	12,80	1,24	10,38	15,23	9,66
Nusa Tenggara Timur	37,71	1,45	34,87	40,55	3,84
Kalimantan Barat	7,62	0,94	5,77	9,47	12,39
Kalimantan Tengah	20,66	1,54	17,63	23,69	7,47
Kalimantan Selatan	11,05	1,11	8,87	13,22	10,05
Kalimantan Timur	6,82	0,89	5,07	8,57	13,07
Sulawesi Utara	15,63	1,52	12,65	18,62	9,74
Sulawesi Tengah	29,20	1,87	25,55	32,86	6,39
Sulawesi Selatan	11,93	0,83	10,31	13,55	6,94
Sulawesi Tenggara	35,87	2,03	31,88	39,85	5,67
Gorontalo	23,84	2,25	19,44	28,25	9,42
Sulawesi Barat	32,39	2,80	26,91	37,87	8,63
Maluku	35,87	2,58	30,81	40,92	7,19
Maluku Utara	22,78	2,14	18,59	26,97	9,38
Papua Barat	22,70	2,84	17,14	28,25	12,49
Papua	9,81	0,97	7,91	11,71	9,90
Indonesia	16,42	0,24	15,94	16,89	1,47

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.18.2 *Sampling Error* Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	26,88	1,29	24,36	29,41	4,79
Sumatera Utara	37,75	1,24	35,33	40,18	3,28
Sumatera Barat	41,92	1,61	38,76	45,09	3,85
Riau	46,68	1,79	43,18	50,19	3,83
Jambi	34,31	1,76	30,86	37,76	5,13
Sumatera Selatan	35,81	1,47	32,94	38,68	4,09
Bengkulu	50,24	2,07	46,19	54,29	4,11
Lampung	49,96	1,65	46,72	53,20	3,31
Kep. Bangka Belitung	50,83	2,47	45,99	55,68	4,86
Kepulauan Riau	45,05	3,43	38,34	51,76	7,60
DKI Jakarta	17,18	1,90	13,45	20,91	11,08
Jawa Barat	26,39	0,96	24,52	28,26	3,62
Jawa Tengah	41,50	0,93	39,68	43,32	2,23
DI Yogyakarta	69,00	2,45	64,20	73,80	3,55
Jawa Timur	33,11	0,86	31,42	34,79	2,60
Banten	23,57	1,46	20,71	26,42	6,19
Bali	73,95	1,95	70,13	77,78	2,64
Nusa Tenggara Barat	40,00	1,93	36,21	43,78	4,83
Nusa Tenggara Timur	55,11	1,42	52,34	57,89	2,57
Kalimantan Barat	31,25	1,42	28,48	34,03	4,53
Kalimantan Tengah	43,25	1,88	39,57	46,93	4,35
Kalimantan Selatan	33,45	1,67	30,18	36,72	4,99
Kalimantan Timur	24,10	1,67	20,83	27,37	6,92
Sulawesi Utara	32,93	2,00	29,01	36,86	6,08
Sulawesi Tengah	54,79	1,85	51,16	58,42	3,38
Sulawesi Selatan	41,84	1,36	39,17	44,50	3,25
Sulawesi Tenggara	66,52	1,87	62,86	70,18	2,81
Gorontalo	45,76	2,59	40,69	50,83	5,65
Sulawesi Barat	68,95	2,35	64,35	73,55	3,40
Maluku	57,86	2,38	53,20	62,52	4,11
Maluku Utara	49,78	2,33	45,22	54,35	4,67
Papua Barat	33,54	2,47	28,70	38,37	7,36
Papua	25,69	1,53	22,70	28,69	5,95
Indonesia	36,82	0,31	36,20	37,43	0,85

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.18.3 Sampling Error Siswa Berumur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga dalam Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	16,31	0,83	14,68	17,94	5,10
Sumatera Utara	25,86	0,90	24,09	27,62	3,48
Sumatera Barat	28,68	1,30	26,14	31,22	4,52
Riau	37,73	1,57	34,66	40,80	4,16
Jambi	21,45	1,18	19,13	23,77	5,52
Sumatera Selatan	23,24	1,03	21,23	25,25	4,42
Bengkulu	34,54	1,54	31,53	37,55	4,45
Lampung	33,98	1,27	31,49	36,47	3,74
Kep. Bangka Belitung	33,51	1,87	29,84	37,18	5,59
Kepulauan Riau	35,01	2,95	29,23	40,80	8,43
DKI Jakarta	12,46	1,43	9,67	15,25	11,44
Jawa Barat	18,37	0,71	16,98	19,76	3,86
Jawa Tengah	30,99	0,72	29,57	32,41	2,34
DI Yogyakarta	60,19	2,34	55,61	64,76	3,88
Jawa Timur	23,10	0,62	21,88	24,32	2,69
Banten	15,02	1,03	13,00	17,04	6,87
Bali	67,47	1,78	63,99	70,95	2,63
Nusa Tenggara Barat	26,03	1,36	23,36	28,70	5,23
Nusa Tenggara Timur	46,24	1,28	43,74	48,75	2,77
Kalimantan Barat	19,35	1,00	17,40	21,31	5,16
Kalimantan Tengah	31,53	1,44	28,70	34,36	4,58
Kalimantan Selatan	22,09	1,15	19,83	24,34	5,21
Kalimantan Timur	15,14	1,14	12,91	17,38	7,52
Sulawesi Utara	24,14	1,53	21,14	27,14	6,34
Sulawesi Tengah	41,97	1,66	38,71	45,23	3,96
Sulawesi Selatan	26,92	0,97	25,01	28,82	3,61
Sulawesi Tenggara	50,85	1,75	47,41	54,28	3,45
Gorontalo	35,06	2,15	30,84	39,28	6,14
Sulawesi Barat	51,25	2,22	46,90	55,60	4,33
Maluku	46,82	2,24	42,44	51,21	4,78
Maluku Utara	36,01	1,94	32,21	39,80	5,38
Papua Barat	27,75	2,38	23,08	32,42	8,59
Papua	17,09	1,07	15,00	19,19	6,24
Indonesia	26,41	0,24	25,95	26,88	0,90

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.19.1 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,77	0,50	1,80	3,74	17,85
Sumatera Utara	3,80	0,50	2,83	4,76	13,04
Sumatera Barat	3,71	0,48	2,78	4,65	12,88
Riau	21,80	2,59	16,73	26,87	11,86
Jambi	2,60	0,47	1,68	3,51	18,03
Sumatera Selatan	2,28	0,42	1,46	3,10	18,41
Bengkulu	3,13	0,62	1,91	4,35	19,95
Lampung	2,33	0,46	1,43	3,22	19,56
Kep. Bangka Belitung	2,61	0,53	1,58	3,64	20,20
Kepulauan Riau	3,04	0,64	1,79	4,29	20,93
DKI Jakarta	2,90	0,43	2,05	3,75	14,91
Jawa Barat	3,74	0,27	3,22	4,26	7,09
Jawa Tengah	3,26	0,26	2,75	3,76	7,99
DI Yogyakarta	3,72	0,60	2,55	4,88	16,04
Jawa Timur	3,46	0,29	2,89	4,03	8,39
Banten	3,69	0,55	2,62	4,76	14,82
Bali	3,80	0,60	2,62	4,97	15,81
Nusa Tenggara Barat	3,14	0,49	2,19	4,10	15,43
Nusa Tenggara Timur	4,40	0,67	3,08	5,71	15,26
Kalimantan Barat	2,13	0,51	1,13	3,13	23,94
Kalimantan Tengah	3,78	0,80	2,22	5,35	21,06
Kalimantan Selatan	2,66	0,43	1,81	3,50	16,25
Kalimantan Timur	3,71	0,58	2,58	4,84	15,54
Sulawesi Utara	4,99	1,00	3,03	6,94	20,00
Sulawesi Tengah	5,86	0,97	3,96	7,75	16,53
Sulawesi Selatan	3,66	0,64	2,41	4,91	17,39
Sulawesi Tenggara	2,77	0,51	1,76	3,77	18,51
Gorontalo	7,76	1,09	5,63	9,90	14,05
Sulawesi Barat	7,67	1,93	3,89	11,45	25,16
Maluku	3,78	0,75	2,31	5,25	19,81
Maluku Utara	13,90	3,60	6,85	20,95	25,87
Papua Barat	4,73	0,85	3,07	6,39	17,91
Papua	5,80	1,51	2,84	8,76	26,01
Indonesia	3,94	0,12	3,70	4,18	3,10

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.19.2 *Sampling Error* Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,95	0,25	2,45	3,45	8,62
Sumatera Utara	4,15	0,48	3,22	5,09	11,43
Sumatera Barat	3,64	0,46	2,75	4,53	12,53
Riau	12,92	1,43	10,11	15,73	11,09
Jambi	3,34	0,45	2,46	4,22	13,43
Sumatera Selatan	3,07	0,41	2,27	3,88	13,39
Bengkulu	4,64	0,50	3,66	5,62	10,77
Lampung	2,86	0,33	2,22	3,50	11,48
Kep. Bangka Belitung	1,92	0,47	1,00	2,83	24,33
Kepulauan Riau	2,95	1,06	0,87	5,03	36,05
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,78	0,34	3,11	4,45	8,99
Jawa Tengah	3,04	0,26	2,53	3,54	8,49
DI Yogyakarta	7,73	3,16	1,54	13,93	40,86
Jawa Timur	3,35	0,26	2,84	3,86	7,79
Banten	3,07	0,46	2,17	3,98	15,01
Bali	3,73	0,66	2,44	5,01	17,63
Nusa Tenggara Barat	3,79	0,64	2,53	5,05	16,94
Nusa Tenggara Timur	5,27	0,42	4,44	6,10	8,04
Kalimantan Barat	4,72	0,63	3,48	5,96	13,37
Kalimantan Tengah	5,82	0,95	3,95	7,69	16,39
Kalimantan Selatan	2,65	0,50	1,66	3,64	19,03
Kalimantan Timur	3,03	0,61	1,83	4,22	20,15
Sulawesi Utara	6,14	0,67	4,83	7,45	10,88
Sulawesi Tengah	5,77	0,61	4,58	6,97	10,55
Sulawesi Selatan	4,42	0,37	3,70	5,13	8,29
Sulawesi Tenggara	5,52	0,85	3,86	7,18	15,35
Gorontalo	5,14	0,71	3,76	6,52	13,71
Sulawesi Barat	10,28	1,64	7,06	13,51	15,99
Maluku	3,95	0,70	2,59	5,31	17,59
Maluku Utara	4,91	0,86	3,22	6,60	17,54
Papua Barat	8,84	1,35	6,20	11,49	15,24
Papua	8,14	0,77	6,62	9,65	9,50
Indonesia	4,22	0,11	4,01	4,43	2,54

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.19.3 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,89	0,23	2,44	3,35	8,02
Sumatera Utara	3,98	0,34	3,31	4,65	8,62
Sumatera Barat	3,67	0,33	3,02	4,32	9,08
Riau	16,59	1,37	13,91	19,27	8,24
Jambi	3,11	0,34	2,44	3,78	10,98
Sumatera Selatan	2,77	0,30	2,18	3,35	10,85
Bengkulu	4,12	0,39	3,35	4,89	9,56
Lampung	2,71	0,27	2,18	3,23	9,90
Kep. Bangka Belitung	2,27	0,35	1,58	2,96	15,53
Kepulauan Riau	3,03	0,56	1,94	4,11	18,38
DKI Jakarta	2,90	0,43	2,05	3,75	14,91
Jawa Barat	3,75	0,21	3,34	4,16	5,60
Jawa Tengah	3,14	0,18	2,78	3,50	5,83
DI Yogyakarta	4,84	1,00	2,88	6,81	20,69
Jawa Timur	3,40	0,20	3,02	3,79	5,73
Banten	3,49	0,40	2,71	4,27	11,41
Bali	3,77	0,45	2,89	4,65	11,86
Nusa Tenggara Barat	3,51	0,42	2,69	4,34	12,01
Nusa Tenggara Timur	5,09	0,36	4,38	5,80	7,14
Kalimantan Barat	3,89	0,46	2,99	4,79	11,80
Kalimantan Tengah	5,10	0,68	3,77	6,42	13,29
Kalimantan Selatan	2,65	0,34	1,99	3,32	12,78
Kalimantan Timur	3,45	0,43	2,62	4,28	12,32
Sulawesi Utara	5,60	0,59	4,45	6,75	10,46
Sulawesi Tengah	5,80	0,52	4,78	6,81	8,90
Sulawesi Selatan	4,12	0,33	3,47	4,78	8,10
Sulawesi Tenggara	4,66	0,61	3,47	5,86	13,01
Gorontalo	6,08	0,60	4,89	7,26	9,94
Sulawesi Barat	9,64	1,33	7,03	12,24	13,79
Maluku	3,88	0,51	2,88	4,89	13,21
Maluku Utara	7,56	1,24	5,13	9,98	16,40
Papua Barat	7,51	0,95	5,65	9,37	12,64
Papua	7,42	0,71	6,04	8,81	9,52
Indonesia	4,08	0,08	3,92	4,24	1,99

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.20.1 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3,00	0,29	2,43	3,57	9,70
Sumatera Utara	4,28	0,41	3,47	5,09	9,68
Sumatera Barat	3,69	0,39	2,93	4,44	10,45
Riau	16,46	1,50	13,52	19,41	9,13
Jambi	3,29	0,44	2,42	4,16	13,47
Sumatera Selatan	2,95	0,37	2,22	3,68	12,57
Bengkulu	4,67	0,56	3,58	5,75	11,89
Lampung	3,06	0,37	2,35	3,78	11,92
Kep. Bangka Belitung	1,84	0,37	1,12	2,56	20,01
Kepulauan Riau	3,20	0,77	1,70	4,71	23,95
DKI Jakarta	2,87	0,57	1,75	3,99	19,97
Jawa Barat	3,87	0,26	3,36	4,39	6,74
Jawa Tengah	3,41	0,24	2,94	3,87	6,96
DI Yogyakarta	5,29	1,46	2,43	8,15	27,63
Jawa Timur	3,64	0,25	3,16	4,13	6,81
Banten	3,10	0,43	2,26	3,93	13,79
Bali	3,90	0,53	2,87	4,93	13,49
Nusa Tenggara Barat	3,33	0,46	2,43	4,23	13,85
Nusa Tenggara Timur	5,04	0,39	4,29	5,80	7,66
Kalimantan Barat	3,99	0,54	2,94	5,04	13,48
Kalimantan Tengah	4,89	0,68	3,57	6,22	13,84
Kalimantan Selatan	2,86	0,46	1,96	3,77	16,10
Kalimantan Timur	3,51	0,51	2,51	4,50	14,45
Sulawesi Utara	6,11	0,80	4,54	7,69	13,14
Sulawesi Tengah	6,51	0,65	5,24	7,78	9,92
Sulawesi Selatan	4,08	0,35	3,39	4,76	8,54
Sulawesi Tenggara	4,29	0,65	3,02	5,56	15,09
Gorontalo	6,06	0,77	4,56	7,57	12,70
Sulawesi Barat	9,60	1,49	6,68	12,53	15,55
Maluku	4,04	0,61	2,84	5,24	15,15
Maluku Utara	7,97	1,41	5,21	10,73	17,65
Papua Barat	7,32	0,96	5,44	9,20	13,13
Papua	7,26	0,71	5,87	8,65	9,76
Indonesia	4,20	0,10	4,01	4,39	2,33

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.20.2 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,79	0,28	2,24	3,34	10,05
Sumatera Utara	3,68	0,39	2,92	4,43	10,47
Sumatera Barat	3,65	0,41	2,86	4,45	11,11
Riau	16,73	1,42	13,94	19,52	8,50
Jambi	2,92	0,40	2,14	3,70	13,65
Sumatera Selatan	2,57	0,34	1,90	3,24	13,27
Bengkulu	3,57	0,46	2,67	4,47	12,80
Lampung	2,33	0,30	1,74	2,92	12,83
Kep. Bangka Belitung	2,71	0,54	1,66	3,76	19,78
Kepulauan Riau	2,84	0,66	1,55	4,12	23,17
DKI Jakarta	2,93	0,50	1,95	3,91	17,05
Jawa Barat	3,63	0,27	3,11	4,15	7,31
Jawa Tengah	2,87	0,22	2,43	3,30	7,82
DI Yogyakarta	4,38	0,84	2,73	6,03	19,24
Jawa Timur	3,15	0,25	2,67	3,64	7,84
Banten	3,91	0,56	2,81	5,00	14,29
Bali	3,63	0,53	2,59	4,67	14,61
Nusa Tenggara Barat	3,71	0,54	2,65	4,77	14,60
Nusa Tenggara Timur	5,13	0,44	4,28	5,99	8,51
Kalimantan Barat	3,79	0,49	2,84	4,74	12,83
Kalimantan Tengah	5,31	0,79	3,77	6,86	14,85
Kalimantan Selatan	2,43	0,37	1,70	3,15	15,24
Kalimantan Timur	3,39	0,47	2,47	4,30	13,74
Sulawesi Utara	5,08	0,60	3,90	6,25	11,80
Sulawesi Tengah	5,07	0,56	3,96	6,17	11,11
Sulawesi Selatan	4,17	0,44	3,31	5,02	10,44
Sulawesi Tenggara	5,06	0,72	3,65	6,46	14,20
Gorontalo	6,09	0,76	4,59	7,58	12,51
Sulawesi Barat	9,67	1,44	6,85	12,49	14,87
Maluku	3,73	0,57	2,62	4,84	15,19
Maluku Utara	7,13	1,31	4,57	9,69	18,32
Papua Barat	7,72	1,19	5,39	10,04	15,38
Papua	7,61	0,85	5,94	9,28	11,22
Indonesia	3,95	0,10	3,76	4,14	2,41

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 7.20.3 Sampling Error Siswa Berumur 5-24 Tahun yang Tidak Masuk Sekolah Selama 1 Minggu Berturut-turut Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Estimasi	Standard Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,89	0,23	2,44	3,35	8,02
Sumatera Utara	3,98	0,34	3,31	4,65	8,62
Sumatera Barat	3,67	0,33	3,02	4,32	9,08
Riau	16,59	1,37	13,91	19,27	8,24
Jambi	3,11	0,34	2,44	3,78	10,98
Sumatera Selatan	2,77	0,30	2,18	3,35	10,85
Bengkulu	4,12	0,39	3,35	4,89	9,56
Lampung	2,71	0,27	2,18	3,23	9,90
Kep. Bangka Belitung	2,27	0,35	1,58	2,96	15,53
Kepulauan Riau	3,03	0,56	1,94	4,11	18,38
DKI Jakarta	2,90	0,43	2,05	3,75	14,91
Jawa Barat	3,75	0,21	3,34	4,16	5,60
Jawa Tengah	3,14	0,18	2,78	3,50	5,83
DI Yogyakarta	4,84	1,00	2,88	6,81	20,69
Jawa Timur	3,40	0,20	3,02	3,79	5,73
Banten	3,49	0,40	2,71	4,27	11,41
Bali	3,77	0,45	2,89	4,65	11,86
Nusa Tenggara Barat	3,51	0,42	2,69	4,34	12,01
Nusa Tenggara Timur	5,09	0,36	4,38	5,80	7,14
Kalimantan Barat	3,89	0,46	2,99	4,79	11,80
Kalimantan Tengah	5,10	0,68	3,77	6,42	13,29
Kalimantan Selatan	2,65	0,34	1,99	3,32	12,78
Kalimantan Timur	3,45	0,43	2,62	4,28	12,32
Sulawesi Utara	5,60	0,59	4,45	6,75	10,46
Sulawesi Tengah	5,80	0,52	4,78	6,81	8,90
Sulawesi Selatan	4,12	0,33	3,47	4,78	8,10
Sulawesi Tenggara	4,66	0,61	3,47	5,86	13,01
Gorontalo	6,08	0,60	4,89	7,26	9,94
Sulawesi Barat	9,64	1,33	7,03	12,24	13,79
Maluku	3,88	0,51	2,88	4,89	13,21
Maluku Utara	7,56	1,24	5,13	9,98	16,40
Papua Barat	7,51	0,95	5,65	9,37	12,64
Papua	7,42	0,71	6,04	8,81	9,52
Indonesia	4,08	0,08	3,92	4,24	1,99

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta – 10010

Telp: 3841195, 3842508, 3810291-5,

Telex: 45159, 45325, 45375, 45385,

Fax: 3857046, E-mail: bpsdq@bps.go.id

Homepage: <http://www.bps.go.id>